



BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN
KEPAHIANG TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023 Nomor 41);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
dan
BUPATI KEPAHANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2025- 2045.

<https://jdih.kepahiangkab.go.id>

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045, yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional Tahun 2025–2045 adalah RPJP Nasional untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepahiang untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kepahiang untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, sasaran dan arah kebijakan dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.
9. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Kepahiang untuk periode 1 (satu) tahunan.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJP Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2045.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (duapuluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada :
 - a. RPJM Nasional;

- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu; dan
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang.
- (3) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman:
- a. penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Kepahiang yang memuat visi, misi, dan program Bupati; dan
 - b. penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB II RPJP DAERAH

Pasal 3

RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
- BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
- BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH
- BAB VI : PENUTUP

Pasal 4

RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PERUBAHAN RPJP DAERAH

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJP Daerah dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJP Daerah kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pembatasan jangka waktu perubahan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika

<https://jdih.kepahiangkab.go.id>

terjadi perubahan mendasar.

- (4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (3), mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi RPJP Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangannya Bupati dapat melimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk melaksanakan visi dan mewujudkan misi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi atas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah.
- (5) Evaluasi terhadap RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup realisasi sasaran pokok arah kebijakan dan penahapan untuk melaksanakan misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (6) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis Daerah.
- (7) DPRD dapat memberi masukan pada saat evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJP Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJM Daerah.

- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dilaksanakan melalui RPJM Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan Kepahiang
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI KEPAHANG,
Ttd.
HIDAYATTULLAH SJAHD

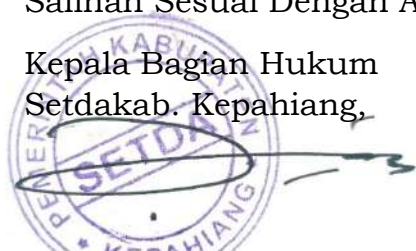
Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG,
Ttd.
HARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2024 NOMOR 53
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG PROVINSI
BENGKULU NOMOR: (5/51/ 2024).

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Kepahiang,



IRWAN SAYUTI, SH., MH.
NIP. 197310252008041001

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG
TAHUN 2025-2045



**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG 2025-2045**



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG 2025-2045**



**SAMBUTAN
BUPATI KEPAHIANG**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2045 dapat disusun dan diterbitkan. Dokumen ini menjadi pedoman penting dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Kepahiang selama 20 Tahun mendatang sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Visi Kabupaten Kepahiang Yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan selaras dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi "Bengkulu Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan" dan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yaitu "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan". Untuk itu dalam mensinergikan gerak langkah pembangunan Kabupaten Kepahiang, diharapkan semua pemangku kepentingan di Kabupaten Kepahiang dapat mendukung dengan bekerjasama serta berperan aktif dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kepahiang.

Akhir kata, Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Tim yang telah bekerja keras dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepahiang 2025-2045 ini, semoga dokumen ini dapat menjadi panduan yang efektif dengan arah pembangunan menuju masa depan yang lebih baik. Terimakasih.

Wassalaamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

BUPATI KEPAHIANG

Dr. Ir. H. HIDAYATULLAH SJAHD, MM., IPU

**SAMBUTAN
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KEPAHANG**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2045 dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Penyusunan RPJPD ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif, melibatkan masukan dari pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, akademisi masyarakat dan sektor swasta.

Dalam RPJPD ini visi jangka panjang Kabupaten Kepahiang 2025-2045 merupakan gambaran keadaan yang ingin dicapai pada akhir tahun 2045, yang akan diwujudkan secara berkesinambungan melalui pelaksanaan rencana pembangunan selama dua puluh tahun sejak tahun 2025.

Terima kasih saya sampaikan kepada tim penyusun RPJPD serta semua pihak yang terlibat dalam memberikan masukan, saran, ide serta gagasan dalam dokumen ini. Semoga RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045 ini dapat menjadi pedoman dalam menentukan arah pembangunan daerah kita yang lebih baik.

Wassalaamu'alaikum Waramatullahi Wabarakatuh

KEPALA BAPPEDA

M. SALIHIN, M.Si

DAFTAR ISI

Uraian	Hal.
SAMBUTAN	ii
BUPATI KEPAHANG	ii
SAMBUTAN	iii
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KEPAHANG	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR MATRIKS	xii
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3. Hubungan antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya	4
1.4. Maksud dan Tujuan	5
1.5. Sistematika Penulisan	5
BAB II	7
GAMBARAN KONDISI UMUM	7
2.1. Aspek Geografi	8
2.2. Aspek Demografi	18
2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	23
2.4. Aspek Pelayanan Umum	30
2.5. Aspek Daya Saing Daerah	60
2.6. Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Kepahiang, 2005-2025	83
2.6.1. Tujuan dan Metode Evaluasi	83
2.6.2. Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Kepahiang, 2005-2025	83
2.7. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	86
2.8. Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik Kabupaten Kepahiang, 2025-2045	90
2.8.1. Proyeksi Kebutuhan Air Minum	90
2.8.2. Proyeksi Kebutuhan Listrik	90
2.8.3. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Sampah	91
2.8.4. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan	92
2.8.5. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan	92
2.9. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	94
BAB III	126
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	126
3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah	126
3.2. Isu Strategis	127

BAB IV	132
VISI DAN MISI DAERAH	132
4.1. Visi	132
4.2. Misi	133
BAB V	136
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	136
5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	136
5.2. Sasaran Pokok	147
BAB VI	160
PENUTUP	160

DAFTAR GAMBAR

Uraian	Hal.
Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RPJPD	2
Gambar 1.2 Proses Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045	3
Gambar 1.3 Kedudukan RPJPD dalam Perencanaan Pembangunan	4
Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Kepahiang	7
Gambar 2.2 Jarak dari Ibu Kota Kabupaten Kepahiang (km)	8
Gambar 2.3 Luas Wilayah (km ²) dan Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepahiang	9
Gambar 2.4 Ketinggian Rata-rata Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepahiang (mdpl)	10
Gambar 2.5 Curah Hujan Maksimal, Minimal, dan Rerata, 2018 – 2021	14
Gambar 2.6 Jumlah Hari Maksimal, Minimal, dan Rerata, 2018 – 2021	14
Gambar 2.7 Rata-rata Tekanan Udara, Suhu, Kelembaban, dan Kecepatan Angin, 2018 – 2021	14
Gambar 2.8 Jumlah dan Persentase Jumlah Penduduk Kabupaten Kepahiang menurut Jenis Kelamin, 2018 – 2022 (dalam Jiwa)	18
Gambar 2.9 Sex Ratio Penduduk Kabupaten Kepahiang, 2018 – 2021	18
Gambar 2.10 Piramida Penduduk Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 dan 2022 (Jiwa)	19
Gambar 2.11 Laju Pertumbuhan Penduduk, 2018-2019 dan 2020-2021 (%)	20
Gambar 2.12 Jumlah dan Persebaran Penduduk, 2018 dan 2022 (ribu jiwa)	20
Gambar 2.13 Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan, 2018 dan 2022 (Jiwa/km ²)	21
Gambar 2.14 Jumlah Penduduk menurut Agama yang Dipeluk, 2020 dan 2022 (Jiwa)	21
Gambar 2.15 Pertumbuhan (Rp. Miliar) dan Laju Pertumbuhan (%) PDRB menurut Lapangan Usaha, 2018-2022	23
Gambar 2.16 Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran, 2018-2022 (Rp. Triliun)	24
Gambar 2.17 Distribusi Persentase PDRB menurut Pengeluaran, 2018-2022 (%)	24
Gambar 2.18 Distribusi Persentase PDRB menurut Lapangan Usaha, 2018-2022 (%)	25
Gambar 2.19 Perkembangan Inflasi Provinsi Bengkulu, 2018-2022 (%)	26
Gambar 2.20 Perkembangan Angka Melek Huruf, 2018-2022 (%)	27
Gambar 2.21 Kemampuan Baca Tulis Penduduk menurut Jenis Kelamin, 2018-2022 (%)	28
Gambar 2.22 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Kepahiang dan Provinsi Bengkulu, 2018-2021 (tahun)	28
Gambar 2.23 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kab./Kota di Prov. Bengkulu, 2018 – 2019 (tahun)	29
Gambar 2.24 Perkembangan RLS di Kabupaten Kepahiang, Rejang Lebong, dan Lebong, 2018–2019 (tahun)	29
Gambar 2.25 Persentase Penduduk menurut Pendidikan, 2018 – 2022 (%)	30

Gambar 2.26	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12 Tahun dan 13-15 Tahun, 2018 – 2022 (%)	30
Gambar 2.27	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12 Tahun (a) dan 13-15 Tahun (b) Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Kepahiang, 2018 – 2022 (%)	31
Gambar 2.28	Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD dan SMP, 2018 – 2022 (%)	32
Gambar 2.29	Perkembangan APK Jenjang SD dan SMP, 2018 – 2022 (%)	32
Gambar 2.30	Perkembangan APM dan APK Jenjang SD, 2018 – 2022 (%)	33
Gambar 2.31	Perkembangan APM dan APK Jenjang SMP, 2018 – 2022 (%)	34
Gambar 2.32	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun (jiwa), SD/MI (unit), dan Rasio Ketersediaan Sekolah (%), 2018 – 2022	35
Gambar 2.33	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun (jiwa), SMP/MTs (unit), dan Rasio Ketersediaan Sekolah (%), 2018 – 2022	35
Gambar 2.34	Sebaran Jumlah SD/MI menurut Kecamatan, 2018 – 2022	36
Gambar 2.35	Sebaran Jumlah SMP/MTs menurut Kecamatan, 2018 – 2022	37
Gambar 2.36	Perkembangan jumlah sekolah (unit) Guru (orang), dan Murid SD/MI (orang), 2018 – 2022	37
Gambar 2.37	Perkembangan Rasio Jumlah Guru-Murid SD/MI, 2018 – 2022 (%)	38
Gambar 2.38	Perkembangan jumlah sekolah (unit) Guru (orang), dan Murid SMP/MTs (orang), 2018 – 2022	38
Gambar 2.39	Perkembangan Rasio Jumlah Guru – Mu`rid SMP/MTs, 2018 – 2022 (%)	39
Gambar 2.40	Perkembangan Jumlah Fasilitas Kesehatan, 2018 – 2022	40
Gambar 2.41	Perkembangan Rasio Faskes di Kabupaten Kepahiang, 2018 – 2022	41
Gambar 2.42	Perkembangan Rasio Puskesmas menurut Kecamatan, 2018 – 2022	41
Gambar 2.43	Perkembangan Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kepahiang, 2018 – 2022	42
Gambar 2.44	Perkembangan Rasio Tenaga Kesehatan, 2018 – 2022	42
Gambar 2.45	Angka Kesakitan Penduduk menurut Jenis Kelamin, 2018 – 2022	43
Gambar 2.46	Persentase Penduduk dengan Penggunaan Jaminan Kesehatan untuk Berobat menurut Jenis Kelamin, 2018 – 2022	44
Gambar 2.47	Persentase Persalinan di Faskes dan dengan Pertolongan Nakes, 2018-2022	44
Gambar 2.48	Persentase Bayi menurut Jenis Imunisasi, 2019 – 2022	45
Gambar 2.49	Persentase Bayi dengan Pemberian ASI menurut Jenis Kelamin dan Rata-rata Lama Pemberian ASI, 2019 – 2022	46
Gambar 2.50	Persentase Perempuan menurut Penggunaan Alat Kontrasepsi, 2018 – 2022	46
Gambar 2.51	Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar, 2018 – 2022	47
Gambar 2.52	Luas Panen (ribu ha), Produksi (ribu ton), dan Produktivitas Tanaman Padi, 2019 – 2022	48
Gambar 2.53	Luas Panen Tanaman Sayuran (ha), 2018 – 2022	49
Gambar 2.54	Perkembangan Produksi Sayuran (ribu kuintal)	49

Gambar 2.55	Luas Panen Tanaman Biofarmaka, 2018 – 2022 (ribu m2)	50
Gambar 2.56	Produksi Tanaman Biofarmaka, 2018-2022 (kg)	51
Gambar 2.57	Produksi Tanaman Buah Kapasitas >500 Ton per Tahun, 2018-2022	52
Gambar 2.58	Produksi Tanaman Buah dengan Kapasitas < 500 Ton per Tahun, 2018-2022	52
Gambar 2.59	Luas Panen Tanaman Perkebunan, 2018-2021 (ha)	53
Gambar 2.60	Produksi Tanaman Perkebunan, 2018-2022 (Ribu Ton)	53
Gambar 2.61	Jumlah (jiwa) dan Tingkat Partisipasi (%) Angkatan Kerja, 2018-2022	55
Gambar 2.62	Komposisi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran	56
Gambar 2.63	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Prov. Bengkulu, 2018-2021	57
Gambar 2.64	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), 2018-2021	58
Gambar 2.65	Jumlah Desa dengan Potensi Wisata, 2022	58
Gambar 2.66	Jumlah Desa/Kelurahan dengan Fasilitas Olahraga, 2022	59
Gambar 2.67	Jumlah Desa/Kelurahan dengan Fasilitas Rekreasional, 2022	59
Gambar 2.68	Jumlah dan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, 2019-2021	60
Gambar 2.69	Proporsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, 2018-2022 (Ribu Rp.)	61
Gambar 2.70	Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Makanan, 2018-2022 (%)	61
Gambar 2.71	Konsumsi Kalori dan Protein Harian, 2018-2022 (kcal.)	62
Gambar 2.72	Persentase Pengeluaran Rumah Tangga Kelompok Non-Pangan, 2018-2022 (%)	62
Gambar 2.73	Persentase Pengeluaran Rumah Tangga Kelompok Non-Pangan, 2018-2022 (%)	63
Gambar 2.74	Perkembangan Nilai Tukar Petani, Prov. Bengkulu, 2018-2022	64
Gambar 2.75	Perkembangan Jumlah Kendaraan (ribu unit), Panjang Jalan (km), dan Rasio Panjang Jalan	65
Gambar 2.76	Komposisi Penggunaan Lahan (ha), 2007	66
Gambar 2.77	Luas Wilayah Perkotaan-Perdesaan dan Wilayah Produktif, 2020 (ha)	66
Gambar 2.78	Proporsi Luas Wilayah Produktif, 2020 (ha)	67
Gambar 2.79	Luas wilayah terdampak banjir dan kekeringan, 2020	67
Gambar 2.80	Perkembangan Jumlah Bank menurut Jenisnya, 2018-2021	68
Gambar 2.81	Perkembangan Jumlah dan Sebaran Rumah Makan/Restoran, 2018-2021	69
Gambar 2.82	Perkembangan Jumlah Hotel/Penginapan, Kamar, dan Tempat Tidur, 2018-2022	69
Gambar 2.83	Persentase Rumah Tangga yang Penggunaan Air Bersih untuk Minum, 2018-2021 (%)	70
Gambar 2.84	Persentase Rumah Tangga yang Sumber: Air Utama untuk Minum, 2020-2021 (%)	71
Gambar 2.85	Perkembangan Jumlah Produksi (Ribu m3), Nilai Penjualan (Juta Rp.), dan Pelanggan (Sambungan) Air Minum PDAM, 2018-2021	71

Gambar 2.86	Perkembangan Jumlah Daya Terpasang (juta KW), Produksi (juta KWh), dan Penggunaan (ribu KWh) Listrik, 2018-2021	72
Gambar 2.87	Perkembangan Jumlah Produksi (KWh), Pemakaian (KWh), dan Pelanggan Listrik (sambungan), 2018-2021	73
Gambar 2.88	Perkembangan Jumlah Rumah Tangga dan Rasio Elektifikasi, 2018-2022	73
Gambar 2.89	Persentase Rumah Tangga dengan Sumber:Utama Penerangan, 2018-2022	74
Gambar 2.90	Persentase Penduduk Usia 5 tahun ke atas dengan Penggunaan Telepon/ Telepon Genggam, 2018-2021	74
Gambar 2.91	Perkembangan Persentase dan Jumlah Desa/Kelurahan dengan Menara BTS, 2018-2022	75
Gambar 2.92	Perkembangan Jumlah Desa/Kelurahan dengan Penerimaan Sinyal Telekomunikasi, 2019-2021	75
Gambar 2.93	Jumlah Tindak Kejahatan (Kasus), Tingkat Penyelesaian (%), dan Jumlah Personil Polisi (orang), 2018-2021	76
Gambar 2.94	Perkembangan Jumlah Kasus Kejahatan, 2019-2022	77
Gambar 2.95	Perkembangan Jumlah Desa menurut Status IDM, 2018-2023	77
Gambar 2.96	Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja menurut Pendidikan Terakhir, 2018-2022 (ribu jiwa)	79
Gambar 2.97	Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja dengan Pendidikan Perguruan Tinggi (orang) dan Rasionalnya terhadap Jumlah Penduduk, 2018-2019	79
Gambar 2.98	Perkembangan Jumlah Penduduk Umur 0-14 Tahun, 15-64 Tahun, dan 65 Tahun ke Atas, 2018-2022	80
Gambar 2.99	Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Non-Produktif (Ribuan Orang) serta Angka Ketergantungan Penduduk (AKP), 2018-2022	81
Gambar 2.100	Konsepsi Evaluasi Kinerja Capaian Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kepahiang 2005-2025	83
Gambar 2.101	Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kepahiang, 2020-2035	86
Gambar 2.102	Proyeksi Perkembangan Faktor Fertilitas dan Mortalitas Penduduk Kabupaten Kepahiang, 2020-2035	87
Gambar 2.103	Proyeksi Perkembangan Jumlah dan Sex Ratio Penduduk Kabupaten Kepahiang, 2020-2035	87
Gambar 2.104	Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Usia 0-14, 15-64, dan 65+ Kabupaten Kepahiang, 2020-2035	88
Gambar 2.105	Proyeksi Perkembangan Penduduk Usia Produktif dan Non-Produktif dan Angka Ketergantungan Kabupaten Kepahiang, 2020-2035	88
Gambar 2.106	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Kepahiang, 2025-2045	90
Gambar 2.107	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Kepahiang, 2025-2045	91
Gambar 2.108	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Sampah Kabupaten Kepahiang, 2025-2045	91
Gambar 2.109	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kepahiang, 2025-2045	92
Gambar 2.110	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Kepahiang, 2025-2045	93
Gambar 2.111	Struktur Ruang Kabupaten Kepahiang, 2023-2043	95
Gambar 2.112	Rencana Sistem Pusat Pemukiman Kabupaten Kepahiang, 2023-2043	96

Gambar 2.113 Rencana Sistem Jaringan Transportasi Kabupaten Kepahiang, 2023-2043	98
Gambar 2.114 Peta Status Jalan Kabupaten Kepahiang	102
Gambar 2.115 Rencana Sistem Jaringan Energi Kabupaten Kepahiang, 2023-2043	103
Gambar 2.116 Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi Kabupaten Kepahiang, 2023-2043	105
Gambar 2.117 Rencana Sistem Prasarana Lainnya Kabupaten Kepahiang, 2023-2043	108
Gambar 2.118 Rencana Pola Ruang Kabupaten Kepahiang, 2023-2043	111
Gambar 2.119 Kawasan Sempadan Kabupaten Kepahiang, 2023-2043	113
Gambar 2.120 Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Kepahiang, 2023	114
Gambar 2.121 Peta Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi Kabupaten Kepahiang, 2023-2043	115
Gambar 2.122 Tutupan Lahan Kabupaten Kepahiang, 2023-2043	116
Gambar 2.123 Rencana Kawasan Tanaman Pangan Kabupaten Kepahiang, 2023-2043	117
Gambar 2.124 Rencana Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Kepahiang, 2023-2043	118
Gambar 2.125 Rencana Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara Kabupaten Kepahiang, 2023-2043	119
Gambar 2.126 Kawasan Tambang dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kabupaten Kepahiang, 2023	120
Gambar 2.127 Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Kepahiang, 2023-2043	122
Gambar 5.1 Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kepahiang 2025-2045	136

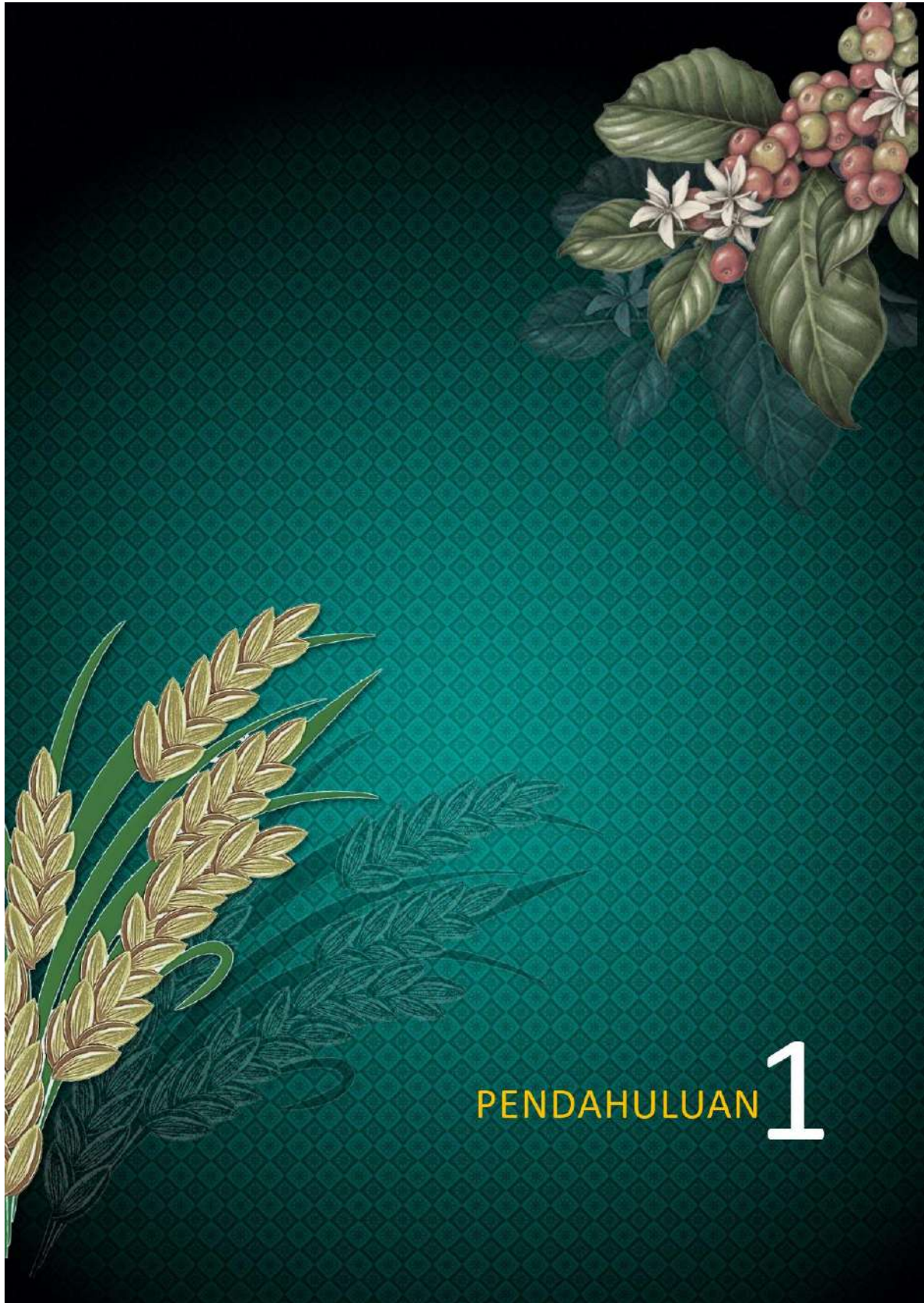
DAFTAR TABEL

Uraian	Hal.
Tabel 2.1 Kabupaten/Kota dan Kecamatan Batas Wilayah Kabupaten Kepahiang	8
Tabel 2.2 Batas Wilayah Kabupaten Kepahiang	9
Tabel 2.3 Luas (ha) dan Persentase Tanah menurut Jenis Tanah di Kabupaten Kepahiang	11
Tabel 2.4 Potensi Tambang dan Energi di Kabupaten Kepahiang	11
Tabel 2.5 Aliran Sungai dan Debit Air Sungai di Kab.Kepahiang, 2007	12
Tabel 2.6 Status Mutu Air Sungai di Kabupaten Kepahiang, 2007	12
Tabel 2.7 Curah Hujan Maksimal, Minimal, dan Rerata, 2018 – 2021	13
Tabel 2.8 Luas (ha) dan Persentase (%) Penggunaan Lahan di Kabupaten Kepahiang, 2007	15
Tabel 2.9 Potensi Bencana Alam di Kabupaten Kepahiang	17
Tabel 2. 10 Perbandingan Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Non-Produktif, 2020 dan 2022	19
Tabel 2.11 Wilayah Kecamatan yang terdampak kejadian banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrim	68
Tabel 2.12 Tabel Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja (orang), 2018-2022	78
Tabel 2.13 Perkiraan kebutuhan fasilitas pendidikan pada akhir 2045	92
Tabel 2.14 Program Perwujudan Pengembangan Pusat Kegiatan	97
Tabel 2.15 Program Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten	100
Tabel 2.16 Jaringan Irigasi Kabupaten Kepahiang 2021	105
Tabel 2.17 Program Pengembangan Prasarana Perumahan dan Permukiman	109
Tabel 2.18 Program Perwujudan Kawasan Lindung	112

DAFTAR MATRIKS

Uraian	Hal.
Matriks 4.1 Perumusan Visi Berdasarkan Isu Strategis	132
Matriks 4.2 Perumusan Visi Berdasarkan Isu Strategis	132
Matriks 4.3 Sasaran, Indikator, Baseline dan Target Visi	133
Matriks 4.4 Visi dan Misi Jangka Panjang Kabupaten Kepahiang 2025-2045	133
Matriks 4.5 Permasalahan dan Misi Jangka Panjang Kabupaten Kepahiang 2025-2045	134
Matriks 5.1 Tahapan Arah Kebijakan dalam 4 Periode 5 Tahunan Kabupaten Kepahiang 1388	
Matriks 5.2 Misi, Agenda Pembangunan dan Transformasi	139
Matriks 5.3 Agenda Pembangunan, Arah Pembangunan dan Arah Kebijakan	140
Matriks 5.4 Sasaran, Indikator, Baseline dan Target Transformasi Sosial	141
Matriks 5.5 Agenda Pembangunan, Arah Pembangunan dan Arah Kebijakan dalam Transformasi Ekonomi	142
Matriks 5.6 Sasaran, Indikator, Baseline dan Target Transformasi Ekonomi	142
Matriks 5.7 Agenda Pembangunan, Arah Pembangunan dan Arah Kebijakan dalam Transformasi Tata Kelola	143
Matriks 5.8 Sasaran, Indikator, Baseline dan Target Transformasi Tata Kelola	143
Matriks 5.9 Agenda Pembangunan, Arah Pembangunan dan Arah Kebijakan dalam Transformasi Mewujudkan Masyarakat Madani Yang Tertib, Aman, Damai, Harmonis, dan Menyatu dalam Kemajemukan	144
Matriks 5.10 Sasaran, Indikator, Baseline dan Target Mewujudkan Masyarakat Madani yang Tertib, Aman, Damai, Harmonis dan Menyatu dalam Kemajemukan	145
Matriks 5.11 Agenda Pembangunan, Arah Pembangunan dan Arah Kebijakan dalam Mewujudkan Lingkungan Hidup Secara Lestari, Seimbang dan Berkelanjutan	145
Matriks 5.12 Sasaran, Indikator, Baseline dan Target Mewujudkan Lingkungan Hidup Secara Lestari, Seimbang dan Berkelanjutan	146
Matriks 5.13 Agenda Pembangunan, Arah Pembangunan dan Arah Kebijakan dalam Menyediakan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis yang Memadai dan Berkualitas	146
Matriks 5.14 Sasaran, Indikator, Baseline dan Target – Menyediakan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis yang Memadai dan Berkualitas	147
Matriks 5.15 Misi, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045: Transformasi Sosial	148
Matriks 5.16 Misi, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045: Transformasi Ekonomi	150

Matriks 5. 17	Misi, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045: Transformasi Tata Kelola	151
Matriks 5. 18	Misi, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045	152
Matriks 5. 19	Misi, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045	153
Matriks 5. 20	Misi, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045	154
Matriks 5. 21	Misi, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045	155



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bab II, Pasal 5, Ayat 1, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional (RPJPN).

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bab 1, Pasal 1, Ayat 25, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

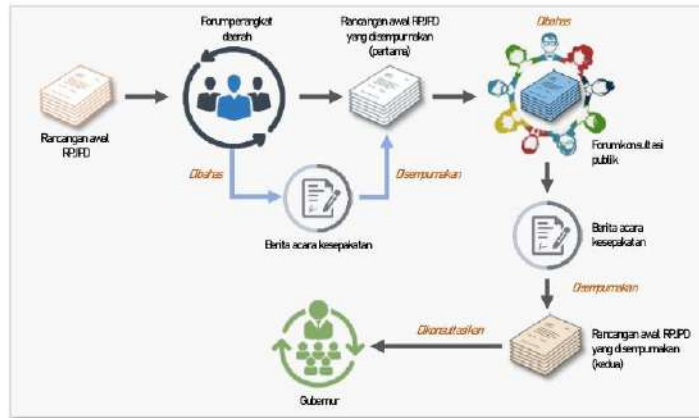
Proses penyusunan dokumen RPJPD secara keseluruhan terdiri dari 6 (enam) tahap, yaitu 1) Persiapan, 2) Penyusunan Rancangan Awal, 3) Penyusunan Rancangan, 4) Pelaksanaan Musrenbang, 5) Perumusan Rancangan Akhir, dan 6) Penetapan (lihat Gambar 1.1).

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RPJPD



Sementara, proses penyusunan dokumen Rancangan RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045 secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 1.2 sebagai berikut:

Gambar 1.2 Proses Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045



Dalam prosesnya, saat ini telah diselesaikan dokumen Ranwal RPJPD (versi nol) yang selanjutnya akan dibahas dan disepakati dalam Forum Perangkat Daerah untuk disempurnakan menjadi versi kesatu serta Forum Konsultasi Publik untuk disempurnakan menjadi versi kedua. Dokumen Ranwal RPJPD yang telah dibahas dan disepakati dalam kedua forum tersebut selanjutnya akan dikonsultasikan dengan pemerintah Provinsi Bengkulu.

Proses penyusunan dokumen Ranwal RPJPD versi nol dimulai dengan pengumpulan permasalahan daerah (masalah pokok, masalah dan akar masalah) dari seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Kepahiang. Selanjutnya, seluruh dokumen permasalahan daerah tersebut dikaji ulang (review) oleh Tenaga Ahli terkait substansi dan konsistensinya secara teknis.

Pada tahap berikutnya, dokumen permasalahan daerah hasil kaji ulang Tenaga Ahli menjadi bahan masukan (input) yang dibahas dalam Diskusi Kelompok Terfokus (Focussed Group Discussion atau FGD) yang melibatkan masing-masing 2 (dua) orang perwakilan staf perencana dari seluruh Perangkat Daerah. Keluaran dari kegiatan FGD adalah finalisasi permasalahan daerah dan isu-isu strategis daerah Kabupaten Kepahiang dalam jangka panjang (20 tahun) yang ditandatangani oleh seluruh peserta dalam bentuk Berita Acara Hasil FGD Penentuan Permasalahan Daerah dan Isu-Isu Strategis Daerah.

Berdasarkan permasalahan daerah dan isu-isu strategis daerah diatas, Tenaga Ahli menyusun rancangan (*exercise*) Visi, Misi, Arah Kebijakan, Sasaran Pokok dan Target Kinerja Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kepahiang 2025-2045. Selanjutnya, rancangan (*exercise*) tersebut dibahas dengan Bappeda Kabupaten Kepahiang dalam kegiatan FGD kedua untuk kemudian disusun kedalam dokumen Ranwal RPJPD versi nol.

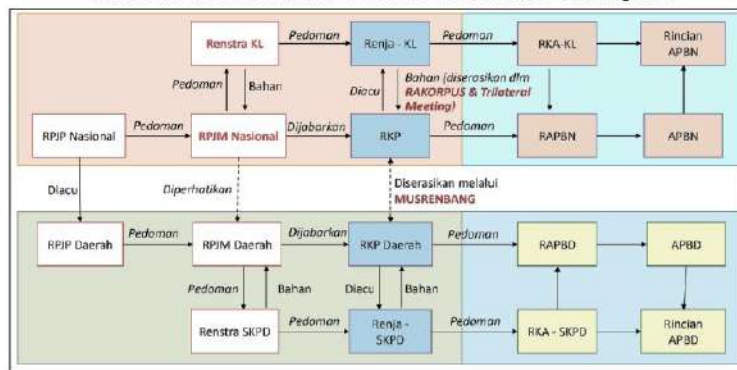
1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2045 dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
 5. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
 12. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Bappenas Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
 13. Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023-2043
- 1.3. Hubungan antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepahiang secara substansial dirumuskan dan disinkronisasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu serta dengan kebijakan pembangunan wilayah yang termuat pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepahiang dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota yang berbatasan dan/atau yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Kepahiang (lihat Gambar 1.3).

Gambar 1.3 Kedudukan RPJPD dalam Perencanaan Pembangunan



Secara substansi, RPJPD Kabupaten Kepahiang berpedoman dan disinkronisasikan dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Bengkulu terutama pada Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan, Sasaran Pokok dan Target Kinerja. Selanjutnya, dengan RTRWN, RTRW

Provinsi Bengkulu dan RTRW Kabupaten Kepahiang serta RTRW kabupaten/kota lain, RPJPD berpedoman pada substansi (1) tujuan penataan ruang wilayah; (2) rencana struktur ruang, yang memuat rencana pembangunan perwilayahan dan pembangunan jaringan infrastruktur; (3) rencana pola ruang wilayah, yang memuat penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya; serta (4) pelibatan masyarakat dalam penataan ruang.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045 adalah untuk mewujudkan pedoman dan panduan pembangunan dalam jangka panjang selama 20 (dua puluh) tahun di Kabupaten Kepahiang serta memberikan pedoman dan panduan untuk penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Kepahiang selama 4 (empat) periode.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi tentang penjelasan gambaran umum dan analisis kondisi Kabupaten Kepahiang selama 5 (lima) tahun terakhir dalam aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Bab ini berisi tentang berbagai permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis Kabupaten Kepahiang dalam jangka panjang (20 tahun).

Bab IV Visi dan Misi Daerah

Bab ini berisi tentang visi dan misi pembangunan Kabupaten Kepahiang dalam jangka panjang (20 tahun).

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

Bab ini berisi arah kebijakan pembangunan daerah dan sasaran pokok pembangunan daerah dalam jangka panjang (20 tahun) Kabupaten Kepahiang.

Bab VI Penutup

Bab ini berisi penegasan kembali tentang pentingnya keberadaan dokumen RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045 termasuk kaidah pelaksanaan didalamnya.



Courtesy: @andrea_nugrah

GAMBARAN KONDISI UMUM 2

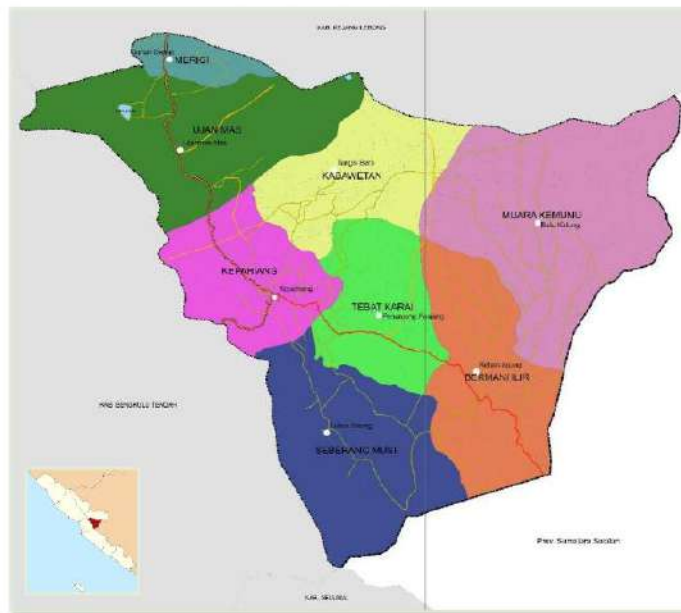
BAB II GAMBARAN KONDISI UMUM



Kepahiang adalah salah satu kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu yang berdiri pada tanggal 7 Januari 2004 berdasarkan UU No. 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Bersama-sama dengan Kabupaten Lebong, Kepahiang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong sebagai Kabupaten/Kota induk.

Wilayah Kabupaten Kepahiang berada pada dataran tinggi di lintasan pegunungan Bukit Barisan. Kondisi ini menjadikan sebagian besar wilayah didominasi daerah perbukitan dengan kemiringan lahan cukup tajam. Hampir sepertiga luas wilayah Kabupaten Kepahiang masih berupa hutan. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepahiang kaya akan sumber daya alam baik hasil bumi pertanian maupun tambang.

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Kepahiang



Sumber: Pemda Kabupaten Kepahiang, inset: https://en.wikipedia.org/wiki/Kepahiang_Regency

Wilayah Kabupaten dihuni oleh penduduk asli maupun pendatang. Latar belakang kehidupan sosialnya cenderung heterogen baik secara budaya, agama, maupun suku. Berbagai kelompok agama dan suku hidup berdampingan secara damai. Suku Rejang merupakan kelompok terbesar di Kepahiang dan mendominasi kehidupan budaya lokal namun berbagai kelompok lain dapat hidup berdampingan sejak lama. Suku-suku yang tinggal Kabupaten Kepahiang, meliputi Suku Rejang, Serawai, Jawa, Lembak, Sunda, dll.¹

¹ *ibid.*

2.1. Aspek Geografi

2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Wilayah Kabupaten Kepahiang meliputi 8 kecamatan dengan ibu kota kabupaten berada di Kecamatan Kepahiang. Terdapat sebanyak 117 Desa/Kelurahan, di mana 12 diantaranya merupakan wilayah administrasi berupa kelurahan, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut:

Tabel 2.1 Kabupaten/Kota dan Kecamatan Batas Wilayah Kabupaten Kepahiang

No.	Kecamatan	Ibu Kota	Jumlah		
			Desa	Kelurahan	RT/RW
1	Muara Kemumu	Batu Kalung	8	-	-
2	Bermani Ilir	Keban Agung	18	1	-
3	Seberang Musi	Lubuk Sahung	13	-	-
4	Tebat Karai	Taba Saling	13	1	-
5	Kepahiang	Pasar Ujung	16	7	-
6	Kabawetan	Tangsi Baru	14	1	-
7	Ujan Mas	Ujan Mas Atas	16	1	-
8	Merigi	Durian Depun	7	1	-
Kabupaten Kepahiang			105	12	-

Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang

Rata-rata jarak masing-masing kecamatan dari ibu kota Kabupaten Kepahiang sekitar 9,9km. Gambar 2.2 menunjukkan bahwa Kecamatan Merigi merupakan wilayah dengan jarak paling jauh dari ibu kota kabupaten, yang mencapai sekitar 19km dan Kecamatan Tebat Karai serta Bermani Ilir merupakan wilayah terdekat dengan jarak sekitar 7km.

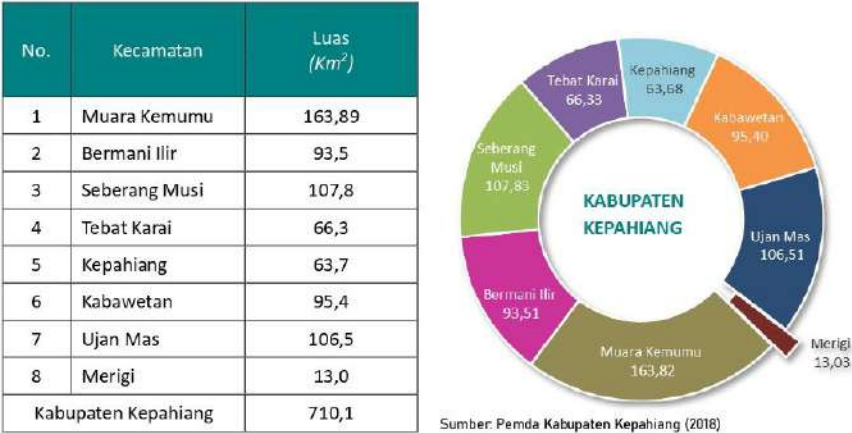
Gambar 2.2 Jarak dari Ibu Kota Kabupaten Kepahiang (km)



Sumber: Pemda Kabupaten Kepahiang, 2018 (diolah)

Luas wilayah Kabupaten Kepahiang mencapai sekitar 710,1 km². Merigi merupakan kecamatan dengan wilayah terkecil dengan luas sekitar 13 km² dan mencakup sekitar 1,8% dari total wilayah kabupaten. Sementara itu, Kecamatan Muara Kemumu mempunyai wilayah yang mencapai sekitar 23% dari total luas wilayah, dengan luas sekitar 163 km², sebagaimana ditunjukkan oleh tabel dan ilustrasi di bawah.

Gambar 2.3: Luas Wilayah (km2) dan Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepahiang



Terkait batas wilayah, Kabupaten Kepahiang berbatasan dengan 3 kabupaten/kota, baik yang termasuk dalam wilayah di Provinsi Bengkulu maupun Sumatera Selatan. Di sebelah Utara, Kabupaten Kepahiang berbatasan dengan kabupaten induk (Kabupaten Rejang Lebong). Sementara di sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, Kabupaten Bengkulu Tengah membatasi wilayah Kabupaten Kepahiang di sebelah Selatan dan bersama Kabupaten Rejang Lebong menjadi batas wilayah di sebelah Barat.

Tabel 2.2 Batas Wilayah Kabupaten Kepahiang

Batas Wilayah	Kabupaten/Kota	Kecamatan
Utara	Rejang Lebong	Curup, Sindang Kelingi, dan Padang Ulak Tanding
Timur	Empat Lawang (Prov. Sumsel)	Ulu Musi
Selatan	Bengkulu Tengah	Taba Penanjung
Barat	Bengkulu Tengah	Pagar Jati
	Rejang Lebong	Bermani Ulu

Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang

2.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

- a. Posisi astronomis dan geostrategis
- Secara astronomis, letak Kabupaten Kepahiang berada dalam bentangan antara 101°55'19"-103°01'29" Bujur Timur dan membujur di antara 02°43'07"-03°46'48" Lintang Selatan. Dari posisinya yang berada pada dataran tinggi di lintasan pegunungan Bukit Barisan, hal ini menjadikan wilayah Kabupaten Kepahiang didominasi karakter muka bumi berupa perbukitan. Hampir sepertiga luas wilayah Kabupaten Kepahiang atau sekitar 18.322,31 hektar (27,55%) masih berupa hutan.² Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepahiang kaya akan sumber daya alam baik hasil bumi pertanian maupun tambang.
- b. Topografi
- Wilayah Kabupaten Kepahiang berada pada dataran tinggi di sepanjang lintasan pegunungan Bukit Barisan. Dari posisinya yang berada pada dataran tinggi di lintasan

² Pemda Kabupaten Kepahiang, *Profil Investasi Kabupaten Kepahiang*, paparan tidak diterbitkan.

pegunungan Bukit Barisan, hal ini menjadikan wilayah Kabupaten Kepahiang didominasi karakter wilayah berupa perbukitan. Kondisi ini menjadikan sebagian besar wilayah didominasi daerah perbukitan dengan kemiringan lahan cukup tajam hingga curam lebih dari 40%.

Dari kondisi topografis dapat digambarkan bahwa wilayah kecamatan di Kabupaten Kepahiang berada pada ketinggian antara 350 - 1200 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sebagian besar atau 75,01% wilayah Kabupaten Kepahiang terletak pada ketinggian 500 - 1.000 mdpl. Sebagian lainnya berada pada ketinggian 100 - 500 mdpl seluas 8.550ha atau 12,86% dan 12,13% luas wilayahnya berada pada ketinggian lebih dari 1.000 mdpl atau seluas 8.071 ha.³

Kecamatan Kabawetan merupakan kecamatan yang berada di wilayah tertinggi, dimana rata - rata desa/kelurahan berada pada ketinggian sekitar 900 mdpl. Sebaliknya, Bermani Ilir merupakan kecamatan yang berada di wilayah terendah di Kabupaten Kepahiang dengan rata - rata ketinggian desa/kelurahannya berada di sekitar 400 mdpl.

Gambar 2.4 Ketinggian Rata-rata Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepahiang (mdpl)



Sumber: Pemda Kabupaten Kepahiang, 2018 (diolah)

Sedangkan menurut kemiringan tanahnya, Kabupaten Kepahiang sebagian besar terletak pada lereng-lereng perbukitan dengan kemiringan lebih dari 40°, yaitu sebanyak 37,68%. Sementara 31,03% wilayah lainnya dengan kemiringan tanah 15° – 40°, 24,78 % dengan kemiringan 2°-15° dan 6,51% dengan kemiringan 0° – 2°.⁴

Faktor ketinggian wilayah membentuk karakteristik geografis Kabupaten Kepahiang yang cenderung berbukit dan bergelombang. Area Berbukit luasnya mencapai kurang lebih 19.030 ha atau sekitar 28,2% dari total luas wilayah. Seementara, wiayah dengan karakter berupa Area Bergelombang hingga Berbukit mencapai sekitar 40,7% atau sebagian besar wilayah kabupaten, seluas kurang lebih 270.065 ha. Sisanya, sekitar 31,1%, merupakan wilayah dengan karakter Area Datar hingga Bergelombang, yang mencakup wilayah seluas 20.045 ha.⁵

³ BPS Kabupaten Kepahiang (2017), *Monografi Kabupaten Kepahiang 2017*

⁴ BPS Kabupaten Kepahiang (2017), *Monografi Kabupaten Kepahiang 2017*

⁵ Pemda Kabupaten Kepahiang (2007), *Profil Investasi Kabupaten Kepahiang*, paparan tidak diterbitkan.

c. Geologi

Lapisan tanah di Kabupaten Kepahiang terdiri dari jenis Alluvial, Regosol, Asosiasi PMK/Regosol Andosol, Latosol, Andosol, Komplek PMK/Litosol Andosol dan Komplek Podsolik Coklat/Litosol. Berdasarkan tekstur tanah, sebagian besar luas wilayah bertekstur sedang seluas 35.579 hektar (53,54%), Tanah dengan tekstur halus meliputi wilayah seluas 22.621 hektar (34,03%), dan sisanya, berupa tanah bertekstur kasar seluas 8.262 hektar (12,43%). Pori drainase tanah sangat rendah sampai tinggi, kapasitas air yang tersedia tergolong tinggi dan sangat tinggi. Permeabilitas tanah sangat lambat sampai sedang, dengan pH tanah 5,1-5,8. Kandungan N total sangat rendah sampai sedang, kandungan C organik sangat rendah sampai sedang, kandungan P relatif rendah. Kedalaman efektif tanah sekitar 30-50 cm. Tekstur tanahnya lempung liat berpasir, liat, dan pasir. Struktur tanahnya gumpal, mampat, dan lepas-lepas.⁶

Tabel 2.3 Luas (ha) dan Persentase Tanah menurut Jenis Tanah di Kabupaten Kepahiang

No	Jenis Tanah	Luas	Persentase
1	Renzina		
2	Alluvial (Al)	1.671	252
3	Regosol (Re)	9.297	441
4	Asosiasi PMK/Latosol Andosol	12.250	1843
5	Latosol (L)	8.268	1318
6	Andosol (An)	10.025	1508
7	Komplek PMK/Litosol dan Latosol	9.761	1446
8	komplek Podsolik Coklat dan latosol	21.078	3171

Sumber: Bappeda Kabupaten Kepahiang (2021)

Penelitian lain menunjukkan bahwa Kabupaten Kepahiang mempunyai struktur lapisan tanah berupa terdiri dari lapisan lempung, pasir apung, batuan, pasir berlanau atau campuran pasir-lanau (mulai dari yang bergradasi buruk hingga tanah berpasir atau berlanau halus mengandung mika.⁷ Selain itu, di beberapa lokasi, khususnya area perkebunan dan pertanian, lapisan tanahnya terdiri dari jenis regosol, litosol dan podsolik dengan struktur tanah mudah meresapkan air dan geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar. Lebih lanjut, Kabupaten Kepahiang mempunyai wilayah yang potensial dalam kaitan dengan kandungan tambang, mineral, dan energi dengan cadangan yang besar.⁸

Tabel 2.4 Potensi Tambang dan Energi di Kabupaten Kepahiang

No.	Kecamatan	Kawasan Tambang dan Energi
1	Muara Kemumu	Obsidian
2	Bermani Ilir	Andesit dan obsidian
3	Seberang Musi	batubara dan emas
4	Tebat Karai	Kaolin, andesit, pasir vulkanik, dan pasir kerakal
5	Kepahiang	Andesit

⁶ Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Kepahiang (2007), Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2007.

⁷ Ismulhadi (2019), *Studi Potensi Longsor Daerah Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu Terutama Akibat Gempa Bumi Menggunakan Pendekatan Parameter Elastis*, Disertasi Doktor.

⁸ Pemda Kabupaten Kepahiang, *Profil Investasi Kabupaten Kepahiang*, paparan tidak diterbitkan.

No.	Kecamatan	Kawasan Tambang dan Energi
6	Kabawetan	Energi panas bumi
7	Ujan Mas	Batubara
8	Merigi	Pasir vulkanik dan pasir kerakal.

Sumber: Bappeda Kabupaten Kepahiang (2021)

d. Hidrologi

Kondisi tata air yang terdapat di Kabupaten Kepahiang pada umumnya terdiri dari sungai-sungai besar berasal dari pegunungan Bukit Barisan. Sumber daya air di Kabupaten Kepahiang dari tahun ke tahun mengalami penurunan, hal ini ditandai dengan penurunan debit air di beberapa sungai seperti Sungai Musi, Sungai Langkap, Sungai Durian, dan Sungai Sempiang. Sungai-sungai tersebut mempunyai debit air yang bervariasi antara 0,1 m3/detik sampai dengan 60 m3/detik. Secara kualitas, pada umumnya kondisi airnya masih baik dan masih dibawah ambang batas mutu air daerah Kabupaten Kepahiang.⁹

Tabel 2.5 Aliran Sungai dan Debit Air Sungai di Kab.Kepahiang, 2007

No.	Nama Sungai	Debit (m3/dtk)
1	Sungai Musi Hulu	55,61
2	Sungai Musi Hilir	61,30
3	Sungai Sapiang Hulu	1,10
4	Sungai Sapiang Hilir	4,00
5	Sungai Langkap Hulu	0,65
6	Sungai Langkap Hilir	3,85
7	Sungai Durian Hulu	0,15
8	Sungai Durian Hilir	1,09

Sumber: Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Kepahiang (2007)

Potensi air di Kabupaten Kepahiang adalah cukup besar hal ini dapat dilihat dari tingginya rata-rata curah hujan di Kabupaten Kepahiang, yang hampir sepanjang tahun selalu turun hujan. Potensi sumber daya air yang besar tersebut mulai menunjukkan gejala adanya penurunan, tetapi belum sampai menimbulkan persoalan kekurangan air. Curah hujan akan tinggi pada sekitar bulan januari sampai dengan juli dan akan menurun pada bulan-bulan agustus sampai dengan oktober dan mulai november curah hujan akan mulai tinggi kembali. Fluktuasi kuantitas air pada perbandingan kondisi maksimum dan kondisi minimum menunjukkan perbedaan yang cukup besar. Walaupun demikian belum sampai pada tahap kekeringan. Lebih lanjut, dari sisi kualitas air dapat digambarkan bahwa status mutu air sungai berdasarkan metode Indeks Pencemar umumnya dalam kondisi tercemar ringan.¹⁰

Tabel 2.6 Status Mutu Air Sungai di Kabupaten Kepahiang, 2007

No.	Nama Sungai	Status Mutu Air	Keterangan
1.	Sungai Musi hulu	Cemar ringan	Hulu
2.	Sungai Musi hilir	Cemar ringan	Hilir
7.	Sungai Sempiang hulu	Cemar ringan	Hulu

⁹ Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Kepahiang (2007), Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2007.

¹⁰ *Ibid*

8.	Sungai Sempiang hilir	Cemar ringan	Hilir
3.	Sungai Langkap hulu	Cemar ringan	Hulu
4.	Sungai Langkap hilir	Cemar ringan	Hilir
5.	Sungai Durian hulu	Cemar ringan	Hulu
6.	Sungai Durian hilir	Cemar ringan	Hilir

Sumber: Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Kepahiang (2007)

e. Klimatologi

Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Kepahiang juga beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 258mm/bulan. Meskipun fluktuatif, namun selama rentang waktu 2018-2021, secara umum terjadi peningkatan rata-rata curah hujan per bulannya. Kondisi curah hujan per bulan per tahun juga berfluktuasi. Pada Tahun 2018, misalnya, curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan November, yang mencapai sekitar 506,8mm. Sementara curah hujan terendah terjadi pada Bulan Juli, yang tercatat hanya sekitar 26,3mm. Pada tahun-tahun berikutnya, kondisi ini bergeser. Pada 2019, curah hujan maksimal terjadi pada April (521,9mm) dan terendah pada September (17,9mm).

Tabel 2.7 Curah Hujan Maksimal, Minimal, dan Rerata, 2018 – 2021

Tahun	Curah Hujan (mm)		Bulan
2018	Maks.	506,8	November
	Min.	26,3	Juli
2019	Maks.	521,9	April
	Min.	17,9	September
2020	Maks.	516,7	Januari
	Min.	48,3	Agustus
2021	Maks.	557,1	Desember
	Maks.	143,6	Juli

Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang, berbagai tahun (diolah) (data merupakan data termuktahir)

Lebih lanjut, jumlah hari hujan rata-rata selama rentang waktu 2018-2021 adalah sebanyak 21 hari per bulan per tahun. Sebagaimana data curah hujan sebelumnya, terdapat peningkatan jumlah hari hujan pada 2021, dimana rata-rata jumlah hari terkecil terjadinya hujan adalah 16 hari/bulan dan jumlah hari terbanyak adalah selama 29 hari/bulan.

Gambar 2.5 Curah Hujan Maksimal, Minimal, dan Rerata, 2018 – 2021



Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang (diolah) (data merupakan data termuktahir)

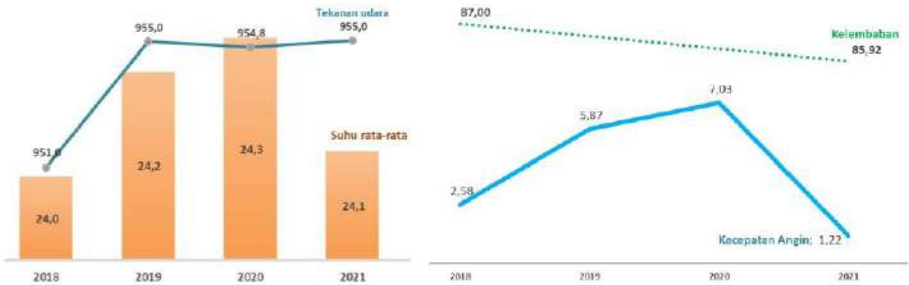
Gambar 2.6 Jumlah Hari Maksimal, Minimal, dan Rerata, 2018 – 2021



Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang (diolah) (data merupakan data termuktahir)

Suhu harian rata-rata 24,2°C selama 2018-2021, dengan suhu maksimal 24,8°C pada April 2020 dan dan suhu minimal 23,5°C pada Januari 2020.

Gambar 2.7 Rata-rata Tekanan Udara, Suhu, Kelembaban, dan Kecepatan Angin, 2018 – 2021



Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang (diolah) (data merupakan data termuktahir)

f. Penggunaan Lahan

Dari luas wilayah Kabupaten Kepahiang sebesar 66.500 hektar, sebagian besar wilayah Kabupaten Kepahiang adalah hutan dan semak belukar dengan luas 29.562 hektar atau sebesar kurang lebih 45%, sedangkan sisanya digunakan untuk pemukiman, perkampungan, dan lahan pertanian dan perkebunan. Kawasan budi daya seluas 48.393,69 hektar dan kawasan hutan seluas 18.106,31 hektar.

Tabel 2.8 Luas (ha) dan Persentase (%) Penggunaan Lahan di Kabupaten Kepahiang, 2007

No.	Penggunaan Lahan	Luas	Persentase
1	Hutan dan semak belukar	29.562	44,5
2	Pemukiman, perkampungan, dan sawah	8.425	12,7
3	Tegalan dan perkebunan	16.710	25,2
4	Kebun campuran, semak, dan ilalang	9.227	13,9
5	Kolam, tambak, dan tanah tandus	2.410	3,6
6	Lain-lain	98	0,1

Sumber: Bappeda Kabupaten Kepahiang (2021) (data merupakan data termuktahir)

Peruntukan kawasan hutan terbagi atas Cagar Alam seluas 3,20 hektar, Taman Wisata Alam seluas 8.515 hektar. 3. Hutan Lindung seluas 9.588,11 hektar. Kawasan lindung meliputi beberapa wilayah, yang tidak hanya antar kecamatan dalam Kabupaten Kepahiang namun juga bersama Kabupaten/Kota lainnya. Kawasan untuk peruntukan perlindungan dan dukungan fungsi alam dan lingkungan, meliputi:

1. Kawasan hutan lindung
 - a) Hutan Lindung Bukit Daun, dengan luas 90.805,07 Ha, yang terletak di wilayah Kabupaten, yaitu Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara;
 - b) Hutan Lindung Konak, dengan luas 11,11 Ha, yang terletak di wilayah Kabupaten Kepahiang;
 - c) Hutan Lindung Rimbo Donok, dengan luas 433,00 Ha, yang terletak di wilayah Kabupaten Kepahiang;
 - d) Hutan Lindung Bukit Balai Rejang, dengan luas 18.069,00 Ha, yang terletak di wilayah 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Kepahiang.
2. Kawasan Resapan Air, meliputi:
 - a) Kawasan hutan lindung Kabupaten Kepahiang, dengan luas 9.588,11 Ha, terdiri dari Hutan Lindung Bukit Dain, Konak, Rimbo Donok dan bukit Balai Rejang; dan
 - b) Kawasan perkebuan yang memiliki struktur tanah mudah meresapkan air/hujan secara besar.
3. Kawasan Perlindungan Setempat, yang memberikan perlindungan setempat, mencakup sempadan sungai, sekitar danau atau waduk, sekitar mata air dan hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota serta kawasan rawan bencana, di antaranya:
 - a) Kawasan sempadan Sungai Musi, Sungai Sempiang, dan Sungai Air Belimbing.
 - b) Kawasan sekitar mata air.
 - c) Kawasan sekitar danau/waduk seluas 39,69 Ha Danau/waduk Ujan Mas.

4. Kawasan ruang terbuka hijau, meliputi:
 - a) Kawasan pusat Kabupaten Kepahiang (Kecamatan Kepahiang);
 - b) Kawasan pusat pemerintahan di masing-masing Kecamatan;
 - c) Kawasan peruntukan pemakaman umum yang di 8 kecamatan; dan
 - d) Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam.
 5. Cagar Alam Kabupaten Kepahiang seluas 3,20 Ha.
 6. Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kaba seluas 8.518 Ha (termasuk wilayah kabupaten) dari total 13.490,00 Ha, yang dikelola oleh Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong
 7. Kawasan taman wisata alam di Kecamatan Ujan Mas dan Kabawetan dengan luas kurang lebih 8.518 hektar.
- g. **Potensi Pengembangan Kawasan**
- Kawasan-kawasan yang potensial dikembangkan terdistribusi pada beberapa wilayah pengembangan sektoral, yang terdiri dari:
1. Kawasan Pertanian, meliputi:
 - a) Pertanian Tanaman Pangan, yang menyebar di seluruh Kecamatan di kabupaten Kepahiang, meliputi komoditas padi dan palawija;
 - b) Pertanian Tanaman Hortikultura yang juga mencakup areal yang menyebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kepahiang.
 2. Kawasan Perkebunan yang terdistribusi di beberapa kecamatan dengan Kopi dan lada sebagai komoditas yang paling banyak diusahakan di Kabupaten Kepahiang dan menjadi primadona di perkebunan rakyat;
 3. Kawasan pengembangan peternakan dengan sentra kawasan berada di Kecamatan Kabawetan dan Kecamatan Ujan Mas.
 4. Kawasan Pertambangan, yang meliputi hampir seluruh kecamatan sesuai dengan komoditas pertambangan yang potensial di masing-masing wilayah.
 5. Kawasan perikanan, yang meliputi:
 - a) Kawasan budi daya yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kepahiang, terutama Kecamatan Seberang Musi, kepahiang, dan Tebat Karai,
 - b) Kawasan pengolahan ikan di Kecamatan Ujan Mas, dan
 - c) Kawasan Minapolitan berada di Kecamatan Ujan Mas, Bermani Ilir, Tebat Karai dan Merigi.
 6. Kawasan Industri Industri Peruntukan industri di Kabupaten Kepahiang adalah seluas 25 Ha (0,03% dari luas wilayah Kabupaten) yang terdistribusi di Kecamatan Tebat Karai, Bermani Ilir, Kabawetan, Merigi, Seberang Musi dan Kepahiang.
 7. Kawasan Pengembangan Pariwisata meliputi Kawasan Wisata Alam Kebun Teh (Kecamatan Kabawetan), Wisata dan panas bumi Bukit Kaba.

h. Wilayah Rawan Bencana

Gambaran geomorfologi Kabupaten Kepahiang menunjukkan tiga karakter utama, yaitu dataran-dataran alluvial dan zona vulkanik yang merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan dengan karakter pegunungan yang dikenal dengan Patahan Semangko. Berdasarkan hal tersebut, Kabupaten Kepahiang termasuk wilayah yang berpotensi terjadi bencana, seperti banjir, longsor, kebakaran hutan, gempa tektonik dan vulkanik.¹¹

- 1. Potensi Tanah Longsor terjadi di wilayah kecamatan yang berada pada kawasan-kawasan perbukitan dengan struktur geologi dan lapisan tanah yang rentan dengan kemiringan lereng lebih dari 40 %, yang meliputi wilayah Kecamatan Seberang musir, Kabawetan, Muara Kemumu, dan Bermani ilir.
- 2. Potensi Rawan Banjir meliputi wilayah Kecamatan Bermani Ilir dan Kecamatan Muara Kemumu pada kawasan yang dilalui oleh Sungai air Belimbing.
- 3. Potensi Letusan Gunung Berapi meliputi wilayah aliran sungai yang bagian hulunya berada di Kecamatan Kabawetan sampai pada radius 15 Km.

Tabel 2.9 Potensi Bencana Alam di Kabupaten Kepahiang

No.	Potensi	Kecamatan/Desa	Keterangan
1	Banjir	Kecamatan Muara Kemumu Desa Cinto Mandi	
		Kecamatan Bermani Ilir: • Desa Muara Langkap • Desa Kembang Seri	
2	Tanah longsor	Berdasarkan kondisi topografi, Kabupaten Kepahiang mempunyai kemiringan di atas 45°, hal ini menyebabkan hampir seluruh wilayah berpotensi terjadi bencana tanah longsor	
3	Gunung Berapi (Bukit Kaba) Lahar, Hujan Abu, awan Panas	Kecamatan Ujan Mas	Berpotensi terlanda lahar hujan, perluasan awan panas, hujan abu dan dapat tertimpa material batu berdimensi kecil
		Kecamatan Kabawetan	berpotensi terlanda lahar hujan, perluasan awan panas, hujan abu dan dapat tertimpa material batu berdimensi kecil
		Kecamatan Tebat Karai	berpotensi terlanda lahar hujan, perluasan awan panas, hujan abu dan dapat tertimpa material batu berdimensi kecil
		Kecamatan Kepahiang	berpotensi terlanda lahar hujan
		Kecamatan Seberang Musi	berpotensi terlanda lahar hujan
4	Gempa bumi	kecamatan Tebat Karai	Hampir diseluruh wilayah Kabupaten Kepahiang berpotensi terhadap bencana gempa bumi, 2 kecamatan ini perlu mendapat perhatian lebih terhadap potensi bencana alam gempa bumi.
		Kecamatan Ujan Mas	

Sumber: Bappeda Kabupaten Kepahiang (2021) (data merupakan data termuktahir)

¹¹ Pemda Kabupaten Kepahiang (2018), Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RP2JM) Bidang Cipta Karya Kabupaten Kepahiang Tahun 2018 -2022; tidak diterbitkan.

2.2. Aspek Demografi

2.1.1. Jumlah dan Struktur Penduduk

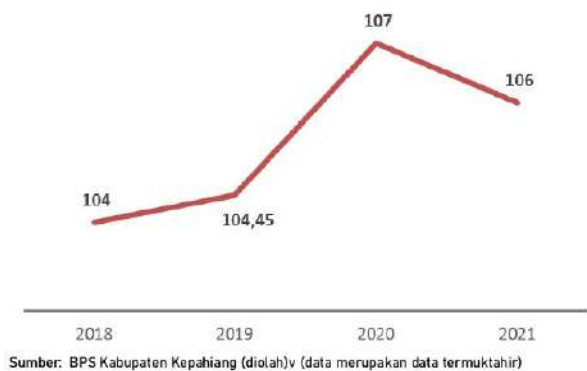
Total jumlah Penduduk Kabupaten Kepahiang pada 2022 kurang lebih sebanyak 153,9 ribu jiwa. Terdapat penambahan jumlah penduduk sekitar 17,8 ribu jiwa penduduk selama lima tahun sebelumnya atau sekitar 11,6% sejak 2018.

Gambar 2.8 Jumlah dan Persentase Jumlah Penduduk Kabupaten Kepahiang menurut Jenis Kelamin, 2018 – 2022 (dalam Jiwa)



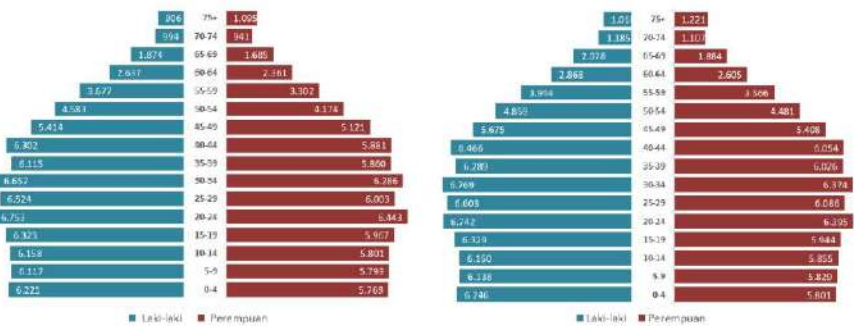
Proporsi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan selama rentang waktu tersebut cenderung berimbang dan relatif tetap selama 2018-2022. Dengan sex ratio antara 104-107, berarti terhadap 100 orang penduduk perempuan terdapat antara 104 hingga 107 orang penduduk laki-laki.

Gambar 2.9 Sex Ratio Penduduk Kabupaten Kepahiang, 2018 – 2021



Dari struktur umur penduduk Kabupaten Kepahiang, data tahun 2020 dan 2022 menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia 15-64 tahun rata-rata mencapai sekitar 71% terhadap total jumlah penduduk, dengan proporsi yang relatif seimbang sebagaimana kecenderungan sex ratio penduduknya.

Gambar 2.10 Piramida Penduduk Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 dan 2022 (Jiwa)



Tabel 2.10 Perbandingan Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Non-Produktif, 2020 dan 2022

Tahun	15-64			<15 & >64	Populasi	% terhadap Populasi	
	L	P	L+P			15-64	<15; >64
2020	54.985	51.398	106.383	43.354	149.737	71,05%	29,0%
2022	56.544	52.939	109.483	44.512	153.995	71,10%	28,9%

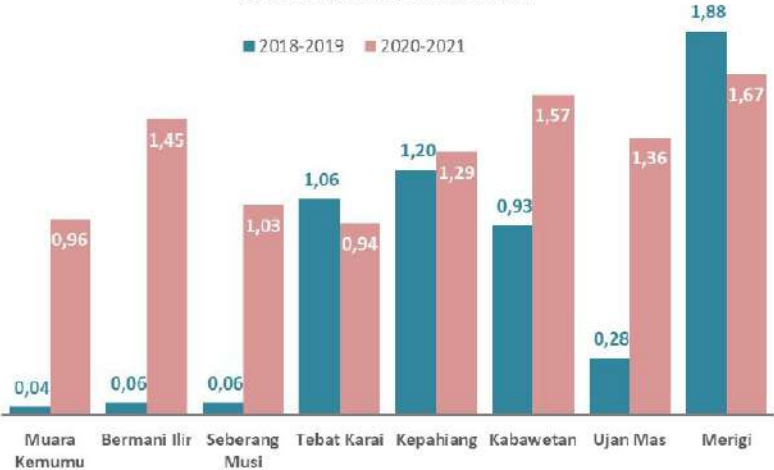
Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang (diolah)

Total jumlah penduduk usia 15-64 tahun (usia produktif) mencapai sekitar 106,4 ribu jiwa atau sekitar 71,05% dari total populasi penduduk Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2020. Pada 2022, terdapat penambahan sekitar 0,5% penduduk usia produktif, dengan proporsi antara laki-laki dan perempuan penduduknya relatif tetap. Sementara itu, pada penduduk usia kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64, meskipun secara absolut menunjukkan penambahan, namun secara proporsi menurun.

2.1.2. Laju pertumbuhan penduduk

Perkembangan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kepahiang menunjukkan, pada 2018-2019, rata-rata pertumbuhan penduduk masing-masing kecamatan sekitar 0,8 persen. Di mana Merigi tercatat sebagai kecamatan dengan pertumbuhan penduduk tertinggi (1,88%). Sementara Muara Kemumu menjadi kecamatan dengan pertumbuhan penduduk terendah hanya sekitar 0,04%. Berikutnya, pada 2021-2022, rata-rata pertumbuhan penduduk kabupaten meningkat menjadi sekitar 1,3%. Hampir seluruh kecamatan mengalami kenaikan pertumbuhan jumlah penduduk, kecuali Kec. Merigi yang justru menunjukkan penurunan pertumbuhan jumlah penduduk pada 2022.

Gambar 2.11 Laju Pertumbuhan Penduduk, 2018-2019 dan 2020-2021 (%)
(data merupakan data termuktahir)



2.1.3. Persebaran penduduk

Data penduduk per kecamatan di Kabupaten Kepahiang menunjukkan adanya kecenderungan proporsi jumlah penduduk/kecamatan yang relatif tetap selama 2018-2022. Dari total jumlah penduduk Kabupaten Kepahiang dalam kurun waktu tersebut, Kec. Kepahiang, yang merupakan ibu kota kabupaten, menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak dengan rata-rata sebesar 49,2 ribu jiwa. Jumlah tersebut mencakup sekitar 33,7% dari total jumlah penduduk kabupaten selama 5 tahun.

Gambar 2.12 Jumlah dan Persebaran Penduduk, 2018 dan 2022 (ribu jiwa)

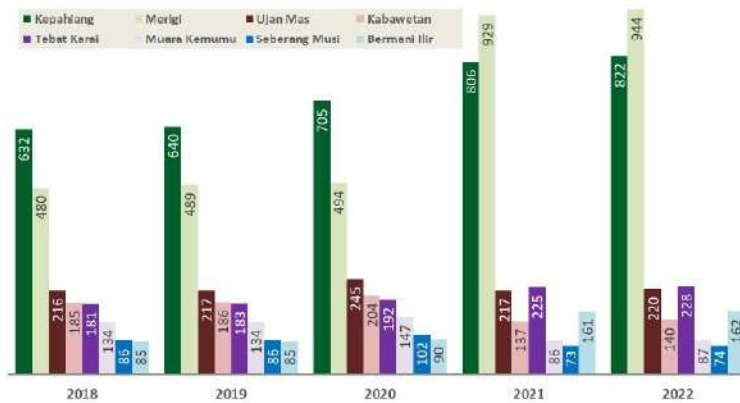


Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang (diolah)

Disusul Ujan Mas dan Bermani Ilir, masing-masing merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar kedua dan ketiga, dengan rata-rata persentase sekitar 15% dan 10% dari total jumlah penduduk. Sementara itu, Seberang mus i tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk terendah, dengan rata-rata jumlah penduduk sebanyak 7,4 ribu jiwa (sekitar 5% dari total) selama kurun waktu tersebut.

Berbeda dengan gambaran persebaran jumlah penduduk per kecamatan, perkembangan kepadatan penduduk Kabupaten Kepahiang per kecamatan menunjukkan adanya perubahan pada 2 tahun terakhir periode 2018-2022. Sebelumnya, Kec. Kepahiang tercatat sebagai wilayah dengan kepadatan tertinggi di antara kecamatan-kecamatan lain dengan rata-rata sebanyak 659 jiwa penduduk/km² wilayah. Sementara Bermani Ilir menjadi kecamatan dengan kepadatan terendah selama rentang waktu tersebut, dengan kepadatan rata-rata 86,6 jiwa penduduk/km².

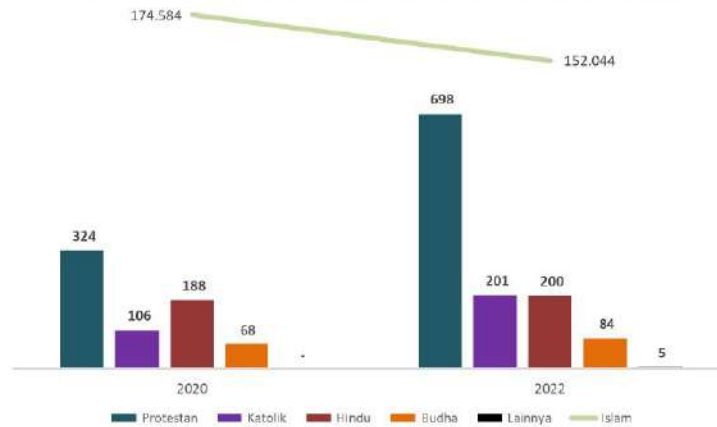
Gambar 2.13 Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan, 2018 dan 2022 (Jiwa/km²)



Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang (diolah)

Pada 2021 – 2022 tingkat kepadatan penduduk antar kecamatan mengalami pergeseran. Kecamatan Merigi yang pada tahun-tahun sebelumnya merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar kedua setelah Kec. Kepahiang, pada 2 tahun tersebut justru menunjukkan peningkatan menjadi kecamatan dengan kepadatan penduduk terbesar di Kabupaten Kepahiang. Tren serupa diikuti oleh Kec. Bermani Ilir yang menunjukkan peningkatan kepadatan lebih dari 50% pada 2021. Selain itu perlu juga dicatat adanya penurunan tingkat kepadatan penduduk di Kec. Muara Kemumu selama rentang 2020-2021.

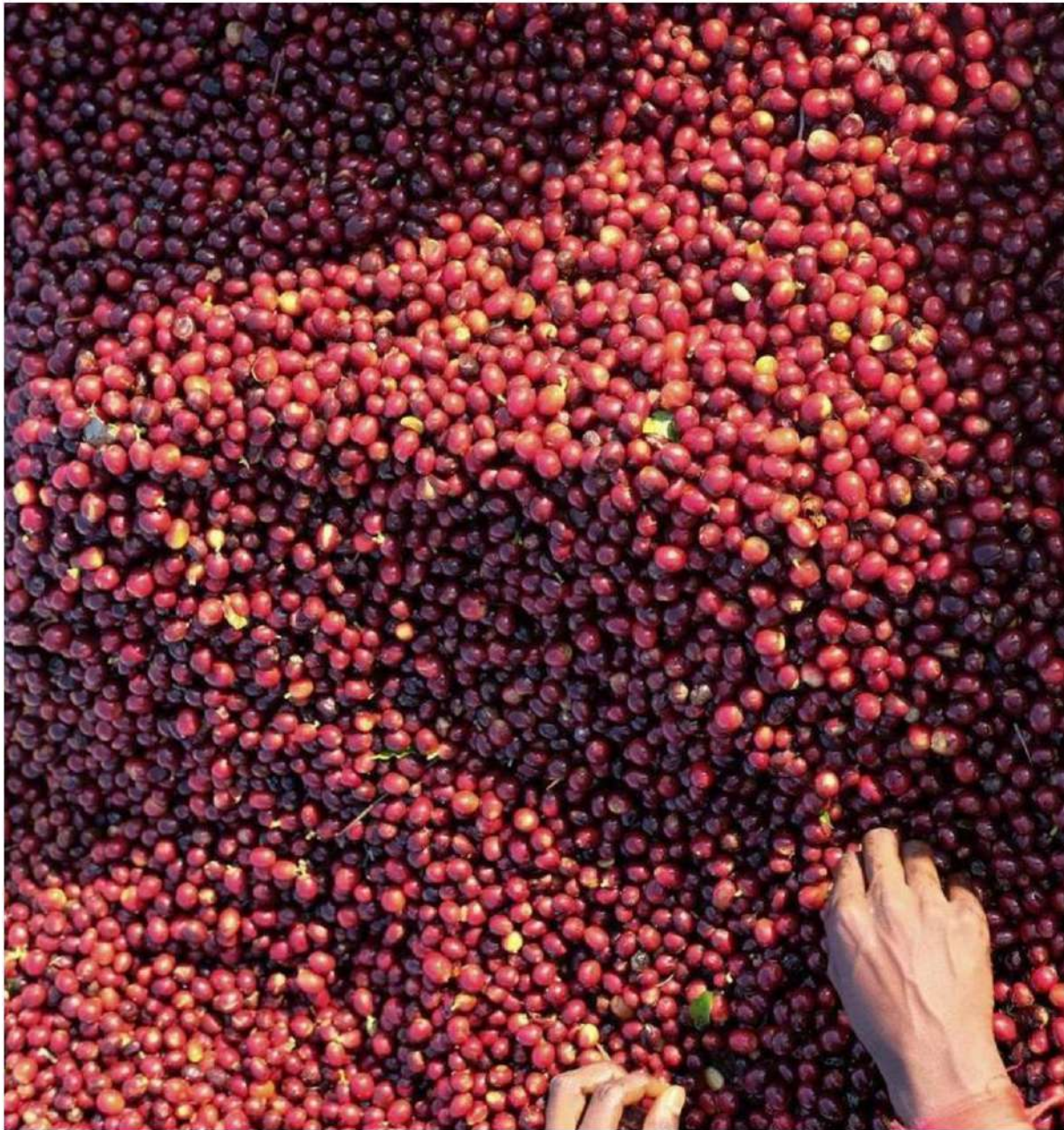
Gambar 2.14 Jumlah Penduduk menurut Agama yang Dipeluk, 2020 dan 2022 (Jiwa)



Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang (diolah)

Selanjutnya, jika melihat perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Kepahiang menurut agama yang dianut, data menunjukkan bahwa agama Islam merupakan agama mayoritas yang dipeluk oleh penduduk kabupaten, dengan persentase sekitar lebih dari 99%. Pada Tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Kepahiang yang memeluk agama Islam mencapai sekitar 174,5 ribu orang atau sekitar 99,6% dari total penduduk. Jumlah ini cenderung menurun pada 2022, menjadi sekitar 152 ribu orang penduduk atau sekitar 99,2%.

Penduduk beragama Kristen Protestan mencapai sekitar 0,18% dari total jumlah penduduk atau sekitar 324 orang penduduk. Pada 2022, jumlah penduduk beragama Kristen Protestan tercatat meningkat hingga lebih dari 100% dari jumlah sebelumnya, menjadi sekitar 698 orang penduduk.



2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

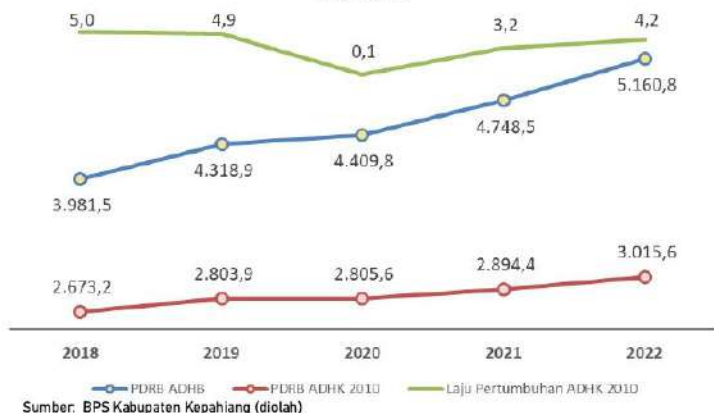
2.3.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha atas dasar harga konstan (ADHK) Tahun 2010 secara agregat selama 2018-2022 menggambarkan adanya penurunan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepahiang. Penurunan laju pertumbuhan yang paling kentara adalah pada periode 2018-2020. Laju pertumbuhan PDRB cenderung menurun dari 5,0% menjadi 4,9% pada 2019.

Kondisi ini makin diperparah pada saat terjadinya pandemi Covid-19 (2020), di mana laju pertumbuhan ekonomi turun drastis hingga hanya sebesar 0,1%. Meskipun seiring makin meredanya pandemi (2021), pertumbuhan ekonomi mulai menggeliat kembali, namun hingga akhir 2022, laju pertumbuhan ekonomi belum dapat kembali seperti pada awal periode dimana pertumbuhan tercatat sebesar 4,2%.

Gambar 2. 15 Pertumbuhan (Rp. Miliar) dan Laju Pertumbuhan (%) PDRB menurut Lapangan Usaha, 2018-2022



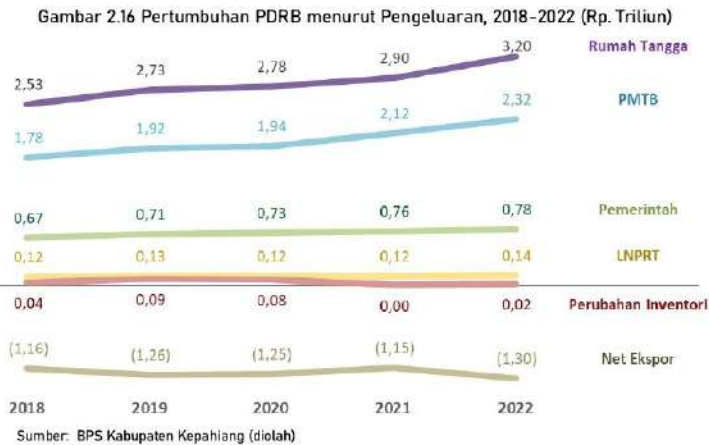
Meskipun terjadi penurunan laju pertumbuhan, secara absolut terdapat peningkatan PDRB pada periode tersebut. Data PDRB menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan total peningkatan kurang lebih sebesar 1,2 Triliun Rupiah pada akhir 2022, dari sebesar 3,98 Triliun Rupiah pada 2018 meningkat menjadi sebesar 5,16 Triliun rupiah pada akhir periode.

Lebih lanjut, data distribusi persentase PDRB menurut Lapangan Usaha ADHB juga memberi gambaran tentang struktur dan pergeseran ekonomi di Kabupaten Kepahiang selama 2018-2022. Dari perkembangan 5 besar kelompok lapangan usaha penyumbang PDRB, terlihat bahwa kelompok usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi terbesar, dengan rata-rata kontribusi sekitar 40,5% selama rentang waktu tersebut.

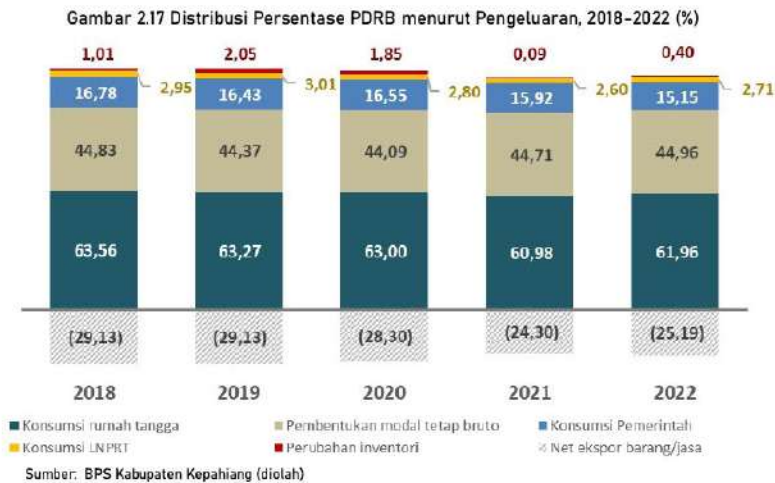
B. Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran

Dari sisi pengeluaran, perkembangan PDRB menurut Pengeluaran ADHB memperlihatkan komponen konsumsi rumah tangga menduduki peringkat teratas dari PDRB selama 2018-2022. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar produk domestik dan produk impor Kabupaten Kepahiang digunakan untuk memenuhi

konsumsi akhir rumah tangga, dengan rata-rata sebesar 2,83 Triliun Rupiah selama rentang waktu tersebut.



Meskipun secara absolut terdapat peningkatan sehingga pada akhir 2022 besaran konsumsi mencapai Rp.3,2T dari 2,53 pada tahun 2018. Namun, secara persentase terjadi penurunan persentase pengeluaran antara 2018-2021. Kondisi paling rendah terjadi pada 2021 sebagai akibat terjadinya pandemi. Menjelang 2022, persentase konsumsi rumah tangga meningkat kembali dengan porsi sekitar 61,96% dari total PDRB.



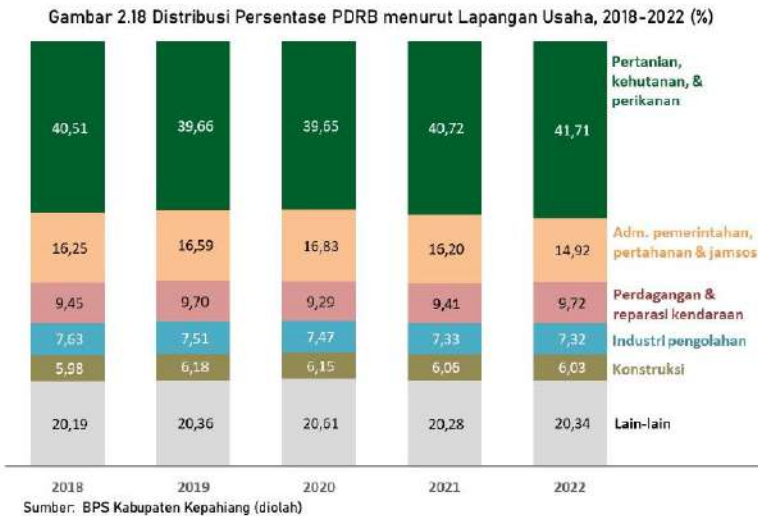
Terjadinya penurunan juga terjadi pada Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), yang menduduki posisi kedua dalam PDRB selama rentang waktu 5 tahun, dengan rata-rata pengeluaran sebesar 44,6%. Saat terjadinya Pandemi (2020), persentase konsumsi komponen ini menurun dari 44,4% pada 2019 menjadi sekitar 44,1% pada 2020, meskipun secara absolut terjadi peningkatan. Pengeluaran terbesar pada komponen ini berasal dari sub-komponen non-bangunan yang mencapai porsi 70% dari total pengeluaran.

Pada urutan ketiga, konsumsi Pemerintah mencatatkan rata-rata pengeluaran sebesar 16,2% selama 2018-2022. Berbeda dengan dua komponen sebelumnya, proporsi konsumsi Pemerintah justru menunjukkan peningkatan pada saat komponen lain mengalami penurunan saat terjadinya pandemi Covid-19 (2020).

Sementara itu, konsumsi lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pengeluaran berupa perubahan inventori menduduk posisi keempat dan kelima dari total PDRB menurut Pengeluaran di Kabupaten Kepahiang Tahun 2018-2022 dengan persentase antara 0,4-3%. Komponen pengeluaran berikutnya, pengeluaran dari ekspor menunjukkan nilai negatif dengan tren yang cenderung fluktuatif selama rentang waktu lima tahun. Hal ini menunjukkan gambaran tentang besaran persentase konsumsi impor yang jauh lebih besar dibanding nilai ekspor barang/jasa. Untuk rincian masing komponen pengeluaran, lihat lampiran.

C. Kontribusi Sektor pada PDRB

Kelompok usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial menjadi penyumbang terbesar kedua, dengan rata-rata sekitar kontribusi sebesar 16,6%. Jika mengamati lebih jauh perkembangan kelompok usaha ini, terlihat bahwa pada saat semua kelompok usaha mengalami penurunan pada Tahun 2020 (saat terjadinya pandemi), kelompok usaha ini justru mengalami peningkatan. Kenaikan ini disinyalir karena pengaruh naiknya status RSUD Kepahiang menjadi rumah sakit rujukan regional dan peningkatan realisasi vaksin, permintaan masyarakat terhadap layanan *rapid test*, dan pemberian jaminan sosial selama terjadinya pandemi. Kondisi-kondisi ini dianggap berpengaruh positif terhadap PDRB komponen pemerintah.¹²



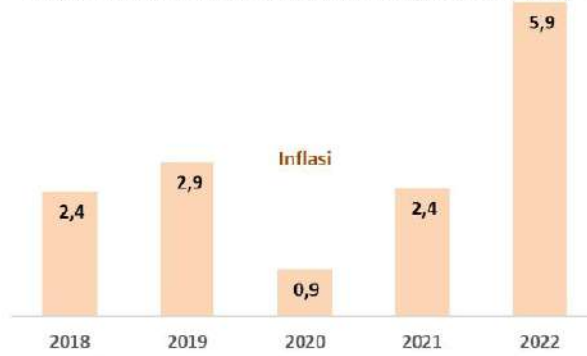
Berikutnya, Kelompok Usaha Perdagangan dan Reparasi Kendaraan (9,51%); Industri Pengolahan (7,45%); dan Kontruksi (6,08%) secara berurutan berada pada posisi ketiga, keempat, dan kelima dari 5 besar penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Kepahiang. Sementara itu, kelompok-kelompok usaha lainnya rata-rata memberi kontribusi antara 0,14% - 4,92%. Rincian kontribusi PDRB dari masing-masing kelompok lapangan usaha dapat dilihat dalam lampiran.

¹² BPS Kabupaten Kepahiang (2021), *PDRB Kabupaten Kepahiang dalam Infografis 2021*.

D. Inflasi

Data inflasi tahunan kabupaten/kota Provinsi Bengkulu menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif selama 2018-2022. Tren inflasi, yang sejak awal periode (2018-2019) cenderung meningkat, terkoreksi menjelang 2020 (saat terjadinya pandemi).

Gambar 2.19 Perkembangan Inflasi Provinsi Bengkulu, 2018-2022 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang (diolah)

Angka inflasi turun dari 2,9% di 2019 hingga menjadi 0,9% di 2020. Setahun berikutnya, seiring dengan pemulihan pasca pandemi, inflasi kembali pada posisi sebagaimana kondisi 2018. Pada tahun 2022, inflasi melonjak hingga lebih dari 100% dari kondisi sebelumnya, hingga tercatat sebesar 5,8% pada akhir periode tersebut sebagaimana ditunjukkan oleh gambar di atas.



2.3.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

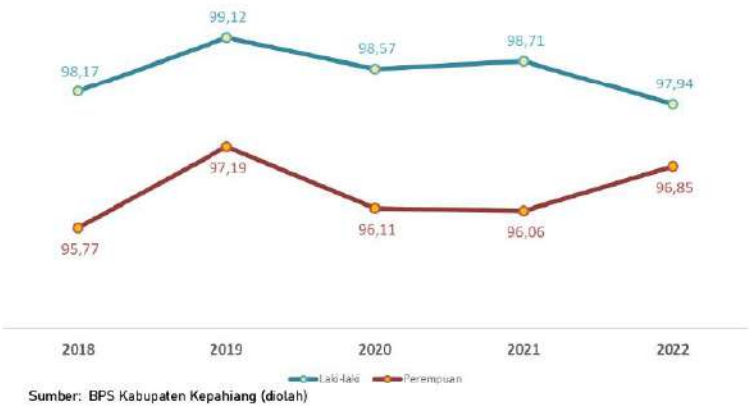
A. Angka Melek Huruf

Persentase penduduk Kabupaten Kepahiang yang berusia di atas 15 tahun dengan kemampuan baca-tulis huruf latin secara total berkembang fluktuatif. Meskipun begitu, sebagian besar penduduk mempunyai kemampuan baca tulis tersebut di atas 90% bahkan mencapai 100% pada beberapa kategori usia. Kemampuan baca-tulis latin kurang dari 95% umumnya terdapat pada penduduk dengan kategori 50 tahun ke atas.



Jika melihat dari jenis kelamin penduduknya, data menunjukkan bahwa penduduk perempuan umumnya mempunyai kemampuan baca tulis huruf latin lebih rendah dari penduduk laki-laki dengan rata-rata sebesar 96,4% perempuan mempunyai kemampuan baca-tulis huruf latin selama rentang waktu 2018-2022. Sementara untuk laki-laki rata-ratanya mencapai sebesar 98,5% selama rentang waktu tersebut.

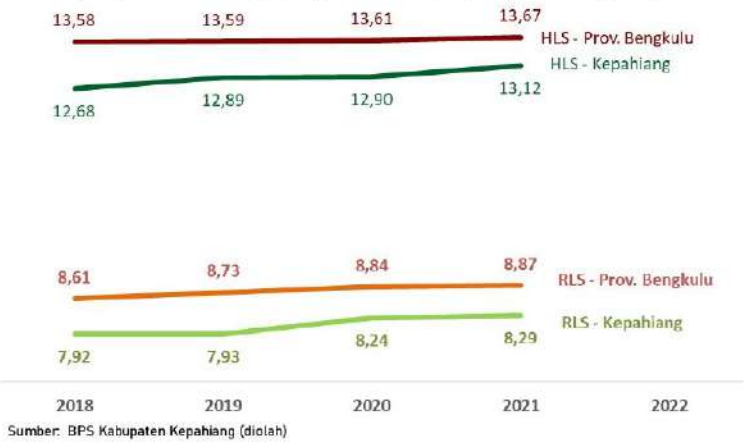
Gambar 2.21 Kemampuan Baca Tulis Penduduk menurut Jenis Kelamin, 2018-2022 (%)



B. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

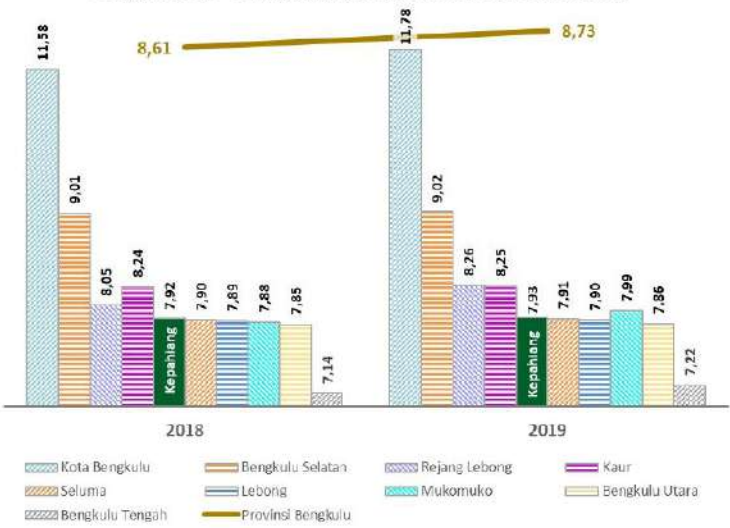
Sementara itu, dari sisi lama sekolah, Rata-rata jumlah masa sekolah (dalam tahun) yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Kepahiang menunjukkan perkembangan dengan tren yang positif, dari rata-rata lama sekolah 7,92 tahun pada 2018 menjadi sekitar 8,29 tahun pada 2022. Total rata-rata selama periode lima tahun sebesar 8,13 tahun lama sekolah.

Gambar 2.22 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Kepahiang dan Provinsi Bengkulu, 2018-2021 (tahun)



Namun begitu, capaian ini masih di bawah rata-rata Provinsi Bengkulu, yang total rata-ratanya mencapai 8,78 tahun. Kepahiang berada dalam urutan kelima dalam rata-rata lama sekolah di antara kabupaten/kota di Prov. Bengkulu pada 2018. Pada 2019, posisi ini digantikan oleh Kabupaten Mukomuko yang menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya pada urutan kedelapan.

Gambar 2.23 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kab./Kota di Prov. Bengkulu, 2018 – 2019 (tahun) (data merupakan data termuktahir)



Jika dilihat lebih jauh, angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Kepahiang lebih rendah dibanding dengan kabupaten Rejang Lebong yang merupakan kabupaten/kota induk pada saat pemekaran dan lebih tinggi dibanding Kab. Lebong yang sama-sama merupakan daerah pemekaran baru Kab. Rejang Lebong.

Gambar 2.24 Perkembangan RLS di Kabupaten Kepahiang, Rejang Lebong, dan Lebong, 2018–2019 (tahun)



Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang (diolah) (data merupakan data termuktahir)

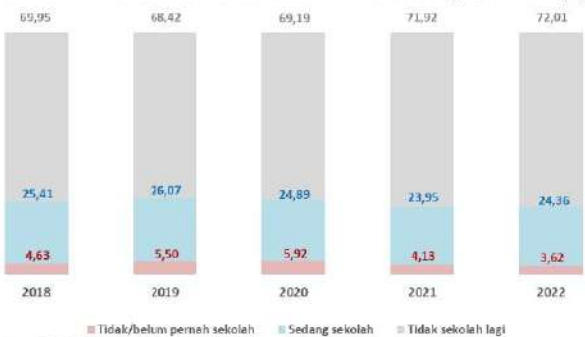
2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

A. Pendidikan

Data tentang pengelompokan usia penduduk dalam kaitan dengan pendidikan melalui sekolah di Kabupaten Kepahiang menunjukkan bahwa pada penduduk usia 5 tahun ke atas, sebagian besar sudah tidak lagi bersekolah (68-72%). Sementara, sekitar 25% lainnya masih bersekolah. Sisanya, sekitar rata-rata 5% di antaranya tercatat masih belum sekolah.

Gambar 2.25 Persentase Penduduk menurut Pendidikan, 2018 – 2022 (%)



A.1. Angka Partisipasi Sekolah

Lebih lanjut, Angka Partisipasi Sekolah (APS) digunakan untuk menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tanpa membedakan jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia yang sesuai (dalam persen). Makin tinggi APS berarti makin banyak penduduk usia sekolah yang bersekolah di Kabupaten Kepahiang.

Gambar 2.26 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12 Tahun dan 13-15 Tahun, 2018 – 2022 (%)



Data APS Kabupaten Kepahiang selama 2018 – 2022 menunjukkan bahwa, secara umum, sebagian besar (rata-rata 88,9%) penduduk pada usia antara 7-18 tahun masih bersekolah selama rentang waktu tersebut dalam korelasi

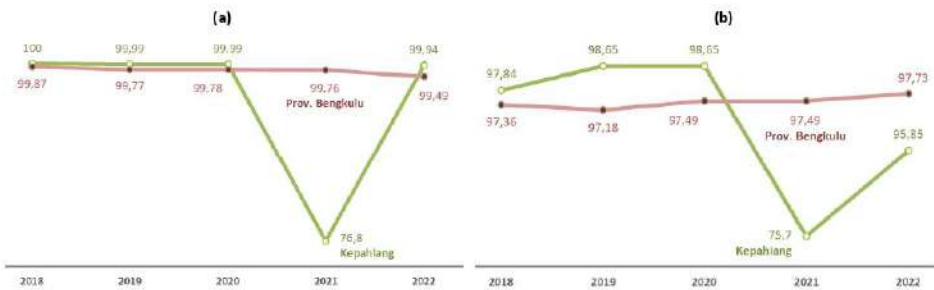
yang cenderung negatif. Semakin tinggi usia penduduk (pada usia sekolah), semakin rendah tingkat partisipasi penduduknya untuk bersekolah pada jenjang yang sesuai tersebut. APS untuk penduduk usia 7-12 tahun berada pada urutan tertinggi dibanding usia lainnya, dengan rata-rata sebesar 95,34%. Sebenarnya angka partisipasi pada usia ini cenderung tinggi selama ini, mendekati 100%. Namun, terdapat koreksi yang signifikan pada tahun 2021, dimana angka partisipasi turun menjadi sekitar 76,8%, yang mempengaruhi tingkat partisipasi secara keseluruhan. Koreksi ini dimungkinkan karena adanya pembatasan sosial selama terjadinya pandemi Covid-19, di mana penduduk harus tetap berada di rumah dan tidak bisa melakukan kegiatan sebagaimana biasanya. Pada 2022, kondisi ini berangsur pulih, yang ditunjukkan dengan peningkatan APS Usia 7-12 tahun menjadi sekitar 99,94%.

Kondisi yang relatif sama ditunjukkan pada APS untuk usia 13-15. Meskipun, secara umum, rata-rata partisipasi pada usia ini cenderung lebih rendah dibanding partisipasi pada usia 7-12 tahun, namun masih termasuk cukup tinggi dengan rata-rata sebesar 98% (perkembangan sebelum pandemi). Sebagaimana fenomena perkembangan APS pada usia 7-12, APS 13-15 juga mengalami kejadian serupa pada 2021, yang mengoreksi tren positif pencapaian angka selama ini. Rata-rata APS selama rentang waktu 5 tahun tersebut sebesar 93,34%, dimana pada 2021 terjadi penurunan APS hingga sebesar 76,2%.

A.2. Angka Partisipasi Sekolah Perbandingan dengan Provinsi Bengkulu

Jika membandingkan dengan rata-rata partisipasi sekolah di tingkat Provinsi Bengkulu, akan terlihat bahwa rata-rata APS Kabupaten Kepahiang cenderung lebih rendah selama 2018-2022. Namun jika mengamati lebih mendalam, khususnya pada APS usia 7-12 dan 13-15 tahun, terlihat bahwa sebenarnya capaian APS Kabupaten Kepahiang cenderung lebih tinggi jika tidak memperhitungkan faktor koreksi akibat pandemi pada 2021.

Gambar 2.27 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-12 Tahun (a) dan 13-15 Tahun (b) Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Kepahiang, 2018 – 2022 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang (diolah)

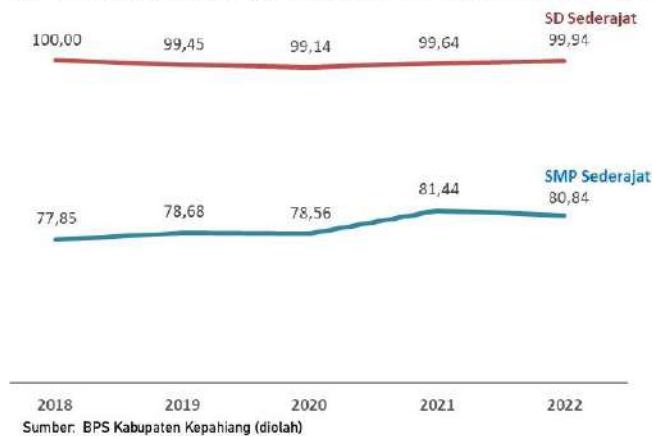
A.3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui cakupan layanan melalui perbandingan antara jumlah siswa usia sekolah tertentu yang sedang berada dalam jenjang pendidikan SD dan SMP sederajatnya dengan penduduk usia yang sesuai. Data ini menunjukkan ketepatan usia dari siswa yang berada di bangku sekolah. Makin tinggi APM

berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu.

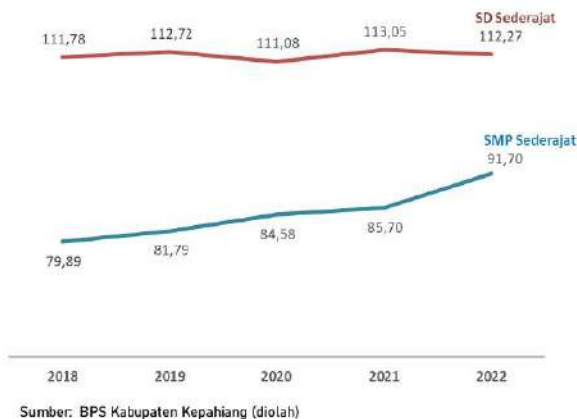
Dalam konteks Kabupaten Kepahiang Tahun 2018-2022, data APM memperlihatkan gambaran yang berbeda-beda pada setiap kategori. Secara umum, tren perkembangan APM cenderung fluktuatif dan berkorelasi negatif, dalam arti semakin tinggi jenjang pendidikan, APM-nya cenderung lebih rendah.

Gambar 2.28 Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD dan SMP, 2018 – 2022 (%)



Pada jenjang SD dan sederajatnya, perkembangan data tingkat partisipasi dan kesesuaian usia siswa mencapai lebih dari 99% selama rentang waktu tersebut. Secara lebih detail, Bahkan, pada 2018, APM SD dan sederajatnya dapat mencapai 100%. Dalam perkembangannya, terlihat adanya penurunan mulai 2019 dan makin turun pada 2020 (pada saat pandemi) menjadi 99,14%. Meskipun begitu, kondisi ini dapat kembali mulai 2021 dengan adanya peningkatan sebesar 0,5%; dan pada akhir periode (2022) tercatat APM komponen ini sebesar 99,94%.

Gambar 2.29 Perkembangan APK Jenjang SD dan SMP, 2018 – 2022 (%)

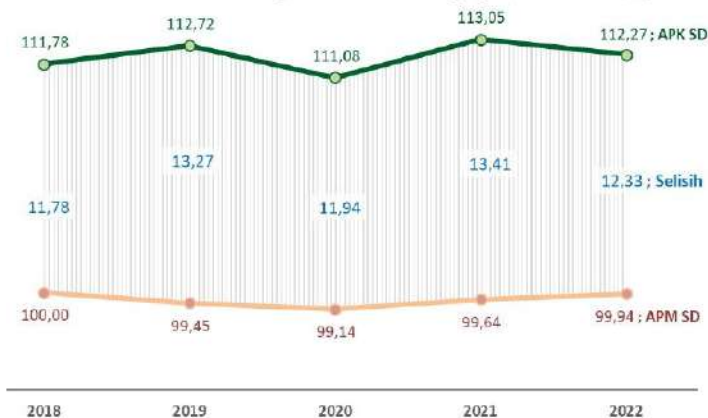


Tren yang berbeda ditunjukkan pada capaian APM pada jenjang SMP dan sederajatnya, dimana meskipun secara umum selama jangka 5 tahun tersebut terdapat kenaikan sekitar 3%, namun data perkembangan per tahun sempat menunjukkan adanya flutuasi, khususnya, pada 2020 dan 2022. Rata-rata capaian dan kesesuaian usia penduduk yang bersekolah pada jenjang SMP dan sederajatnya adalah sebesar 79,5% selama 2018-2022.

A.4. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) perbandingan antara banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk usia sekolah. APK dapat digunakan untuk mengetahui cakupan layanan, termasuk tingkat inefisiensi layanan dengan mengukur banyaknya siswa yang bersekolah pada suatu jenjang tertentu-tanpa memandang usia, termasuk penduduk yang berada di luar usia sekolah tersebut.

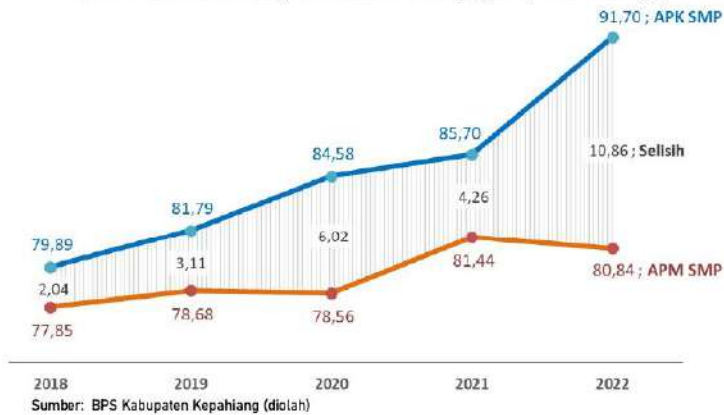
Gambar 2.30 Perkembangan APM dan APK Jenjang SD, 2018 – 2022 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang (diolah)

Data APK Kabupaten Kepahiang 2018-2022, khususnya pada jenjang SD dan sederajatnya, menunjukkan rata-rata perkembangan sebesar 112,18% per tahunnya. Jika dibandingkan dengan APM pada jenjang tersebut, maka terlihat adanya perbedaan besaran APK dan APM setiap tahunnya, rata-rata sebesar 12,5% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya penduduk yang usianya tidak sesuai dengan yang seharusnya (baik berusia di bawah 7 tahun maupun lebih dari 12 tahun).

Gambar 2. 31 Perkembangan APM dan APK Jenjang SMP, 2018 – 2022 (%)



Sementara itu, pada jenjang SMP dan sederajatnya, rata-rata APK dari 2018-2022 adalah sebesar sekitar 84,73%. Setiap tahunnya, besaran APK berkembang dengan tren yang positif, dari sebesar 79,9% pada 2019 hingga menjadi sebesar 91,7% pada 2022 atau meningkat sebesar 11,8% selama jangka waktu lima tahun tersebut.

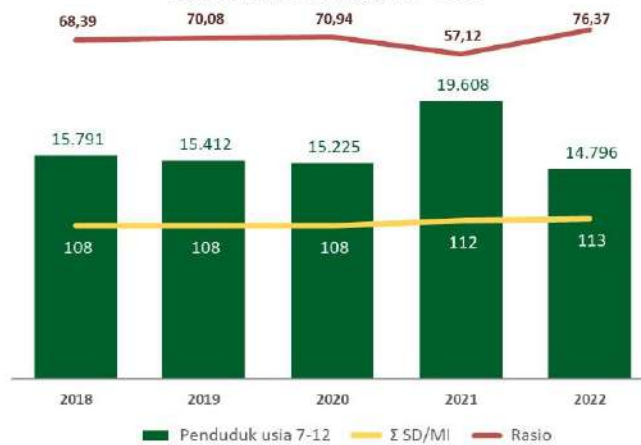
Jika membandingkan dengan capaian APM, terdapat selisih antara 2%-11% setiap tahunnya. Maknanya terdapat rata-rata 5,3% siswa yang bersekolah di jenjang SMP dan sederajatnya berusia lebih atau kurang dari usia 13-15 tahun (tidak sesuai dengan usia yang seharusnya).

A.5. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Jumlah gedung SD/MI di Kabupaten Kepahiang selama 2018-2022 bertambah seiring waktu, dari sebanyak 108 unit gedung sekolah pada 2018 bertambah hingga sebanyak 113 sekolah pada 2022. Sementara itu, data jumlah penduduk usia 7-12 tahun atau usia sekolah dasar, yang mempunyai kaitan dengan ketersediaan sekolah pada jenjang ini, menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Rasio ketersediaan SD/MI dihitung per 10 ribu penduduk pada kategori usia tersebut. Semakin tinggi rasio menunjukkan tingkat pemenuhan yang makin baik.

Pada awal periode (2018), rasio jumlah SD/MI terhadap jumlah penduduk usia 7-12 adalah sebesar 68,4%. Seiring waktu, rasio ini semakin membaik, yang dipengaruhi oleh penurunan jumlah penduduk sesuai kategori hingga 2020. Pada 2021, meskipun jumlah gedung sekolah bertambah, namun jumlah penduduk pada usia tersebut juga bertambah dengan signifikan, sehingga rasio ketersediaannya menurun sekitar 57,1%. Pada akhir periode, kondisi cakupan ini membaik seiring naiknya rasio ketersediaan menjadi 76,4%, yang dipengaruhi adanya penambahan baru gedung SD/MI dan turunya jumlah penduduk pada usia 7-12 tahun.

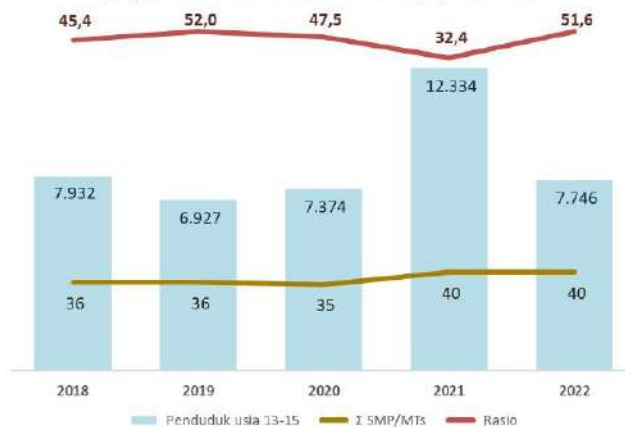
Gambar 2.32 Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun (jiwa), SD/MI (unit), dan Rasio Ketersediaan Sekolah (%), 2018 - 2022



Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang (diolah)

Sementara itu, untuk rasio ketersediaan SMP/MTs di Kabupaten Kepahiang, data selama 2018-2022 menunjukkan perkembangan yang cenderung fluktuatif. Hal ini menyebabkan rasio ketersediannya juga berfluktuasi. Dari sisi ketersediaan sekolah, dari jumlah sebanyak 36 pada 2018 dan 2019 berkurang menjadi 35 unit sekolah gedung pada 2020. Meskipun pada 2 tahun berikutnya terdapat penambahan sebanyak 5 unit sekolah baru pada 2021 dan 2022. Namun, jika memperhatikan perkembangan jumlah penduduk usia 13-15 tahun pada rentang waktu tersebut, maka fluktuasi rasio ketersediannya jenjang sekolah menengah pertama ini menjadi beralasan. Terjadi penurunan jumlah penduduk pada kategori usia tersebut pada 2019, dari yang semula sebanyak kurang lebih 7.932 orang pada 2018 menjadi 6.927 orang. Hal ini mendorong kenaikan rasio menjadi lebih baik, dengan peningkatan sekitar 7,6% menjadi sekitar 52% pada 2019.

Gambar 2.33 Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun (jiwa), SMP/MTs (unit), dan Rasio Ketersediaan Sekolah (%), 2018 - 2022

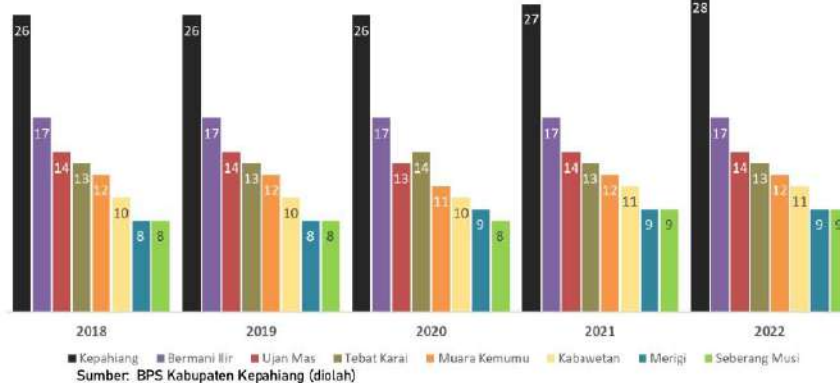


Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang (diolah)

Dua tahun berikutnya, terdapat kenaikan jumlah penduduk usia 13-15 tahun menjadi 7.374 orang pada 2020 dan bertambah lagi menjadi 12.334 orang pada 2021. Kenaikan jumlah penduduk yang signifikan ini mempengaruhi penurunan angka rasio ketersediaan SMP/MI menjadi 32,4% pada 2021. Pada akhir periode (2022) terjadi penurunan jumlah penduduk pada kategori usia tersebut hingga 7.746 orang, yang pada gilirannya mempengaruhi kenaikan rasio ketersediaan SMP/MI menjadi 51,6%.

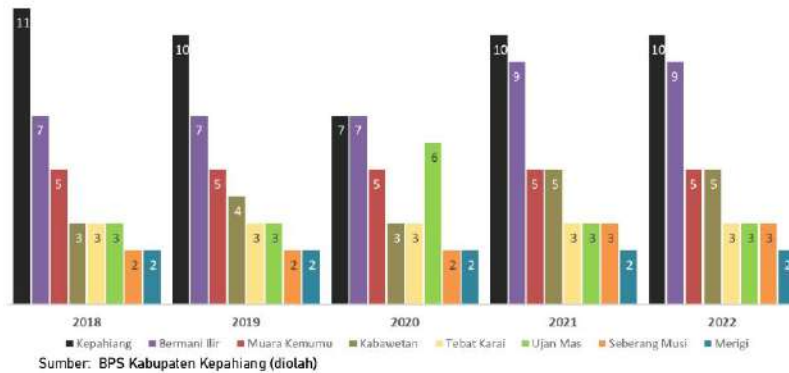
Lebih lanjut, dari data sebaran sekolah per kecamatan terlihat bahwa Kec. Kepahiang sebagai ibu kota kabupaten mempunyai jumlah sekolah yang terbanyak (baik SD/MI maupun SMP/MTs) di antara kecamatan-kecamatan lain. Jumlah SD/MI berkembang dari 26 unit pada 2018 menjadi 28 unit sekolah pada 2022. Kecamatan dengan keberadaan jumlah sekolah terbanyak berikutnya adalah, berturut-turut, Kec. Bermani Ilir dengan 17 unit SD/MI, dan Kecamatan Ujan Mas dengan 14 unit sekolah. Sementara Merigi dan Seberang Musi merupakan kecamatan dengan ketersediaan SD/MI paling sedikit, antara 8-9 unit sekolah, yang bertambah seiring waktu selama 2018-2022 tersebut.

Gambar 2.34 Sebaran Jumlah SD/MI menurut Kecamatan, 2018 – 2022



Pada jenjang SMP/MI, perkembangan sebaran sekolah berdasarkan kecamatan cenderung bervariasi dari tahun ke tahun selama 2018-2022. Meskipun begitu, Kec. Kepahiang sebagai ibu kota dan Kec. Bermani Ilir masih menjadi kecamatan dengan ketersediaan SMP/MTs terbanyak pertama dan kedua di Kabupaten Kepahiang. Variasi masing-masing kecamatan agaknya dipengaruhi adanya penutupan dan pembukaan sekolah baru yang terjadi di masing-masing wilayah tersebut. Di Kec. Kepahiang, misalnya, jumlah SMP/MTs sempat berkurang dari 11 unit pada 2018 menjadi 7 unit sekolah pada 2020. Meskipun pada 2021 dan 2022 jumlah sekolah ini bertambah menjadi 10 unit pada dua tahun tersebut. Di sisi lain, Kec. Bermani jumlah sekolah pada jenjang ini cenderung bertambah, dari 7 unit pada 2018 menjadi 9 unit pada 2022.

Gambar 2.35 Sebaran Jumlah SMP/MTs menurut Kecamatan, 2018 – 2022



Pembukaan dan penutupan sekolah baru, misalnya, terjadi juga di Kec. Ujan Mas. Pada 2018-2019 terdapat sebanyak 3 unit SMP/MTs, yang kemudian bertambah menjadi 6 unit pada 2020. Namun memasuki 2021 hingga akhir 2022, tercatat hanya terdapat 3 unit sekolah di wilayah kecamatan ini.

A.6. Rasio guru-murid SD/MI

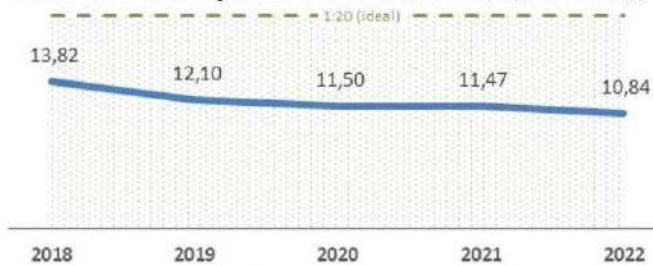
Data perkembangan jumlah guru, murid, dan sekolah pada jenjang SD/MI selama 2018-2022 menunjukkan kondisi yang relatif berlawanan. Sementara jumlah sekolah dan guru cenderung bertambah seiring waktu, di sisi lain, jumlah murid sekolah pada jenjang tersebut cenderung menurun.

Gambar 2.36 Perkembangan jumlah sekolah (unit) Guru (orang), dan Murid SD/MI (orang), 2018 – 2022



Perkembangan jumlah murid SD/MI selama waktu tersebut memperlihatkan bahwa dari sebanyak 15.791 orang murid pada 2018 telah terjadi penurunan total sebanyak lebih dari seribu orang murid hingga menjadi 14.787 orang murid pada 2022. Sebaliknya, jumlah guru pada jenjang ini cenderung terus bertambah selama waktu 5 tahun tersebut. Pada 2018, tercatat sebanyak 1.143 orang menjadi guru SD/MI di Kabupaten Kepahiang, yang terus bertambah hingga menjadi sebanyak 1.364 orang guru pada akhir 2022, atau total bertambah sekitar 221 orang guru.

Gambar 2.37 Perkembangan Rasio Jumlah Guru-Murid SD/MI, 2018 – 2022 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang (diolah)

Kondisi ini mengakibatkan perkembangan rasio guru-murid cenderung membaik seiring waktu. Pada 2018, rasio guru – murid untuk jenjang SD/MI adalah 1:14 orang. Hal ini berarti bahwa dari 1 orang guru terdapat rata-rata sekitar 14 orang murid. Dalam perkembangannya, rasio ini semakin menurun hingga sekitar 1:11 orang murid pada 2022, di mana 1 orang menangani 11 murid. Secara umum, rasio ini dapat dikatakan sangat baik karena dapat melebihi ukuran ideal sebagaimana dinyatakan dalam PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, di mana standar ideal rasio murid-guru adalah 20:1 untuk SD.

A.7. Rasio guru-murid SMP/MTs

Pada jenjang SMP/MTs, data perkembangan jumlah murid selama 2018-2022 cenderung menunjukkan fluktuasi. Selama rentang waktu tersebut, sempat terjadi penurunan jumlah murid, khususnya, pada 2019, yang turun menjadi sebanyak 15.410 orang murid dari sebanyak 15.791 orang murid pada 2018. Pada perkembangan selanjutnya, jumlah murid pada jenjang ini mengalami kenaikan hingga tahun 2021 tercatat jumlah murid SMP/MTs sebanyak kurang lebih 15.059 orang murid. Berikutnya, pada akhir periode (2022) jumlah murid berkurang menjadi sekitar 14.787 orang murid.

Gambar 2.38 Perkembangan jumlah sekolah (unit) Guru (orang), dan Murid SMP/MTs (orang), 2018 – 2022

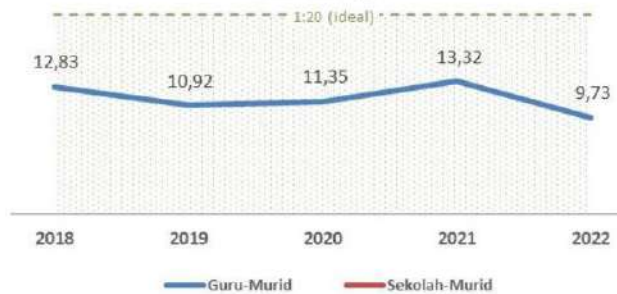


Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang (diolah)

Di sisi lain, seiring perkembangan jumlah sekolah yang secara umum menunjukkan penambahan dari 36 unit menjadi 40 unit sekolah pada akhir 2022 (sempat berkurang pada 2020), jumlah guru SMP/MTs selama rentang waktu tersebut menunjukkan adanya penambahan yang konsisten, dari

sebanyak 605 orang guru pada 2018 menjadi total sekitar 763 orang guru pada 2022, atau total bertambah sebanyak 158 orang guru.

Gambar 2.39 Perkembangan Rasio Jumlah Guru – Mu'rid SMP/MTs, 2018 – 2022 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang (diolah)

Kondisi ini, pada gilirannya, memberikan pengaruh pada perkembangan rasio guru-murid SMP/MTs yang juga cenderung fluktuatif. Pada 2018, rasio guru-murid pada jenjang ini sebesar 1:13 yang berarti 1 orang guru menghadapi 13 orang murid. Rasio ini membaik dimana 1 orang guru menangani kurang dari 11 orang murid pada 2019. Pada 2 tahun berikutnya, kondisi ini meningkat hingga mencapai 1:13,3, melebihi kondisi 2018. Pada akhir periode terjadi peningkatan dimana rasio guru mengajar menjadi 1:10 orang murid. Meskipun terjadi fluktuasi perkembangan rasio selama rentang waktu tersebut, namun sebagaimana pada jenjang SD/MI, secara umum rasio guru-murid SMP/MTs di Kabupaten Kepahiang selama 2018-2022 lebih dari standar ideal yang ditetapkan dalam PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru di atas.



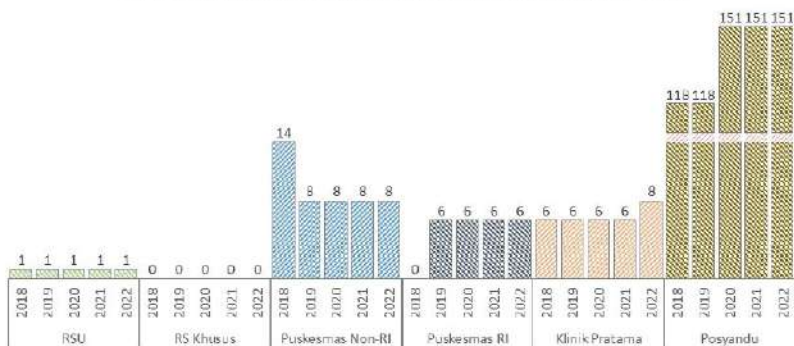


B. Kesehatan

B.1. Ketersediaan fasilitas kesehatan

Terkait bidang kesehatan, perkembangan data terkait aspek layanan menunjukkan perkembangan jumlah fasilitas kesehatan (faskes) baik jumlah maupun tingkat layanan selama 2018-2022. Penambahan jumlah faskes terlihat pada bertambahnya jumlah klinik pratama pada 2022, yang bertambah menjadi 8 fasilitas dari sebanyak 6 fasilitas selama 4 tahun sebelumnya.

Gambar 2.40 Perkembangan Jumlah Fasilitas Kesehatan, 2018 – 2022

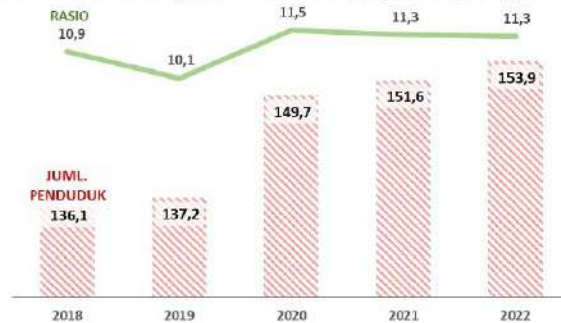


Sumber: BPS Prov. Bengkulu dan BPS Kabupaten Kepahiang (diolah)

Penambahan yang signifikan terdapat pada fasilitas berbasis masyarakat, seperti Posyandu, yang terdapat partisipasi sebanyak 33 fasilitas mulai 2020 menjadi 151 fasilitas. Sementara itu pada dari aspek kualitas layanan, data dan informasi perkembangan juga menunjukkan adanya peningkatan. Pada 2020, misalnya, status RSUD Kepahiang naik menjadi rumah sakit rujukan regional.¹³ Selain itu, status sebagian puskesmas mengalami peningkatan di mana dari sebanyak 14 Puskesmas yang ada pada 2018, sebanyak 6 di antaranya meningkat menjadi Puskesmas Rawat Inap (RI) sejak 2019.

¹³ BPS Kabupaten Kepahiang (2021), *PDRB Kabupaten Kepahiang dalam Infografis 2021*.

Gambar 2.41 Perkembangan Rasio Faskes di Kabupaten Kepahiang, 2018 – 2022

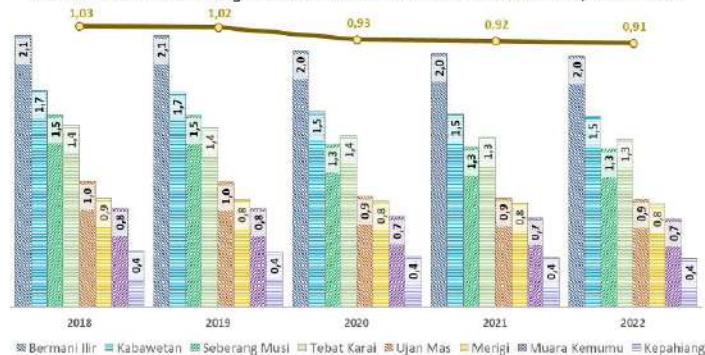


Sumber: BPS Prov. Bengkulu dan BPS Kabupaten Kepahiang (diolah)

Dengan membandingkan dimensi *supply* (ketersediaan) seluruh faskes (tanpa memperhatikan jenis dan tingkatan faskes) dengan jumlah penduduk selama rentang waktu tersebut, maka diperoleh gambaran bahwa rasio faskes per sepuluh ribu penduduk selama 2018-2022 cenderung fluktuatif. Rasio ketersediaan terendah terjadi pada 2019 dengan nilai 10,1 yang turun dari kondisi sebelumnya dengan rasio sebesar 10,9. Jika diamati, kondisi penurunan ini terjadi disebabkan karena adanya penambahan jumlah penduduk pada 2019, yang tidak diikuti dengan penambahan jumlah faskes pada tahun tersebut. Setahun berikutnya rasio ketersediaan faskes meningkat hingga sebesar 11,5 pada 2020, peningkatan ini agaknya dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah faskes berbasis masyarakat berupa Posyandu, dari sebanyak 118 unit pada 2019 menjadi 151 unit pada 2020.

Lebih lanjut, rasio ketersediaan Puskesmas (tanpa memperhatikan tingkat faskes) terhadap jumlah penduduk di masing-masing kecamatan menunjukkan bahwa Bermani Ilir merupakan kecamatan urutan pertama dalam hal rasio ketersediaan puskesmas per 10.000 penduduknya, dengan rata-rata rasio sebesar 2,06 selama 2018-2022.

Gambar 2.42 Perkembangan Rasio Puskesmas menurut Kecamatan, 2018 – 2022



Sumber: BPS Prov. Bengkulu dan BPS Kabupaten Kepahiang (diolah)

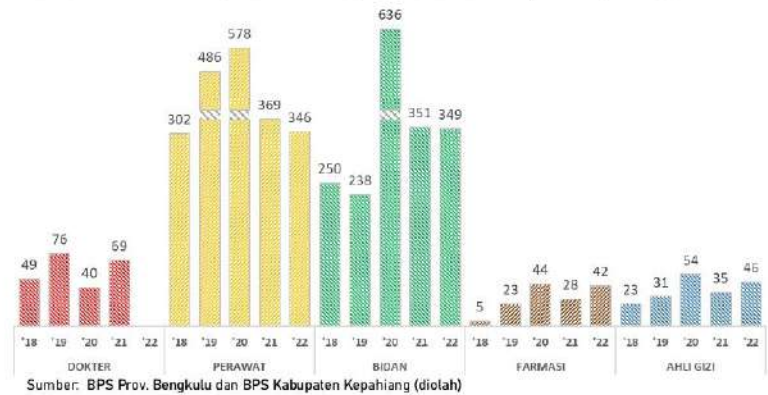
Kabawetan menjadi kecamatan dengan rasio tertinggi kedua dengan rata-rata rasio ketersediaan puskesmas sebesar 1,6 selama lima tahun tersebut. Berikutnya, Kec. Kepahiang yang merupakan ibu kota kabupaten justru menjadi wilayah dengan rasio ketersediaan jumlah puskesmas terendah dibanding kecamatan lainnya. Selama 5 tahun, rasio jumlah puskesmas di Kec. Kepahiang

relatif tetap, yaitu sebesar 0,4 per tahunnya. Sementara itu, di tingkat kabupaten secara umum, tren perkembangan rasio puskesmas per 10 ribu penduduk di Kabupaten Kepahiang secara total menunjukkan penurunan selama 2018-2022.

B.2. Ketersediaan tenaga kesehatan

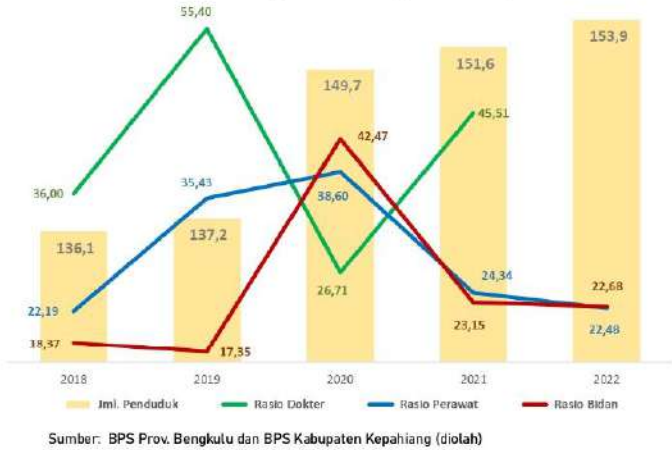
Perkembangan ketersediaan tenaga kesehatan (nakes), yang meliputi jumlah dokter (secara umum), perawat, bidan, tenaga farmasi, dan ahli gizi menunjukkan tren yang fluktuatif selama 2018-2022. Ketersediaan jumlah nakes tertinggi (kecuali dokter) terjadi pada 2020. Tren ketersediaan tenaga kesehatan pada rentang waktu tersebut, pada gilirannya, mempengaruhi tren fluktuatif perkembangan rasio nakes terhadap jumlah penduduk.

Gambar 2.43 Perkembangan Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kepahiang, 2018 – 2022



Rasio dokter per 100ribu jumlah penduduk menunjukkan angka tertinggi pada 2019, yang mencapai rasio 55,4. Hal ini berarti bagi 100 ribu penduduk terdapat sekitar 55 orang dokter. Rasio terendah ketersediaan dokter terjadi pada 2019, dimana untuk 100ribu penduduk dapat dilayani oleh sekitar 27 dokter.

Gambar 2.44 Perkembangan Rasio Tenaga Kesehatan, 2018 – 2022

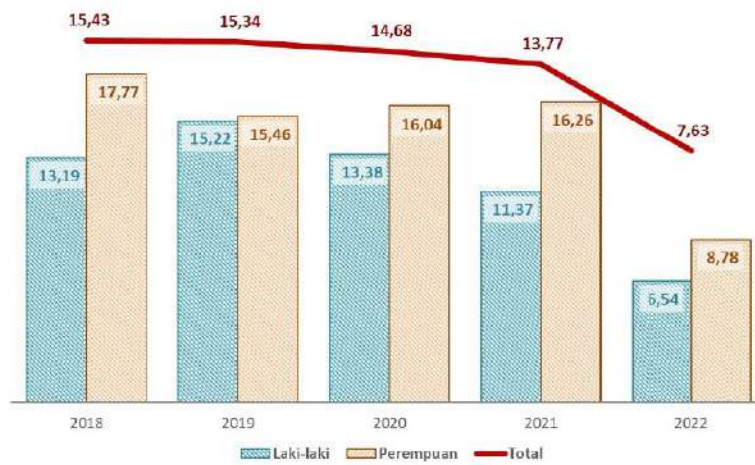


Rasio perawat per 10ribu penduduk menunjukkan perkembangan sebagaimana tren ketersediaan perawat pada data sebelumnya. Rasio tertinggi perawat terjadi pada 2020, dimana untuk sepuluh ribu penduduk, terdapat sekitar 39 orang perawat. Setelah 2020, rasio ketersediaan perawat menurun hingga angka 22,5 pada 2022, yang mendekati kondisi pada 2018 (22,19). Pola serupa ditunjukkan oleh data perkembangan rasio bidan, yang menggambarkan perbandingan jumlah bidan per sepuluh ribu penduduk, dengan capaian tertinggi pada 2020. Pada tahun tersebut, terhadap 10ribu penduduk terdapat sekitar 42 orang bidan di Kabupaten Kepahiang. Sebagaimana rasio perawat, rasio ketersediaan bidan juga menurun setelah 2020 – 2022 hingga mendekati angka rasio pada awal periode.

B.3. Angka kesakitan dan penggunaan jaminan kesehatan

Gambaran tentang perkembangan angka kesakitan penduduk di Kabupaten Kepahiang selama 2018-2022 menunjukkan kecenderungan yang positif, di mana selama rentang waktu tersebut, terjadi penurunan tingkat keluhan kesehatan masyarakat secara signifikan, dari sekitar 15,4% pada 2018 berkurang lebih dari setengahnya pada akhir 2022 menjadi sekitar 7,6%.

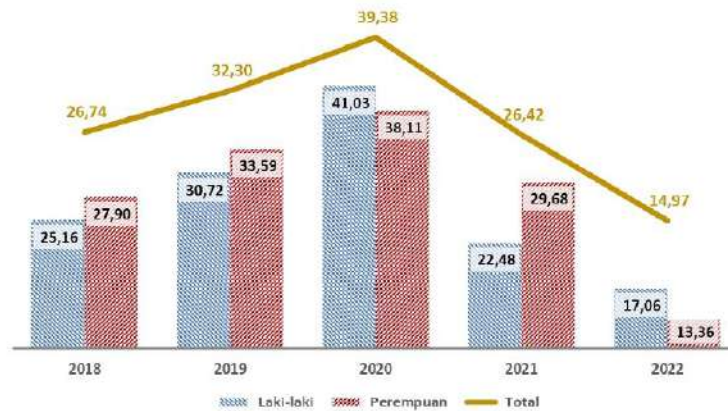
Gambar 2.45 Angka Kesakitan Penduduk menurut Jenis Kelamin, 2018 – 2022



Sumber: BPS Prov. Bengkulu dan BPS Kabupaten Kepahiang (diolah)

Di sisi lain, meskipun pada 2020 terdapat kenaikan signifikan dalam penggunaan jaminan kesehatan untuk berobat, namun secara umum, perkembangan persentase penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan selama 2018-2022 cenderung menurun. Tingginya persentase penggunaan jaminan kesehatan pada 2020 (hampir 40%) dimungkinkan terjadi karena alasan pandemi. Setelah tahun 2020, persentase ini terus menurun, hingga pada 2022 tercatat sebesar kurang lebih 15%.

Gambar 2.46 Persentase Penduduk dengan Penggunaan Jaminan Kesehatan untuk Berobat menurut Jenis Kelamin, 2018 – 2022



Sumber: BPS Prov. Bengkulu dan BPS Kabupaten Kepahiang (diolah)

B.4. Kehamilan dan persalinan

Terkait layanan kesehatan, khususnya terkait persalinan ibu hamil, perkembangan data perempuan di Kab kepahiang usia 15-49 tahun yang pernah melahirkan selama 2018-2022 menunjukkan tren yang cukup menggembirakan. Terdapat peningkatan yang signifikan jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar pelayanan kesehatan di faskes dalam rentang waktu lima tahun tersebut. Pada 2018, persentase ibu melahirkan di faskes tercatat sekitar 62% persalinan, yang meningkat hingga lebih dari 25%, menjadi sekitar 90% pada 2022.

Gambar 2.47 Persentase Persalinan di Faskes dan dengan Pertolongan Nakes, 2018 – 2022



Sumber: BPS Prov. Bengkulu dan BPS Kabupaten Kepahiang (diolah)

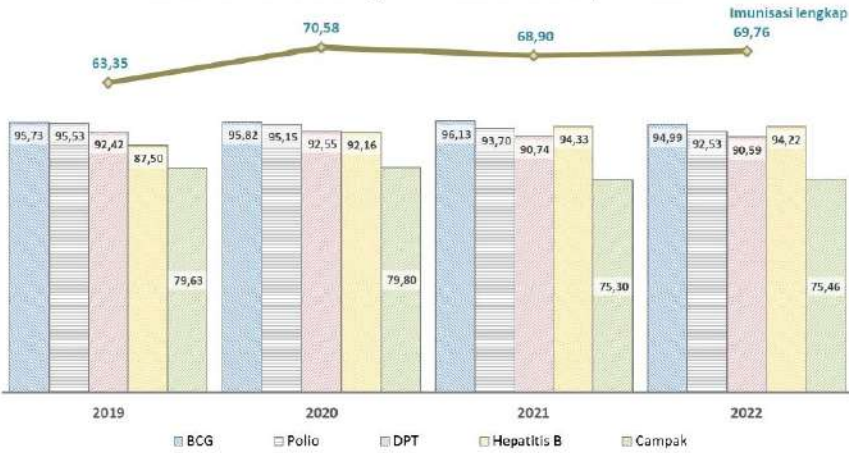
Lebih dari pada itu, rata-rata persalinan dilakukan dengan pertolongan nakes. Selama 2018-2022 tingkat persalinan ini cukup tinggi (di atas 95%) bahkan mencapai 100% pada 2020. Meskipun sempat terjadi penurunan pada 2021, namun kondisi ini kembali membaik pada 2022 (sekitar 98,2%). Penurunan pada 2020 agaknya dipengaruhi adanya kebijakan pembatasan sosial dan penerapan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19.

B.5. Kesehatan bayi dan KB

Penggunaan layanan imunisasi pada bayi di bawah lima tahun (balita), umur 0-59 bulan, menunjukkan tren positif selama 2018-2022. Namun begitu, secara umum, cakupan imunisasi hanya mencapai rata-rata 68,2% selama lima tahun. Disamping itu, sempat terjadi pelambatan peningkatan cakupan imunisasi pada 2021, di mana terjadi penurunan menjadi sekitar 68,9%. Seiring dengan meredanya pandemi, terjadi peningkatan jumlah balita yang memperoleh imunisasi menjadi sekitar 69,8% pada 2022.

Cakupan layanan imunisasi yang diperoleh balita, meliputi Pemberian BCG yang mencapai sekitar 95% setiap tahunnya sekaligus menempatkan pada posisi teratas dalam urutan layanan yang diperoleh balita. Sementara itu, Vaksin Polio menduduki posisi kedua sebagai imunisasi yang paling banyak diberikan kepada balita, dengan kisaran antara sekitar 93%-95% dalam lima tahun tersebut. Pada posisi terakhir, persentase balita yang memperoleh imunisasi Campak berada dalam kisaran antara 75-79,8%.

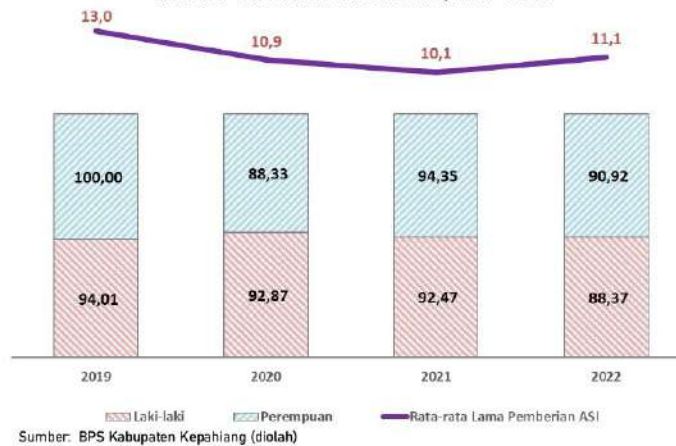
Gambar 2.48 Persentase Bayi menurut Jenis Imunisasi, 2019 - 2022



Sumber: BPS Kabupaten Kepahiang (diolah)

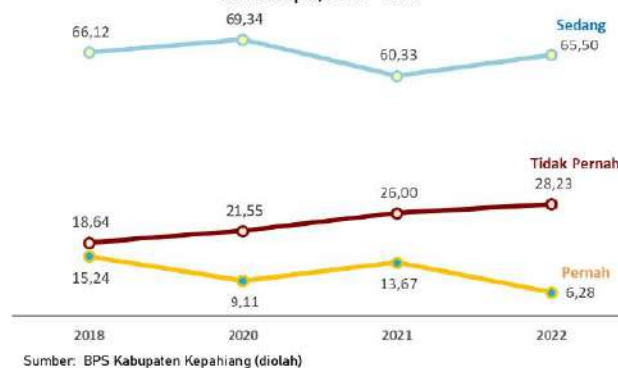
Upaya Pemerintah dalam kampanye tentang pentingnya pemberian ASI bagi bayi di bawah dua tahun (baduta), umur 0-23 bulan, menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, di mana lebih dari 90 persen rata-rata Baduta di Kabupaten Kepahiang memperoleh ASI dalam jangka waktu 2018-2022. Namun begitu, pencapaian ini perlu mendapatkan perhatian lebih karena perkembangan data justru menunjukkan tren yang cenderung menurun selama lima tahun tersebut.

Gambar 2.49 Persentase Bayi dengan Pemberian ASI menurut Jenis Kelamin dan Rata-rata Lama Pemberian ASI, 2019 – 2022



Selain itu, persentase pemberian ASI lebih tinggi pada Baduta perempuan (rata rata 93,4%) dibanding kepada laki-laki, yang rata-ratanya kurang lebih 91,2% selama periode waktu tersebut. Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah kondisi tentang rata-rata lama pemberian ASI, yang cenderung menunjukkan penurunan seiring waktu. Pada tahun 2019, rata-rata lama pemberian ASI adalah sekitar 13 bulan. Kondisi ini menurun hingga 2021 dimana rata-rata lama pemberian ASI kurang lebih 10 bulan. Di sisi lain, Pemerintah menganjurkan pemberian ASI eksklusif selama 24 bulan dalam berbagai program sejak 2019, khususnya untuk pencegahan *stunting*. Pada akhir 2022, terjadi kenaikan sekitar 1% dari tahun sebelumnya, dengan rata-rata sekitar 11,1 bulan lama pemberian ASI bagi baduta.

Gambar 2.50 Persentase Perempuan menurut Penggunaan Alat Kontrasepsi, 2018 – 2022



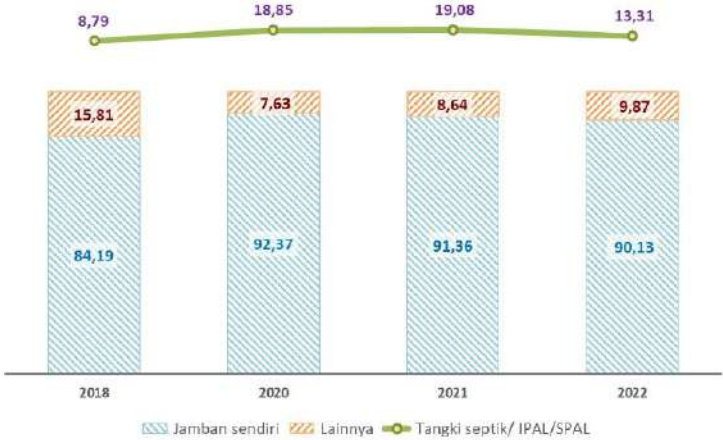
Sementara itu, dalam kaitan dengan layanan KB, perkembangan jumlah perempuan yang dengan penggunaan alat kontrasepsi cenderung stagnan bahkan menurun selama 2018-2022. Data tentang penggunaan alat kontrasepsi pada perempuan berumur 15-49 tahun dan pernah kawin hanya sekitar 65,3%. Sebaliknya, sekitar 23,6% di antaranya justru tidak pernah menggunakan sama sekali. Menariknya, perkembangan jumlah perempuan yang tidak pernah ini

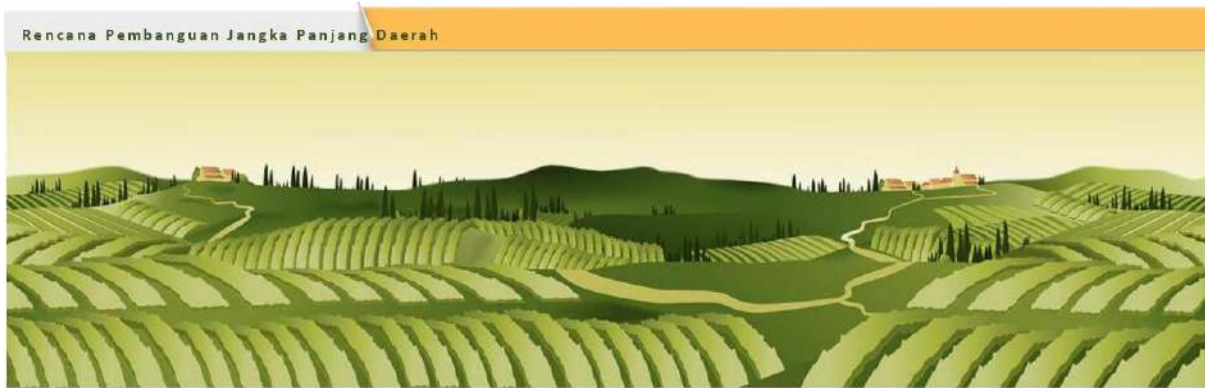
menunjukkan peningkatan dari sekitar 18,6% pada 2019, seiring waktu terus meningkat, hingga sebesar 28,2% pada 2022.

B.6. Kesehatan lingkungan

Pada indikator layanan kesehatan lingkungan, khususnya, terkait penggunaan fasilitas buang air besar (BAB) terlihat adanya pelambatan selama 2018-2022. Penggunaan jamban sendiri sebagai fasilitas BAB sempat mengalami kenaikan pada 2020 dengan persentase sekitar 92,4% dari kondisi pada 2019 yang mencapai sekitar 84,2%. Namun setelah 2020, perkembangannya justru menunjukkan penurunan, sehingga pada 2022 persentase penggunaan jamban sendiri sebesar 90,1%. Selain itu, penggunaan tangki septik/IPAL/SPAL dalam skala rumah tangga juga menunjukkan tren yang serupa. Meskipun terdapat kenaikan mulai 2018 dari 8,8% menjadi 19,1% pada 2021, namun terjadi pelambatan di tahun 2022, yang turun menjadi 13,3% rumah tangga dengan fasilitas tersebut.

Gambar 2.51 Persentase Rumah Tangga menurut Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar, 2018 – 2022





C. Pertanian

C.1. Tanaman Padi

Perkembangan indikator-indikator pertanian tanaman pangan, khususnya, padi di Kabupaten Kepahiang selama 2019-2022 secara umum menunjukkan penurunan dengan pola pergerakan yang serupa. Sejak 2018, luas panen tanaman padi menurun dari seluas 19,9 ribu ha menjadi 14,36 ribu ha pada 2021. Demikian halnya dengan total produksi yang bergerak dari sekitar 3,9 ribu ton produksi pada 2019 turun sekitar 800 ton pada 2021 menjadi sekitar 3,1 ton. Tahun 2021 agaknya menjadi titik balik perkembangan perkembangan pertanian tanaman padi. Setidaknya, hal itu ditunjukkan dengan adanya kenaikan indikator-indikator perkembangan pada 2022. Hingga akhir 2022, tercatat kenaikan produksi padi naik menjadi 3,6 ribu ton mengiringi terjadinya penambahan luas lahan panen sebesar kurang lebih 300 ha menjadi total 17,3 ribu ha pada akhir periode tersebut. Kondisi ini juga menggambarkan perkembangan tingkat produktivitas dengan pola yang serupa, di mana terjadi pelambatan pada 2019-2021, yang kemudian meningkat kembali pada akhir periode.

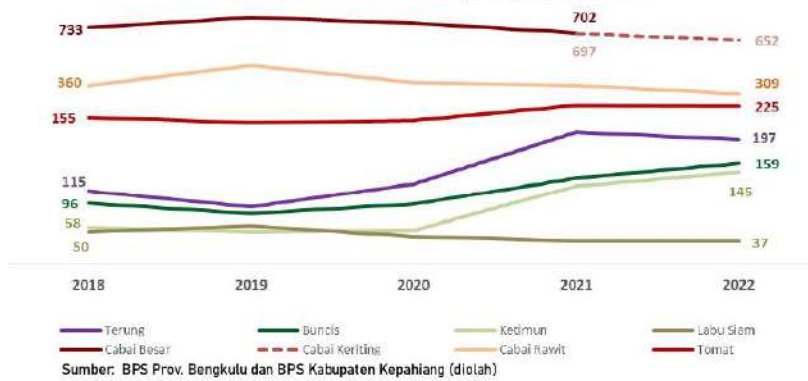
Gambar 2.52 Luas Panen (ribu ha), Produksi (ribu ton), dan Produktivitas Tanaman Padi, 2019 – 2022



C.2. Tanaman Sayuran

Pola perkembangan indikator pertanian tanaman sayuran di Kabupaten Kepahiang selama 2018-2022 cenderung bervariasi pada masing-masing komoditas. Perkembangan luas lahan panen, misalnya, menunjukkan variasi dan fluktuasi tingkat penggunaan lahan untuk masing-masing komoditas tanaman sayuran.

Gambar 2.53 Luas Panen Tanaman Sayuran (ha), 2018 – 2022



Cabai Besar merupakan komoditas dengan lahan panen terluas dengan rata-rata 749Ha selama 2018-2021. Meskipun pada 2019 sempat terjadi kenaikan dari kondisi pada 2018 (seluas 733Ha), namun perkembangannya cenderung menurun setelah itu hingga menjadi sekitar 702Ha pada 2021. Setelah 2021, komoditas ini bahkan tak lagi tercatat perkembangannya, yang kemungkinan digantikan dengan komoditas Cabai Keriting, yang muncul sejak 2021 tersebut.

Gambar 2.54 Perkembangan Produksi Sayuran (ribu kuintal)



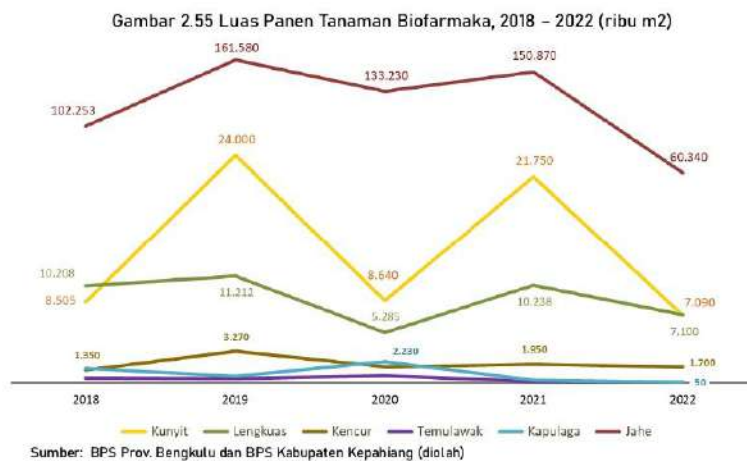
Hingga akhir 2022, Cabai Keriting menjadi komoditas dengan lahan panen terluas di antara komoditas lainnya. Tren yang serupa terlihat pada perkembangan luas panen komoditas Cabai Rawit, yang menjadi komoditas kedua dengan luas panen terbesar. Setelah mencatatkan kenaikan luasan panen pada 2019, yang meningkat dari sekitar 360Ha pada 2018, luas panen komoditas ini cenderung menurun hingga akhir 2022, yang tercatat seluas sekitar 309Ha. Berbeda dengan ketiga komoditas sebelumnya, beberapa komoditas lain, misalnya, Tomat, Terung, dan Buncis, yang menduduki posisi berurutan berdasarkan luas panen, justru menunjukkan peningkatan luas panen setelah 2019.

Dari sisi hasil produksi, Cabai Besar dan Cabai Keriting menjadi komoditas dengan kapasitas produksi terbesar, dengan rata-rata 87 ribu kuintal untuk Cabai Besar selama 2018-2021 dan 155 ribu kuintal untuk Cabai Keriting selama 2021-2022. Tren produksi komoditas sayuran menunjukkan pola pergerakan yang serupa, di mana sempat terjadi penurunan produksi dari kondisi 2018 hingga

waktu 2019-2020, yang kemudian terjadi peningkatan yang signifikan setelahnya hingga akhir periode (2022). Tren serupa terlihat pada produksi komoditas Tomat, Terung, dan Cabai Rawit, yang menduduki posisi yang berurutan dalam hal produksi pada akhir 2022. Penurunan produksi pada sebagian besar komoditas antara 2019 – 2020 dimungkinkan karena adanya kebijakan pembatasan sosial selama Pandemi Covid-19, yang membatasi petani untuk dapat menggarap lahan pertanian. Namun seiring meredanya pandemi, perkembangan menunjukkan lonjakan produksi di sebagian besar komoditas pertanian sayuran di Kabupaten Kepahiang antara 2020-2022.

C.3. Tanaman Biofarmaka

Komoditas tanaman Jahe, Kunyit, dan Lengkuas adalah beberapa dari komoditas Kab, yang secara umum menduduki tiga besar komoditas tanaman biofarmaka selama 2018-2022. Luas panen tanaman Jahe, rata-rata mencapai sekitar 121,7 ribu m² (sekitar 12Ha) selama rentang waktu tersebut.

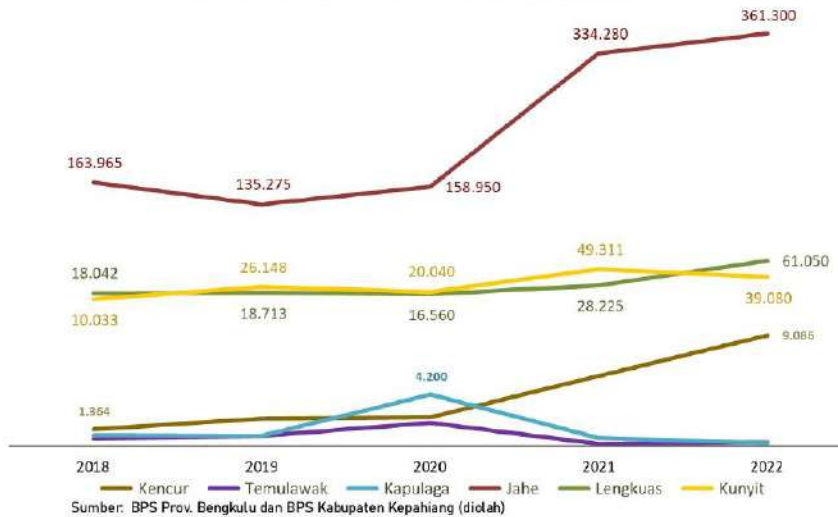


Sementara, lahan panen Kunyit dan Lengkuas rata-rata dalam luasan sekitar 14 ribu m² dan 8,8 ribu m². Perkembangan luas panen ketiga komoditas tersebut menunjukkan pergerakan yang cenderung fluktuatif selama lima tahun. Dari kondisi pada tahun 2018, luas panen meningkat pada 2019. Puncak perkembangan ketiga komoditas agaknya terjadi pada tahun tersebut, dimana untuk Jahe luas panen meningkat dari sekitar 102,3 ribu m² menjadi sekitar 161,6 ribu m² (meningkat lebih dari 50%) pada 2019. Bahkan untuk tanaman Kunyit peningkatan luas panen pada 2019 mencapai hingga hampir 3 kali lipat dari kondisi 2018. Sementara itu, peningkatan luas panen tanaman Lengkuas cenderung lebih landai, dengan penambahan sekitar 1.000 m² pada 2019.

Memasuki 2020, luas lahan panen ketiga komoditas mengalami penurunan yang signifikan mendekati kondisi pada awal periode (2018), khususnya, untuk Jahe atau bahkan lebih rendah seperti yang terlihat pada tanaman Lengkuas, yang tersisa hingga 5,3 ribu m². Penurunan ini dimungkinkan karena pengaruh adanya pembatasan sosial selama pandemi. Seiring dengan redanya pandemi, perkembangan tanaman biofarmaka kembali mengalami kenaikan kembali seperti kondisi sebelum pandemi. Pada akhir tahun kelima (2022),

perkembangan luas panen tanaman biofarmaka di Kabupaten Kepahiang menunjukkan penurunan.

Gambar 2.56 Produksi Tanaman Biofarmaka, 2018-2022 (kg)



Berbeda dengan tren luas lahan panen, perkembangan produksi tanaman biofarmaka justru menunjukkan tren peningkatan yang cenderung positif selama 2018-2022. Meskipun sempat terjadi pelambatan selama 2018-2020, namun setelahnya terjadi peningkatan produksi yang signifikan. Rata-rata produksi tanaman Jahe, misalnya, mencapai kurang lebih 230,8 ribu kg (sekitar 231 Ton) selama jangka waktu tersebut. Puncak produksi komoditas ini terjadi pada 2022, di mana hasil tanaman Jahe tercatat mencapai sekitar 361,3 Ton pada tahun tersebut.

Meskipun tidak sedrastis peningkatan yang terjadi pada komoditas Jahe, perkembangan produksi tanaman Kunyit dan Lengkuas juga menunjukkan trend positif seiring waktu, dengan rata-rata produksi sebesar 28,9 Ton (Kunyit) dan 28,5 Ton (Lengkuas).

C.4. Tanaman buah

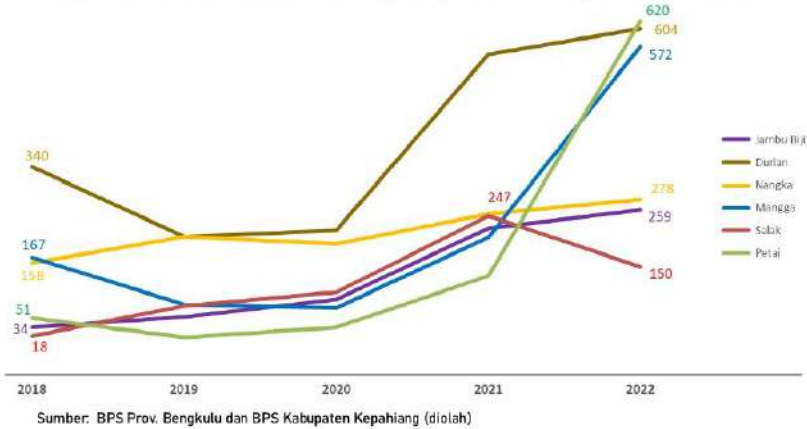
Perkembangan produksi komoditas tanaman buah selama 2018-2022, umumnya, menunjukkan perkembangan yang positif pada hampir seluruh komoditas. Beberapa komoditas dengan rata-rata produksi di atas 500 ton per tahun menunjukkan tren perkembangan yang serupa, di mana mulai 2018-2020 meskipun terjadi peningkatan namun cenderung lambat. Setelah tahun 2020 tersebut, umumnya, menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun-tahun berikutnya.

Gambar 2.57 Produksi Tanaman Buah Kapasitas >500 Ton per Tahun, 2018-2022



Jeruk Siam menjadi komoditas dengan hasil produksi tertinggi dengan rata-rata produksi sekitar 6,5 ribu Ton selama lima tahun. Puncak produksi komoditas ini terjadi pada 2022, dengan produksi kurang lebih 15,7 ribu Ton atau sekitar 5 kali lipat dari produksi 2021. Komoditas kedua dengan produksi terbesar adalah tanaman pisang, yang selama lima tahun rata-rata menghasilkan sekitar 3,5 ribu Ton per tahun. Tahun 2021 menjadi momen tertinggi produksi komoditas ini, dengan hasil produksi sebesar 4,9 ribu Ton. Pada urutan berikutnya, Pepaya menjadi komoditas dengan produksi terbesar ketiga, yang selama periode waktu rata-rata menghasilkan sekitar 2,6 ribu Ton per tahun. Peningkatan yang signifikan produksi pepaya terjadi setelah 2020, dengan tren yang terus meningkat hingga 2022. Bahkan pada akhir periode tersebut produksi Pepaya tercatat melebihi produksi Pisang, sebesar 5,4 ribu Ton. Pada urutan keempat, Alpukat menjadi komoditas terbesar berikutnya, dengan rata-rata sebesar 972 Ton per tahun.

Gambar 2.58 Produksi Tanaman Buah dengan Kapasitas < 500 Ton per Tahun, 2018-2022

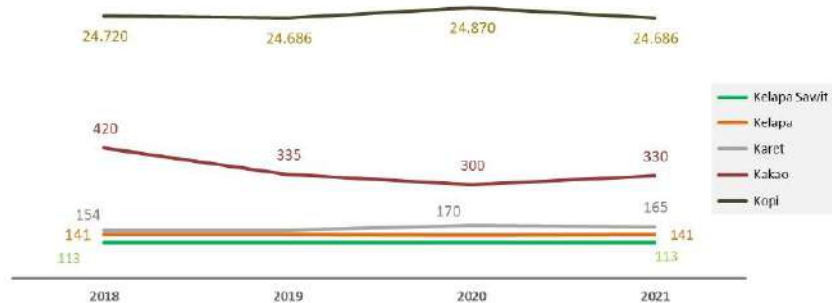


Sementara itu, untuk komoditas tanaman buah lainnya, dengan rata-rata produksi di bawah 500 Ton per tahun, perkembangannya juga menunjukkan peningkatan selama 2018-2022, dengan tren yang relatif serupa pada hampir semua komoditas.

C.5. Tanaman perkebunan

Pada sektor tanaman perkebunan, Kopi menjadi komoditas dengan luas panen terluas di antara lainnya selama 2018-2021, dengan rata-rata luasnya sekitar 24,7 ribu Ha setiap tahunnya. Komoditas berikutnya adalah Kakao yang rata-rata luas panennya sekitar 346 Ha selama rentang waktu tersebut.

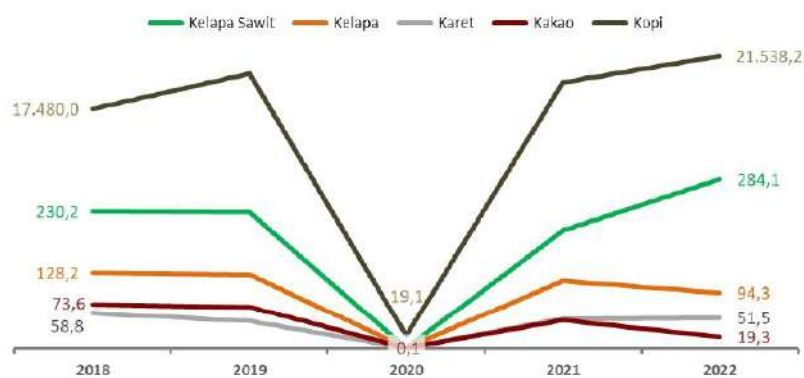
Gambar 2.59 Luas Panen Tanaman Perkebunan, 2018-2021 (ha)



Sumber: BPS Prov. Bengkulu dan BPS Kabupaten Kepahiang (diolah)

Selanjutnya, Karet, Kelapa, dan Kelapa Sawit, secara berurutan menempati posisi ketiga, keempat, dan kelima dari lima besar komoditas dengan luas panen terluas berikutnya. Secara umum, perkembangan luas panen komoditas-komoditas tersebut seiring waktu relatif stabil dengan fluktuasi yang relatif moderat.

Gambar 2.60 Produksi Tanaman Perkebunan, 2018-2022 (Ribu Ton)

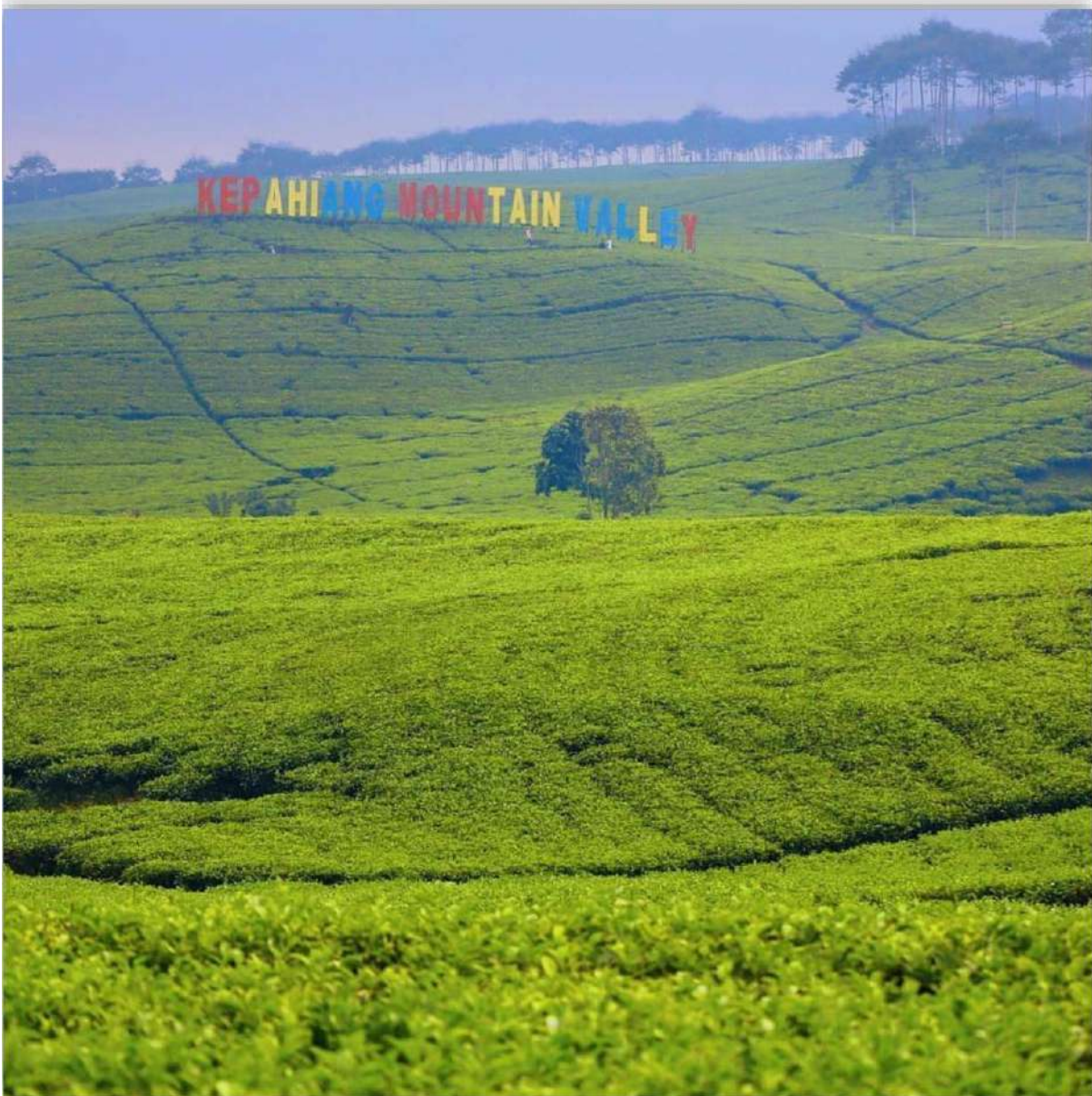


Sumber: BPS Prov. Bengkulu dan BPS Kabupaten Kepahiang (diolah)

Sebaliknya, tren perkembangan yang berbeda justru ditunjukkan dari sisi produksi komoditas-komoditas tersebut selama 2018-2022. Terjadi penurunan yang drastis pada 2020 justru pada saat perkembangannya menunjukkan tren positif dari tahun sebelumnya. Pada keempat komoditi selain Kopi, turunnya produksi pada 2020 bahkan hampir mendekati nol. Pada komoditas Kopi, kenaikan produksi kopi naik dari sekitar 17,5 juta Ton kondisi 2018 menjadi kurang lebih 20,2 juta Ton tahun 2019. Namun pada tahun berikutnya, 2020, hasil ini turun dengan sangat drastis menjadi hanya sekitar 19,1 ribu Ton. Turunnya produksi pada 2020 dimungkinkan terjadi karena pengaruh pandemi. Seiring

redanya pandemi, sebagian besar komoditas kembali pada jalur tren positif secara bertahap.

Namun, jika membandingkan dengan luas panen, sisi produksi menunjukkan komposisi yang berbeda dari komoditas-komoditas tersebut. Kopi tetap menjadi komoditas dengan produksi terbesar dengan rata-rata produksi sebesar 15,7 juta Ton selama 2018-2022. Kelapa Sawit, yang secara luas panen berada pada posisi kelima, dari sisi produksi justru menempati posisi kedua terbesar dengan rata-rata produksi 188,4 ribu Ton. Urutan berdasarkan rata jumlah produksi berikutnya diduduki oleh komoditas Kelapa (92,2 ribu T), Kakao (42 ribu T), dan Karet (41,5 ribu T).



D. Ketenagakerjaan

Perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Kepahiang selama 2018-2022 menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang termasuk dalam angkatan kerja. Rata-rata jumlah penduduk dalam kategori tersebut adalah sebesar 78,4 ribu jiwa selama rentang waktu tersebut. Puncak perkembangan terjadi pada 2020, dimana terdapat sekitar 83,8 ribu jiwa sebagai angkatan. Setelah tahun tersebut, perkembangan jumlah angkatan melandai dan cenderung menurun hingga sekitar 81,2 ribu jiwa pada 2022.

Gambar 2.61 Jumlah (jiwa) dan Tingkat Partisipasi (%) Angkatan Kerja, 2018-2022



Sumber: BPS Prov. Bengkulu dan BPS Kabupaten Kepahiang (diolah)

Gambaran ini berkebalikan dengan tren jumlah penduduk berusia di atas 15 tahun yang bukan termasuk dalam kategori angkatan kerja (masih sekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi). Sempat terjadi penurunan jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori ini pada tahun 2020, di mana jumlahnya mencapai 22,3 ribu jiwa yang turun dari sekitar 24,9 ribu jiwa pada 2018. Jumlah ini kembali meningkat setahun setelahnya hingga pada 2022 tercatat sebanyak 27,8 ribu jiwa penduduk yang bukan termasuk angkatan kerja. Terkait dengan hal tersebut, maka tren perkembangan tingkat partisipasi kerja juga sesuai dengan perkembangan jumlah angkatan kerja dengan rata-rata sebesar 76% selama lima tahun. Puncak dari perkembangan partisipasi angkatan kerja terjadi pada 2020, di mana dari sebanyak 106 ribu penduduk yang usia di atas 15 tahun pada tahun 2020 sekitar 80% diantaranya (sekitar 83,8 ribu orang) merupakan angkatan kerja.

Lebih jauh mengamati perkembangan komposisi angkatan kerja sendiri terlihat bahwa selama 2018-2022, rata-rata sebanyak 77,4 ribu penduduk yang berusia di atas 15 tahun yang termasuk dalam kategori angkatan kerja sedang bekerja/mempunyai pekerjaan. Sementara sekitar 2 ribu sisanya belum/tidak mempunyai pekerjaan atau menganggur.

Gambar 2.62 Komposisi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran



Perkembangan jumlah penduduk angkatan kerja yang mempunyai pekerjaan (bekerja) cenderung meningkat selama rentang waktu lima tahun tersebut. Puncak perkembangan jumlah orang yang bekerja dalam kategori ini terjadi pada 2020, dimana jumlahnya mencapai sekitar 81,7 ribu orang. Pada tahun-tahun berikutnya hingga akhir periode perkembangannya menunjukkan adanya pelambatan pada penurunan hingga sekitar 78,7 ribu orang pada 2022. Namun begitu secara umum perkembangan sejak 2018 masih cenderung positif.

Di sisi lain, jumlah pengangguran terbuka cenderung meningkat dengan pergerakan yang fluktuatif seiring waktu. Jumlah pengangguran tertinggi terjadi pada akhir periode yang mencapai sebanyak 2,37 ribu penduduk dari kondisi awal di tahun 2018 sebanyak 2,3 ribu orang. Meskipun secara absolut bertambah, namun tingkat pengangguran terbuka (TPT) cenderung menurun selama 2018-2022. Pada 2018, TPT mencapai sebesar 3,08% dari total jumlah angkatan kerja. Dengan lebih banyaknya, jumlah kelompok penduduk bekerja, TPT cenderung menurun pada akhir 2022, sebesar 2,9%. Rata-rata TPT sebesar 2,5% selama 2018-2022.

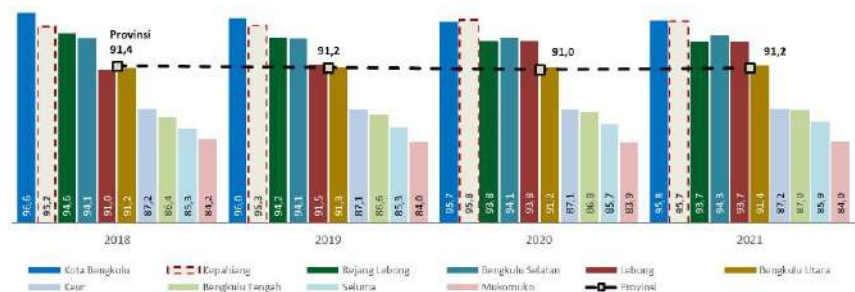


E. Pemberdayaan perempuan

Salah satu cara untuk mengukur capaian upaya membangun keberdayaan perempuan selama 2018-2022 adalah dengan melihat capaian perkembangan indeks pembangunan gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan sanitaso (IDG). IPG dihitung berdasarkan perbandingan antara IPM penduduk perempuan terhadap penduduk laki-laki, yang meliputi dimensi kesehatan, pendidikan, dan hidup layak. Sementara itu, IDG dihitung dari proporsi peran perempuan di beberapa sektor dibandingkan dengan peran laki-laki.

Capaian selama 2018-2021 terlihat adanya peningkatan dari sekitar 95,2% pada 2018 menjadi 95,7% pada 2021. Dengan peningkatan ini berarti pembangunan kualitas sumber daya manusia secara sosial dan ekonomi di Kabupaten Kepahiang relatif merata antara perempuan dan laki-laki. Capaian IPG Kabupaten Kepahiang termasuk tinggi di bandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bengkulu. Kepahiang menduduk peringkat kedua di bawah Kota Bengkulu dalam pencapaian IPG, dengan rata-rata 95,5%. Bahkan pada 2020, IPG Kabupaten Kepahiang berada pada posisi tertinggi melampaui Kota Bengkulu, dengan capaian sekitar 95,8%. Capaian ini bahkan melebihi IPG Rejang Lebong yang merupakan kabupaten induk sebelum pemekaran.

Gambar 2.63 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Prov. Bengkulu, 2018–2021



Sumber: BPS Prov. Bengkulu dan BPS Kabupaten Kepahiang (diolah) (data merupakan data termuktahir)

Sementara itu, perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Kepahiang selama 2018-2021 secara umum justru cenderung menurun, Meskipun pada 2021 terlihat adanya pergerakan positif kenaikan menjadi 66,96% dari sekitar 66,17% pada 2020.

Gambar 2.64 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), 2018-2021



Sumber: BPS Prov. Bengkulu dan BPS Kabupaten Kepahiang (diolah) (data merupakan data termuktahir)

Gambaran ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik relatif kurang jika dibandingkan laki-laki, khususnya, jika dilihat dalam proporsi keterwakilan di parlemen, proporsi jabatan pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan antara perempuan dan laki-laki.

2.4.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

A. Pariwisata

Sebagaimana umumnya wilayah yang berada di dataran tinggi yang memiliki potensi wisata alam, Kabupaten Kepahiang juga memiliki potensi wisata dari kondisi alamnya. Pada 2022 tercatat setidaknya terdapat 1 desa yang merupakan desa wisata. Sementara untuk wisata alam, terdapat 2 desa yang menjadi destinasi kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar wilayah kabupaten.

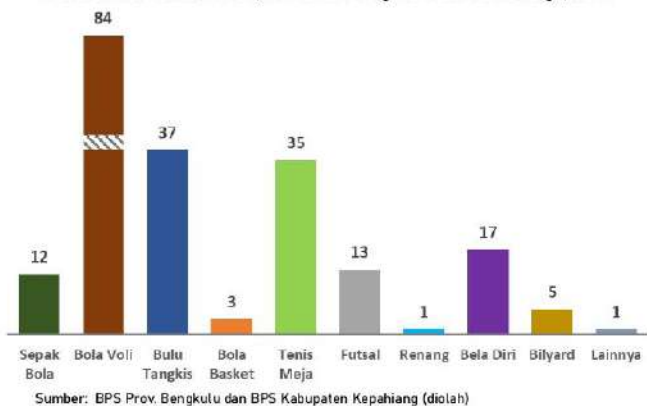
Gambar 2.65 Jumlah Desa dengan Potensi Wisata, 2022



Sumber: BPS Prov. Bengkulu dan BPS Kabupaten Kepahiang (diolah)

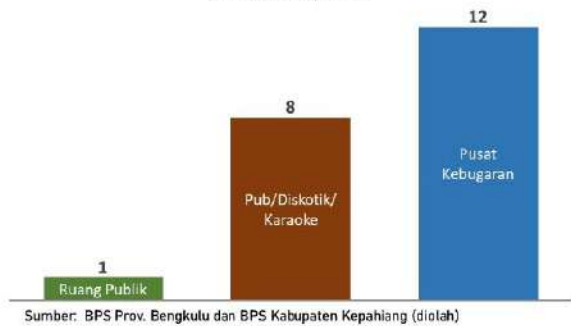
Selain itu, lokasi wisata tirta baik untuk tujuan rekreasi maupun olah raga terdapat di 3 desa pilihan kunjungan wisatawan. Lebih jauh, tidak hanya tempat kunjungan bagi umumnya wisatawan dari luar kabupaten, untuk dukungan ketersediaan sarana untuk rekreasi atau kegiatan luar-ruangan bagi khususnya penduduk kabupaten juga cukup memadai baik dari sisi jumlah maupun sebarannya.

Gambar 2.66 Jumlah Desa/Kelurahan dengan Fasilitas Olahraga, 2022



Data 2022 setidaknya menunjukkan bahwa sebagian besar jumlah desa/kelurahan memiliki fasilitas olahraga, misalnya, sekitar 70% desa/kelurahan memiliki fasilitas lapangan Bola Voli atau di sebanyak 84 desa dari total 117 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kepahiang. Demikian halnya dengan fasilitas bulu tangkis di sebanyak 37 desa/kelurahan, lapangan sepak bola (lapangan besar dan futsal) di sekitar 25 desa/kelurahan, dan fasilitas-fasilitas cabang-cabang olahraga lainnya. Selain itu, juga sudah terdapat fasilitas untuk kegiatan rekreasional masyarakat lainnya, seperti pub atau hiburan yang tersebar di 8 desa/kelurahan serta sudah adanya pusat kebugaran yang berada di 12 desa.

Gambar 2.67 Jumlah Desa/Kelurahan dengan Fasilitas Rekreasional, 2022

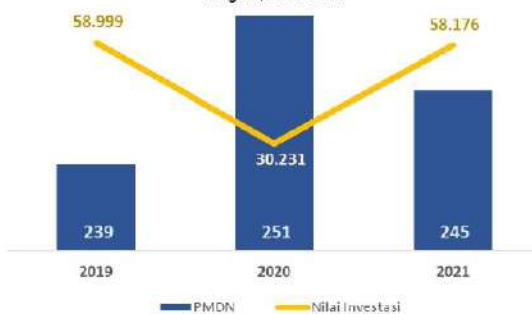


B. Perindustrian

B.1. Jumlah investasi skala nasional (PMDN)

Dari sektor industri, investor yang menanamkan modal di Kabupaten Kepahiang dalam kurun 2018-2022 terdiri dari kelompok penanaman modal dalam negeri (PMDN). Sementara untuk penanaman modal asing (PMA), belum ada data yang dapat menunjukkan kegiatan investasinya.

Gambar 2.68 Jumlah dan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, 2019-2021



Sumber: BPS Prov. Bengkulu dan BPS Kabupaten Kepahiang (diolah) (data merupakan data termuktahir)

Khusus untuk PMDN, perkembangan jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Kepahiang dalam jangka waktu lima tahun tersebut cenderung fluktuatif. Puncak jumlah investor terjadi pada 2020, dimana tercatat sebanyak 251 perusahaan dalam negeri beroperasi di wilayah kabupaten. Terdapat kenaikan berupa penambahan jumlah perusahaan PMDN sebanyak 12 perusahaan dari kondisi 2019 (sekitar 239 perusahaan). Setelah 2020, terjadi penurunan menjadi sebanyak 245 perusahaan yang tersisa beroperasi di wilayah kabupaten. Penurunan ini dimungkinkan terjadi karena efek pandemi pada 2020-2021. Sebagaimana juga terlihat pada perkembangan nilai investasi dari perusahaan PMDN selama 2019-2021 tersebut. Pada 2019, total nilai investasi PMDN mencapai sekitar 59 miliar Rupiah. Pada 2020, nilai investasi menurun hingga lebih dari 50% investasi semula menjadi sekitar 30,2 miliar Rupiah. Seiring dengan meredanya pandemi, jumlah investasi kembali naik mendekati kondisi 2019, dengan mencapai sekitar 58,2 miliar Rupiah.

2.5. Aspek Daya Saing Daerah

2.5.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

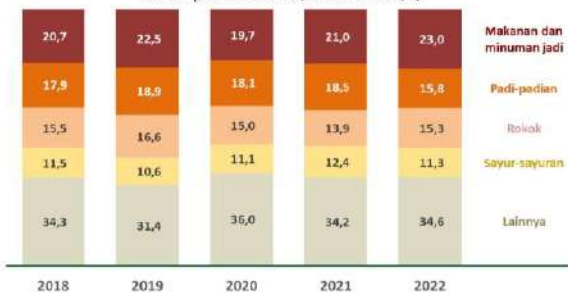
Perkembangan rata-rata total konsumsi per bulan rumah tangga perkapita penduduk Kabupaten Kepahiang selama 2018-2022 menunjukkan kecenderungan yang positif, meskipun perkembangan setiap tahunnya cenderung terjadi fluktuasi, namun dalam secara umum meningkat pada akhir periode (2022).

Gambar 2.69 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, 2018-2022 (Ribu Rp.)



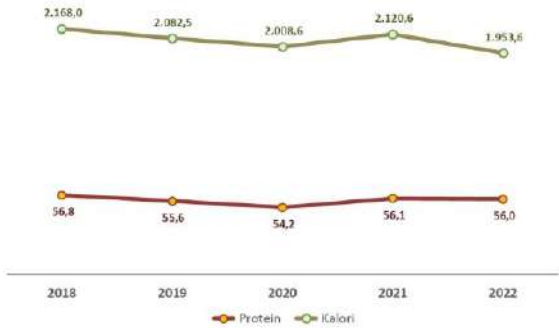
Pada 2018, rata-rata konsumsi adalah sebesar 875,4 ribu Rupiah. Meskipun sempat terjadi penurunan pada 2019 (menjadi sekitar 794,8 ribu Rupiah), namun pada tahun berikutnya (2020) menunjukkan adanya peningkatan menjadi 897,4 ribu Rupiah. Kondisi pelambatan atau penurunan kembali terjadi pada 2021 untuk kemudian naik kembali pada 2022, yang mencapai sekitar 1.009 juta Rupiah perkapita penduduknya.

Gambar 2.70 Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kelompok Makanan, 2018-2022 (%)



Pada konsumsi pangan, pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi merupakan porsi terbesar, yang rata-rata sekitar 21,7% pengeluaran per bulan dialokasikan untuk pembelian produk ini. Porsi terbesar kedua adalah pengeluaran untuk kelompok produk padi-padian yang rata-rata mencapai sekitar 17,5% setiap bulannya. Selanjutnya, produk rokok (rata-rata, 15,3%) dan sayur-sayuran (11,4%), secara berurutan menempati posisi ketiga dan keempat dalam hal porsi rata-rata pengeluaran konsumsi pangan per kapita penduduk selama rentang waktu 2018-2022. Pergerakan tren konsumsi pangan, khususnya pada kelompok 4 besar pengeluaran, menunjukkan bahwa sebagian besar terjadi penurunan porsi pengeluaran pada 2020, kecuali pengeluaran untuk sayur-sayuran yang justru relatif meningkat pada saat terjadi penurunan.

Gambar 2.71 Konsumsi Kalori dan Protein Harian, 2018-2022 (kcal.)



Sumber: BPS Prov. Bengkulu dan BPS Kabupaten Kepahiang (diolah)

Pada komposisi pengeluaran pangan, khususnya terkait konsumsi kalori dan protein harian masyarakat, terlihat adanya kesesuaian dimana pengeluaran untuk kelompok kalori mengambil porsi terbesar mencapai 97,3% (2.067 kcal.) dibanding konsumsi untuk protein yang rata-rata hanya sekitar 55,7 kcal. (2,7%).

B. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Perkapita

Sementara itu, pada konsumsi non-pangan, pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga menjadi porsi terbesar, dengan rata-rata sekitar 48,4% terhadap total pengeluaran non-pangan per tahunnya. Proporsi pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga.

Gambar 2.72 Persentase Pengeluaran Rumah Tangga Kelompok Non-Pangan, 2018-2022 (%)



Sumber: BPS Prov. Bengkulu dan BPS Kabupaten Kepahiang (diolah)

Pengeluaran untuk aneka barang dan jasa secara total menjadi porsi terbesar kedua kelompok pengeluaran non-pangan, dengan rata-rata sebesar 24,6% per tahunnya. Selanjutnya, pengeluaran untuk produk pakaian dan barang tahan lama menduduki posisi ketiga dan keempat dalam porsi pengeluaran perkapita per bulan, dengan rata-rata sekitar 8,4% per tahun.

C. Produktivitas Total Daerah

Dari sisi produktivitas daerah, perkembangan PDRB menurut Lapangan Usaha atas dasar harga konstan (ADHK) Tahun 2010 secara agregat selama 2018-2022 menunjukkan adanya penurunan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepahiang. Meskipun terjadi penurunan laju pertumbuhan, namun secara absolut terdapat peningkatan PDRB pada periode tersebut.

Gambar 2.73 Persentase Pengeluaran Rumah Tangga Kelompok Non-Pangan, 2018-2022 (%)



Sumber: BPS Prov. Bengkulu dan BPS Kabupaten Kepahiang (diolah)

Dari distribusi persentase PDRB menurut Lapangan Usaha ADHB diperoleh gambaran bahwa kelompok usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memberikan kontribusi terbesar, dengan rata-rata kontribusi sekitar 40,5% selama rentang waktu tersebut. Peran pemerintah masih cukup signifikan dengan kontribusi antara 15-17% selama jangka waktu lima tahun. Kelompok Usaha Perdagangan dan Reparasi Kendaraan (9,51%); berada pada posisi ketiga.

D. Nilai Tukar Petani

Perkembangan nilai tukar petani (NTP) Provinsi Bengkulu menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat selama 2018-2022. NTP merupakan rasio antara Indeks Harga yang Diterima oleh Petani (It) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (Ib). Dengan kenaikan tersebut, berarti adanya perbaikan yang signifikan dalam nilai tukar yang diterima petani secara keseluruhan, dengan nilai di atas (>) 100 sejak 2019-2022.

Gambar 2.74 Perkembangan Nilai Tukar Petani, Prov. Bengkulu, 2018-2023



Pada 2018, nilai tukar tercatat sebesar 100, yang maknanya secara umum antara tingkat harga komoditas yang dijual petani dan harga barang yang dibeli petani sama. Harga pertanian secara umum dianggap setara antara tingkat harga komoditas yang dijual petani dan harga barang yang dibeli petani. Mulai 2019, terdapat kecenderungan yang makin positif, dengan peningkatan sekitar 4,8% menjadi sekitar 104.82% dengan capaian ini, berarti petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan.

Meskipun sempat terjadi pelambatan laju pada akhir 2022, namun secara umum trennya cenderung tetap terjaga. Bahkan pada data sementara hingga April 2023, masih menunjukkan peningkatan, dengan rata-rata sekitar 142,6%.



2.5.2. Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur

A. Infrastruktur dan Wilayah

A.1. Rasio panjang jalan-kendaraan

Secara umum, panjang jalan di Kabupaten Kepahiang relatif tidak bertambah sejak 2018, dengan total panjang sekitar 656,8km untuk semua jenis jalan dan kewenangan. Sementara di sisi lain, jumlah kendaraan bertambah dengan signifikan seiring waktu. Terdapat penambahan sekitar 5.092 kendaraan dari 2018 hingga 2022 pada semua jenis kendaraan.

Perkembangan rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan cenderung bertambah dari sekitar 77,9 poin pada 2018 naik menjadi 88,5 poin pada 2022. Hal ini berarti, pada 2018, dari sepanjang 1km jalan (tanpa memandang kelas jalan) melayani sekitar 78 unit kendaraan (tanpa memandang jenis). Pada akhir 2022, jumlah kendaraan yang dilayani bertambah menjadi 89 unit kendaraan untuk sepanjang 1km jalan.

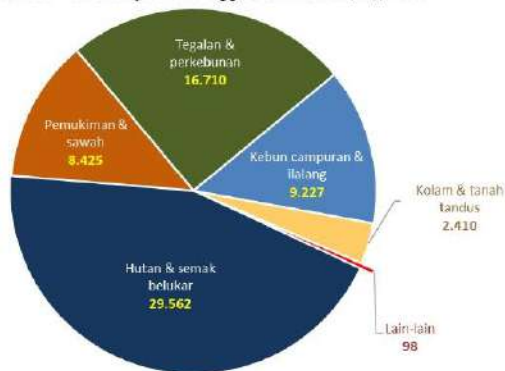
Gambar 2.75 Perkembangan Jumlah Kendaraan (ribu unit), Panjang Jalan (km), dan Rasio Panjang Jalan



A.2. Struktur lahan

Data tentang penggunaan lahan pada 2007 sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 2.8 di atas menunjukkan bahwa dari total sekitar 71,01 ribu hektar (ha) luas wilayah Kabupaten Kepahiang, sekitar 42%-nya masih berupa hutan dengan luas sekitar 29,5 ribu ha. Penggunaan lahan terluas berikutnya adalah untuk perkebunan dan tegalan yang mencapai sekitar 16,7 ribu ha atau sekitar 24%. Luas pemukiman dan persawahan mencapai sekitar 8,4 ribu ha atau sekitar 12% dari total luas wilayah.

Gambar 2.76 Komposisi Penggunaan Lahan (ha), 2007

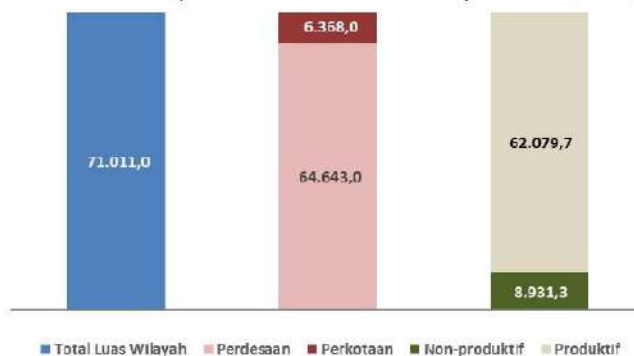


Sumber: BPS Prov. Bengkulu, BPS, dan Bappeda Kabupaten Kepahiang (diolah) (data merupakan data termuktahir)

A.3. Wilayah perkotaan, perdesaan, dan produktif

Lebih lanjut, data penggunaan lahan pada 2020 menunjukkan bahwa struktur ruang kabupaten didominasi wilayah perdesaan yang mencapai sekitar 91% dari total luas wilayah Kabuapten. Wilayah perkotaan identik dengan ibu kota Kabupaten sebagai pusat perkembangan daerah, yaitu Kec. Kepahiang, yang luasnya mencakup kurang lebih 6,4 ribu ha atau sekitar 9% dari total luas wilayah Kabupaten.

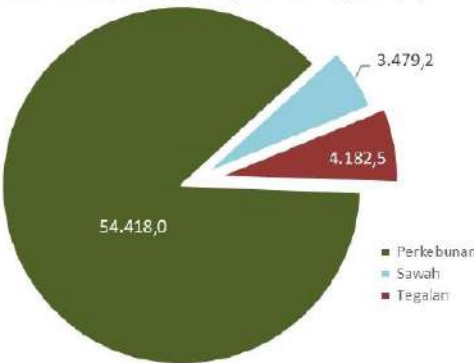
Gambar 2. 77 Luas Wilayah Perkotaan-Perdesaan dan Wilayah Produktif, 2020 (ha)



Sumber: BPS Prov. Bengkulu, BPS, dan Bappeda Kabupaten Kepahiang (diolah) (data merupakan data termuktahir)

Sementara itu, luas wilaah produktif mencakup setidaknya 87% dari wilayah Kabupaten, atau sekitar 62,1 ribu ha, yang umumnya digunakan untuk kegiatan produktif pada sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Sementara sekitar 8,9 ribu ha sisanya (sekitar 13%) merupakan wilayah non-produktif. Areal perkebunan menjadi porsi terbesar wilayah produktif, yang mencakup sekitar 87% persen wilayah produktif, yang setara dengan area seluas kurang lebih 54,4 ribu ha. Porsi terbesar kedua adalah area tegal dengan luas sekitar 4,2 ribu ha (6,7%). Sisanya, sekitar 3,5 ribu ha merupakan area persawahan tanaman padi, yang mencakup sekitar 5,6% dari total luas wilayah produktif.

Gambar 2.78 Proporsi Luas Wilayah Produktif, 2020 (ha)



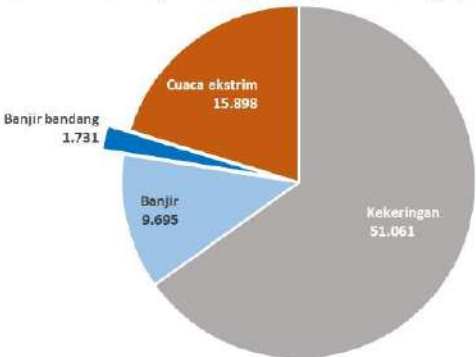
Sumber: BPS Prov. Bengkulu dan BPS Kabupaten Kepahiang (diolah) (data merupakan data termuktahir)

A.4. Wilayah banjir dan kekeringan

Sebagai bagian dari wilayah dataran tinggi dengan tingkat kemiringan yang lebih dari 40 derajat di beberapa wilayah, Kabupaten Kepahiang termasuk daerah dengan potensi bencana yang relatif tinggi, khususnya untuk bencana banjir. Data tahun 2020 menunjukkan wilayah yang terdampak banjir mencakup total seluas 11,426 ha. Sekitar 85% di antaranya merupakan wilayah terdampak banjir tahunan/musiman, seluas kurang lebih 9,7 ribu ha. Sementara 15% di antaranya adalah wilayah yang terdampak bencana banjir bandang, yang mencakup sekitar 1,7 ribu ha.

Sebaliknya, pada musim kemarau, kejadian kekeringan juga berdampak pada beberapa wilayah. Data menunjukkan, total luasan wilayah yang terdampak kejadian kekeringan mencapai sekitar 51,1 ribu hektar. Sementara itu, seiring terjadinya perubahan cuaca yang ekstrim terdapat wilayah yang terkena dampak dari kejadian angin kencang dan tidak stabil, yang biasanya terjadi di wilayah pegunungan. Wilayah Kecamatan Kemumu yang dilaporkan mengalami kejadian angin kencang dalam beberapa waktu belakangan. Secara lebih rinci, wilayah terdampak menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.11 di bawah.

Gambar 2.79 Luas wilayah terdampak banjir dan kekeringan, 2020



Sumber: Bappeda Kabupaten Kepahiang (diolah) (data merupakan data termuktahir)

Tabel 2.11 Wilayah Kecamatan yang terdampak kejadian banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrim

Banjir	Banjir Bandang	Kekeringan	Cuaca Ekstrim
1. Tebat Karai	1. Tebat Karai	1. Tebat Karai	Muara Kemumu
2. Kepahiang	2. Kepahiang	2. Kepahiang	
3. Kabawetan	3. Kabawetan	3. Kabawetan	
4. Ujan Mas	4. Ujan Mas	4. Ujan Mas	
5. Merigi	5. Merigi	5. Merigi	
6. Muara Kemumu	6. Muara Kemumu	6. Muara Kemumu	
7. Bermani Ilir	7. Seberang Musi	7. Bermani Ilir	
8. Seberang Musi		8. Seberang Musi	

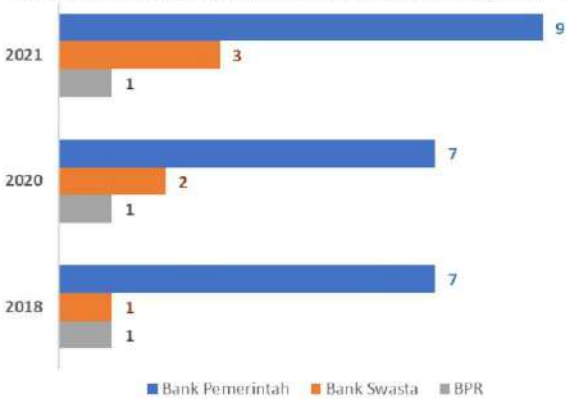
Sumber: Bappeda Kabupaten Kepahiang (diolah)

B. Sarana Prasana Ekonomi dan Perdagangan

B.1. Jenis dan jumlah bank

Keberadaan bank (termasuk cabang bank) di Kabupaten Kepahiang menunjukkan adanya peningkatan jumlah selama 2018-2022. Jumlah bank bertambah dari sebanyak 9 bank yang telah berdiri di wilayah kabupaten pada 2018 bertambah menjadi total 13 bank pada 2021.

Gambar 2.80 Perkembangan Jumlah Bank menurut Jenisnya, 2018-2021



Sumber: BPS Prov. Bengkulu dan BPS Kabupaten Kepahiang (diolah) (data merupakan data termuktahir)

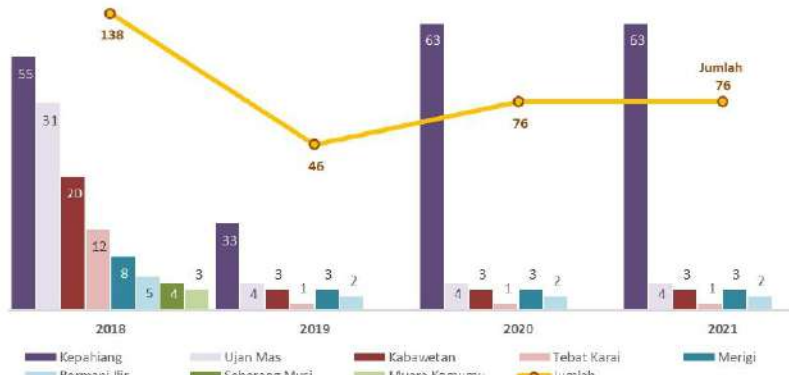
Bank umum Pemerintah menjadi penggerak dukungan kegiatan bisnis dengan keberadaan jumlah terbanyak kantor bank dan cabang bank di Kepahiang. Pada 2018, telah berdiri Bank umum Pemerintah sebanyak 7 kantor bank, yang berkembang dengan pendirian kantor bank/cabang bank baru pada 2021 menjadi 9 kantor di wilayah kabupaten. Jumlah bank milik swasta juga bertambah seiring waktu. Pada 2018, hanya terdapat 1 kantor bank swasta di kabupaten, yang pada akhir 2021, tercatat adanya pendirian kantor bank baru menjadi 3 kantor 2021. Sementara itu, untuk jenis bank perkreditan rakyat (BPR), tercatat 1 kantor BPR selama rentang waktu tersebut.

B.2. Jumlah restoran/rumah makan

Keberadaan restoran/rumah makan di Kabupaten Kepahiang secara umum menunjukkan penurunan jumlah sejak 2018-2021. Seiring waktu, terjadi penurunan jumlah rumah makan mencapai hampir 50% hingga akhir 2021, dari

sebanyak 138 rumah makan yang tersebar di wilayah kabupaten pada 2018, menjadi sekitar 76 rumah makan pada 2021.

Gambar 2.81 Perkembangan Jumlah dan Sebaran Rumah Makan/Restoran, 2018-2021



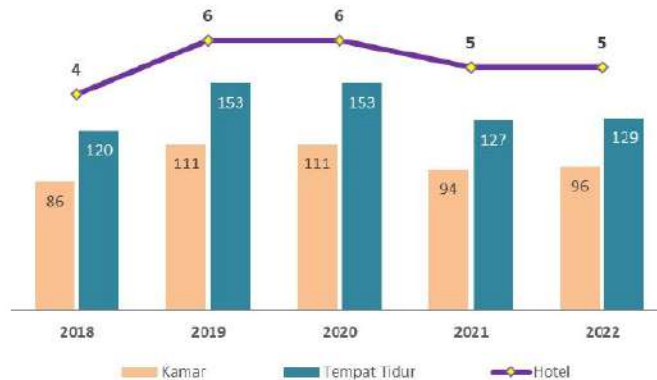
Sumber: BPS Prov. Bengkulu dan BPS Kabupaten Kepahiang (diolah) (data merupakan data termuktahir)

Dari sisi persebaran, pada 2018, keberadaan rumah makan di wilayah Kabupaten Kepahiang relatif merata. Sejak 2019, selain jumlahnya jauh berkurang, keberadaan rumah makan lebih banyak di ibu kota kabupaten (Kec. Kepahiang). Bahkan data tidak lagi mencatat keberadaan rumah makan di beberapa kecamatan lain, seperti Kec. Seberang Musi, dan Muara Kemumu.

B.3. Jumlah penginapan/hotel

Perkembangan jumlah penginapan dan hotel di Kabupaten Kepahiang selama 2018-2022 menunjukkan kecenderungan positif, dalam arti secara umum terjadi peningkatan pada akhir 2022 dari kondisi awal 2018.

Gambar 2.82 Perkembangan Jumlah Hotel/Penginapan, Kamar, dan Tempat Tidur, 2018-2022



Sumber: BPS Prov. Bengkulu dan BPS Kabupaten Kepahiang (diolah) (data merupakan data termuktahir)

Keseluruhan hotel yang berada di wilayah kabupaten merupakan hotel dengan kelas non-bintang. Pada 2018, terdapat total 4 hotel non-bintang dengan total terdapat sebanyak 86 kamar dan 120 tempat tidur. Pada 2 tahun berikutnya, terdapat penambahan sebanyak 2 hotel, menjadi total tersedia 6 hotel pada 2019-2020. Total kamar pada tahun tersebut sejumlah 111 kamar dengan 153

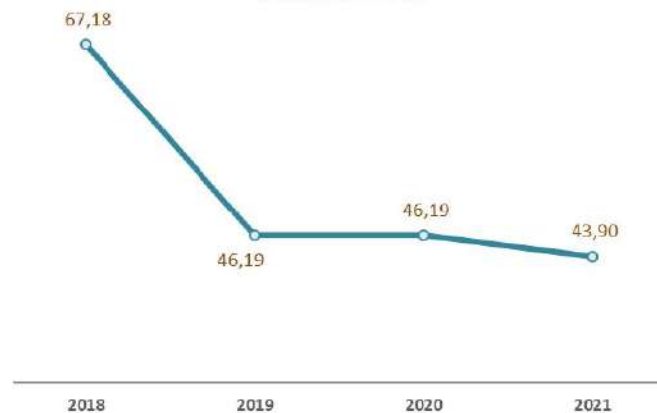
tempat tidur. Jumlah ini berkurang pada tahun-tahun berikutnya, di mana dari sebanyak 6 hotel berkurang menjadi 5 hotel kelas non-bintang hingga akhir 2022.

C. Air Bersih, Listrik, dan Telepon

C.1. Penggunaan air bersih

Perkembangan penggunaan air bersih penduduk, khususnya, untuk keperluan air minum menunjukkan trend yang cenderung menurun dengan signifikan selama 2018-2021. Sebagaimana ditunjukkan oleh data perkembangan rumah tangga yang menggunakan sumber air bersih untuk minum, pada 2018 terdapat sekitar 67,2% dari sekitar 34,4 ribu rumah tangga yang menggunakan air bersih untuk kebutuhan air minum. Persentase ini menurun secara drastis menjadi sekitar 46,2% pada 2019. Pada tahun-tahun berikutnya, kondisi ini terus menurun seiring waktu, di mana pada 2021 dari sebanyak 38,3 ribu rumah tangga, kurang dari setengahnya (sekitar 43,9%) menggunakan air bersih untuk minum.

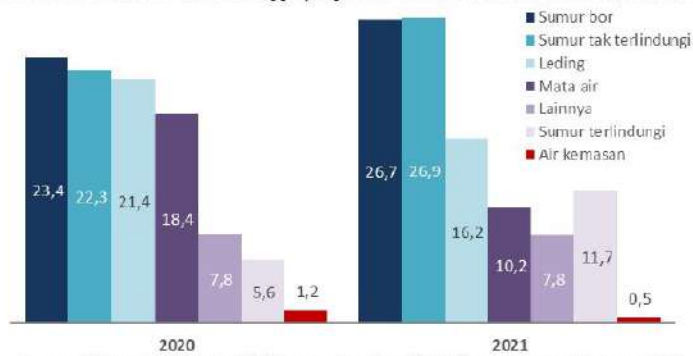
Gambar 2.83 Persentase Rumah Tangga yang Penggunaan Air Bersih untuk Minum, 2018-2021 (%)



Sumber: BPS Prov. Bengkulu dan BPS Kabupaten Kepahiang (diolah) (data merupakan data termutakhir)

Dari perilaku rumah tangga dalam penggunaan sumber air untuk minum terlihat bahwa sumber utama air minum penduduk Kabupaten Kepahiang pada 2020-2021, sebagian besar berasal dari air sumur bor/pompa, sumur tak terlindungi, dan leding.

Gambar 2.84 Persentase Rumah Tangga yang Sumber : Air Utama untuk Minum, 2020-2021 (%)

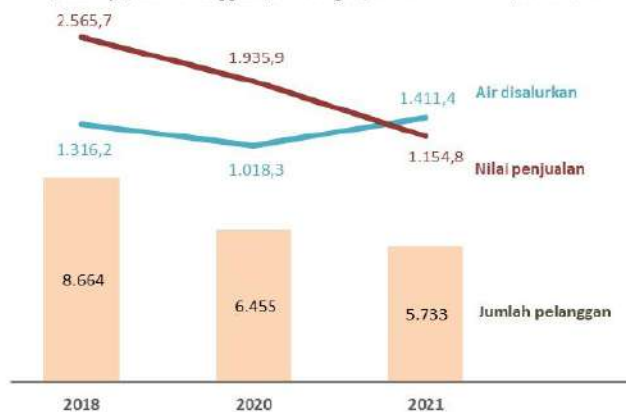


Sumber: BPS Prov. Bengkulu dan BPS Kabupaten Kepahiang (diolah) (data merupakan data termuktahir)

Penggunaan air dari sumur bor menjadi pilihan pertama dari sebanyak 23,4% rumah tangga di Kabupaten Kepahiang pada 2020. Berikutnya, air dari sumur tak terlindungi menjadi pilihan kedua terbanyak setidaknya oleh sekitar 22,3% rumah tangga pada tahun tersebut. Menduduki peringkat ketiga dalam penggunaan sumber air minum utama penduduk adalah air leding, yang digunakan oleh sekitar 21,4% jumlah rumah tangga. Penggunaan air kemasan menjadi pilihan terakhir sebagai sumber air minum yang dikonsumsi oleh hanya sekitar 1,2% rumah tangga.

Pada tahun 2021, sebagaimana trend penurunan penggunaan sumber air bersih untuk air minum di atas, terdapat peningkatan penggunaan air dari sumur (baik dari jenis sumur bor, tak terlindungi, dan terlindungi) dan, sebaliknya, terjadi penurunan dalam penggunaan air leding, mata air, dan air kemasan sebagai sumber air utama air minum rumah tangga. Bahkan penggunaan air dari sumur tak terlindungi menjadi pilihan pertama, yang dikonsumsi oleh sekitar 26,9% rumah tangga di Kabupaten Kepahiang.

Gambar 2.85 Perkembangan Jumlah Produksi (Ribuan m³), Nilai Penjualan (Juta Rp.), dan Pelanggan (Sambungan) Air Minum PDAM, 2018-2021



Sumber: BPS Prov. Bengkulu dan BPS Kabupaten Kepahiang (diolah) (data merupakan data termuktahir)

Lebih jauh, perkembangan produksi air PDAM Kabupaten Kepahiang selama 2018-2021 juga cenderung menunjukkan adanya penurunan. Jumlah pelanggan selama rentang waktu tersebut menurun dari sekitar 8.664 pelanggan pada 2018 menjadi sekitar 5.733 pelanggan pada 2021. Nilai penjualan air juga menurun

kurang lebih 1,4 miliar Rupiah, dari sebesar 2,6 miliar pada 2018 turun menjadi sekitar 1,2 miliar Rupiah pada 2021. Namun, jumlah air (volume) PDAM yang dikonsumsi justru meningkat dari 1.32 juta m³ menjadi sekitar 1,4 juta m³ pada akhir 2021.

C.2. Ketersediaan listrik

a. Produksi dan penggunaan

Secara umum, terdapat peningkatan ketersediaan listrik di Kabupaten Kepahiang selama 2018-2021. Daya terpasang naik dari 46,6 ribu KW pada 2018 menjadi 54,2 ribu KW pada 2021. Produksi listrik juga mengalami peningkatan selama rentang waktu. Pada 2018, total produksi listrik adalah sebesar 78,85 juta KWh. Meskipun sempat terjadi penurunan produksi pada 2019, namun pada tahun-tahun berikutnya meningkatkan produksi menjadi sekitar 81,7 juta KWh pada 2020 dan 85,3 juta KWh hingga akhir 2021.

Perkembangan produksi yang cenderung fluktuatif ini agaknya untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan listrik. Total kebutuhan listrik sendiri menunjukkan trend yang cenderung terus meningkat selama rentang waktu tersebut. Total penggunaan listrik mencapai sekitar 75,7 juta KWh pada 2018, dan kondisi ini terus meningkat sehingga pada 2021 tercatat jumlah penggunaan listrik mencapai sekitar 85,23 juta KWh.

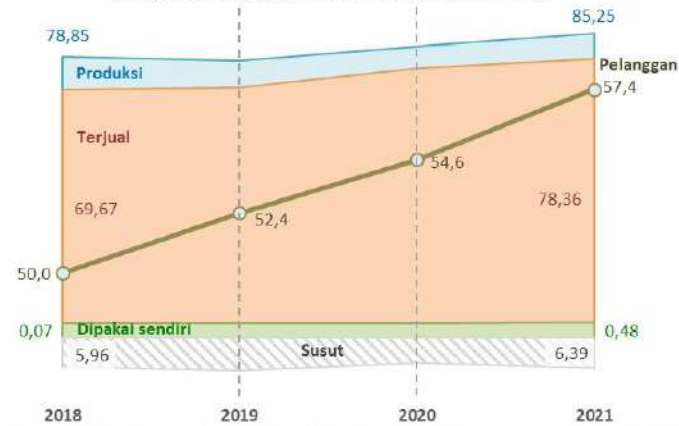
Gambar 2.86 Perkembangan Jumlah Daya Terpasang (juta KW), Produksi (juta KWh), dan Penggunaan (ribu KWh) Listrik, 2018-2021



Sumber: BPS Prov. Bengkulu dan BPS Kabupaten Kepahiang (diolah) (data merupakan data termuktahir)

Dari sisi penggunaan terlihat bahwa dari rata-rata produksi listrik sekitar 80,9 juta KWh setiap tahunnya selama 2018-2021, sekitar 90,8% terjual kepada masyarakat (rata-rata sekitar 73,5 juta KWh), dan kurang dari 1% atau rata-rata sekitar 156,1 ribu KWh digunakan sendiri selama rentang waktu tersebut. Sementara itu, sekitar 8% di antaranya merupakan besaran penyusutan/ hilangnya produksi listrik, yang rata-rata per tahunnya mencapai sebesar 6,1 juta KWh.

Gambar 2.87 Perkembangan Jumlah Produksi (KWh), Pemakaian (KWh), dan Pelanggan Listrik (sambungan), 2018-2021



Dari sisi pelanggan, terlihat adanya trend yang terus meningkat dari yang awalnya sebanyak 50 ribu pelanggan listrik pada 2018 bertambah sebanyak kurang lebih 7,4 ribu pelanggan baru menjadi sekitar 57,4 ribu pelanggan pada akhir 2021. Total jumlah pelanggan ini meliputi jenis pelanggan rumah tangga, sosial, gedung kantor, usaha, serta Industri dan Hotel.

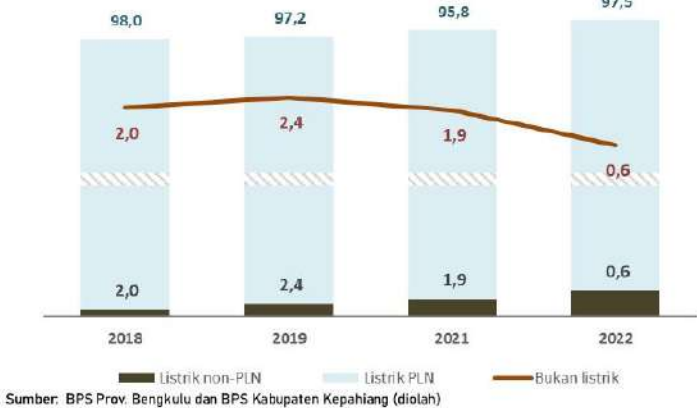
Gambar 2.88 Perkembangan Jumlah Rumah Tangga dan Rasio Elektrifikasi, 2018-2022



b. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Khusus pada penggunaan listrik oleh rumah tangga (baik produksi PLN maupun non-PLN), secara umum, perkembangan selama 2018-2022 menunjukkan adanya peningkatan. Pada 2018, tercatat dari sekitar 34,4 ribu rumah tangga, sebanyak 98% di antaranya merupakan rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama. Seiring waktu, meskipun sempat terjadi pelambatan pada 2019, yang turun menjadi sekitar 97,6%, namun pada tahun-tahun berikutnya persentase rumah tangga terus meningkat hingga hampir seluruh rumah tangga atau sekitar 99,4% dari 38,9 ribu rumah tangga telah menggunakan listrik pada 2022.

Gambar 2.89 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber : Utama Penerangan, 2018-2022

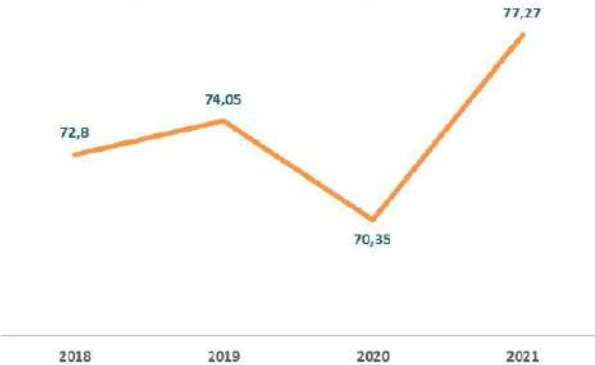


Dari persentase tersebut, kurang dari 1% rumah tangga menggunakan listrik non-PLN. Selain itu, masih terdapat rumah tangga yang selama rentang waktu tersebut belum menggunakan listrik, yang rata-rata persentasenya mencapai sekitar 1,8% per tahun. Namun seiring waktu persentase ini makin menurun dari awalnya sebesar 2% menjadi hanya sekitar 0,6% rumah tangga pada akhir 2022.

C.3. Penggunaan telepon

Tingkat penggunaan telepon atau telepon genggam oleh penduduk Kabupaten Kepahiang cukup tinggi dan perkembangannya menunjukkan trend yang terus bertambah selama 2018-2021. Dari sebanyak kurang lebih 123,5 ribu penduduk berusia di atas 5 tahun, sekitar 72,8% di antaranya (sekitar 88,9 ribu penduduk) tercatat menggunakan telepon atau telepon genggam (nirkabel) pada 2018.

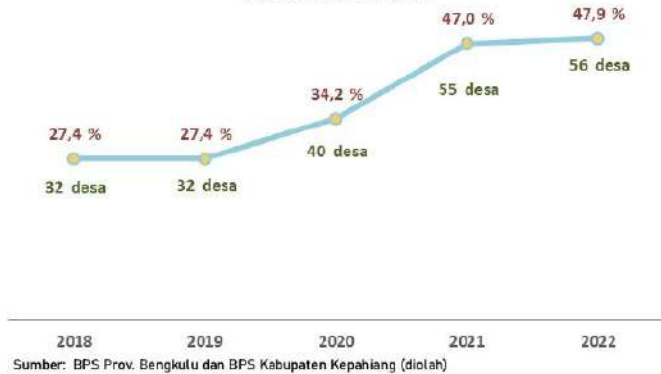
Gambar 2.90 Persentase Penduduk Usia 5 tahun ke atas dengan Penggunaan Telepon/Telepon Genggam, 2018-2021



Pada 2019, persentase ini bertambah sekitar 2% menjadi sekitar 92,6 ribu penduduk pada kategori tersebut. Meskipun sempat terjadi penurunan persentase penggunaan telepon/telepon genggam pada 2020 seiring terjadinya pandemi Covid-19, namun secara absolut jumlah pengguna justru naik menjadi sekitar 93,2 ribu penduduk pada kelompok usia tersebut. Pada

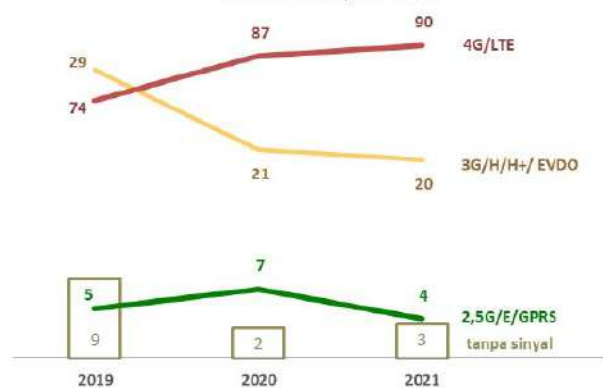
tahun berikutnya, terjadi peningkatan lebih dari 5% penggunaan telepon. Persentase penduduk berumur >5 tahun yang menggunakan telepon/telepon genggam meningkat menjadi 77,3% pada 2021. Jumlah diperkirakan mencapai lebih dari 100 ribu penduduk pada kategori tersebut.

Gambar 2.91 Perkembangan Persentase dan Jumlah Desa/Kelurahan dengan Menara BTS, 2018-2022



Perkembangan tingkat penggunaan ini sejalan dengan perkembangan ketersediaan infrastruktur telekomunikasi berupa menara *base transceiver station* (BTS) yang memfasilitasi komunikasi nirkabel. Selama 2018-2022, jumlah desa dengan menara BTS bertambah dengan signifikan. Dari sekitar 27% desa atau sebanyak 32 desa pada 2018 yang mempunyai infrastruktur BTS, dalam jangka waktu lima tahun bertambah menjadi 56 desa dengan menara BTS atau sekitar 47% dari 117 desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Kepahiang.

Gambar 2.92 Perkembangan Jumlah Desa/Kelurahan dengan Penerimaan Sinyal Telekomunikasi, 2019-2021



Perkembangan infrastruktur di atas juga menunjukkan peningkatan kualitas sinyal telekomunikasi di wilayah Kabupaten Kepahiang. Setidaknya, pada 2019-2021 terdapat peningkatan jumlah desa dengan tingkat kualitas sinyal yang makin baik. Dari 117 desa atau kelurahan, pada akhir 2021 tercatat sebanyak 90 Desa (sekitar 77%) di antaranya dapat menerima sinyal dengan platform 4G/LTE. Jumlah ini meningkat dari sebanyak 74 desa pada 2019.

Di sisi lain, jumlah desa/kelurahan dengan penerimaan sinyal pada platform 3G dan GPRS menunjukkan kecenderungan yang terus berkurang dan beralih kepada platform 4G. Perkembangan teknologi juga memungkinkan berkurangnya jumlah desa/kelurahan yang belum dapat menerima sinyal telekomunikasi seiring waktu, di mana pada akhir 2021 setidaknya tercatat sebanyak 3 desa yang belum dapat menerima sinyal. Jumlah ini sudah jauh menurun dibanding pada 2019, yang masih terdapat sebanyak 9 desa tanpa sinyal.

2.5.3. Fokus Iklim Berinvestasi

A. Angka kriminalitas

Tingkat kriminalitas di suatu daerah mempengaruhi tingkat perkembangan investasi di daerah tersebut. Semakin tinggi tingkat kriminalitas pada gilirannya akan menciptakan kondisi yang makin kurang kondusif bagi tumbuhnya investasi. Sebaliknya, dengan makin sedikitnya kejadian kriminalitas, hal ini dianggap akan makin memperbaiki kualitas iklim investasi daerah tersebut.

Terkait dengan hal tersebut, secara umum selama 2018-2021, terdapat penurunan jumlah kejahatan di Kabupaten Kepahiang dari sebanyak 359 kasus yang dilaporkan pada 2018 turun menjadi sekitar 252 kasus pada 2021. Penurunan jumlah kejahatan terbanyak terjadi pada 2019, dimana terdapat penurunan sebanyak 179 kasus dari posisi 2018 menjadi sekitar 180 kasus yang dilaporkan pada 2019. Namun begitu, jika mengamati perkembangan setiap tahunnya, terdapat gambaran adanya peningkatan jumlah kejahatan setelah 2020 hingga akhir 2021. Jumlah kejahatan yang dilaporkan pada 2019 meningkat menjadi 229 kasus, dan bertambah menjadi 252 kasus pada 2021.

Gambar 2.93 Jumlah Tindak Kejahatan (Kasus), Tingkat Penyelesaian (%), dan Jumlah Personil Polisi (orang), 2018-2021



Sumber: BPS Prov. Bengkulu dan BPS Kabupaten Kepahiang (diolah) (data merupakan data termuktahir)

Namun begitu, tingkat penyelesaian kasus justru cenderung menurun dalam jangka waktu tersebut dari sekitar 88,3% (sebanyak 317 kasus diselesaikan) pada 2018 menjadi sekitar 76,6% (sebanyak 193 dari 252 kasus yang dilaporkan) pada akhir 2021. Data peningkatan kejahatan sejak 2019-2022 menunjukkan kejahatan pencurian menjadi kasus terbanyak yang dilaporkan. Sementara kejahatan penganiayaan dan penipuan menjadi kasus kejahatan yang dilaporkan terbanyak kedua dan ketiga dalam rentang waktu tersebut.

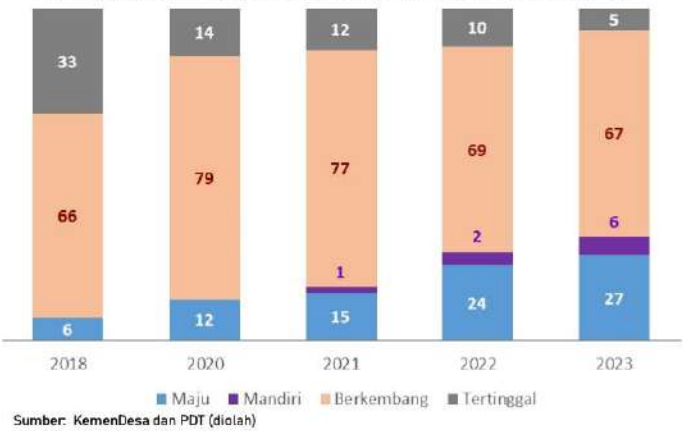
Gambar 2.94 Perkembangan Jumlah Kasus Kejahatan, 2019-2022



B. Perkembangan status desa

Upaya pembangunan Desa di Kabupaten Kepahiang selama 2018-2023 agaknya menunjukkan arah perkembangan yang makin progresif, setidaknya, jika dilihat dari perkembangan status desa berdasarkan capaian indeks desa membangun (IDM) selama rentang waktu tersebut. IDM yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemDesa PDTT) mengukur tingkat pembangunan desa berdasarkan indikator ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Gambar 2.95: Perkembangan Jumlah Desa menurut Status IDM, 2018-2023



Dari sebanyak total 117 Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Kepahiang, IDM dikhususkan untuk mengukur tingkat pembangunan Desa, yang meliputi sebanyak 105 Desa. Data capaian IDM menunjukkan terjadinya peningkatan status di sebagian besar Desa. Jumlah Desa yang termasuk dalam kategori tertinggal menurun secara signifikan dari sebanyak 33 Desa (31,4% dari jumlah keseluruhan Desa) pada 2018 menjadi sebanyak 5 Desa pada akhir 2023 (kurang dari 5%). Di sisi lain, terjadi peralihan (peningkatan) status dari Desa Tertinggal masuk dalam kategori status Desa Berkembang. Meskipun perkembangan jumlah Desa pada kategori ini terkesan fluktuatif setiap tahunnya. Namun, hal ini justru menggambarkan adanya pergerakan

dinamis dari peningkatan status desa, baik dari status tertinggal menjadi berkembang, maupun dari status berkembang masuk dalam kategori lebih yang tinggi (Desa Maju). Jumlah desa yang termasuk dalam kategori Desa Maju bertambah secara signifikan sejak 2018-2023 dengan penambahan sekitar 20%. dari hanya sebanyak 6 Desa pada 2018 menjadi sebanyak 27 Desa pada akhir 2023. Selain itu, sejak 2021, mulai terdapat Desa yang termasuk dalam kategori status Desa Mandiri. Meskipun belum secepat pertumbuhan kategori maju, namun perkembangannya cenderung positif (terus bertambah), sehingga pada 2023, tercatat sebanyak 6 Desa termasuk dalam kategori Desa Mandiri.

2.5.4. Fokus Sumber Daya Manusia

A. Kualitas tenaga kerja

Perkembangan jumlah angkatan kerja, yaitu jumlah penduduk Kabupaten Kepahiang yang berumur 15 tahun ke atas menurut kegiatan selama seminggu, secara umum meningkat selama 2018-2022. Pada 2018, sebanyak 74,6 ribu penduduk pada kategori tersebut tercatat sebagai angkatan kerja, baik yang termasuk kelompok sedang bekerja ataupun pengangguran. Sementara sekitar 25 persen dari penduduk kategori tersebut termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya).

Tabel 2.12 Tabel Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja (orang), 2018-2022

Kategori	2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja	74.639	76.231	83.790	81.232	81.062
Bukan Angkatan Kerja	24.857	24.467	22.291	26.225	27.790
Jumlah	99.496	100.698	106.081	107.457	108.852

Sumber: BPS Prov. Bengkulu dan BPS Kabupaten Kepahiang (diolah)

Jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 6.423 penduduk dari kondisi 2018, menjadi sekitar 81,1 ribu orang pada akhir 2022. Peningkatan tertinggi terjadi pada kurun 2018-2020 di mana terdapat penambahan sekitar 9,1 ribu orang angkatan kerja. Namun setelah 2020, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kepahiang cenderung menurun hingga akhir 2022.

Gambar 2.96 Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja menurut Pendidikan Terakhir, 2018-2022 (ribu jiwa)



Sumber: BPS Prov. Bengkulu dan BPS Kabupaten Kepahiang (diolah)

Jika dilihat lebih lanjut, khususnya pada komposisi angkatan kerja berdasarkan pendidikan, maka akan terlihat bahwa angkatan kerja dengan pendidikan SD ke bawah menjadi porsi terbesar jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kepahiang selama rentang waktu lima tahun tersebut. Angkatan kerja dengan Jenjang pendidikan SMA menjadi terbanyak kedua, dengan rata-rata sebanyak 22,6 ribu orang per tahunnya. Berikutnya, angkatan kerja dengan jenjang SMP menjadi posisi ketiga terbanyak dalam komposisi angkatan kerja berdasarkan pendidikan.

Sementara itu, tenaga kerja lulusan perguruan tinggi menempati posisi keempat pada komposisi angkatan. Meskipun perkembangan angkatan kerja pada kategori ini sedikit fluktuatif, namun secara umum terdapat penambahan jumlah seiring waktu, dari sebanyak 5,6 ribu orang pada 2018 meningkat menjadi sekitar 8 ribu orang pada 2022. Kategori ini meliputi seluruh tenaga kerja dengan latar belakang pendidikan lulus perguruan tinggi (apapun jenjangnya).

Gambar 2.97 Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja dengan Pendidikan Perguruan Tinggi (orang) dan Rasionya terhadap Jumlah Penduduk, 2018-2019



Sumber: BPS Prov. Bengkulu dan BPS Kabupaten Kepahiang (diolah)

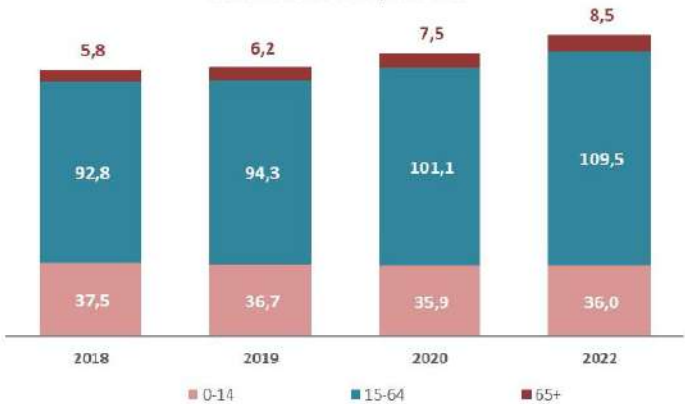
Rasio jumlah angkatan kerja dengan pendidikan setingkat sarjana ke atas per 10.000 penduduk selama 2018-2022 cenderung fluktuatif, namun secara umum terjadi kenaikan rasio pada 2022 dibandingkan kondisi awal pada 2018. Rasio pada 2018 adalah sebesar 408,6 di mana dari setiap 10.000 penduduk pada tahun tersebut terdapat sekitar 409 orang penduduk berusia minimal 15 tahun, yang termasuk dalam angkatan kerja dengan pendidikan sarjana. Kenaikan tertinggi sempat terjadi pada 2019 dimana rasio mencapai sekitar 543,2 per 10.000 penduduk. Setelah 2019, rasio ini terus menurun hingga 2021 menjadi sekitar 459,6. Selanjutnya, pada 2022, rasio kembali terjadi peningkatan.

B. Tingkat ketergantungan

B.1. Komposisi dan proporsi penduduk menurut usia

Perkembangan demografi Kabupaten Kepahiang selama 2018-2022 menunjukkan gambaran yang sebenarnya cukup menggembirakan, setidaknya, jika melihat komposisi penduduk berdasarkan usia. Perkembangan selama rentang waktu tersebut menggambarkan komposisi di mana dari jumlah penduduk keseluruhan, sebagian besar merupakan penduduk dengan usia 15-64 tahun (atau biasa disebut sebagai usia produktif).

Gambar 2.98 Perkembangan Jumlah Penduduk Umur 0-14 Tahun, 15-64 Tahun, dan 65 Tahun ke Atas, 2018-2022



Tidak hanya dari sisi jumlah, perkembangan proporsi kategori penduduk ini dibanding kategori usia lainnya juga menunjukkan trend yang positif dan terjaga selama lima tahun. Pada 2018, jumlah penduduk usia produktif adalah sebanyak kurang lebih 93 ribu jiwa atau mencapai sekitar 68,2% dari jumlah penduduk Kabupaten Kepahiang secara keseluruhan. Sementara untuk penduduk usia kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun, masing-masing jumlahnya sebesar kurang lebih 37,5 ribu (<15 tahun) dan 5,8 ribu jiwa (65 tahun ke atas) pada 2018.

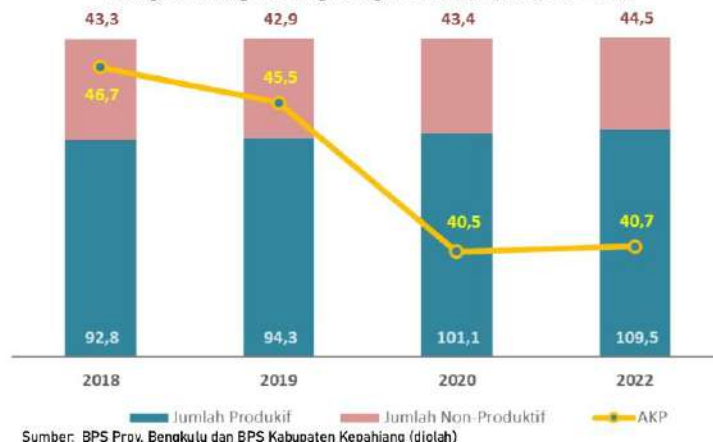
Pada tahun-tahun berikutnya, proporsi penduduk pada kategori ini relatif tidak mengalami berubah yang ekstrim, dalam arti proporsinya cenderung tetap hingga 2022. Proporsi jumlah penduduk usia produktif justru menunjukkan perkembangan yang terus meningkat. Pada 2019, misalnya, proporsi jumlah penduduk usia produktif meningkat menjadi sekitar 68,7% dari jumlah penduduk keseluruhan atau bertambah menjadi 94,3 ribu jiwa. Peningkatan juga terjadi pada tahun berikutnya, di mana 70% dari jumlah penduduk Kabupaten Kepahiang termasuk sebagai penduduk usia produktif, di mana jumlahnya

mencapai sekitar 101 ribu penduduk. Pada akhir periode, 2022, jumlah penduduk Kabupaten Kepahiang terdiri dari komposisi penduduk usia produktif sebanyak 109,5 ribu jiwa (71,1%), penduduk usia 65 tahun ke atas sebanyak 8,5 ribu jiwa (5,5%), dan penduduk usia <15 tahun sebanyak 36 ribu jiwa (23,4%).

B.2. Angka beban ketergantungan

Gambaran tentang perkembangan proporsi jumlah penduduk sebagaimana disampaikan di atas, sekaligus dapat digunakan untuk menggambarkan perkembangan angka ketergantungan penduduk di Kabupaten Kepahiang selama rentang waktu 208-2022.

Gambar 2.99 Perkembangan Jumlah Penduduk Usia Produktif dan Non-Produktif (Ribu Orang) serta Angka Ketergantungan Penduduk (AKP), 2018-2022



Angka ketergantungan penduduk (AKP) atau juga disebut rasio beban ketergantungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non-produktif, kategori penduduk, yang meliputi: Penduduk usia <15 tahun (penduduk muda) dan penduduk usia >64 tahun (penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (berusia antara 15-64 tahun). Tingginya rasio beban ketergantungan dapat mengurangi pertumbuhan produktivitas suatu daerah. Artinya penduduk yang bukan usia angkatan kerja dapat memengaruhi tingkat produktivitas penduduk angkatan kerja. Makin tinggi AKP makin besar jumlah penduduk yang menjadi tanggungan penduduk lainnya sesuai kategori.

Dari data AKP Kabupaten Kepahiang selama 2018-2022 dapat digambarkan adanya perkembangan yang cenderung menurun selama rentang waktu tersebut. Hal ini utamanya disebabkan dengan adanya penambahan jumlah dan proporsi penduduk usia produktif yang cenderung terus meningkat sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Pada 2018, AKP Kabupaten Kepahiang adalah sebesar 46,7%, dimana secara ekonomi hal ini berarti, sebanyak 100 orang penduduk usia kerja (usia produktif) menanggung 47 orang penduduk yang belum atau tidak lagi bekerja (non-produktif). Dalam perkembangannya, mengikuti pertambahan jumlah penduduk, rasio ketergantungan ini semakin menurun. Rasio terkecil terjadi pada 2020, sebesar 40,5%, di mana jumlah penduduk produktif pada saat itu mencapai sekitar 101 ribu jiwa atau sekitar 70% dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Kepahiang. Sementara jumlah

penduduk usia non-produktif secara keseluruhan mencapai sekitar 43,4 ribu jiwa. Pada akhir 2022, tercatat AKP Kab Kepahiang adalah sebesar 40,7%.



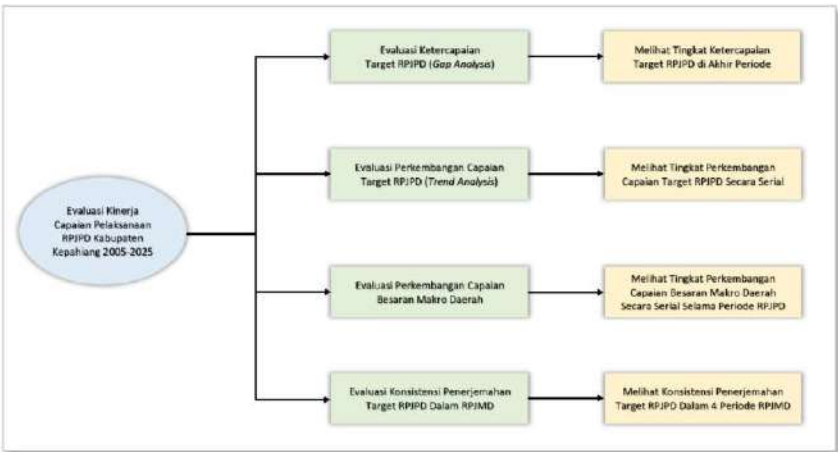
2.6. Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Kepahiang, 2005-2025

2.6.1. Tujuan dan Metode Evaluasi

Evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan evaluasi secara tuntas terhadap kinerja pencapaian pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kepahiang 2005-2025 berdasarkan data dan informasi pembangunan yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif (*descriptive-qualitative analysis*) yang menggabungkan antara pendekatan analisis kinerja pencapaian hasil (*gap analysis*), analisis perkembangan (*trend analysis*) dan analisis konsistensi (*consistency analysis*).

Gambar 2.100 Konsepsi Evaluasi Kinerja Capaian Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kepahiang 2005-2025



Secara metodologis, konsepsi evaluasi kinerja capaian pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kepahiang 2005-2025 dikelompokkan dalam 4 (empat) jenis analisis yang digunakan untuk menghasilkan 3 (tiga) jenis evaluasi, yaitu: 1) evaluasi ketercapaian; 2) evaluasi perkembangan; dan evaluasi konsistensi. Dengan memadukan keempat jenis analisis diatas diharapkan dapat menghasilkan evaluasi yang lebih utuh, lengkap dan menyeluruh.

2.6.2. Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Kepahiang, 2005-2025

Berdasarkan 4 (empat) evaluasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Hasil evaluasi kinerja pencapaian target RPJPD

Dari evaluasi berdasarkan penilaian kinerja pencapaian seluruh indikator, sasaran pokok dan misi RPJPD dapat disimpulkan bahwa target RPJPD Kabupaten Kepahiang 2005-2025 diperkirakan tidak akan tercapai sepenuhnya pada akhir tahun 2025. Atau dengan kata lain, keberhasilan pencapaian target RPJPD hanya bersifat parsial dan tidak menyeluruh.

b. Hasil Evaluasi Perkembangan Kinerja Pencapaian Target RPJPD

Evaluasi terhadap perkembangan 23 (dua puluh tiga) data terpilih yang menunjukkan kinerja ketercapaian indikator RPJPD yang termasuk bagus merupakan bentuk pendalaman penilaian yang mampu mengungkapkan seberapa konsisten dan stabilnya

upaya pencapaian target indikator selama periode pelaksanaan RPJPD. 2) Sebagian besar dari ke-23 data terpilih tersebut dalam periode penilaian yang dilakukan menunjukkan selama periode waktu penilaian konsistensi dan stabilitas tren pencapaian kinerjanya masih belum bagus secara keseluruhan. Informasi ini pada gilirannya akan sangat berguna untuk dijadikan basis informasi untuk perbaikan baik substansi maupun implementasi kebijakan, program dan kegiatan dalam proses perencanaan pembangunan pada periode selanjutnya.

c. Hasil Evaluasi Perkembangan Kinerja Pencapaian Sasaran Makro Daerah

- 1) Terlepas dari sedikit meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepahiang, secara kuantitatif kinerja penurunan kemiskinan Kabupaten Kepahiang selama periode 2005-2021 cukup bagus. Hal ini terlihat dari adanya tren penurunan tingkat kemiskinan dan membaiknya kondisi hidup orang miskin secara signifikan. Namun demikian, yang perlu diperbaiki kinerjanya adalah upaya menjaga konsistensi dalam menurunkan tingkat kemiskinan, tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan sehingga tidak terlalu banyak terjadi lagi fluktuasi dalam perkembangannya;
- 2) Dalam konteks jangka panjang, upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan hingga mencapai "*single digit*" atau dibawah angka psikologis 10 persen harus menjadi fokus perhatian Pemda Kabupaten Kepahiang kedepan melalui kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan kemiskinan secara lebih tematik, holistik, terintegrasi dan berbasis spasial yang akan diterjemahkan baik dalam dokumen RPJPD dan RPJMD pada periode-periode berikutnya;
- 3) Dalam konteks kualitas sumber daya manusia, upaya untuk meningkatkan tren peningkatan angka IPM secara konsisten sekaligus upaya mempercepat masuk dalam kelompok daerah dengan kategori IPM bagus (diatas angka 70) harus menjadi fokus perhatian Pemda Kabupaten Kepahiang dalam periode-periode perencanaan pembangunan berikutnya;
- 4) Secara ekonomi, pencapaian kinerja perkembangan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan secara konsisten menjaga dan mempertahankannya agar mampu berlangsung secara terus menerus dari waktu ke waktu masih belum bagus. Modal ekonomis Kabupaten Kepahiang harus mampu dimanfaatkan dan dikonversikan secara sektoral untuk menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil dalam jangka waktu lama;
- 5) Secara ekonomi pula, pencapaian kinerja perkembangan transformasi struktural perekonomian Kabupaten Kepahiang relatif cukup bagus. Namun demikian, "pekerjaan rumah" yang besar dan yang masih tersisa adalah upaya untuk meningkatkan proporsi sektor industri manufaktur dalam PDRB hingga mencapai "*double digit*" atau diatas angka 10 persen harus menjadi fokus perhatian Pemda Kabupaten Kepahiang dalam perencanaan pembangunan untuk periode-periode berikutnya.

d. Hasil Evaluasi Konsistensi Penerjemahan RPJPD Dalam RPJMD

- 1) Secara keseluruhan, selama 4 (empat) periode penyusunan RPJMD Kabupaten Kepahiang tercatat secara rata-rata penerjemahan Misi RPJPD Kabupaten Kepahiang 2005-2025 kedalam Sasaran di masing-masing RPJMD mencapai nilai konsistensi sekitar 86,42 persen. Dalam kategori penilaian tingkat konsistensi, besarnya nilai tersebut masih masuk dalam kategori Bagus.
- 2) Oleh karena itu, Bupati Kepahiang dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kepahiang selama ini relatif telah berhasil menerjemahkan amanat

dokumen rencana pembangunan jangka panjang kedalam penyusunan rencana aksi dalam jangka menengah secara konsisten meskipun belum sepenuhnya sempurna.

- 3) Dari keempat periode RPJMD, hanya pada RPJMD periode ketiga atau periode 2016-2021 kualitas penerjemahan RPJPD dalam RPJMD tergolong kurang bagus atau dengan kata lain RPJMD 2016-2021 masih kurang konsisten dalam menerjemahkan Misi RPJPD Kabupaten 2005-2025 kedalam sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD.

e. Rekomendasi Kebijakan

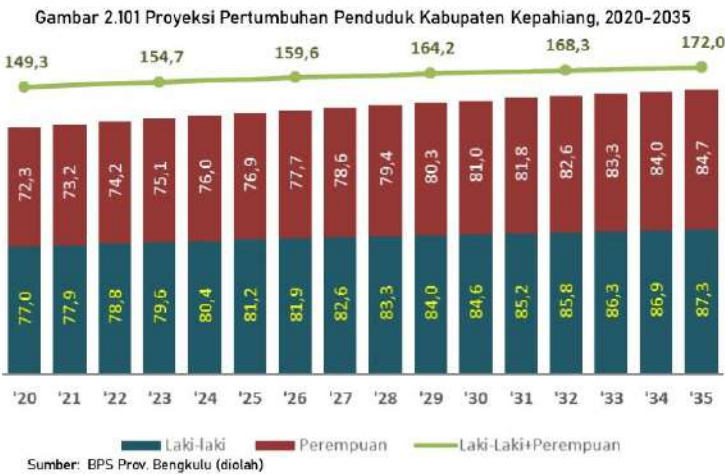
Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam penyusunan dokumen RPJPD periode berikutnya harus dipastikan bahwa seluruh indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran-sasaran yang ditetapkan akan didukung dengan ketersediaan data yang baik dan lengkap sehingga dapat ditentukan data pada kondisi awal perencanaan, data pada kondisi akhir perencanaan, dan data selama periode RPJPD dilaksanakan. Dengan demikian, pelaksanaan RPJPD dapat diukur, dinilai dan dievaluasi dengan baik dan tepat baik dalam ketercapaian target RPJPD, perkembangan pencapaian target RPJPD, perkembangan pencapaian sasaran makro daerah maupun penerjemahan RPJPD dalam setiap periode RPJMD.
- 2) Penentuan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pencapaian sasaran RPJPD harus dilakukan berdasarkan prinsip Specific, Measurable, Achievable, Result-Oriented/Relevant dan Time-Bound (SMART). Artinya, pertama, indikator-indikator yang digunakan harus jelas dan fokus sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Kedua, indikator-indikator yang digunakan dapat diukur dengan skala penilaian tertentu (kuantitas atau kualitas). Untuk jenis data dalam bentuk kualitas dapat dikuantitatifkan dengan persentase atau nominal. Ketiga, indikator-indikator yang digunakan dapat dicapai dengan biaya yang masuk akal dan dengan metode yang sesuai, serta berada di dalam rentang kendali dan kemampuan unit kerja dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan. Keempat, indikator-indikator yang digunakan harus terkait secara logis dengan kebijakan/program/kegiatan yang diukur, tupoksi serta realisasi tujuan dan sasaran strategis organisasi. Kelima, indikator-indikator yang digunakan harus memperhitungkan rentang waktu pencapaian, untuk analisis perbandingan kinerja dengan masa-masa sebelumnya.
- 3) Untuk menjamin efektivitas dan konsistensi penerjemahan Misi RPJPD kedalam Sasaran RPJMD maka perlu dilakukan pengaturan bersama antara Pemda Kabupaten Kepahiang dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang bahwa sebelum diselenggarakannya pemilihan kepala daerah (bupati) secara langsung maka Tim Sukses seluruh calon pasangan kepala daerah harus mendapatkan informasi yang lengkap dari Bappeda Kabupaten Kepahiang yang terdiri dari:
 - a) Amanat RPJPD yang harus diterjemahkan kedalam RPJMD sehingga Visi dan Misi seluruh calon kepala daerah - yang nantinya akan diterjemahkan kedalam RPJMD - tidak melenceng jauh dari amanat RPJPD atau bahkan bertentangan dengan amanat RPJPD; dan
 - b) Hasil evaluasi RPJMD pada periode sebelumnya. Dengan demikian maka tingkat konsistensi, kesinambungan sekaligus keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Kepahiang dapat dijaga dengan baik dalam jangka panjang.

2.7. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.7.1. Proyeksi Pertumbuhan Penduduk 2020-2035

Jumlah penduduk Kabupaten Kepahiang diperkirakan akan mencapai sebanyak 172 ribu jiwa pada akhir 2035. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk saat ini (2023) berarti terdapat penambahan sekitar 17,3 ribu jiwa atau bertambah sekitar 11,2% dari kondisi saat ini. Lebih lanjut, hasil proyeksi penduduk berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan oleh BPS Provinsi Bengkulu menggambarkan bahwa, pada 2035, jumlah penduduk laki-laki akan mencapai kurang lebih berjumlah 87,3 ribu jiwa atau 50,8%. Sementara penduduk perempuan mencapai jumlah 84,7 ribu jiwa atau sekitar 49,2% dari total penduduk pada tahun tersebut.

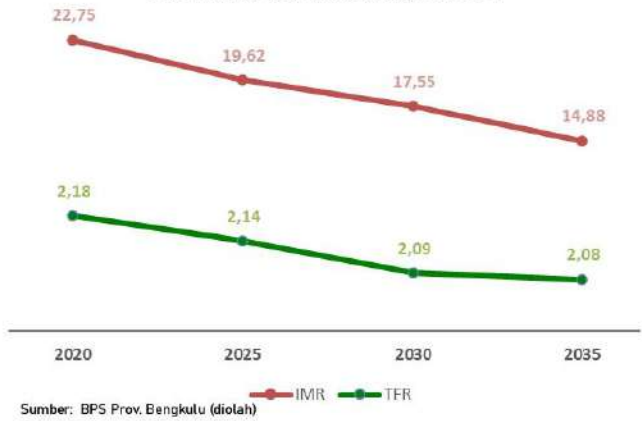


2.7.2. Perkembangan Faktor Fertilitas Dan Mortalitas

Lebih jauh, jika melihat faktor fertilitas dan mortalitas yang berkorelasi positif terhadap laju pertumbuhan penduduk terlihat bahwa perkembangan angka kelahiran total atau *Total Fertility Rate* (TFR) diproyeksikan akan cenderung menurun sejak 2020-2035. Wanita selama masa reproduksi, perkembangannya cenderung menurun dari sebesar 2,18 pada 2020 menjadi sebesar 2,08 pada 2035.

Meskipun terjadi penurunan faktor fertilitas, namun dari sisi faktor mortalitas hasil proyeksi juga menggambarkan adanya kecenderungan menurun dengan lebih signifikan seiring waktu tersebut. Angka kematian bayi atau *Infant Mortality Rate* (IMR), yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada 2020, menunjukkan adanya penurunan dari sebesar 22,8 per seribu kelahiran menjadi 14,9 pada 2035.

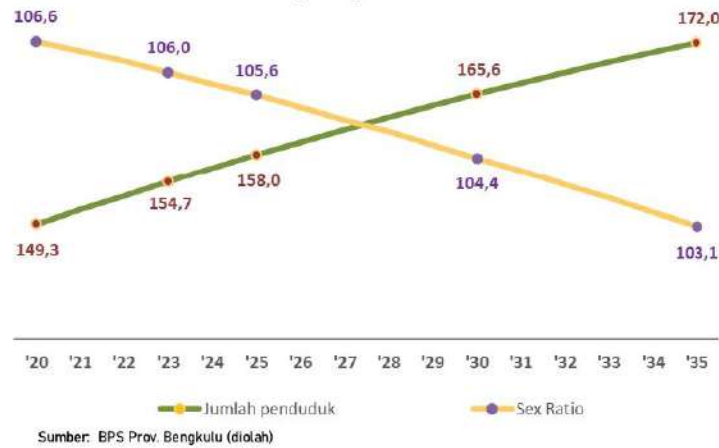
Gambar 2.102 Proyeksi Perkembangan Faktor Fertilitas dan Mortalitas Penduduk Kabupaten Kepahiang, 2020-2035



2.7.3. Perkembangan Rasio Jenis Kelamin

Dengan perkembangan tersebut, komposisi penduduk berdasarkan gender juga mengalami pergeseran. *Sex ratio* (perbandingan jumlah penduduk laki-laki per 100 orang penduduk perempuan) bergeser menjadi relatif lebih berimbang selama 2020-2035. Pada 2020, jumlah penduduk lak-laki mencapai sekitar 77 ribu jiwa (51,6%) dan penduduk perempuan mencapai kurang lebih 72,3 ribu jiwa (48,4%), di mana *sex ratio* pada tahu tersebut sebesar 106,6. Hal ini berarti terhadap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 107 penduduk lak-laki pada tahun 2020.

Gambar 2.103 Proyeksi Perkembangan Jumlah dan Sex Ratio Penduduk Kabupaten Kepahiang, 2020-2035

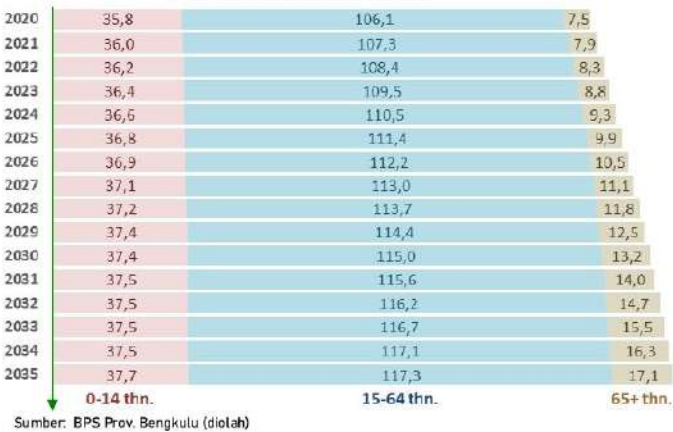


Trend grafik *sex ratio* yang cenderung menurun seiring waktu menggambarkan makin bertambahnya jumlah penduduk perempuan seiring waktu. Pada 2035, rasio menurun menjadi sekitar 103,1 di mana diperkirakan dari sekitar 100 orang penduduk perempuan akan terdapat sekitar 103 orang penduduk laki-laki pada tahun tersebut.

2.7.4. Rasio Ketergantungan

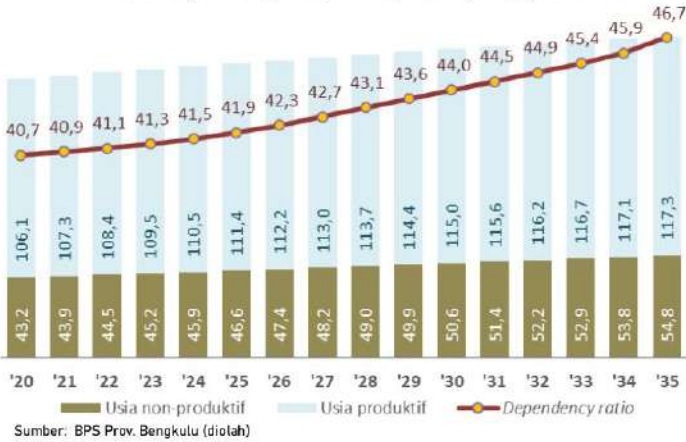
Sementara itu, hasil proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Kepahiang menurut umur tahun 2020-2035 meskipun secara umum menunjukkan adanya peningkatan jumlah, namun tingkat signifikansinya cenderung bervariasi di masing-masing kelompok umur. Pada kelompok umur 0-14 tahun, misalnya, secara umum terdapat pertumbuhan jumlah penduduk kategori usia ini, dari sekitar 35,8 ribu jiwa pada 2020 diproyeksikan bertambah sekitar 1.900 jiwa menjadi kurang lebih 37,7 ribu jiwa pada 2035.

Gambar 2.104 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Usia 0-14, 15-64, dan 65+ Kabupaten Kepahiang, 2020-2035



Jumlah penduduk pada kelompok umur 15-64 tahun diproyeksikan mengalami pertumbuhan paling besar sekitar 11,9 ribu jiwa selama rentang waktu tersebut, dari 106,1 ribu jiwa pada 2020 bertambah menjadi 117,3 ribu jiwa pada 2035. Pada kelompok ketiga, penduduk usia 65 tahun ke atas, hasil proyeksi menunjukkan penambahan jumlah yang cukup signifikan dari sekitar 7,5 ribu jiwa pada 2020 menjadi 17,1 ribu jiwa pada 2035 atau bertambah sekitar 9,6 ribu jiwa seiring waktu.

Gambar 2.105 Proyeksi Perkembangan Penduduk Usia Produktif dan Non-Produktif dan Angka Ketergantungan Kabupaten Kepahiang, 2020-2035



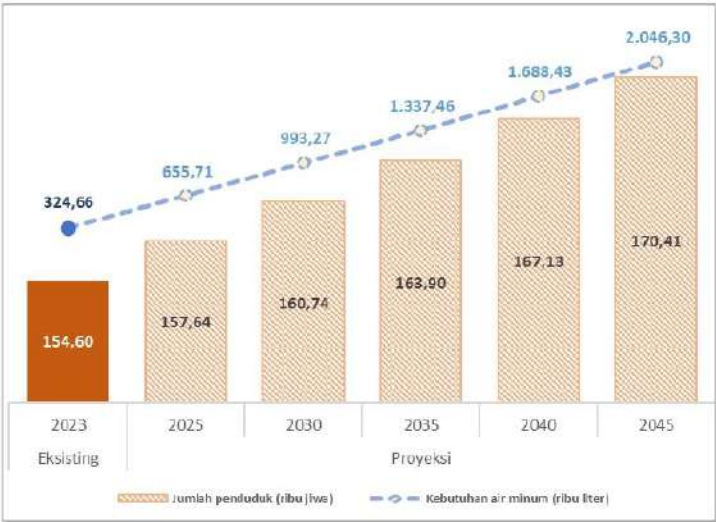
Pergeseran komposisi penduduk menurut umur ini pada gilirannya juga mempengaruhi tingkat ketergantungan penduduk Kabupaten Kepahiang selama 2020-2035. Rasio ketergantungan penduduk (*dependency ratio*) diproyeksikan meningkat seiring waktu. Jika, pada 2020, dari sebanyak 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 41 orang penduduk non-produktif (40,7%), maka pada 2035, rasio ini meningkat menjadi 46,7%, yang artinya bertambah menjadi sekitar 47 orang penduduk non-produktif yang harus ditanggung oleh sebanyak 100 orang penduduk usia produktif. Terjadinya peningkatan rasio ini agaknya dipengaruhi oleh penambahan jumlah penduduk pada kategori umur sebagaimana gambaran di atas. Meskipun secara umum jumlah penduduk pada kategori usia produktif (15-64 tahun) meningkat dengan signifikan, namun di sisi lain, jumlah penduduk non-produktif, khususnya pada kelompok usia lanjut (65+), juga mengalami peningkatan secara cukup signifikan.

2.8. Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik Kabupaten Kepahiang, 2025-2045

2.8.1. Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Kondisi eksisting kebutuhan air saat ini (2023) adalah sebanyak 324,66 ribu liter bagi sekitar 154,6 ribu jiwa penduduk Kabupaten Kepahiang. Kebutuhan jumlah air minum pada akhir 2045 diperkirakan mencapai sekitar 2.046 ribu liter (2,05 juta liter), yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan seluruh penduduk Kabupaten Kepahiang yang diperkirakan mencapai 170,41 ribu jiwa pada akhir periode tersebut.

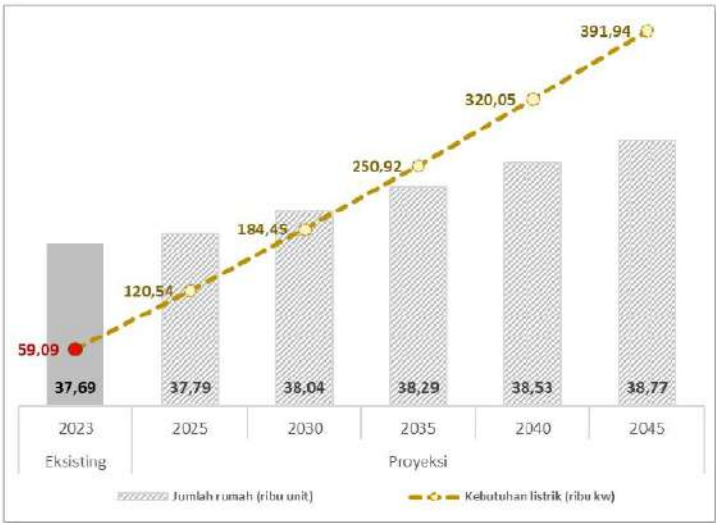
Gambar 2.106 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Kepahiang, 2025-2045



2.8.2. Proyeksi Kebutuhan Listrik

Sementara itu, kebutuhan listrik Kabupaten Kepahiang pada akhir periode 2045 diperkirakan mencapai 391,9 ribu kw yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 38,77 ribu unit rumah penduduk pada akhir periode tersebut. Jumlah ini bertambah secara signifikan berdasarkan perhitungan proyeksi pertambahan jumlah penduduk dan jumlah rumah tinggal selama rentang waktu 20 tahun tersebut. Kondisi eksisting saat ini adalah tersedianya sejumlah 59,09 ribu kw yang digunakan untuk kebutuhan sekitar 27,69 ribu unit rumah yang ada di Kabupaten Kepahiang.

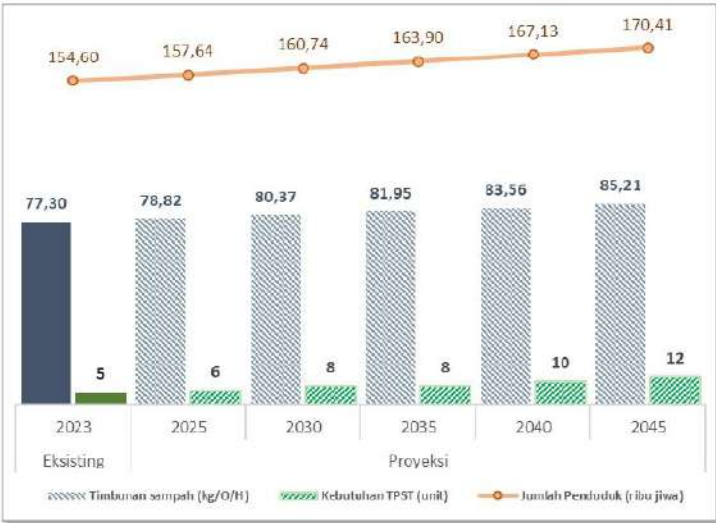
Gambar 2.107 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Kepahiang, 2025-2045



2.8.3. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah menjadi masalah yang perlu segera dicarikan solusi. Seiring waktu, dengan makin bertambahnya jumlah penduduk, masalah sampah yang mungkin belum dianggap penting kedepannya dapat menjadi persoalan yang signifikan, khususnya, bagi Kabupaten Kepahiang yang termasuk daerah yang sedang berkembang.

Gambar 2.108 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Sampah Kabupaten Kepahiang, 2025-2045



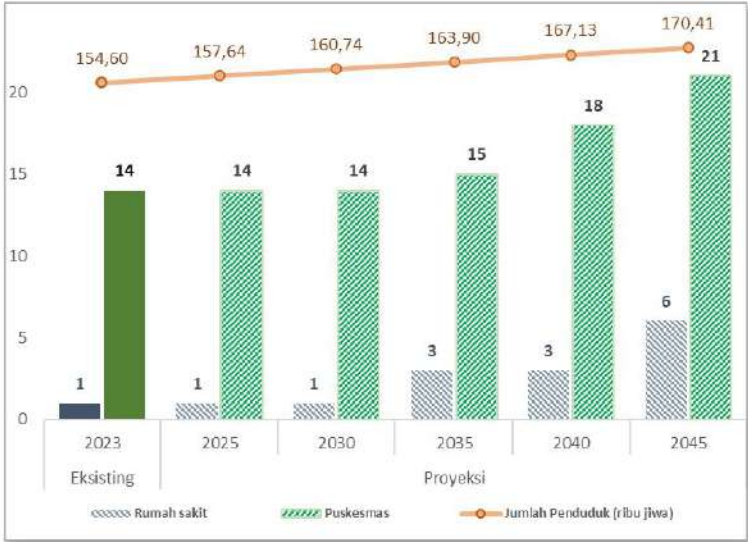
Terkait hal tersebut, saat ini (2023) upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Kepahiang menangani pengelolaan terhadap sekitar 77,3 kg timbunan sampah per orang per hari. Pengelolaan ini dilakukan dengan dukungan sebanyak 5 (lima) unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang tersebar di beberapa titik wilayah Kabupaten Kepahiang.

Kedepannya, diproyeksikan timbunan sampah akan naik menjadi 85,21 kg per orang per hari pada akhir 2045. Dengan proyeksi permasalahan tersebut, maka kebutuhan TPST diproyeksikan sebanyak 12 unit TPST pada akhir periode 20 tahun tersebut.

2.8.4. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Lebih lanjut, terkait kebutuhan fasilitas kesehatan bagi penduduk di Kabupaten Kepahiang, dapat disampaikan bahwa kondisi saat ini, terdapat sebanyak 1 unit rumah sakit (RS) dan 14 unit puskesmas untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat Kabupaten Kepahiang yang mencapai jumlah 154,6 ribu jiwa penduduk pada akhir 2023.

Gambar 2.109 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kepahiang, 2025-2045



Seiring dengan penambahan jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 170,41 ribu jiwa penduduk pada 2045, terdapat kenaikan kebutuhan fasilitas kesehatan di Kabupaten Kepahiang yang diproyeksikan kebutuhannya menjadi sebanyak 6 unit RS dan 21 unit puskesmas pada akhir 2045 tersebut.

2.8.5. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

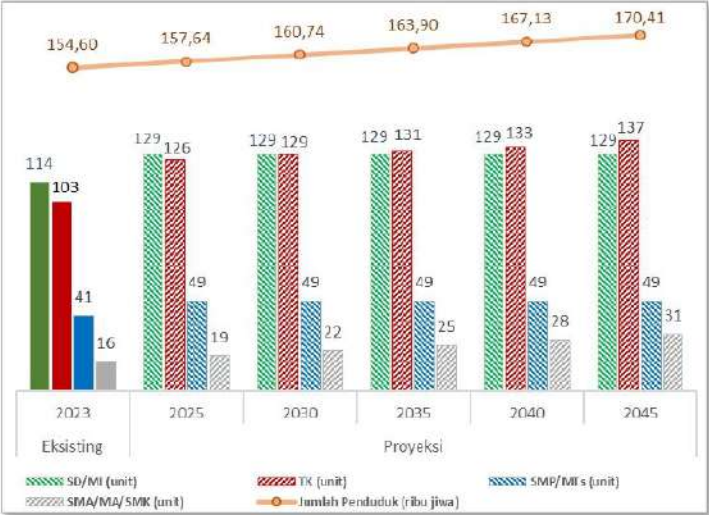
Sementara itu, terkait bidang pendidikan, berdasarkan perhitungan perkiraan pertambahan jumlah penduduk Kabupaten Kepahiang selama 2025-2045, diperkirakan pada akhir 2045 terdapat kebutuhan fasilitas pendidikan dasar dan menengah sebanyak:

Tabel 2.13 Perkiraan kebutuhan fasilitas pendidikan pada akhir 2045

No.	Fasilitas pendidikan	Kebutuhan akhir 2045
1	TK dan sederajatnya	129
2	SD dan sederajatnya	137
3	SMP dan sederajatnya	49
4	SMA dan sederajatnya	31

Jumlah ketersediaan fasilitas tersebut merupakan hasil proyeksi kebutuhan penduduk Kabupaten Kepahiang terhadap sarana pendidikan, yang pada akhir 2045 tersebut diperkirakan mencapai 170,41 ribu jiwa penduduk.

Gambar 2.110 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Kepahiang, 2025-2045





2.9. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.8.1. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi. Rencana struktur ruang yang dibentuk ini mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan
2. Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten, mencakup:

1. Perwujudan pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten, meliputi perwujudan pusat kegiatan mulai dari PKW, PKL/PKL, PPK, hingga PPL di wilayah kabupaten Kepahiang;
2. Perwujudan sistem jaringan prasarana kabupaten, yang mencakup pula sistem prasarana nasional dan wilayah/regional di wilayah kabupaten.
3. Perwujudan sistem prasarana jaringan transportasi di wilayah kabupaten, yang meliputi:
 - a. sistem prasarana transportasi darat, udara, dan air;
 - b. perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air;
 - c. perwujudan sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan;
 - d. perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
 - e. perwujudan sistem jaringan prasarana lingkungan (persampahan, sanitasi dan drainase); dan
 - f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

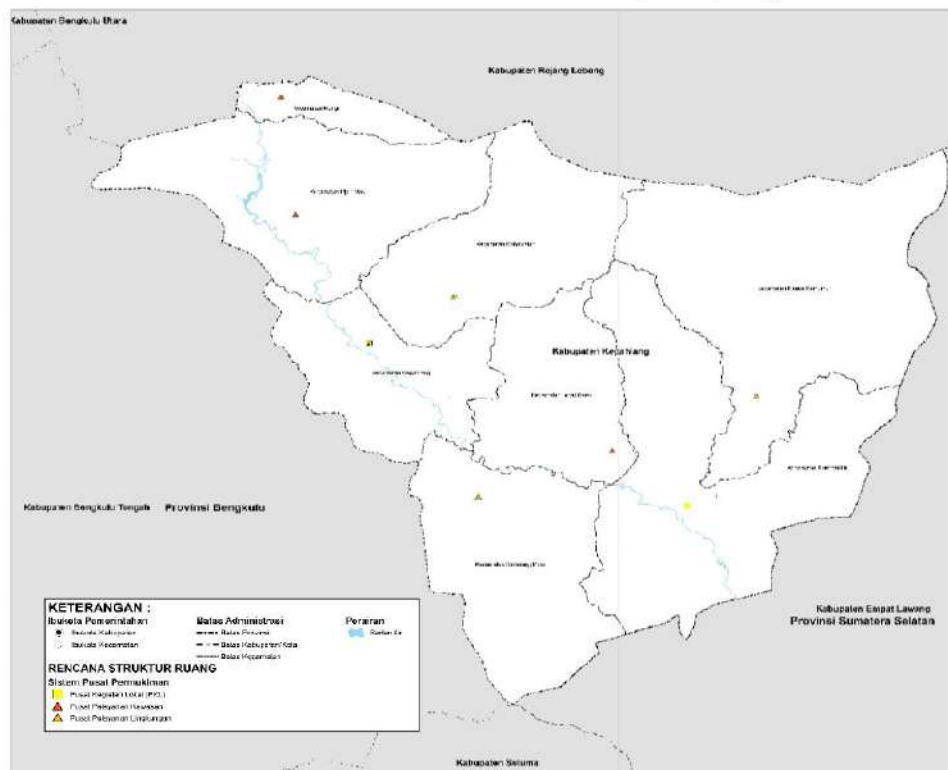
A. Perwujudan Pengembangan Pusat Kegiatan

Program perwujudan pengembangan pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Kepahiang meliputi:

1. Pengembangan dan Penataan PKW Kepahiang
2. Pengembangan dan Penataan PKL Keban Agung
3. Pengembangan PKL Ujan Mas Atas (Kecamatan Ujan Mas);
4. Pengembangan PPK, mencakup:
5. Penanjung Panjang (Kecamatan. Tebat Karai)
6. Durian Depun (Kecamatan Merigi)
7. PPL di Kabupaten Kepahiang ditetapkan pada;
8. Kota Batu Kalung di Kecamatan Muara Kemumu;
9. Kota Tangsi Baru di Kecamatan Kabawetan;
10. Kota Lubuk Saung di Kecamatan Seberang Musi.

Dalam pengembangan pusat kegiatan tersebut, maka perlu adanya dukungan dan ketersediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanannya.

Gambar 2.112 Rencana Sistem Pusat Pemukiman Kabupaten Kepahiang, 2023-2043



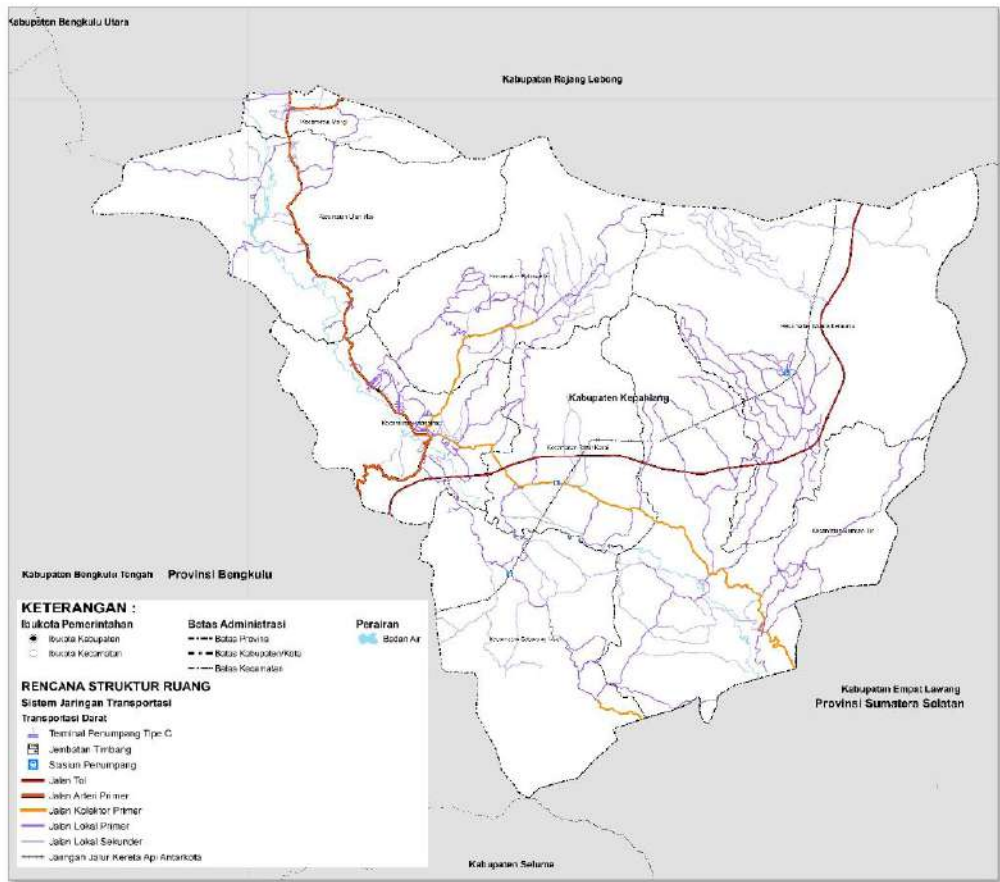
Tabel 2.14 Program Perwujudan Pengembangan Pusat Kegiatan

No.	Program	Kegiatan Pengembangan
1	PKW (Pusat Kegiatan Wilayah)	a. Peningkatan pelayanan rumah sakit kelas C menjadi B. b. Peningkatan sarana Pasar Lokal Utama I. c. Pembangunan terminal tipe B. d. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana Terminal Barang, serta prasarana dan sarana Sistem Angkutan Umum Massal. e. Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan. f. Pembangunan prasarana TPA Regional di Penanjung Panjang (Kec.TebatKarai), dan di Muara Langkap (Kec. Bermani Ilir). g. Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) h. Pengembangan prasarana dan sarana permukiman (air bersih, drainase, sanitasi). i. Pengembangan Prasarana Pendidikan tingkat Perguruan Tinggi di Kawasan perkotaan Kepahiang. j. Pengembangan/pembangunan prasarana olahraga (sport center) dengan skala pelayanan seluruh wilayah Kabupaten Kepahiang.
2	PKL (Pusat Kegiatan Lokal)	a. Peningkatan pelayanan kesehatan dengan skala pelayanan kecamatan dan wilayah kecamatan lain. b. Peningkatan sarana Pasar Lokal. c. Pembangunan terminal tipe C. d. Peningkatan kapasitas pelayanan sosial budaya. e. Peningkatan kapasitas pelayanan olahraga dan kepemudaan. f. Pengembangan prasarana dan sarana permukiman (air bersih, drainase, sanitasi). g. Pengembangan Prasarana Pendidikan tingkat Perguruan Tinggi.
3	PKL (Pusat Kegiatan Lokal promosi)	Terdapat 1 (Satu) lokasi PKL yang akan dikembangkan di Kabupaten Kepahiang, adalah PKL Ujan Mas Atas (Kecamatan Ujan Mas). Pengembangan PKL tersebut dilakukan melalui kegiatan: • Peningkatan pelayanan Kesehatan (Puskesmas). • Peningkatan sarana Pasar Lokal. • Pembangunan Terminal tipe C; • Pengembangan prasarana dan sarana permukiman (air bersih, drainase, sanitasi).
4	PPK (Pusat Pelayanan Kawasan)	a. Peningkatan pelayanan Puskesmas. b. Peningkatan sarana pasar lingkungan c. Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perkotaan (Ibukota Kecamatan/IKK). d. Pengembangan prasarana dan sarana permukiman (air bersih, drainase, sanitasi).
5	PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan)	a. Peningkatan pelayanan puskesmas atau balai pengobatan/klinik. b. Peningkatan sarana pasar lingkungan. c. Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perdesaan. d. Pengembangan prasarana dan sarana dasar permukiman (air bersih, drainase, sanitasi).

B. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten

Program perwujudan sistem jaringan prasarana di Kabupaten Kepahiang, mencakup perwujudan sistem jaringan prasarana transportasi; sistem jaringan prasarana sumber daya air; sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan; sistem jaringan prasarana telekomunikasi; dan sistem jaringan prasarana lingkungan; dan perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Gambar 2.113 Rencana Sistem Jaringan Transportasi Kabupaten Kepahiang, 2023-2043



C. Perwujudan Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi

Pengembangan sistem jaringan transportasi ditujukan untuk mendukung terciptanya struktur ruang wilayah yang sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang dan penyebaran kegiatan yang telah direncanakan. Berdasarkan analisis pengembangan wilayah dan perkembangan kegiatan pada masa yang akan datang, maka terdapat beberapa aspek penting yang menjadi perhatian utama dalam merencanakan sistem jaringan transportasi antara lain:

1. Bahwa sistem transportasi lokal memiliki keterkaitan yang kuat dengan sistem transportasi regional;
2. Pengembangan simpul-simpul transportasi harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan sistem transportasi lainnya, terutama proses peralihan antar moda transportasi.
3. Bahwa setiap prasarana dan sarana transportasi memiliki karakteristik pelayanan yang spesifik dan berhirarki, dan secara spasial saling berpengaruh dengan pola guna lahan dan struktur ruang wilayah atau kawasan.

Untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat pelayanan prasarana transportasi guna mendukung berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan, program perwujudan pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi diantaranya adalah:

1. Dukungan peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan arteri primer (Jalan Nasional);
2. Dukungan peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan kolektor primer (Jalan Provinsi);
3. Pembangunan jaringan jalan lokal primer dan jalan lingkungan (Jalan Kabupaten);
4. Peningkatan kapasitas pelayanan sistem jaringan jalan lokal primer dan jalan lingkungan (Jalan Kabupaten);
5. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana terminal Tipe C dan Tipe B;
6. Peningkatan dan pengembangan sistem angkutan umum;
7. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pelayanan transportasi sungai, danau;
8. Dukungan pengembangan atau pembangunan jaringan jalur kereta api.

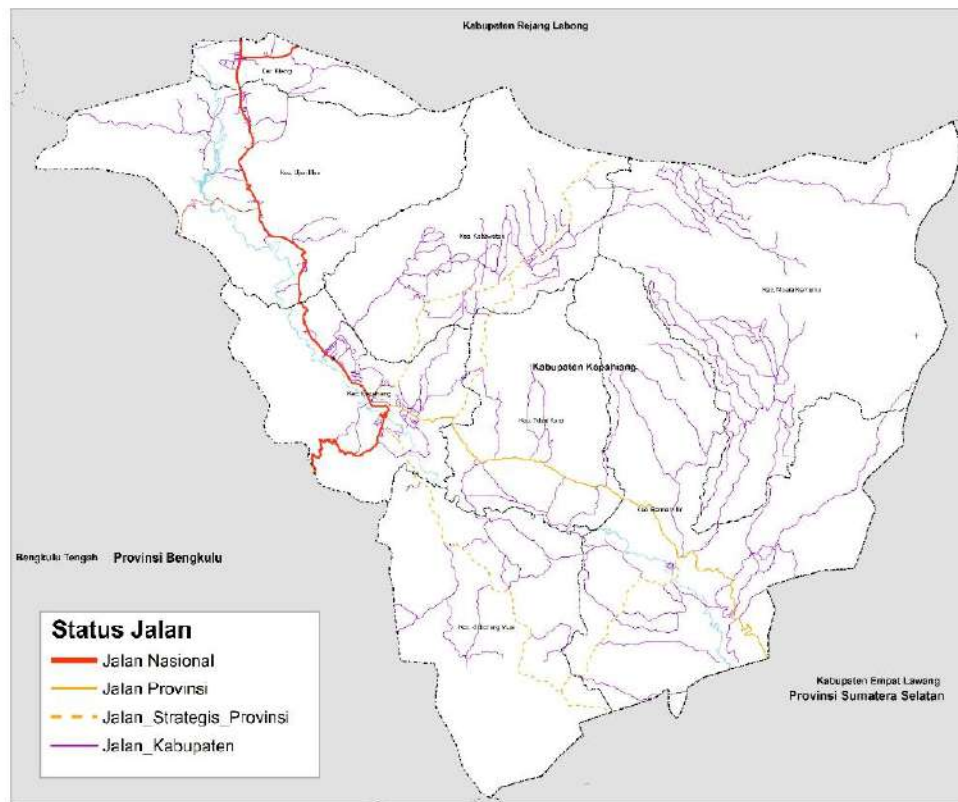
Program perwujudan pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi meliputi kegiatan-kegiatan pengembangan, diantaranya, dapat dilihat dalam Tabel 2.12 sebagai berikut:

Tabel 2.15 Program Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten

No.	Program	Kegiatan Pengembangan
1.	Program Transportasi Darat (Jaringan Jalan)	a. Dukungan Peningkatan Jalan Arteri Primer (Jalan Nasional) yang menghubungkan Ruas Jalan Lubuk Linggau – Curup – Kepahiang – Bengkulu. b. Dukungan Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer (Jalan Provinsi) • Ruas Jalan Pagar Alam – Kepahiang, yang menghubungkan Kabupaten Kepahiang–Kota Pagar alam. • Ruas Jalan Kepahiang – Tebat Karai. • Ruas JalanKepahiang-Kabaweten • Ruas Jalan Taba Mula di Kecamatan Merigi • Ruas Jalan Bumi Sari – Tanjung Alam • Ruas Jalan Tebat Monok – Cirebon Baru • Ruas Jalan Taba Air Pauh – Batas Sumatera Selatan • Ruas Jalan Tpk. Gedung-Batas Kec. Kepahiang • Ruas Jalan Tebat Karai-Bermani Ilir • Ruas Jalan Cirebon Baru-Kab. Bengkulu Utara • Ruas Jalan Tpk. Gedung-Batas Rejang Lebong • Ruas Jalan Tebat Monok-Bandung Baru c. Peningkatan Jaringan Jalan Lokal Primer (Jalan Kabupaten). Ruas Jalan yang menghubungkan antara PPK – PPL dan Antara PPK – PPL. d. Pembangunan jalan baru meliputi: • Pembangunan jalan tol yang menghubungkan Kota Bengkulu dengan Kota Palembang, di Kabupaten Kepahiang akan melintasi Kecamatan Seberang Musi, Kecamatan Tebat Karai dan Kecamatan Bermani Ilir • Pembangunan jalan lingk ar luar yang menghubungkan ke arah Kota Bengkulu – Curup tidak melalui pusat kota Kepahiang dengan jalur dari Tebat Monok – Kelobak (Pusat Pemerintahan Kabupaten Kepahiang). • Pembangunan jalan lingk ar luar Talang Jalang (Desa Taba Santing – Padang Lekat – Kellik). • Pembangunan jalan lingk ar luar Kelobak (Pusat Pemerintahan) – Batu Ampar. • Pembangunan jalan lingk ar luar Bayung – Lubuk Sini. • Pembangunan jalan lingk ar luar yang menghubungkan wilayah pedesaan di bagian utara dan selatan shingga membentuk interkoneksi wilayah dengan menghubungkan wilayah Kecamatan Kepahiang-Muara Kemumu – Seberang Musi dengan fungsi sebagai Jalan Kolektor Primer. e. Rehabilitasi jalan di TWA. Rehabilitasi jalan merupakan upaya membuka keterisolasian desa-desa yang terdapat disekitar TWA. Jalan yang akan direhabilitasi tersebut juga merupakan konsekuensi dari persetujuan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ri. Jalan yang akan direhabilitasi tersebut kurang lebih sepanjang 12 Km.

No.	Program	Kegiatan Pengembangan
2.	Program Pengembangan Prasarana Terminal	a. Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Tebat Monok (Kecamatan Kepahiang) b. Peningkatan dan optimalisasi Terminal Penumpang Tipe C pada PKL dan PKL, mencakup: • Terminal Penumpang Tipe C di Keban Agung (Kecamatan Bermani Ilir) • Terminal Penumpang Tipe C Taba Mulan (Kecamatan Merigi).
3.	Program Pengembangan Sistem Jaringan Rel Kereta Api	a. Rencana pengembangan jaringan jalur kereta api di Kabupaten Kepahiang sesuai dengan rencana jaringan kereta api pada lintas Kota Padang – Kepahiang – Bengkulu (berdasarkan RTRW Provinsi Bengkulu 2011-2031), b. Dukungan terhadap pengembangan jaringan jalur kereta api berikut prasarananya yang melintasi jalur dan menghubungkan antara Kota Padang (Kabupaten Rejang Lebong) – Tebat Karai (Kabupaten Kepahiang)-Karang Tinggi (Kabupaten Bengkulu Tengah) – Kota Bengkulu.

Gambar 2.114 Peta Status Jalan Kabupaten Kepahiang



D. Perwujudan Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Energi Kelistrikan.

Dalam rangka pengembangan sistem jaringan dan pusat pembangkit tenaga listrik baru, kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

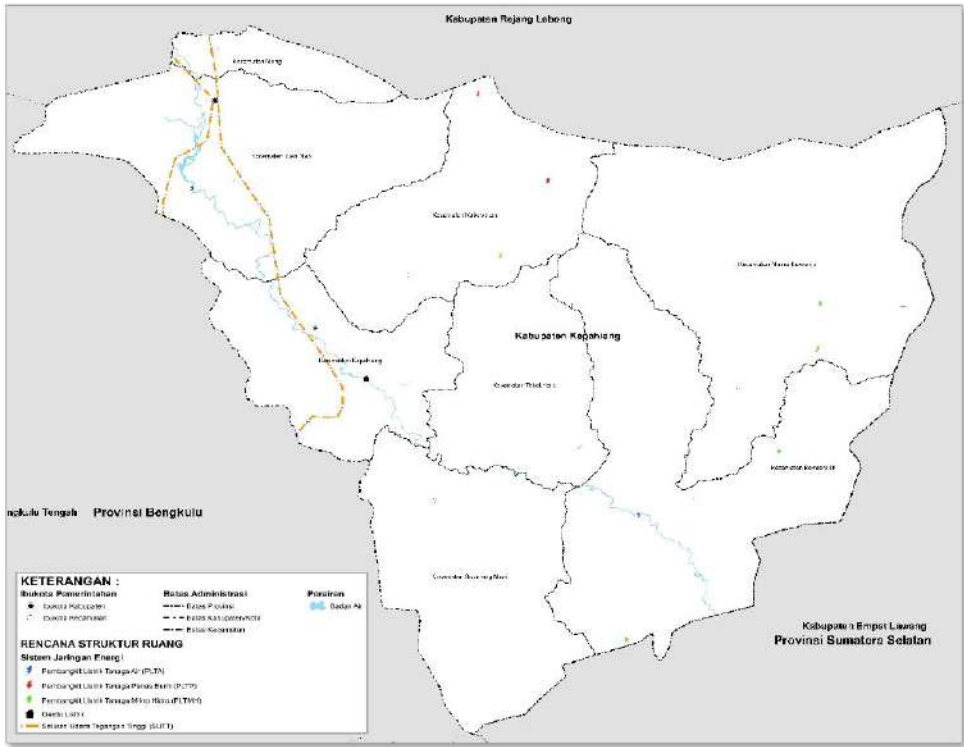
1. Perencanaan sistem jaringan distribusi yang andal.
2. Pengembangan dan peningkatan pembangkit listrik yang ada
3. Interkoneksi sistem pembangkit yang ada.
4. Pengendalian sistem pelayanan pada gardu induk.
5. Memanfaatkan sumber pembangkit energi alternatif untuk mendukung kontinuitas pasokan listrik.
6. Pemanfaatan pusat-pusat pembangkit listrik yang berada di luar wilayah Kab.Kepahiang.

Untuk meningkatkan ketersediaan energi/kelistrikan melalui kegiatan:

1. Peningkatan pasokan daya listrik yang bersumber dari PLN Cabang Sumatera Selatan secara bertahap hingga menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kepahiang.

- 2. Peningkatan kapasitas pembangkit listrik eksisting yang berada di Kecamatan Ujan Mas yaitu PLTA Musi.
- 3. Rencana Pembangunan dan Pengembangan prasarana pembangkit baru dengan alternatif sumber energi yang belum dimanfaatkan secara optimal, yaitu Pengembangan sumber energi panas bumi (geotermal) di Bukit Hitam (Kecamatan Kabawetan), untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB),
- 4. Peningkatan jaringan distribusi listrik untuk mendukung kegiatan industri pada pusat kegiatan utama Kabupaten.
- 5. Peningkatan jaringan distribusi listrik utama ke pusat-pusat kecamatan di Kabupaten Kepahiang.

Gambar 2.115 Rencana Sistem Jaringan Energi Kabupaten Kepahiang, 2023-2043



E. Perwujudan Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

Dalam rangka pengembangan pelayanan jaringan telekomunikasi di Kabupaten Kepahiang, maka kebijakan pengembangan sektor telekomunikasi adalah sebagai berikut:

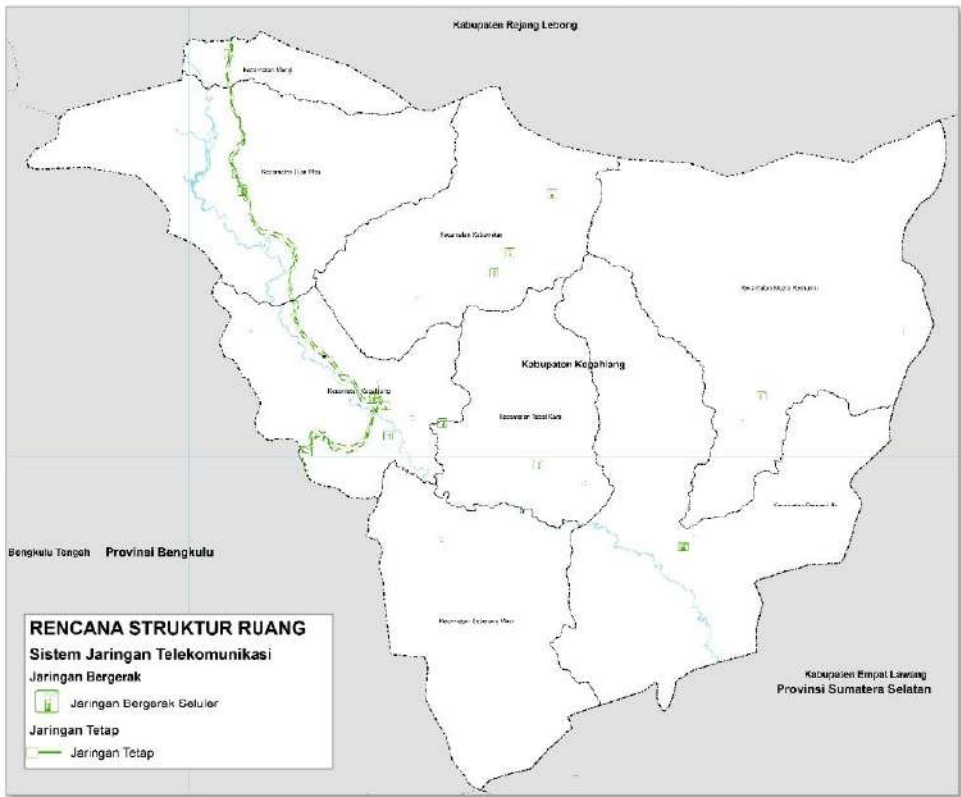
- 1. Pengaturan zona-zona pembangunan tower-tower transmisi selular, terutama yang berada di tengah kota dan pada bangunan-bangunan bertingkat, agar sesuai dengan kriteria teknis, kriteria keselamatan penerbangan dan kriteria keindahan kota.

2. Pemilihan lokasi stasiun transmisi telekomunikasi harus memperhatikan kondisi geologi setempat dan keserasiannya dengan pola pemanfaatan lahan di sekitarnya.
3. Pengembangan jaringan telepon kabel, harus dikembangkan secara bertahap dan ekonomis.
4. Pengembangan sistem jaringan bawah tanah harus memperhatikan rencana pengembangan wilayah pada masa yang akan datang, dan sistem jaringan bawah tanah lainnya lainnya (pipa air bersih, pipa air kotor, jaringan drainase, dan lainnya).

Pengembangan jaringan telekomunikasi berdasarkan atas tingkat kebutuhan suatu wilayah yang mengikuti tingkat perkembangan penduduk, yang dilakukan melalui kegiatan:

1. Pengembangan jaringan komunikasi seluler yang mencakup keseluruhan wilayah Kabupaten Kepahiang, melalui pembangunan Tower BTS Bersama pada semua wilayah Kecamatan.
2. Pengembangan/peningkatan jaringan telekomunikasi kabel terutama untuk layanan kegiatan industri pada Pusat Kegiatan Kabupaten (PKW, PKL dan PKL).

Gambar 2.116 Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi Kabupaten Kepahiang, 2023-2043



F. Perwujudan Pengembangan Sistem Prasarana Sumber Daya Air

Untuk mewujudkan keseimbangan ketersediaan air dalam rangka mewujudkan kota kepahiang ketahanan pangan serta meningkatkan dan mempertahankan jaringan irigasi yang ada, maka program pengembangan prasarana sumberdaya air berupa:

- 1. Peningkatan dan pemeliharaan sumber daya air pada Wilayah Sungai (WS) Lintas Provinsi yang berskala nasional guna menjaga kelestarian lingkungan dilakukan pada (1) WS Musi; dan (2) WS Air Belimbing.
- 2. Rencana pemeliharaan & pengelolaan jaringan irigasi pada Daerah Irigasi (DI) yang ada di Kabupaten Kepahiang yaitu:
- 3. Rencana pengelolaan dan konservasi bendung PLTA Musi sebagai bangunan penampung air untuk penyediaan air baku alternatif, pembangkit listrik, pariwisata, kegiatan budidaya, dan kegiatan ekonomi lainnya.

Tabel 2.16 Jaringan Irigasi Kabupaten Kepahiang 2021

No.	Kecamatan	Jumlah DI (Unit)	Luas Areal (Ha)
1	Kepahiang	18	1.533,00
2	Tebat Karai	17	1.494,01

No.	Kecamatan	Jumlah DI (Unit)	Luas Areal (Ha)
3	Kabawetan	13	710,24
4	Merigi	5	689,00
5	Bermani Ilir	12	530,00
6	Ujan Mas	10	649,00
7	Muara Kemumu	2	366,00
8	Seberang Musi	6	355,00
	Total	83	6.326,25

Sumber: Bappeda Kabupaten Kepahiang

G. Perwujudan Pengembangan Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Sistem Prasarana lingkungan yang akan dikembangkan di Kabupaten Kepahiang, terdiri atas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); Prasarana Pengelolaan Air Limbah; Prasarana Pengelolaan Persampahan; dan Drainase.

1. Sistem Penyediaan Air Minum, dengan program pengembangan meliputi:
 - a) Peningkatan akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih.
 - b) Peningkatan kapasitas pelayanan / cakupan layanan.
 - c) Pembangunan prasarana air bersih bagi masyarakat di pedesaan.
 - d) Optimalisasi sumber air dengan memanfaatkan kapasitas yang belum terpakai.
 - e) Peningkatan kualitas air hasil olahan sesuai dengan standar Menkes RI Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 untuk SPAM Perpipaan PDAM.
 - f) Penurunan kehilangan air pada sistem perpipaan sesuai dengan standar pelayanan bidang air minum (Kementerian PU-Ditjen Cipta Karya).
 - g) Peningkatan kontinuitas pelayanan menjadi 24 jam sesuai dengan standar pelayanan bidang air minum (Kementerian PU-Ditjen Cipta Karya).
 - h) Perlindungan terhadap air baku.
 - i) Pembuatan aturan dari Pemerintah Daerah untuk pengelolaan sistem perpipaan non PDAM dan SPAM Non Perpipaan.

Pengembangan jaringan air bersih perpipaan, dan gravitasi (MAP dan MAG) diprioritaskan pada daerah-daerah yang rawan air minum dengan laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi seperti di Kecamatan Bermani Ilir, Muara Kemumu, Seberang Musi dan Tebat Karai.

2. Prasarana Pengelolaan Air Limbah, dengan program pengembangan meliputi:
 - a) Pembangunan pengolahan limbah khusus untuk RSUD Kepahiang;
 - b) Pembangunan IPAL di daerah Muara Langkap (Kec. Bermani Ilir);
 - c) Peningkatan sarana pengolahan air limbah setempat bagi masyarakat di pedesaan dan pengolahan air limbah secara komunal untuk daerah perkotaan;
 - d) Sosialisasi tentang sanitasi lingkungan yang sehat kepada masyarakat.

3. Pengelolaan Persampahan, Beberapa arahan program untuk pengelolaan persampahan diantaranya:

- a) Perluasan cakupan layanan bidang persampahan.
- b) Pembangunan TPA Regional dan TPA Wilayah.
- c) Program pemanfaatan limbah sampah.

Kegiatan yang dapat menunjang program penanggulangan sampah di Kabupaten Kepahiang antara lain:

- a) Penambahan jumlah truk sampah
- b) Pembangunan TPA di wilayah Ujan Mas.
- c) Penambahan jumlah truck tinja
- d) Pengadaan Arm Roll.
- e) Pembangunan TPS terutama pada daerah pemukiman.
- f) Pembangunan pabrik pengolahan sampah (kompos)

Penanganan diprioritaskan pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepahiang terutama pada pasar-pasar karena jumlah timbulan sampah yang bersumber dari sayuran dan buah-buahan sangat tinggi.

4. Program untuk jaringan drainase di Kabupaten Kepahiang, diantaranya meliputi:

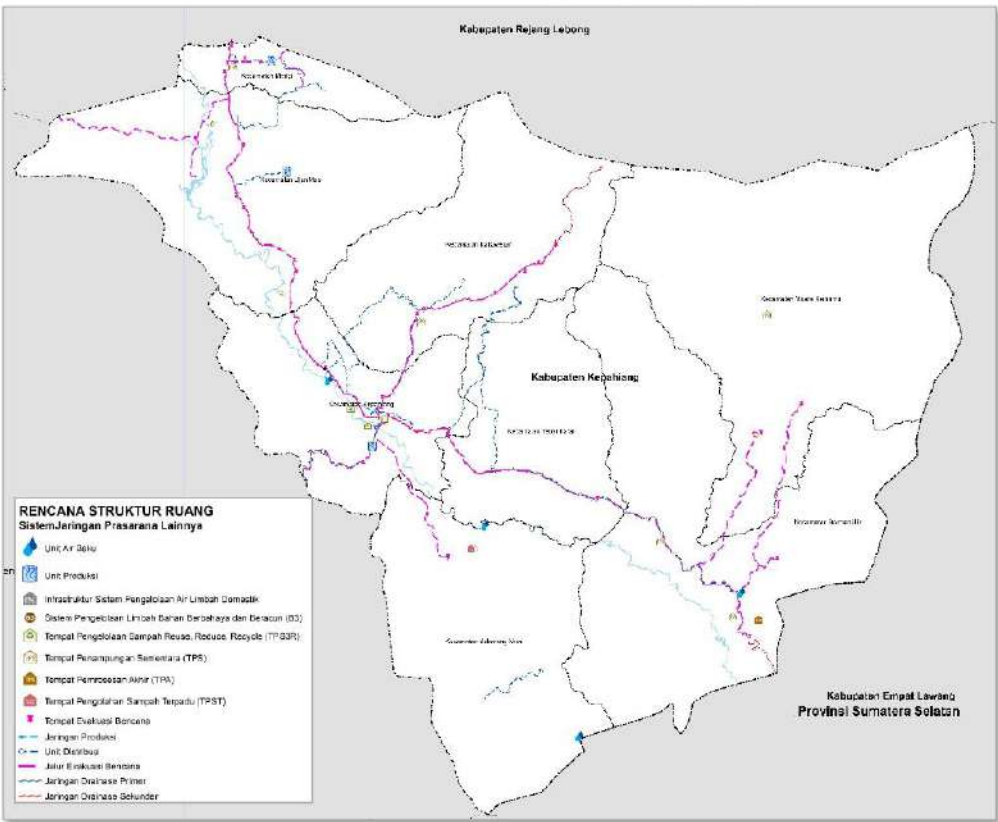
- a) Pembangunan saluran drainase permukiman
- b) Perbaikan dan pemeliharaan drainase
- c) Penyediaan dan perbaikan bak kontrol
- d) Penyesuaian elevasi drainase dan saluran
- e) Pengangkatan sampah dan sedimentasi serta pembersihan drainase.
- f) Operasional dan Pemeliharaan jaringan drainase
- g) Sosialisasi pencegahan banjir.

H. Perwujudan Pengembangan Prasarana Wilayah Lainnya

Perwujudan Pengembangan Prasarana Wilayah Lainnya dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Pengembangan Prasarana Perumahan dan Permukiman
2. Pengembangan Prasarana Perkantoran dan Pemerintahan
3. Pengembangan Prasarana Perdagangan
4. Pengembangan Prasarana Pendidikan
5. Pengembangan Prasarana Kesehatan.

Gambar 2.117 Rencana Sistem Prasarana Lainnya Kabupaten Kepahiang, 2023–2043

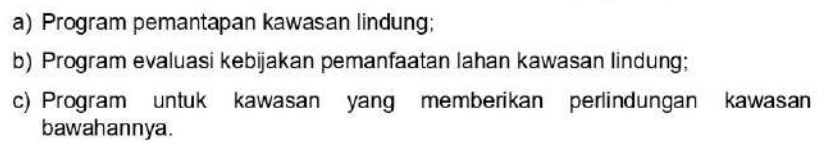


Tabel 2.17 Program Pengembangan Prasarana Perumahan dan Permukiman

No.	Program	Kriteria	Kegiatan Pengembangan
1	Pengembangan Prasarana Perumahan dan Permukiman	a. Kawasan permukiman diarahkan untuk mengisi kawasan belum terbangun terutama di kawasan pusat kota. Ini dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan dari kegiatan-kegiatan yang telah berkembang dan mengurangi perkembangan kawasan permukiman secara sporadis. b. Pengembangan kawasan permukiman pada pusat – pusat kegiatan, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok, sedapat mungkin agar berada dalam pengawasan instansi terkait melalui mekanisme IMB. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan kawasan permukiman yang teratur dan harmonis diantara kawasan permukiman, dan antara kawasan permukiman dengan kawasan non permukiman lainnya. c. Penataan kawasan perumahan sepanjang aliran sungai disesuaikan dengan ketentuan sempadan. d. Perluasan fisik kawasan perumahan disesuaikan dengan arahan pola ruang dan hasil analisis kebutuhan ruang yang diproyeksikan berdasarkan kecenderungan pertumbuhan penduduk.	a. Pengembangan permukiman dengan menerapkan konsep hunian berimbang perumahan ukuran besar, sedang, kecil yaitu 1:3:6, sedangkan pengadaannya dilakukan oleh swasta, pemerintah, dan masyarakat. b. Pengembangan prasarana dan sarana lingkungan pendukung perumahan. c. Perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan, khususnya untuk perumahan dan kawasan kumuh.
2	Pengembangan Prasarana Perkantoran dan Pemerintahan	a. Berada pada jalur – jalur jalan utama atau jalan protokol yang mempunyai tingkat aksesibilitas ke kecamatan lain cukup tinggi. b. Memiliki struktur geologi yang mampu mendukung beban bangunan berkonstruksi tinggi. c. Tidak berdampingan dengan kegiatan yang bersifat polutan seperti kawasan industri, pasar tradisional, dan terminal. d. Ketersediaan air bersih terjamin.	a. Penataan/pengelompokan terhadap instansi-instansi yang memiliki keterkaitan koordinasi yang tinggi. b. Relokasi kawasan pemerintahan, khususnya bagi dinas-dinas yang belum memiliki bangunan tetap, pengaturan lokasinya dapat disesuaikan berdasarkan intensitas koordinasi antar instansi.
3	Pengembangan Prasarana Perdagangan	a. Lokasi tergantung pada hasil analisis pasar dengan mempertimbangkan distribusi penduduk, daya beli dan lokasi dari pusat-pusat yang bersaing. b. Pusat perdagangan skala regional berada pada jalur arteri. c. Dekat dengan lokasi perdagangan, terminal regional, dan terminal barang. d. Mempunyai sirkulasi yang baik. e. Mempunyai jalur/jalan lain menuju atau pun keluar dari pusat kawasan. f. Secara fisik berada pada kondisi topografi yang homogen (datar). g. Mempunyai cukup lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau dan lahan parkir.	a. Relokasi kawasan perdagangan yang sesuai dengan peruntukannya. b. Pengembangan prasarana perdagangan regional pada pusat kegiatan PKW, PKL dan PPK. c. Pengembangan prasarana perdagangan lingkungan lokal pada pusat kegiatan PPL. d. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung.

No.	Program	Kriteria	Kegiatan Pengembangan
4	Pengembangan Prasarana Pendidikan	a. Simbiosis dengan kegiatan lainnya. b. Memiliki akses jaringan jalan yang baik ke seluruh kawasan di sekitarnya c. Tidak berdampingan langsung dengan aktivitas kota yang memiliki tingkat kebisingan dan polusi udara yang tinggi. d. Memiliki kondisi topografi yang relatif datar. e. Bebas banjir dan genangan. f. Ketersediaan air bersih terjamin.	a. Peningkatan dan pengembangan prasarana pendidikan dari jenjang terendah hingga tertinggi. b. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukungnya. c. Pembangunan prasarana pendidikan beserta sarana dan prasarana pendukungnya yang belum terdapat di kecamatan – kecamatan di Kabupaten Kepahiang.
5	Pengembangan Prasarana Kesehatan.	a. Simbiosis dengan kegiatan lainnya. b. Memiliki akses jaringan jalan yang baik ke seluruh kawasan di sekitarnya. c. Memiliki kondisi topografi yang relatif datar. d. Bebas banjir dan genangan. e. Ketersediaan air bersih terjamin.	a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada setiap rumah sakit. b. Pengembangan prasarana kesehatan pada wilayah atau kecamatan yang belum memiliki prasarana ini. c. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarananya. d. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. e. Peningkatan kualitas tenaga medis.

Gambar 2.118 Rencana Pola Ruang Kabupaten Kepahiang, 2023-2043



Tabel 2.18 Program Perwujudan Kawasan Lindung

No.	Program	Rincian
1	Program pemantapan kawasan lindung	a. Evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung. b. Mempertahankan kawasan hutan lindung yang telah ada dan sesuai RTRWN dan RTRWP Bengkulu 2010-2030. c. Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna mengembalikan /meningkatkan fungsi lindung. d. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung. e. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan. f. Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung. g. Pengawasan kawasan lindung.
2	Program evaluasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung.	a. Evaluasi kondisi eksisting pemanfaatan lahan kawasan lindung b. Penyusunan rekomendasi kebijakan pemanfaatan lahan kawasan lindung tanpa mengganggu fungsi lindung.
3	Program untuk kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya.	Kriteria: a. Kawasan yang diidentifikasi sebagai kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya meliputi: b. Kawasan hutan lindung, tersebar di hampir semua kecamatan di wilayah tengah-selatan Kabupaten Kepahiang yang memiliki luas 9.588,11 Ha. c. Kawasan resapan air, merupakan seluruh hutan lindung dan kawasan perkebunan yang ada di kabupaten Kepahiang yang memiliki jenis tanah ergosol, litosol dan podsolik dengan struktur tanah mudah meresapkan air dan geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar. Program: a. Mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung. b. Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan c. resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.

A.2. Program Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat yang terdapat di Kabupaten Kepahiang terdiri dari:

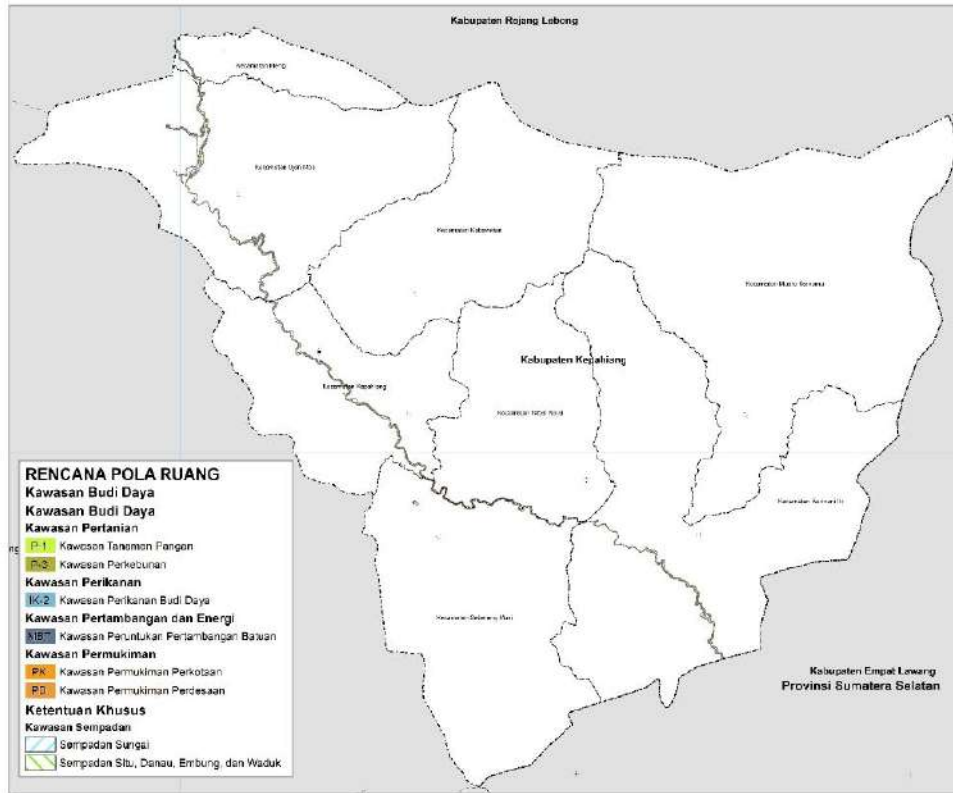
- a) Kawasan sempadan sungai, meliputi seluruh sungai di kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kepahiang, baik sungai besar maupun kecil.
- b) Kawasan sekitar danau/waduk, meliputi Danau Musi.
- c) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan, menyebar di seluruh kecamatan berfungsi PKL & PKL, PPK dan PPL.

Program untuk kawasan ini adalah:

- a) Menjaga sempadan sungai untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.
- b) Menjaga kawasan sekitar danau/waduk untuk melindungi danau/waduk dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk/danau.
- c) Menjaga kawasan sekitar mata air untuk melindungi mata air dari dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.

Menjaga kawasan terbuka hijau kota termasuk di dalamnya hutan kota untuk melindungi kota dari polusi udara dan kegiatan manusia yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan kota, serta mengedalikan tata air, meningkatkan upaya pelestarian habitat flora dan fauna, meningkatkan nilai estetika lingkungan perkotaan dan kenyamanan kehidupan di kota.

Gambar 2.119 Kawasan Sempadan Kabupaten Kepahiang, 2023-2043



A.3. Program Kawasan Suaka Alam

Pelestarian Alam dan Cagar Budaya terdiri atas Pagar Gunung 1 (Luas 1,8 Ha), Pagar Gunung 2 (Luas 0,8 Ha), Pagar Gunung 3 (Luas 0,28 Ha), Pagar Gunung 4 (Luas 0,22 Ha), Pagar Gunung 5 (Luas 0,10 Ha) dengan luas total keseluruhan adalah 3,20 Ha, yang keseluruhannya terletak di Pagar Gunung (Kec. Kepahiang), berdasarkan RTRWP Bengkulu 2010-2030.

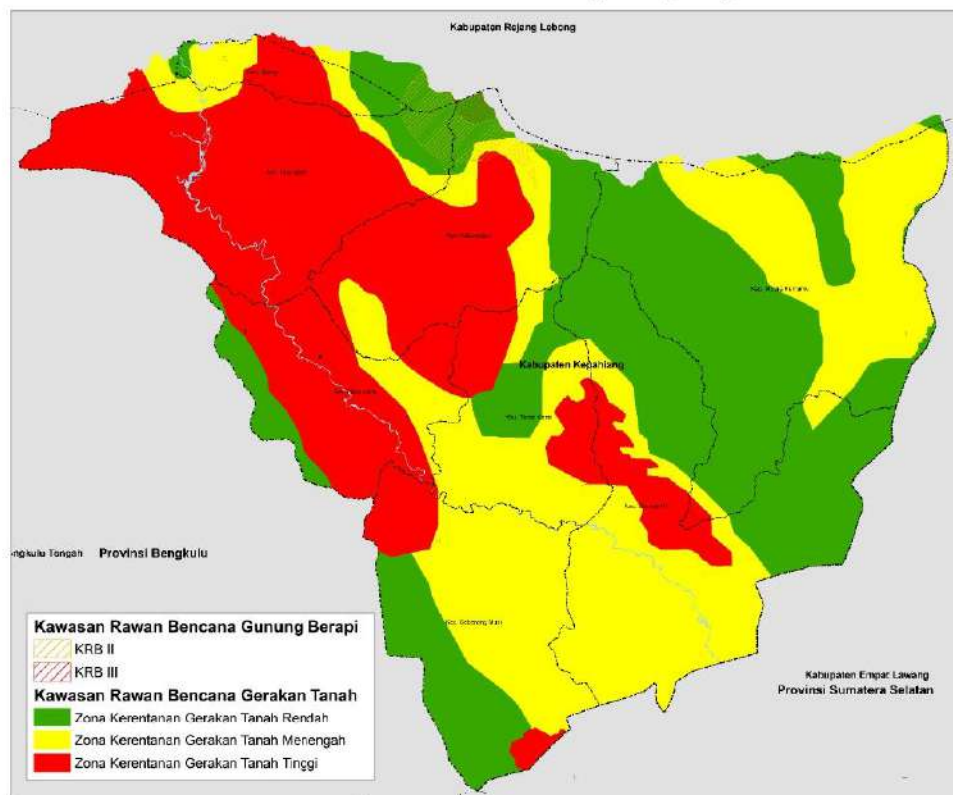
A.4. Program Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Kepahiang, meliputi:

- Kawasan rawan gunung berapi yang terdapat di Kecamatan Kabawetan
- Kawasan rawan banjir yang terdapat di Kecamatan Bermani Ilir.
- Kawasan rawan Longsor, meliputi Kecamatan Seberang musu, Kabawetan, Muara Kemumu dan Bermani ilir.

- d) Kawasan rawan gempa bumi, yang meliputi seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepahiang.

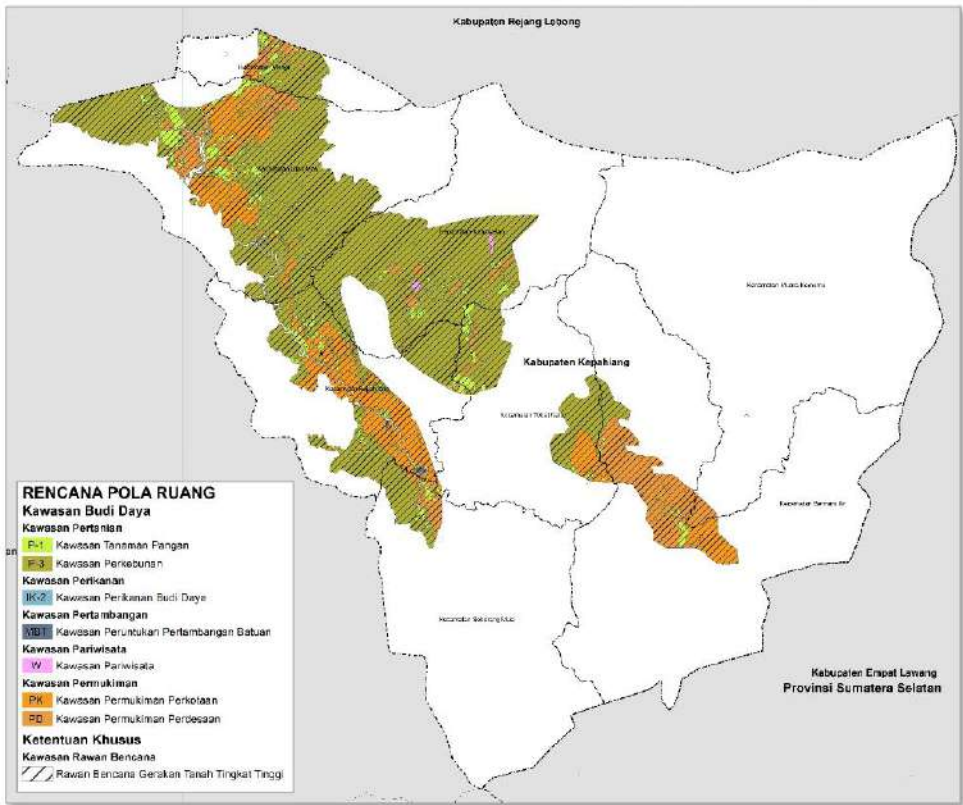
Gambar 2.120 Peta Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Kepahiang, 2023



Program kawasan ini adalah:

- Menginventarisir kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Kepahiang secara lebih akurat.
- Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia.
- Melakukan upaya untuk mengurangi/meniadakan resiko bencana alam seperti melakukan penghijauan pada lahan kritis.
- Melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada/dekat dengan daerah rawan bencana alam.

Gambar 2.121 Peta Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah Tingkat Tinggi Kabupaten Kepahiang, 2023-2043



A.5. Program Kawasan Lindung Lainnya

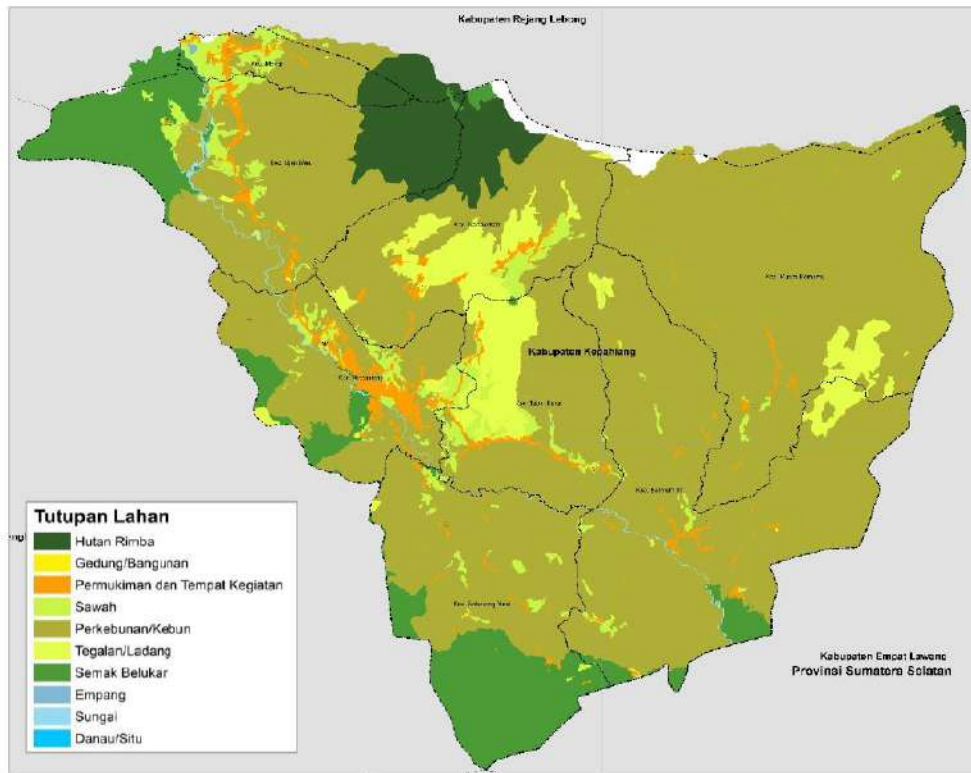
- a) Melestarikan fungsi lindung dan tatanan lingkungan kawasan cagar biosfer untuk melindungi ekosistem asli, ekosistem unik, dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi dari gangguan kerusakan seluruh unsur-unsur alamnya untuk penelitian dan pendidikan.
- b) Melestarikan lingkungan untuk melindungi daerah dan ekosistemnya bagi kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut.

B. Kawasan Budidaya

B.1. Program Perwujudan Kawasan Budidaya

Perwujudan kawasan pertanian melalui program pengembangan (1) kawasan pertanian Tanaman Pangan, dan (2) kawasan pertanian hortikultura.

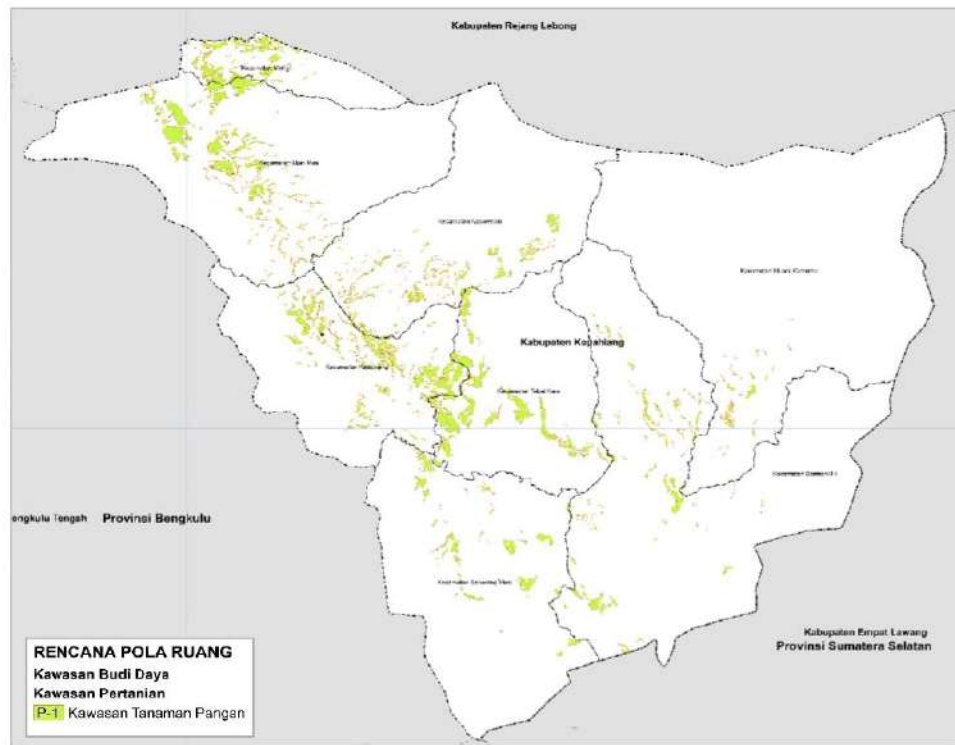
Gambar 2.122 Tutupan Lahan Kabupaten Kepahiang, 2023-2043



Program pengembangan kawasan pertanian Tanaman pangan, yaitu:

- Peningkatan produktivitas dan aksesibilitas lahan padi sawah yang ada di Kabupaten Kepahiang.
- Peningkatan integrasi tanaman pangan dan peternakan.
- Penetapan kawasan pertanian tanaman pangan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang perlu dilindungi dari alih fungsi lahan.
- Peningkatan produktivitas lahan padi sawah yang ada di Kabupaten Kepahiang.
- Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan.
- Pengembangan manajemen pengelolaan kegiatan pertanian Hortikultura yang lebih terorganisir.

Gambar 2.123 Rencana Kawasan Tanaman Pangan Kabupaten Kepahiang, 2023-2043

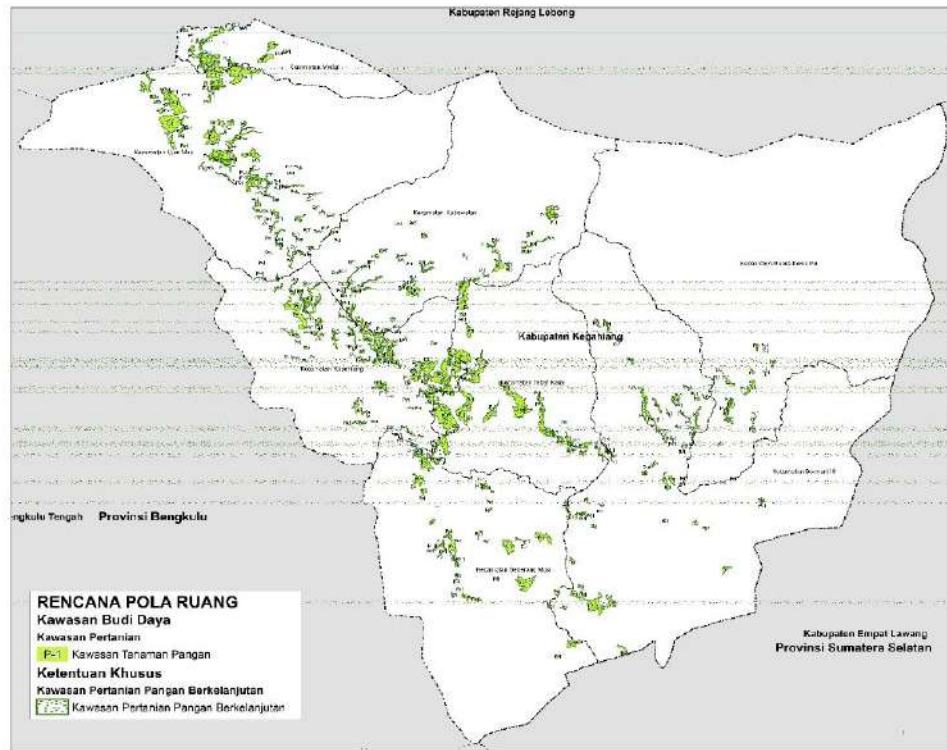


Program pengembangan kawasan hortikultura, yaitu:

- Peningkatan produktivitas dan aksesibilitas lahan komoditi hortikultura.
- Peningkatan konservasi dan nilai tambah kawasan hortikultura sebagai satu kesatuan pengembangan kawasan agrowisata Kepahiang.
- Pengembangan dan perluasan pertanian hortikultura, yang terdapat di seluruh Kecamatan di kabupaten Kepahiang.
- Pengembangan Sentra Pertanian Agropolitan Hortikultura di Kecamatan Bermani Ilir.
- Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian hortikultura.
- Pengembangan manajemen pengelolaan kegiatan pertanian hortikultura yang lebih terorganisir.



Gambar 2.124 Rencana Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Kepahiang, 2023-2043



B.2. Program Perwujudan Pengembangan Kawasan Perkebunan

Program pengembangan kawasan perkebunan yaitu:

- Pengembangan komoditi unggulan perkebunan yang terdiri atas kayu manis, kelapa, kakao, kopi, teh dan karet di Kecamatan kabawetan, bermani ilir, Muara kemumu dan Seberang Musi.
- Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkebunan. dan
- Pengembangan manajemen pengelolaan kegiatan perkebunan yang lebih terorganisir.

B.3. Program Perwujudan pengembangan Kawasan Peternakan

Program pengembangan kawasan perternakan yaitu:

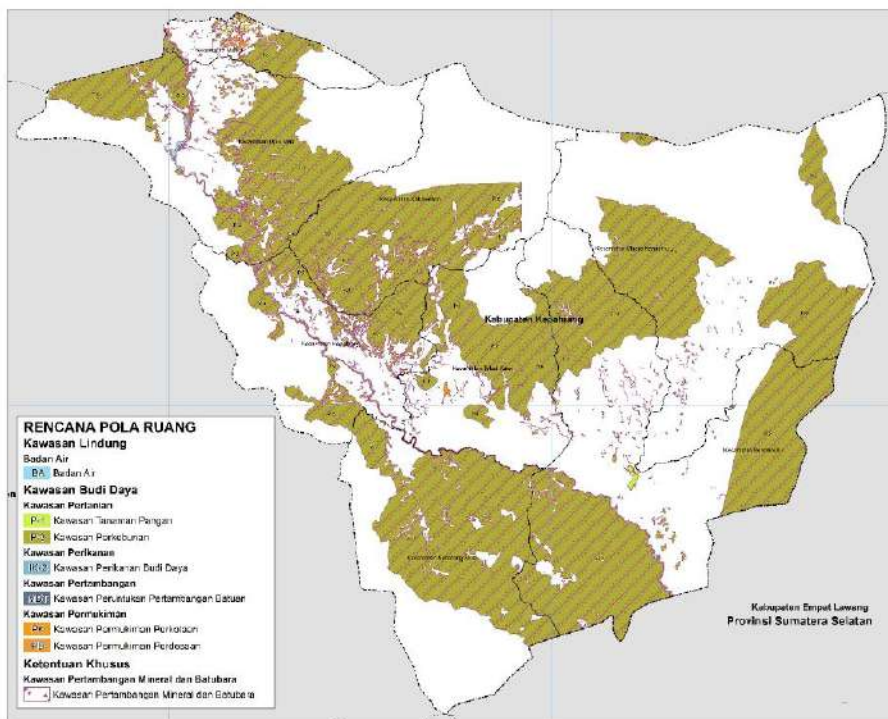
- Pengembangan peternakan potensial di Kabupaten Kepahiang.
- Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan peternakan.
- Pengembangan manajemen pengelolaan kegiatan peternakan yang lebih terorganisir.

B.4. Program Perwujudan Pengembangan Kawasan Perikanan

Program pengembangan perikanan yaitu:

- Pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar, yang tersebar di Kecamatan Ujan Mas, Seberang Musi, Kepahiang, Tebat Karai.
- Pengembangan perikanan tangkap di perairan Danau Musi
- Pengembangan industri pengolahan perikanan.
- Pengembangan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan kegiatan perikanan.
- Pengembangan manajemen pengelolaan kegiatan perikanan yang lebih terorganisir.

Gambar 2.125 Rencana Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara Kabupaten Kepahiang, 2023-2043



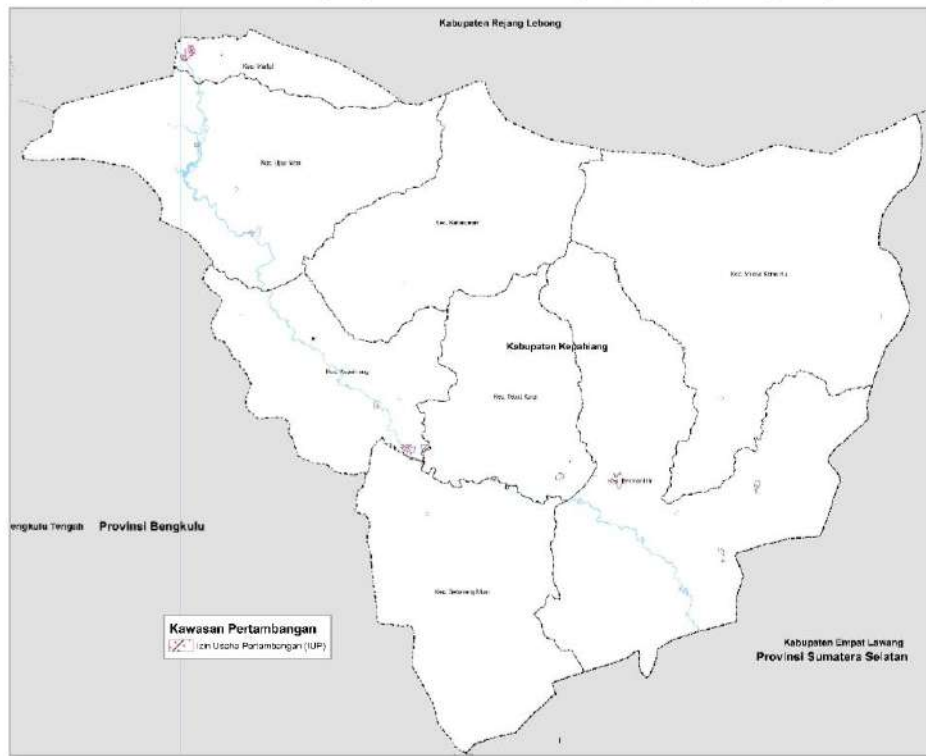
B.5. Program Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertambangan

Program pengembangan kawasan pertambangan yaitu:

- Inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan.
- Penetapan aturan zonasi penambangan rakyat yang diijinkan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan.

- c) Relokasi dan lokalisasi tambang rakyat.
- d) Pelarangan dan penghentian kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan.

Gambar 2.126 Kawasan Tambang dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kabupaten Kepahiang, 2023



B.6. Program Perwujudan Pengembangan Kawasan Industri

Program pengembangan industri Kabupaten Kepahiang, yaitu:

- Pengembangan Industri pengolahan pangan di kecamatan Kabawetan, Seberang Musi, Bermani Ilir, Tebat Karai
- Pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan di Kecamatan Kabawetan, Bermani Ilir, Kepahiang, Merigi, Ujan Mas dan Tebat Karai.
- Pengembangan industri kerajinan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kepahiang.

B.7. Program Perwujudan Pengembangan Kawasan Pariwisata

Program pengembangan kepariwisataan Kabupaten Kepahiang, ditujukan pada kawasan unggulan wisata, yaitu:

- a) Peningkatan dan Pengembangan obyek wisata utama yaitu Wisata Alam Kebun Teh, Sumber Panas Bumi (Geothermal), Danau Musi Indah Suro Ilir.

- b) Peningkatan dan Pengembangan obyek wisata penunjang utama, yaitu Hutan wisata Konak, Air Terjun Bukit Hitam, Bukit Jupi, PLTA Musi.
- c) Peningkatan dan Pengembangan obyek wisata penunjang yaitu Bunga Rafflesia dan Tempat Peribadatan.

B.8. Program Perwujudan Pengembangan Kawasan Permukiman

Rencana pengembangan kawasan permukiman bertujuan untuk mendorong percepatan pertumbuhan kegiatan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pelestarian budaya.

- a) Pengembangan kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
 - Pengembangan kota kecil dan nagari kawasan pusat pertumbuhan.
 - Pengembangan sarana dan prasarana kawasan tertinggal.
 - Revitalisasi kawasan tradisional/bersejarah, kawasan pariwisata dan kawasan lain yang menurun kualitasnya.
 - Pengembangan sistem jaringan transportasi yang mendukung alur produksi- koleksi distribusi antar kota, antar wilayah dan antara perkotaan dan perdesaan.
 - Pengembangan prasarana dan sarana kawasan perdesaan lainnya.
- b) Pengembangan kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
 - Percepatan penyediaan perumahan melalui kegiatan Penyediaan KPR-RSH bersubsidi, Pengembangan perumahan swadaya dan Pengembangan Kasiba/Lisiba.
 - Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh. Kegiatan ini ditujukan untuk kawasan yang memiliki lingkungan permukiman yang kurang sehat serta kondisi perumahan yang kurang layak pada kota-kota yang menjadi pusat pengembangan.
 - Revitalisasi kawasan tradisional/etnis/bersejarah yaitu kawasan yang mempunyai bangunan bersejarah yang bernilai atau bermakna penting.
 - Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman.
 - Pengembangan prasarana dan sarana kawasan perkotaan.

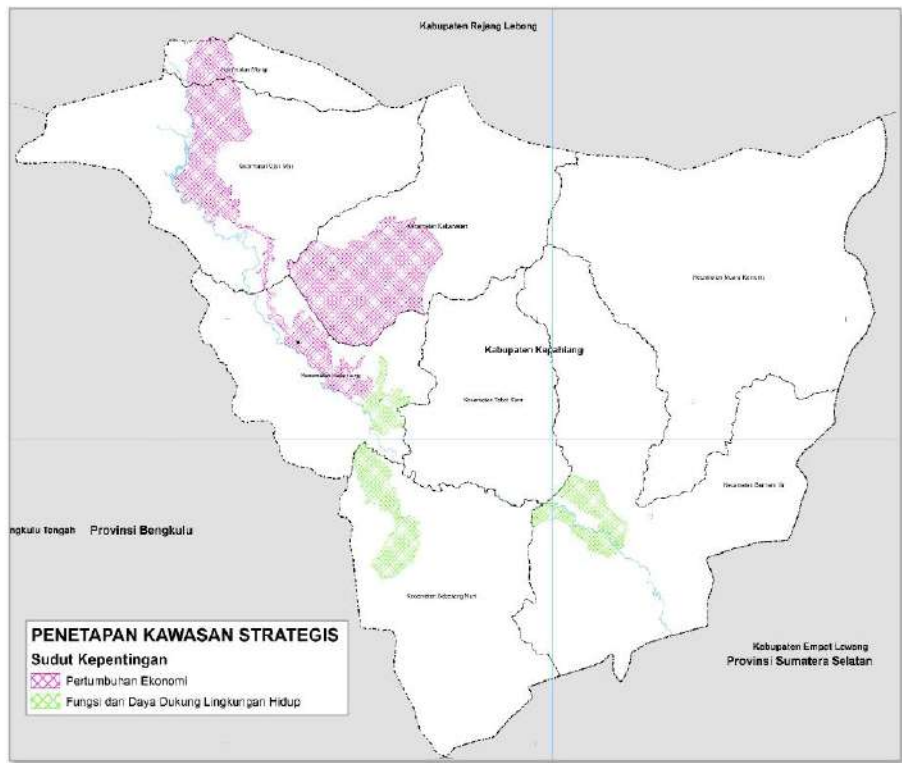


2.8.3. Kawasan Strategis Kabupaten

Courtesy: Dinas PUI Provinsi Bengkulu

Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah penataan ruangnya yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Gambar 2.127 Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Kepahiang, 2023-2043



A. Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Ekonomi

Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi yang ada di Kabupaten Kepahiang, yang meliputi Kawasan Ibukota Kabupaten kepahiang (PKW), Kawasan Pariwisata (agro wisata) dan Kawasan Sentra Pertanian Agropolitan (Hortikultura). Program pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi ini diantaranya adalah:

- 1. Kawasan strategis Ibukota Kabupaten (Kepahiang)
 - a) Penetapan/penataan batas (delineasi) kawasan strategis
 - b) Penyusunan Rencana Rinci kawasan (RTR Kawasan Strategis)
 - c) Pengembangan lahan perkotaan untuk kegiatan permukiman perkotaan, perdagangan dan hutan wisata kota
 - d) Pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan permukiman perkotaan, perdagangan dan hutan wisata kota.

- e) Peningkatan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana penunjang permukiman perkotaan, perdagangan dan hutan wisata kota.
- f) Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang permukiman perkotaan, perdagangan dan hutan wisata kota.
- 2. Kawasan Strategis Pariwisata (agrowisata)
 - a) Penetapan/penataan batas (delineasi) kawasan strategis
 - b) Penyusunan Rencana Rinci kawasan (RTR Kawasan Strategis)
 - c) Pembebasan lahan wisata yang lahannya masih belum dikuasai sepenuhnya.
 - d) Peningkatan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana penunjang wisata.
 - e) Pembangunan sarana dan prasarana penunjang wisata.
 - f) Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang obyek wisata.
 - g) Kejelasan status pengelolaan kawasan wisata, melalui penetapan status kawasan dalam Perda atau SK Bupati.
- 3. Kawasan Sentra Pertanian Agropolitan Kecamatan Bermani Ilir,
 - a) Penetapan/penataan batas (delineasi) kawasan strategis
 - b) Penyusunan Rencana Rinci kawasan (RTR Kawasan Strategis)
 - c) Pengembangan lahan sentra produksi pertanian hortikultura pada lahan non produktif dan potensial untuk dikembangkan
 - d) Pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan agropolitan, melalui pembangunan terminal agrobisnis.
 - e) Peningkatan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana penunjang kegiatan agropolitan.
 - f) Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana penunjang kegiatan agropolitan.
 - g) Penetapan status dan badan pengelola kawasan agropolitan melalui Perda atau SK Bupati.
- B. Program Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan

Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan ini terdiri dari :

 - 1. Kawasan Taman Wisata Alam Bukit Kaba.
 - 2. Kawasan Danau Musi Indah Suro Ilir

Program pengembangan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan ini adalah dengan:

 - 1. Penetapan/penataan batas (delineasi) kawasan strategis;
 - 2. Penyusunan Rencana Rinci kawasan (RTR Kawasan Strategis);
 - 3. Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan danau dan sekitarnya guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung dan daya dukung lingkungan.

4. Menjaga kawasan sekitar danau untuk melindungi dari berbagai usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian ekosistem dari kawasan danau dan sekitarnya;
5. Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan danau dan sekitarnya.



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Selama dua dekade pembangunan yang dilakukan dengan melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) 2005-2025, Kabupaten Kepahiang telah mencapai berbagai kemajuan di segala bidang pembangunan. Namun demikian, masih banyak permasalahan pembangunan jangka panjang yang dihadapi di masa mendatang yang harus direncanakan penanganan dan penyelesaiannya melalui penyusunan RPJMD Kabupaten Kepahiang 2025-2045.

Permasalahan tersebut secara holistik merupakan permasalahan yang timbul secara internal baik yang bersifat makro maupun bersifat sektoral dari berbagai urusan yang diampu seluruh perangkat daerah serta secara eksternal yang berasal dari tingkat regional, nasional dan global.

Dalam upaya mengidentifikasi, memetakan, memilah dan memilih berbagai permasalahan jangka panjang yang dihadapi Kabupaten Kepahiang dalam dua puluh tahun kedepan, telah dilakukan penjaringan permasalahan (masalah pokok, masalah dan akar masalah) di setiap perangkat daerah.

Selanjutnya, hasil penjaringan permasalahan tersebut dibahas dalam diskusi kelompok terfokus atau focussed group discussion yang melibatkan perwakilan seluruh perangkat daerah untuk melakukan penilaian, pemeringkatan dan penentuan permasalahan daerah yang layak ditetapkan sebagai permasalahan pembangunan jangka panjang Kabupaten Kepahiang.

Penilaian dan pemeringkatan yang dilakukan menggunakan kriteria dan bobot yang ilmiah sehingga menghasilkan pengukuran yang bersifat objektif dan kuantitatif untuk dijadikan dasar pertimbangan kualitatif untuk seluruh perwakilan perangkat daerah dalam menentukan permasalahan yang layak dipilih sebagai permasalahan pembangunan jangka panjang daerah. (lihat Matriks 3.1).

Matriks 3.1 Kriteria dan Pemeringkatan Permasalahan Daerah

Kriteria	Nilai Pemeringkatan Permasalahan		
	Sangat Strategis (3)	Cukup Strategis (2)	Kurang Strategis (1)
Besaran Dampak (D)	- Dampaknya mencakup sebagian besar/seluruh wilayah Kabupaten - Frekuensi permasalahan diperkirakan sering dan terus menerus	- Dampaknya mencakup lebih dari satu Kecamatan - Frekuensi permasalahan diperkirakan sedang	- Dampaknya mencakup terbatas hanya satu Kecamatan - Frekuensi permasalahan diperkirakan hanya sesaat
Derajat Urgensi (U)	- Tidak bisa ditunda penanganannya - Kedalaman pengaruhnya pada hampir semua sektor/urusan	- Bila ditunda akan mendapatkan risiko/kerugian besar - Kedalaman pengaruhnya pada beberapa sektor/urusan	- Bisa ditunda karena risiko/kerugiannya termasuk kecil - Kedalaman pengaruhnya hanya pada satu sektor/urusan
Kemudahan Penanganan (K)	- Menjadi kewenangan Kabupaten tetapi biaya dan teknologi terjangkau - Tidak memerlukan kemauan politik (political will) Kepala Daerah dan DPRD	- Menjadi kewenangan Kabupaten tetapi biaya besar dan teknologi tinggi - Perlu sedikit kemauan politik (political will) Kepala Daerah dan DPRD	- Diluar kewenangan Kabupaten - Memerlukan kemauan politik (political will) Kepala Daerah dan DPRD yang tinggi

Dari proses tersebut diatas, permasalahan pembangunan daerah dalam jangka panjang yang dihadapi Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penerimaan daerah.
2. Masih belum kuatnya ketahanan pangan dan belum terjaminnya keamanan pangan.
3. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani.
4. Masih rendahnya pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
5. Masih belum tercapainya target investasi.
6. Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan.
7. Meningkatnya prevalensi stunting.
8. Masih rendahnya derajat pendidikan.
9. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan sosial.
10. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
11. Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis.
12. Masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis.
13. Menurunnya indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan.
14. Masih belum optimalnya pelayanan transportasi.
15. Masih rendahnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
16. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga persatuan bangsa.
17. Masih belum kuatnya penegakan hukum (perda dan perkara).
18. Masih rendahnya nilai survei kepuasan masyarakat.
19. Masih rendahnya kualitas layanan administrasi kependudukan.

3.2. Isu Strategis

Secara substansial isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Kepahiang tidak terlepas dari isu strategis yang dihadapi di tingkat global, nasional maupun provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, beberapa isu strategis pembangunan jangka panjang pada tingkat global, nasional maupun provinsi Bengkulu pasti akan berpengaruh dalam penentuan isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Kepahiang dalam dua puluh tahun kedepan.

3.2.1 Isu Strategis Global

Isu strategis pembangunan jangka panjang di tingkat global bersumber dari adanya fenomena Megatren 2045. Secara global, isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) **Perkembangan Demografi Global.** Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Menurut data *World Population Prospects* (2022), populasi dunia saat ini akan mencapai lebih dari sekitar 7 milyar jiwa serta diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai sekitar 9,7 milyar jiwa pada tahun 2050. Hal tersebut akan memberikan tantangan berupa penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan semakin terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Kebutuhan terhadap pangan, energi dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk.

- 2) **Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi Global.** Secara geopolitik dinamika politik global kedepan akan menjadi tantangan serius untuk setiap negara. Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Selanjutnya, secara geoekonomi nilai *output* negara berkembang semakin dominan. Pada tahun 2050 diperkirakan nilai *output* negara berkembang akan meningkat hingga mencapai sekitar 71 persen dari total nilai *output* dunia dengan negara-negara di kawasan Asia akan menjadi pendorong utama yang kontribusinya diperkirakan akan mencapai sekitar 54 persen.
- 3) **Perkembangan Teknologi.** Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital dalam berbagai bentuknya telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun demikian, perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Dengan demikian perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal serta diimbangi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi.
- 4) **Urbanisasi Dunia.** Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UNDESA, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara berkembang. Untuk kawasan Asia diperkirakan dalam empat dekade kedepan penduduk perkotaan akan meningkat sekitar 1,7 kali lipat. Tekanan penduduk dan pembangunan di negara berkembang yang pada umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh.
- 5) **Konstelasi Perdagangan Global.** Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam perekonomian global akan mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika. Perekonomian negara berkembang terutama negara kelompok E7 diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi dari negara maju yang tergabung dalam kelompok G7.
- 6) **Tata Kelola Keuangan Global.** Desain kebijakan fiskal global dan nasional pada tahun 2045 sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Pendapatan negara kedepan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dari sisi belanja negara, pergeseran komposisi demografi yang menuju *aging society* pada tahun 2045 akan menentukan komposisi belanja yang lebih didominasi oleh komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun. Dari sisi pembiayaan anggaran, tren kedepan akan sejalan dengan pendalaman pasar keuangan dan arah kebijakan moneter global yang ditransmisikan melalui jalur suku bunga serta aliran likuiditas di pasar uang dan pasar modal.
- 7) **Pertumbuhan Kelas Menengah.** Jumlah kelas menengah dunia pada tahun 2045 diperkirakan akan mencapai sekitar 8,8 milyar atau lebih dari 90 persen terhadap total populasi dunia. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari sebelumnya yang didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat bergeser ke kawasan Asia terutama China dan India. Pertumbuhan pesat kelas menengah akan menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik.

- 8) **Persaingan Sumber Daya Alam.** Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam terutama energi, air dan pangan di tingkat global diperkirakan akan meningkat di masa depan. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan sumber daya alam akan mendorong meningkatnya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah dunia.
- 9) **Perubahan Iklim.** Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi serta kehilangan keanekaragaman hayati atau yang dikenal sebagai tiga krisis global (*the triple planetary crisis*) diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Hal ini akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat dan laju pembangunan secara keseluruhan. Namun demikian, fenomena tersebut akan mendorong adanya praktik ekonomi hijau dan rendah karbon secara global.
- 10) **Pemanfaatan Luar Angkasa.** Tren eksplorasi luar angkasa (antariksa) semakin meningkat selama satu dekade terakhir. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia yaitu, suatu ruang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Hal ini telah mendorong berkembangnya industri antariksa yang diharapkan akan berdampak positif pada meningkatnya kualitas hidup manusia di bumi. Kedepan hal tersebut akan menimbulkan tiga isu utama, yaitu ekonomi antariksa (*space economy*), kelestarian antariksa (*space sustainability*) dan keamanan antariksa (*space security*).

3.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu strategis pembangunan jangka panjang pada periode 2025-2045 secara nasional adalah sebagai berikut: 1) Produktivitas rendah; 2) IPTEKIN dan Riset Lemah; 3) Deindustrialisasi dini; 5) Ekonomi laut belum optimal; 6) Kontribusi Koperasi dan UMKM rendah; 7) Infrastruktur dan literasi rendah; 8) Pembangunan belum berkelanjutan; 9) Integrasi domestik terbatas; 10) Kualitas sumber daya manusia masih rendah; 11) Tata kelola pemerintahan belum optimal; 12) Kepastian dan penegakan hukum masih lemah; 13) Demokratisasi belum optimal; dan 14) Kesenjangan Jawa dan luar Jawa.

3.2.3 Isu Strategis Bengkulu

Isu strategis pembangunan jangka panjang Provinsi Bengkulu pada periode 2025-2045 adalah sebagai berikut: 1) Peningkatan daya saing ekonomi; 2) Hilirisasi komoditas unggulan dan pengembangan pariwisata yang komprehensif dan kompetitif; 3) Pengembangan konektivitas daerah serta pemerataan dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan; 4) Kemiskinan, kesejahteraan dan daya saing sumber daya manusia; 5) Pembangunan peran perempuan pada sektor formal di Provinsi Bengkulu masih relatif rendah; 6) Peningkatan kinerja birokrasi; dan 7) Pembangunan rendah karbon dan emisi gas rumah kaca.

3.2.4 Isu Strategis Kabupaten Kepahiang

Pemilihan dan penentuan isu strategis pembangunan jangka panjang daerah yang dihadapi Kabupaten Kepahiang dalam dua puluh tahun kedepan didasarkan pada pengolahan permasalahan daerah yang telah ditetapkan kedalam rumpun isu strategis serta penambahan beberapa isu strategis yang secara eksternal berasal dari tingkat nasional dan global.

Selanjutnya, berdasarkan berbagai isu strategis tersebut dilakukan penilaian dan pemeringkatan dengan menggunakan kriteria dan bobot secara ilmiah untuk menentukan

secara objektif isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Kepahiang dalam dua puluh tahun kedepan (lihat Matriks 3.2).

Matriks 3.2 Kriteria dan Pembobotan Isu Strategis Daerah

No	Kriteria	Bobot
1	Berdampak Sangat Besar/Signifikan Terhadap Kemajuan dan Kesejahteraan Daerah 20 Tahun Kedepan	5
2	Berpengaruh Signifikan Terhadap Pencapaian SDGs dan IPM 20 Tahun Kedepan	4
3	Berpengaruh Signifikan Terhadap Pencapaian SPM Pelayanan Dasar 20 Tahun Kedepan	3
4	Merupakan Tugas Pokok Pemerintah Daerah Selama 20 Tahun Kedepan	2
5	Mudah Untuk Ditangani dan Diselesaikan Selama 20 Tahun Kedepan	1

Dari proses tersebut diatas, beberapa isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Kepahiang adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas.
4. Lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.
5. Penegakan hukum dan kohesivitas sosial.
6. Tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas.



Courtesy: www.pnggg.com

VISI DAN MISI DAERAH 4

BAB IV
VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Visi

Visi jangka panjang Kabupaten Kepahiang 2025-2045 merupakan gambaran keadaan yang ingin dicapai pada akhir tahun 2045, yang akan diwujudkan secara berkesinambungan melalui pelaksanaan rencana pembangunan selama dua puluh tahun sejak tahun 2025. Visi Jangka Panjang Kabupaten Kepahiang 2025-2045 adalah:

Kabupaten Kepahiang yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan

Perumusan Visi tersebut secara substansial didasarkan pada pengolahan Isu Strategis yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya (lihat Matriks 4.1).

Matriks 4.1 Perumusan Visi Berdasarkan Isu Strategis

No.	Isu Strategis Daerah	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1.	Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Maju	Kabupaten Kepahiang yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan
2.	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Berdaya Saing	
3.	Tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas		
4.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Sejahtera	
5.	Penegakan hukum dan kohesivitas sosial		
6.	Lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Berkelanjutan	

Selanjutnya, pernyataan Visi tersebut diatas dapat dijelaskan secara rinci berdasarkan pengertian masing-masing pokok visinya (lihat Matriks 4.2)

Matriks 4.2 Perumusan Visi Berdasarkan Isu Strategis

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
Kabupaten Kepahiang Yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan	Maju	Kabupaten Kepahiang yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan stabil yang berbasis pada potensi unggulan lokal sera memiliki tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan rendah serta ketahanan pangan yang tinggi.
	Berdaya Saing	Kabupaten Kepahiang yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas, ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis yang berkualitas.
	Sejahtera	Kabupaten Kepahiang yang memiliki sumberdaya manusia yang sehat, terdidik, terampil, taat hukum, aman, damai, harmonis dan menyatu dalam kemajemukan.
	Berkelanjutan	Kabupaten Kepahiang yang mampu memanfaatkan ruang dengan tepat dan bijaksana serta mengelola lingkungan hidup mengelola lingkungan hidup secara lestari, seimbang dan berkelanjutan.

Visi yang baik harus terukur mampu dievaluasi pencapaiannya sehingga harus memiliki sasaran, indikator, *baseline* dan target yang jelas. Oleh karena itu,

Kabupaten Kepahiang juga memiliki sasaran, indikator, *baseline* dan target (lihat Matriks 4.3).

Matriks 4.3 Sasaran, Indikator, Baseline dan Target Visi

Visi	Sasaran	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Kabupaten Kepahiang yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan	Kesejahteraan ekonomi masyarakat meningkat	PDRB per kapita (Rp Juta)	37 - 40	80 - 100
		Kontribusi sektor manufaktur dalam PDRB (%)	7,3 - 7,5	8,5 - 9,0
	Kemiskinan dan ketimpangan menurun	Rasio Gini (indeks)	0,31 - 0,32	0,285 - 0,295
	Tingginya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan meningkatnya kualitas kebijakan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks)	88,19	100
		Indeks Kualitas Kebijakan (indeks)	65 (Baik)	85 (Sangat Baik)
	Kualitas sumber daya manusia meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	71,50	81,02
	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas lingkungan (indeks)	67,32	71,55

4.2. Misi

Misi merupakan perangkat (*tools*) untuk mewujudkan Visi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pencapaian Visi Jangka Panjang Kabupaten Kepahiang 2025-2045 telah ditetapkan 6 (enam) Misi, yaitu: 1) Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, 2) Mewujudkan Ekonomi Inklusif dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas, 3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berkualitas serta Pelayanan Publik Prima, 4) Mewujudkan Masyarakat Madani yang Tertib, Aman, Damai, Harmonis dan Menyatu dalam Kemajemukan, 5) Mewujudkan Lingkungan Hidup Secara Lestari, Seimbang dan Berkelanjutan, dan 6) Menyediakan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis yang Memadai dan Berkualitas (lihat Matriks 4.4).

Matriks 4.4 Visi dan Misi Jangka Panjang Kabupaten Kepahiang 2025-2045

Visi	Misi
Kabupaten Kepahiang yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan	1. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. 2. Mewujudkan Ekonomi Inklusif dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas. 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berkualitas serta Pelayanan Publik Prima. 4. Mewujudkan Masyarakat Madani yang Tertib, Aman, Damai, Harmonis dan Menyatu dalam Kemajemukan. 5. Mewujudkan Lingkungan Hidup secara Lestari, Seimbang dan Berkelanjutan. 6. Menyediakan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis yang Memadai dan Berkualitas.

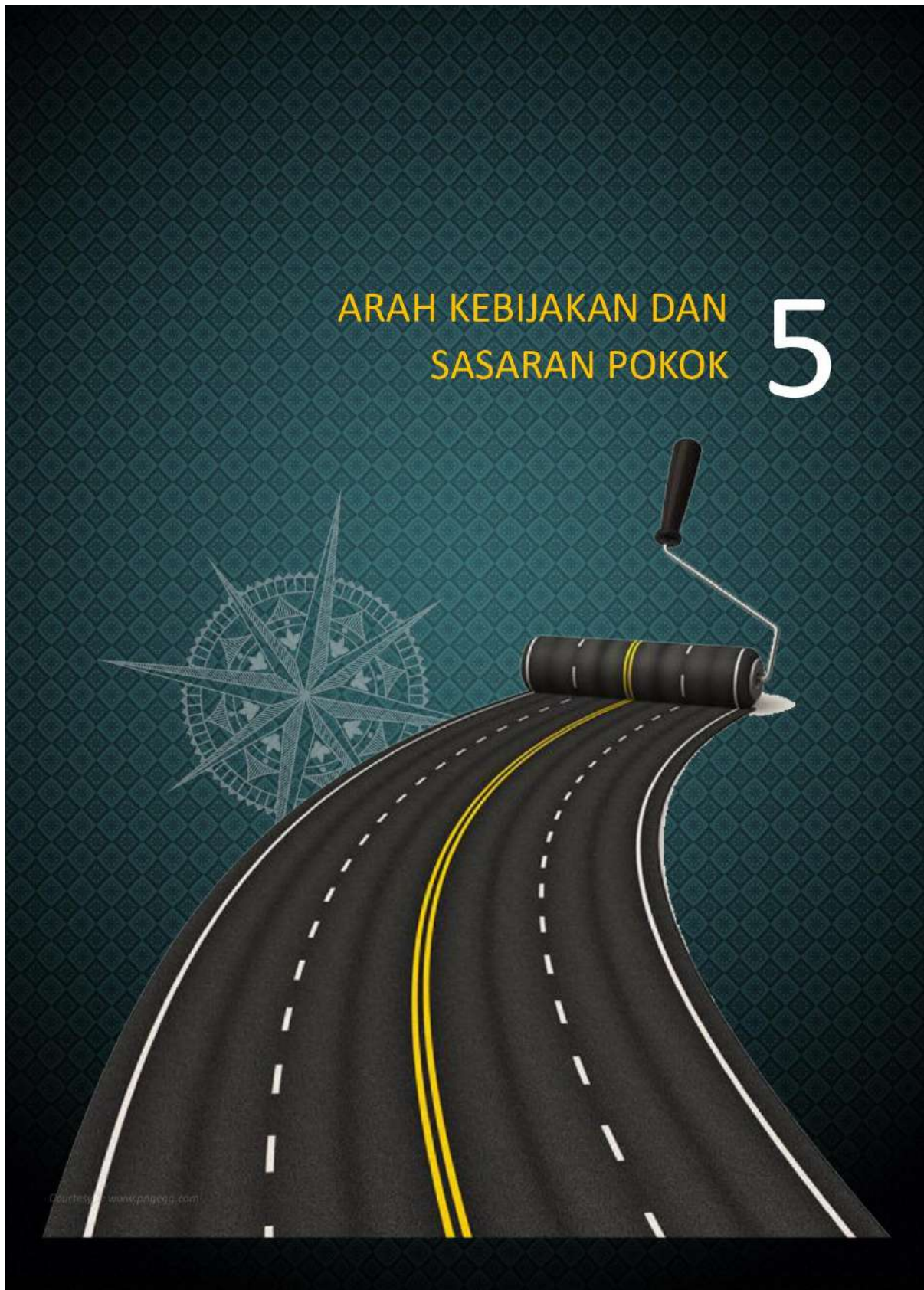
Disamping untuk mewujudkan Visi, secara substansial Misi tersebut diatas dirumuskan pula untuk menjawab permasalahan jangka panjang daerah. Dengan demikian, perumusan Misi merupakan upaya yang nyata untuk menangani dan menyelesaikan berbagai permasalahan jangka panjang di Kabupaten Kepahiang selama dua puluh tahun kedepan (lihat Matriks 4.5).

Matriks 4.5 Permasalahan dan Misi Jangka Panjang Kabupaten Kepahiang 2025-2045

Permasalahan Daerah	Misi
• Masih rendahnya kontribusi PAD dalam penerimaan daerah. • Masih belum kuatnya ketahanan pangan dan belum terjaminnya keamanan pangan. • Masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani. • Masih rendahnya pertumbuhan UMKM. • Masih belum tercapainya target investasi.	MISI 1: Mewujudkan ekonomi inklusif dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
• Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan. • Meningkatnya prevalensi stunting. • Masih rendahnya derajat pendidikan. • Masih rendahnya tingkat kesejahteraan sosial. • Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	MISI 2: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
• Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis. • Masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis.	MISI 3: Menyediakan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis yang Memadai dan Berkualitas.
• Menurunnya indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan.	MISI 4: Mewujudkan Lingkungan Hidup secara Lestari, Seimbang dan Berkelanjutan.
• Masih belum kuatnya penegakan hukum (perda dan perkara). • Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga persatuan bangsa.	MISI 5: Mewujudkan Masyarakat Madani yang Tertib, Aman, Damai, Harmonis dan Menyatu dalam Kemajemukan.
• Masih belum optimalnya pelayanan transportasi. • Masih rendahnya profesionalitas ASN. • Masih rendahnya nilai survei kepuasan masyarakat. • Masih renilahnya kualitas layanan administrasi kependudukan.	MISI 6: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berkualitas serta Pelayanan Publik Prima.

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5



Courtesy: www.pngegg.com

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

5.1.1. Tahapan Arah Kebijakan Dalam 4 Periode 5 Tahunan

Tahapan arah kebijakan dalam 4 periode 5 tahunan dilakukan untuk menjamin konsistensi pencapaian target pembangunan jangka panjang sehingga dokumen RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045 dapat diterjemahkan dengan tepat dalam 4 (empat) dokumen RPJMD selama dua puluh tahun kedepan.

Gambar 5.1 Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kepahiang 2025-2045



Tahap Pertama pembangunan jangka panjang Kabupaten Kepahiang (2025-2029) difokuskan untuk **Membangun Fondasi dan Struktur Transformasi Pembangunan**. Pada tahap ini berbagai arah kebijakan yang ditetapkan untuk menerjemahkan pencapaian misi pembangunan adalah sebagai berikut: 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan, derajat pendidikan dan kesejahteraan sosial; 2) Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan penguatan fondasi kemajuan perekonomian daerah; 3) Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, 4) Peningkatan kualitas masyarakat madani dan penguatan kohesivitas sosial, 5) Peningkatan kualitas lingkungan hidup, ketahanan air dan pangan serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, dan 6) Percepatan penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis yang memadai dan berkualitas.

Tahap Kedua pembangunan jangka panjang Kabupaten Kepahiang (2030-2034) difokuskan untuk **Memperkokoh Fondasi dan Struktur Transformasi Pembangunan**. Pada tahap ini berbagai arah kebijakan yang ditetapkan untuk menerjemahkan pencapaian misi pembangunan adalah sebagai berikut: 1) Percepatan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan inklusif, 2) Percepatan kemajuan perekonomian daerah yang berkeadilan berbasis potensi unggulan lokal, 3) Pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, 4) Pemantapan kualitas masyarakat madani dan kohesivitas sosial, 5) Pemantapan kualitas lingkungan hidup, ketahanan air dan pangan serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, dan 6) Percepatan penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis yang memadai dan berkualitas.

Tahap Ketiga pembangunan jangka panjang Kabupaten Kepahiang (2035-2039) difokuskan untuk **Mewujudkan Transformasi Pembangunan Menuju Kabupaten Kepahiang yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan**. Pada tahap ini berbagai arah kebijakan yang ditetapkan untuk menerjemahkan pencapaian misi pembangunan adalah sebagai berikut: 1) Penguatan daya saing sumber daya manusia dan keberlanjutan kesejahteraan sosial, 2) Kemajuan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkeadilan berbasis potensi unggulan lokal, 3) Tata kelola pemerintahan berkualitas tinggi dan pelayanan publik prima, 4) Masyarakat madani berkualitas dan kohesivitas sosial kuat, 5) Lingkungan hidup berkualitas, ketahanan air dan pangan kuat serta resiliensi kuat terhadap bencana dan perubahan iklim, dan 6) Pemantapan kualitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis.

Tahap Keempat pembangunan jangka panjang Kabupaten Kepahiang (2040-2045) difokuskan untuk **mewujudkan Kabupaten Kepahiang yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan**. Pada tahap ini berbagai arah kebijakan yang ditujukan untuk menerjemahkan pencapaian misi pembangunan adalah sebagai berikut: 1) Manusia Kabupaten Kepahiang yang unggul, 2) Kemajuan perekonomian daerah yang berdaya saing, berkeadilan dan berkelanjutan berbasis potensi unggulan lokal, 3) Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berdaya saing tinggi, 4) Masyarakat madani yang berkualitas dan kohesivitas sosial kuat secara berkelanjutan, 5) Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas, ketahanan air dan pangan kuat serta resiliensi kuat terhadap bencana dan perubahan iklim secara berkelanjutan, dan 6) Ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis berkualitas secara berkelanjutan.

Matriks 5.1 Tahapan Arah Kebijakan dalam 4 Periode 5 Tahunan Kabupaten Kepahiang

MISI	TAHAPAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN KEPAHIANG 2025-2045			
	Periode I (2025-2029)	Periode II (2030-2034)	Periode III (2035-2039)	Periode IV (2040-2045)
	Membangun Fondasi dan Struktur Transformasi Pembangunan	Memperkokoh Fondasi dan Struktur Transformasi Pembangunan	Mewujudkan Transformasi Pembangunan Menuju Kabupaten yang Maju, Berdayasaing, Sejahtera dan Berkelanjutan	Kabupaten yang Maju, Berdayasaing, Sejahtera, dan Berkelanjutan
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia, Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan, Derajat Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial	Percepatan Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Inklusif	Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan Kesejahteraan Sosial	Manusia Kabupaten Kepahiang yang Unggul
Mewujudkan Ekonomi Inklusif dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas	Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat dan Penguatan Fondasi Kemajuan Perekonomian Daerah	Percepatan Kemajuan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan Berbasis Potensi Unggulan Lokal	Kemajuan Perekonomiati Daerah yang Berdaya Saing dan Berkeadilan Berbasis Potensi Unggulan Lokal	Kemajuan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Berkeadilan dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Unggulan Lokal
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berkualitas serta Pelayanan Publik Perijnan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Pemantapan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas Tinggi dan Pelayanan Publik Prima	Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berdaya Saing Tinggi
Mewujudkan Masyarakat Madani Yang Tertib, Anian, Damai, Harmonis dan Menyatu Dalam Kemajemukan	Peningkatan Kualitas Masyarakat Madani dan Penguatan Kohesivitas Sosial	Pemantapan Kualitas Masyarakat Madani dan Kohesivitas Sosial	Masyarakat Madani Berkualitas dan Kohesivitas Sosial Kuat	Masyarakat Mariani Berkualitas dan Kohesivitas Sosial Kuat Secara Berkelanjutan
Mewujudkan Lingkungan Hidup Secara Lestari, Seimbang dan Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Air dan Pangan, serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Pemantapan Kualitas Lingkungan Hidup, Ketahanan Air dan Pangan, serta Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Lingkungan Hidup Berkualitas, Ketahanan Air dan Pangan Kuat, serta Resiliensi Kuat terliadap Bencana dan Perubahan Iklim	Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas, Ketahanan Air dan Pangan Kuat, serta Resiliensi Kuat terliadap Bencana dan Perubahan Iklim Secara Berkelanjutan
Menyediakan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis yang Memadai dan Berkualitas	Percepatan Penyediaan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis yang Memadai dan Berkualitas	Percepatan Penyediaan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis yang Memadai dan Berkualitas	Pemantapan Kualitas Ittfastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis	Ketersediaan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis Berkualitas secara Berkelanjutan

5.1.2. Arah Kebijakan Strategis (Transformatif)

Berbeda dengan dokumen RPJPD pada periode sebelumnya, dokumen RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045 disusun dengan menggunakan paradigma baru, yaitu adanya upaya transformasi jangka panjang untuk mewujudkan perubahan yang signifikan dan mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 yang tercantum dalam dokumen RPJPN 2025-2045.

Oleh karena itu, misi pembangunan jangka panjang harus dalam kerangka paradigma transformatif di atas serta diterjemahkan menjadi agenda pembangunan. Selanjutnya, agenda pembangunan tersebut akan diterjemahkan kedalam arah pembangunan, arah kebijakan, sasaran, indikator, *baseline* dan target.

Agenda Pembangunan Kabupaten Kepahiang 2025-2045 adalah merupakan Misi yang telah diselaraskan dengan paradigma baru yang digunakan secara nasional adalah: Transformasi Pembangunan yang terdiri dari: a) Transformasi Sosial, b) Transformasi Ekonomi, dan c) Transformasi Tata Kelola. Landasan Transformasi yang terdiri dari: a) Mewujudkan Masyarakat Madani yang Tertib, Aman, Damai, Harmonis dan Menyatu Dalam Kemajemukan, dan b) Mewujudkan Lingkungan Hidup Secara Lestari, Seimbang dan Berkelanjutan. Kerangka Implementasi Transformasi dalam bentuk upaya Menyediakan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis yang Memadai dan Berkualitas (lihat Matriks 5.2)

Matriks 5.2 Misi, Agenda Pembangunan dan Transformasi

Misi	Agenda Pembangunan	Transformasi
1. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Transformasi Sosial	Transformasi Pembangunan
2. Mewujudkan Ekonomi Inklusif dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas	Transformasi Ekonomi	
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berkualitas serta Pelayanan Publik Prima	Transformasi Tata Kelola	
4. Mewujudkan Masyarakat Madani Yang Tertib, Aman, Damai, Harmonis dan Menyatu Dalam Kemajemukan	Mewujudkan Masyarakat Madani Yang Tertib, Aman, Damai, Harmonis dan Menyatu Dalam Kemajemukan	Landasan Transformasi
5. Mewujudkan Lingkungan Hidup Secara Lestari, Seimbang dan Berkelanjutan	Mewujudkan Lingkungan Hidup Secara Lestari, Seimbang dan Berkelanjutan	
6. Menyediakan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis yang Memadai dan Berkualitas	Menyediakan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis yang Memadai dan Berkualitas	Kerangka Implementasi Transformasi

5.1.3. Agenda Pembangunan, Arah Pembangunan, dan Arah Kebijakan

Dalam paradigma baru penyusunan RPJPD, Misi atau Agenda Pembangunan tidak langsung diterjemahkan kedalam Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok. Oleh karena itu, di masing-masing Agenda Pembangunan harus diterjemahkan terlebih dahulu Arah Pembangunan dan Arah Kebijakannya kemudian baru ditetapkan Sasaran, Indikator, *Baseline* 2025 dan Target 2045. Penerjemahan Arah Pembangunan dan Arah Kebijakan untuk masing-masing Agenda Pembangunan dapat dilihat dalam Matriks 5.3-5.8 di bawah ini.

a. Transformasi Sosial

Agenda Pembangunan Transformasi Sosial diterjemahkan kedalam 4 (empat) Arah Pembangunan, yaitu: 1) Pembangunan Manusia Berkualitas, 2) Kesehatan Masyarakat

Meningkat dan Pelayanan Kesehatan Berkualitas, 3) Derajat Pendidikan Masyarakat Meningkat, dan 4) Kesejahteraan Sosial Masyarakat Meningkat.

Selanjutnya, Arah Pembangunan tersebut diterjemahkan kedalam 10 (sepuluh) Arah Kebijakan, yaitu: 1) Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, 2) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, 3) Menurunkan prevalensi stunting, 4) Mewujudkan derajat pendidikan yang tinggi, 5) Mewujudkan tingkat kesejahteraan sosial yang tinggi, 6) Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, 7) Mewujudkan minat baca masyarakat yang tinggi, 8) Mewujudkan usia harapan hidup yang tinggi, 9) Mengoptimalkan pengendalian pertumbuhan penduduk, dan 10) Meningkatkan kualitas pembangunan gender.

Matriks 5.3 Agenda Pembangunan, Arah Pembangunan dan Arah Kebijakan

Agenda Pembangunan	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Pembangunan Manusia Berkualitas	1. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	2. Kesehatan Masyarakat Meningkat dan Pelayanan Kesehatan Berkualitas	2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan 3. Menurunkan prevalensi stunting
	3. Derajat Pendidikan Masyarakat Meningkat	4. Mewujudkan derajat pendidikan yang tinggi
	4. Kesejahteraan Sosial Masyarakat Meningkat	5. Mewujudkan tingkat kesejahteraan sosial yang tinggi 6. Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 7. Mewujudkan minat baca masyarakat yang tinggi 8. Mewujudkan usia harapan hidup yang tinggi 9. Mengoptimalkan pengendalian pertumbuhan penduduk 10. Meningkatkan kualitas pembangunan gender

Matriks 5.4 Sasaran, Indikator, *Baseline* dan Target Transformasi Sosial

Sasaran	Indikator	<i>Baseline</i> 2025	Target 2045
1. Kualitas pembangunan manusia meningkat	1. Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	71,50	81,02
	2. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	10.82 per KH	Tidak ada Kematian
2. Kualitas pelayanan kesehatan meningkat	3. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	168.13 Per KH	Tidak ada Kematian
3. Prevalensi stunting menurun	4. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	8:14	8:16
4. Tingginya derajat pendidikan	5. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1	3
5. Tingginya tingkat kesejahteraan sosial	6. Rasio dokter per satuan penduduk	1:4.300	1:2.200
	7. Rasio dokter gigi per satuan penduduk	1:25.500	1:7.500
6. Rendahnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	8. Rasio dokter spesialis per satuan penduduk	1:26.000	1:16.000
	9. Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	92,31%	100%
7. Tingginya minat baca masyarakat	10. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%
8. Tingginya angka harapan hidup	11. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%
9. Optimalnya pengendalian pertumbuhan penduduk	12. Prevalensi stunting	15%	4,7%
	13. Angka Partispasi Sekolah (APS) SMA/SMK /MA/Paket C	69,16%	100%
10. Kualitas pembangunan gender meningkat	14. Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	65%	80%
	15. Persentase PPKS yang mendapat manfaat perlindungan sosial dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial	85%	90%
	16. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	60 s.d 70	30 s.d 40
	17. Persentase Peningkatan Pemustaka (%)	30 %-40%	50%-60%
	18. Usia Harapan Hidup	72	78
	19. Laju pertumbuhan penduduk	1.9	1,85
	20. Indeks Pembangunan Gender (indeks)	96.2	98,02
	21. Literasi membaca SD	62,46	70,00
	22. Literasi membaca SMP	69,57	80,00
	23. Literasi numerasi SD	48,54	65,00
	24. Literasi numerasi SMP	63,97	75,00

b. Transformasi Ekonomi

Agenda Pembangunan Transformasi Ekonomi diterjemahkan kedalam 2 (dua) Arah Pembangunan, yaitu: 1) Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Meningkat, dan 2) Perekonomian Daerah Maju dan Berkeadilan.

Selanjutnya, Arah Pembangunan tersebut diterjemahkan kedalam 8 (delapan) Arah Kebijakan, yaitu: 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, 2) Mewujudkan tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan dan tingkat pengangguran yang rendah, 3)

Meningkatkan ketahanan pangan, 4) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 5) Meningkatkan kontribusi sub sektor perikanan, perdagangan dan manufaktur dalam PDRB, 6) Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap retribusi daerah dalam PAD, 7) Mewujudkan target investasi, dan 8) Mewujudkan kelembagaan koperasi yang kuat dan pertumbuhan UMKM yang tinggi.

Matriks 5.5: Agenda Pembangunan, Arah Pembangunan dan Arah Kebijakan dalam Transformasi Ekonomi

Agenda Pembangunan	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
Mewujudkan Ekonomi Inklusif dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas	1. Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Meningkat	1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat 2. Mewujudkan tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan dan tingkat pengangguran yang rendah 3. Meningkatkan ketahanan pangan
	2. Perekonomian Daerah Maju dan Berkualitas	4. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi 5. Meningkatkan kontribusi sub sektor perikanan, perdagangan dan manufaktur dalam PDRB 6. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap retribusi daerah dalam PAD 7. Mewujudkan target investasi 8. Mewujudkan kelembagaan koperasi yang kuat dan pertumbuhan UMKM yang tinggi

Matriks 5.6 Sasaran, Indikator, Baseline dan Target Transformasi Ekonomi

Sasaran	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1. Tingginya pertumbuhan ekonomi	1. Pertumbuhan PDRB	4,1 - 4,5%	7 - 8%
2. Kesejahteraan ekonomi masyarakat meningkat	2. PDRB per kapita (Rp Juta)	37 - 40	80 - 100
3. Rendahnya tingkat kemiskinan	3. Tingkat Kemiskinan (%)	12,5 - 12	6 - 5
4. Rendahnya tingkat pengangguran	4. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,00 - 2,35%	1,5 - 1,7%
5. Rendahnya tingkat ketimpangan	5. Indeks Gini (indeks)	0,31 - 0,32	0,285 - 0,295
6. Ketahanan pangan meningkat	6. Indeks Ketahanan Pangan (indeks)	67,75	75,69
7. Kontribusi sub sektor perikanan dalam PDRB meningkat	7. Proporsi sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	3,33%	4,17%
8. Kontribusi sub sektor perdagangan besar bukan inobil dan sepeda motor terhadap PDRB	8. Proporsi sub sektor perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor terhadap PDRB (%)	6,90%	13,80%
9. Kontribusi sektor manufaktur dalam PDRB meningkat	9. Proporsi sektor manufaktur terhadap PDRB (%)	7,3 - 7,5	8,5 - 9,0
10. Kontribusi sektor pariwisata terhadap retribusi daerah dalam PAD meningkat	10. Proporsi sektor pariwisata terhadap	2,80 - 2,92%	3,0 - 3,5%

Sasaran	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
	retribusi daerah dalam PAD (%)		
11. Tercapainya target investasi	11. jumlah investasi (Rp)	550 Milyar	2 Triliyun
12. Kuatnya kelembagaan koperasi	12. Persentase koperasi berkualitas (%)	50%	100%
13. Tingginya pertumbuhan UMKM	13. Persentase pertumbuhan UMKM bersertifikat (%)	20%	80%
14. Tingginya pertumbuhan wirausaha	14. Pertumbuhan wirausaha (%)	2,9%	7,0%

c. Transformasi Tata Kelola

Agenda Pembangunan Transformasi Tata Kelola diterjemahkan kedalam Arah Pembangunan, yaitu Pelayanan Publik Prima dan Kebijakan Publik Berkualitas.

Selanjutnya, Arah Pembangunan tersebut diterjemahkan kedalam 4 (empat) Arah Kebijakan, yaitu: 1) Mewujudkan profesionalitas ASN yang tinggi, 2) Mewujudkan layanan publik prima, 3) Meningkatkan kualitas proses bisnis pemerintahan, dan 4) Meningkatkan kualitas kebijakan publik.

Matriks 5.7 Agenda Pembangunan, Arah Pembangunan dan Arah Kebijakan dalam Transformasi Tata Kelola

Agenda Pembangunan	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berkualitas serta Pelayanan Publik Prima	1. Pelayanan Publik Prima dan Kebijakan Publik Berkualitas	1. Mewujudkan profesionalitas ASN yang tinggi 2. Mewujudkan layanan publik prima 3. Meningkatkan kualitas proses bisnis pemerintahan 4. Meningkatkan kualitas kebijakan publik

Matriks 5.8 Sasaran, Indikator, Baseline dan Target Transformasi Tata Kelola

Sasaran	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1. Tingginya profesionalitas ASN	1. Indeks Profesionalitas ASN (indeks)	60	84
2. Tingginya nilai survei kepuasan masyarakat	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks)	88,19	100
3. Tingginya kualitas layanan administrasi kependudukan	3. Persentase akurasi dan kecepatan dalam penerbitan dokumen kependudukan (%)	91%	99%
4. Optimalnya pengelolaan kinerja perangkat daerah	4. Nilai Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi	B	A
5. Tingginya kualitas penyusunan kebijakan publik	5. Indeks Penilaian Komponen pelaporan kinerja pada SAKIP Pemerintah Daerah (indeks)	B	A
6. Tingginya indeks SPBE	6. Indeks Kualitas Kebijakan (indeks)	65 (Baik)	85 (Sangat Baik)

Sasaran	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
7. Tingginya kualitas kearsipan	7. Indeks SPBE (indeks)	2,6	4,5
8. Optimalnya pemanfaatan data statistik sektoral	8. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	16%	100%
9. Tingginya keterbukaan informasi publik	9. Persentase data statistik (%)	47%	90%
10. Optimalnya pengendalian internal pemerintah	10. Indeks Kategori Keterbukaan Informasi Publik (indeks)	85	100
11. Optimalnya pelayanan transportasi	11. Persentase tindak lanjut temuan (%)	77,97%	85%
12. Tingginya profesionalitas ASN	12. Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 4
13. Tingginya nilai survei kepuasan masyarakat	13. Persentase layanan angkutan darat (%)	52%	80%
14. Tingginya capaian pelaksanaan aksi HAM	14. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	72%	90%
15. Tingginya kerjasama antar daerah	15. Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten/ Kota	5	15

d. Mewujudkan Masyarakat Madani yang Tertib, Aman, Damai, Harmonis dan Menyatu dalam Kemajemukan

Agenda Pembangunan Mewujudkan Masyarakat Madani yang Tertib, Aman, Damai, Harmonis dan Menyatu dalam Kemajemukan diterjemahkan kedalam Arah Pembangunan, yaitu Kualitas Masyarakat Madani Meningkatkan.

Selanjutnya, Arah Pembangunan tersebut diterjemahkan kedalam 5 (lima) Arah Kebijakan, yaitu: 1) Mewujudkan tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga persatuan bangsa, 2) Mewujudkan kuatnya penegakan hukum (perda dan perkara), 3) Mewujudkan pemerintahan desa yang berkualitas tinggi, 4) Mengoptimalkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat, dan 5) Meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan.

Matriks 5.9 Agenda Pembangunan, Arah Pembangunan dan Arah Kebijakan dalam Transformasi Mewujudkan Masyarakat Madani Yang Tertib, Aman, Damai, Harmonis, dan Menyatu dalam Kemajemukan

Agenda Pembangunan	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
Mewujudkan Masyarakat Madani Yang Tertib, Aman, Damai, Harmonis dan Menyatu Dalam Kemajemukan	1. Kualitas Masyarakat Madani Meningkatkan	1. Mewujudkan tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga persatuan bangsa 2. Mewujudkan kuatnya penegakan hukum (perda dan perkara) 3. Mewujudkan pemerintahan desa yang berkualitas tinggi 4. Mengoptimalkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat 5. Meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan

Matriks 5.10 Sasaran, Indikator, *Baseline* dan Target Mewujudkan Masyarakat Madani yang Tertib, Aman, Damai, Harmonis dan Menyatu dalam Kemajemukan

Sasaran	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1. Tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga persatuan bangsa	1. Persentase penanganan konflik (%)	81%	100%
2. Kuatnya penegakan hukum (perda dan perkara)	2. Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih (%)	83,50%	90%
3. Tingginya kualitas pemerintahan desa	3. Persentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada (%)	10 %-20%	5 %-10%
4. Optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat	4. Persentase desa berstatus mandiri (%)	9,52%	100%
5. Peranan organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan meningkat	5. Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat (%)	81,50%	100%
6. Tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga persatuan bangsa	6. Persentase ormas yang aktif (%)	31%	90%

e. Mewujudkan Lingkungan Hidup Secara Lestari, Seimbang dan Berkelanjutan

Agenda Pembangunan Mewujudkan Lingkungan Hidup Secara Lestari, Seimbang dan Berkelanjutan diterjemahkan kedalam 3 (tiga) Arah Pembangunan, yaitu: 1) Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat, 2) Ketahanan Pangan Meningkat, dan 3) Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Meningkat.

Selanjutnya, Arah Pembangunan tersebut diterjemahkan kedalam 3 (tiga) Arah Kebijakan, yaitu: 1) Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan, 2) Meningkatkan ketahanan pangan, dan 3) Meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Matriks 5.11 Agenda Pembangunan, Arah Pembangunan dan Arah Kebijakan dalam Mewujudkan Lingkungan Hidup Secara Lestari, Seimbang dan Berkelanjutan

Agenda Pembangunan	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
Mewujudkan Lingkungan Hidup Secara Lestari, Seimbang dan Berkelanjutan	1. Kualitas lingkungan meningkat 2. Kualitas lingkungan meningkat 3. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Meningkat	1. Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan 2. Meningkatkan ketahanan pangan 3. Meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

Matriks 5.12 Sasaran, Indikator, Baseline dan Target Mewujudkan Lingkungan Hidup Secara Lestari, Seimbang dan Berkelanjutan

SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045
1. Kualitas lingkungan meningkat	1. Indeks Kualitas Lingkungan (indeks)	67,32	71,55
2. Ketahanan pangan meningkat	2. Indeks Ketahanan Pangan	67,75	75,69
3. Ketahanan daerah terhadap penanggulangan bencana	3. Indeks Kapasitas Daerah (indeks)	117,49	100
	4. Indeks Risiko Bencana	101,31	80

f. Menyediakan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis yang Memadai dan Berkualitas

Agenda Pembangunan Menyediakan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis yang Memadai dan Berkualitas diterjemahkan kedalam 3 (tiga) Arah Pembangunan, yaitu: 1) Penyediaan Infrastruktur Dasar Memadai dan Berkualitas, 2) Penyediaan Infrastruktur Sosial Memadai dan Berkualitas, dan 3) Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Memadai dan Berkualitas.

Selanjutnya, Arah Pembangunan tersebut diterjemahkan kedalam 3 (tiga) Arah Kebijakan, yaitu: 1) Menyediakan infrastruktur dasar yang memadai dan berkualitas, 2) Menyediakan infrastruktur sosial yang memadai dan berkualitas, dan 3) Menyediakan infrastruktur ekonomi yang memadai dan berkualitas.

Matriks 5.13 Agenda Pembangunan, Arah Pembangunan dan Arah Kebijakan dalam Menyediakan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis yang Memadai dan Berkualitas

Agenda Pembangunan	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
Menyediakan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis yang Memadai dan Berkualitas	1. Penyediaan Infrastruktur Dasar Memadai dan Berkualitas 2. Penyediaan Infrastruktur Sosial Memadai dan Berkualitas 3. Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Memadai dan Berkualitas	1. Menyediakan infrastruktur dasar yang memadai dan berkualitas 2. Menyediakan infrastruktur sosial yang memadai dan berkualitas 3. Menyediakan infrastruktur ekonomi yang memadai dan berkualitas

Matriks 5.14 Sasaran, Indikator, Baseline dan Target – Menyediakan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis yang Memadai dan Berkualitas

Sasaran	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1. Ketersediaan infrastruktur dasar	1. Persentase Panjang jalan dan jembatan	84,73%	99,80%
	2. Persentase Panjang irigasi	96,00%	99,98%
2. Ketersediaan infrastruktur sosial	3. Persentase Jumlah kelengkapan jalan	22,25%	99,75%
	4. Persentase Jumlah bangunan gedung kantor	96,24%	99,78%
3. Ketersediaan infrastruktur ekonomi	5. Persentase Panjang drainase	20,00%	99,75%
	6. Persentase Jumlah rumah tangga yang berakses air minum	86,00%	99,78%
	7. Persentase Jumlah rumah tinggal bersanitasi	88,21%	99,78%
	8. Persentase Jumlah rumah layak huni	74,00%	99,78%
	9. Persentase Jumlah wilayah yang ditangani sistem persampahan	50,00%	100,00%
	10. Persentase Jumlah SD dan SMP	96,00%	99,78%
	11. Persentase Jumlah sarana perpustakaan	56,00%	99,78%
	12. Persentase Jumlah rumah sakit	25,00%	99,99%
	13. Persentase Jumlah puskesmas	87,50%	99,99%
	14. Persentase Jumlah embung	16,66%	99,98%
	15. Persentase Panjang jalan usaha tani	50,00%	100,00%
	16. Persentase Panjang parit	99,67%	100,00%
	17. Persentase Jumlah pintu air	1,53%	99,98%
	18. Persentase Jumlah lumbung pangan	41,93%	99,98%
	19. Persentase Jumlah pasar	60,00%	99,98%

5.2. Sasaran Pokok

5.2.1. Misi, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Sasaran Pokok

Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045 dapat dilihat dalam Matriks-matriks di bawah:

a. Misi 1: Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Transformasi Sosial)

Matriks 5.15 Misi, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045: Transformasi Sosial

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Pokok
1. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Transformasi Sosial)	1. Pembangunan Manusia Berkualitas 2. Kesehatan Masyarakat Meningkat dan Pelayanan Kesehatan Berkualitas 3. Derajat Pendidikan Masyarakat Meningkat 4. Kesejahteraan Sosial Masyarakat Meningkat	1. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan 3. Menurunkan prevalensi stunting 4. Mewujudkan derajat pendidikan yang tinggi 5. Mewujudkan tingkat kesejahteraan sosial yang tinggi 6. Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 7. Mewujudkan minat baca masyarakat yang tinggi 8. Mewujudkan usia harapan hidup yang tinggi 9. Mengoptimalkan pengendalian pertumbuhan penduduk 10. Meningkatkan kualitas pembangunan gender	1. Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	71,50	81,02	Terwujudnya Kabupaten Kepahiang yang memiliki Sumber Daya Manusia Berkualitas yang meningkat
			2. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	10.82 per KH	Tidak ada Kematian	
			3. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	168.13 Per KH	Tidak ada Kematian	
			4. Rasio puskesmas, poliklinik, pusku per satuan penduduk	8:14	8:16	
			5. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1	3	
			6. Rasio dokter per satuan penduduk	1:4.300	1:2.200	
			7. Rasio dokter gigi per satuan penduduk	1:25.500	1:7.500	
			8. Rasio dokter spesialis per satuan penduduk	1:26.000	1:16.000	
			9. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	92,31%	100%	
			10. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%	
			11. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%	
			12. Prevalensi stunting	15%	4,7%	
			13. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	69,16%	100%	
			14. Harapan Lama Sekolah	13,72-13,74	15,43-15,48	

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Pokok
			15. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 tahun	8,37-8,40	10,98-11,00	
			16. Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	65%	80%	
			17. Persentase PPKS yang mendapat manfaat perlindungan sosial dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial	85%	90%	
			18. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	60 s.d 70	30 s.d 40	
			19. Persentase Peningkatan Pemustaka (%)	30 %-40%	50%-60%	
			20. Usia Harapan Hidup	72	78	
			21. Laju pertumbuhan penduduk	1.9	1,85	
			22. Indeks Pembangunan Gender (Indeks)	96.2	98,02	
			23. Literasi membaca SD	62,46	70	
			24. Literasi membaca SMP	69,57	80	
			25. Literasi numerasi SD	48,54	65	
			26. Literasi numerasi SMP	63,97	75	
			27. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98	100	
			28. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	98%	100%	

b. Misi 2: Mewujudkan Ekonomi Inklusif dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas (Transformasi Ekonomi)

Matriks 5.16 Misi, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045: Transformasi Ekonomi

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Pokok
2. Mewujudkan Ekonomi Inklusif dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas (Transformasi Ekonomi)	1. Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Meningkat 2. Perekonomian Daerah Maju dan Berkualitas	1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat	1. Pertumbuhan PDRB	4,1 - 4,5%	7 - 8%	Terwujudnya Kabupaten Kepahiang yang memiliki Ekonomi Inklusif dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas
			2. PDRB per kapita (Rp. Juta)	37 - 40	80 - 100	
		2. Mewujudkan tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan dan tingkat pengangguran yang rendah	3. Tingkat Kemiskinan (%)	12,5 - 12	6 - 5	
			4. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,00 - 2,35%	1,5 - 1,7%	
			5. Indeks Gini (indeks)	0,31 - 0,32	0,285 - 0,295	
			6. Indeks Ketahanan Pangan (indeks)	67,75	75,69	
		3. Meningkatkan ketahanan pangan	7. Proporsi sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	3,33%	4,17%	
		4. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi	8. Proporsi sub sektor perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor terhadap PDRB (%)	6,90%	13,80%	
		5. Meningkatkan kontribusi sub sektor perikanan, perdagangan dan manufaktur dalam PDRB	9. Proporsi sektor manufaktur terhadap PDRB (%)	7,3 - 7,5	8,5 - 9,0	
			10. Proporsi sektor pariwisata terhadap retribusi daerah dalam PAD (%)	2,80 - 2,92%	3,0 - 3,5%	
		6. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap retribusi daerah dalam PAD	11. Jumlah investasi (Rp)	550 Miliar	2 Triliyun	
			12. Persentase koperasi berkualitas (%)	50,00%	100%	
		7. Mewujudkan target investasi	13. Persentase pertumbuhan UMKM bersertifikat (%)	20,00%	80,00%	
		8. Mewujudkan kelembagaan koperasi yang kuat dan pertumbuhan UMKM yang tinggi	14. Pertumbuhan wirausaha (%)	2,9 %	7,0 %	
			15. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	40,81 %	50 %	

c. Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berkualitas serta Pelayanan Publik Prima (Transformasi Tata Kelola)

Matriks 5.17 Misi, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045: Transformasi Tata Kelola

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Pokok
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berkualitas serta Pelayanan Publik Prima (Transformasi Tata Kelola)	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berkualitas serta Pelayanan Publik Prima	1. Mewujudkan profesionalitas ASN yang tinggi	1. Indeks Profesionalitas ASN (indeks)	60	84	Terwujudnya Kabupaten Kepahiang yang memiliki Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berkualitas serta Pelayanan Publik Prima
		2. Mewujudkan layanan publik prima	2. Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,19	100	
		3. Meningkatkan kualitas proses bisnis pemerintahan	3. Persentase akurasi dan kecepatan dalam penerbitan dokumen kependudukan (%)	91%	99%	
		4. Meningkatkan kualitas kebijakan publik	4. Nilai Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi	B	A	
			5. Indeks Penilaian Komponen pelaporan kinerja pada SAKIP Pemerintah Daerah (indeks)	B	A	
			6. Indeks Kualitas Kebijakan (indeks)	65 (Baik)	85 (Sangat Baik)	
			7. Indeks SPBE (indeks)	2,6	4,5	
			8. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	16%	100%	
			9. Persentase data statistik (%)	47%	90%	
			10. Indeks Kategori Keterbukaan Informasi Publik (indeks)	85	100	
			11. Persentase tindak lanjut temuan (%)	77,97%	85%	
			12. Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 4	
			13. Persentase layanan angkutan darat (%)	52%	80%	
			14. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	72	90	
			15. Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten/ Kota	5	15	

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Pokok
			16. PAD terhadap Pendapatan Daerah(%)	1,2%	1,6%	

d. Misi 4: Mewujudkan Masyarakat Madani Yang Tertib, Aman, Damai, Harmonis dan Menyatu Dalam Kemajemukan

Matriks 5.18 Misi, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Pokok
Mewujudkan Masyarakat Madani Yang Tertib, Aman, Damai, Harmonis dan Menyatu Dalam Kemajemukan	Kualitas Masyarakat Madani Meningkat	1. Mewujudkan tingginya kesadaran masyarakat dalam menjaga persatuan bangsa 2. Mewujudkan kuatnya penegakan hukum (perda dan perkada) 3. Mewujudkan pemerintahan desa yang berkualitas tinggi 4. Mengoptimalkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat 5. Meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan	1. Persentase penanganan konflik (%)	81%	100%	Terwujudnya Kabupaten Kepahiang yang memiliki Masyarakat Madani yang Tertib, Aman, Damai, Harmonis dan Menyatu Dalam Kemajemukan
			2. Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih (%)	83,50%	90%	
			3. Persentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada (%)	10 %-20%	5 %-10%	
			4. Persentase desa berstatus mandiri (%)	9,52%	100%	
			5. Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat (%)	81,50%	100%	
			6. Persentase ormas yang aktif (%)	31%	90%	

e. Misi 5: Mewujudkan Lingkungan Hidup Secara Lestari, Seimbang dan Berkelanjutan

Matriks 5.19 Misi, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Pokok
Mewujudkan Lingkungan Hidup Secara Lestari, Seimbang dan Berkelanjutan	9. Kualitas lingkungan meningkat 10. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Meningkat	1. Kualitas lingkungan meningkat 2. Ketahanan pangan meningkat 3. Ketahanan daerah terhadap penanggulangan bencana	1. Indeks Kualitas Lingkungan (Indeks)	67,32	71,55	Terwujudnya Kabupaten Kepahiang yang memiliki Lingkungan Hidup yang Lestari, Seimbang dan Berkelanjutan
			2. Indeks Ketahanan Pangan	67,75	75,69	
			3. Indeks Kapasitas Daerah (Indeks)	117,49	100	
			4. Indeks Risiko Bencana	101,31	80	

f. Misi 6: Menyediakan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis yang Memadai dan Berkualitas

Matriks 5. 20 Misi, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Pokok
1. Menyediakan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis yang Memadai dan Berkualitas	1. Penyediaan Infrastruktur Dasar Memadai dan Berkualitas 2. Penyediaan Infrastruktur Sosial Memadai dan Berkualitas 3. Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Memadai dan Berkualitas	1. Menyediakan infrastruktur dasar yang memadai dan berkualitas 2. Menyediakan infrastruktur sosial yang memadai dan berkualitas 3. Menyediakan infrastruktur ekonomi yang memadai dan berkualitas	1. Persentase Panjang jalan dan jembatan	84,73%	99,80%	Terwujudnya Kabupaten Kepahiang yang memiliki Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis yang Memadai dan Berkualitas
			2. Persentase Panjang irigasi	96,00%	99,98%	
			3. Persentase Jumlah kelengkapan jalan	22,25%	99,75%	
			4. Persentase Jumlah bangunan gedung kantor	96,24%	99,78%	
			5. Persentase Panjang drainase	20,00%	99,75%	
			6. Persentase Jumlah rumah tangga yang berakses air minum	86,00%	99,78%	
			7. Persentase Jumlah rumah tinggal bersanitasi	88,21%	99,78%	
			8. Persentase Jumlah rumah layak huni	74,00%	99,78%	
			9. Persentase Jumlah wilayah yang ditangani sistem persampahan	50,00%	100,00%	
			10. Persentase Jumlah SD dan SMP	96,00%	99,78%	
			11. Persentase Jumlah sarana perpustakaan	56,00%	99,78%	
			12. Persentase Jumlah rumah sakit	25,00%	99,99%	
			13. Persentase Jumlah puskesmas	87,50%	99,99%	
			14. Persentase Jumlah embung	16,66%	99,98%	
			15. Persentase Panjang jalan usaha tani	50,00%	100,00%	
			16. Persentase Panjang parit	99,67%	100,00%	
			17. Persentase Jumlah pintu air	1,53%	99,98%	
			18. Persentase Jumlah lumbung pangan	41,93%	99,98%	

Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Pokok
			19. Persentase Jumlah pasar	60,00%	99,98%	

5.2.2. Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target

Matriks 5. 21 Misi, Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045
1. Terwujudnya Kabupaten Kepahiang yang memiliki Sumber Daya Manusia Berkualitas yang meningkat	1. Pembangunan Manusia Berkualitas 2. Kesehatan Masyarakat Meningkat dan Pelayanan Kesehatan Berkualitas 3. Derajat Pendidikan Masyarakat Meningkat 4. Kesejahteraan Sosial Masyarakat Meningkat	1. Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	71,50	81,02
		2. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	10.82 per KH	Tidak ada Kematian
		3. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	168.13 Per KH	Tidak ada Kematian
		4. Rasio puskesmas, poliklinik, pusda per satuan penduduk	8.14	8.16
		5. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	1	3
		6. Rasio dokter per satuan penduduk	1:4.300	1:2.200
		7. Rasio dokter gigi per satuan penduduk	1:25.500	1:7.500
		8. Rasio dokter spesialis per satuan penduduk	1:26.000	1:16.000
		9. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	92,31%	100%
		10. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%	100%
		11. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%
		12. Prevalensi stunting	15%	4,7%
		13. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK /MA/Paket C	69,16%	100%
		14. Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	65%	80%
		15. Persentase PPKS yang mendapat manfaat perlindungan sosial dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial	85%	90%
		16. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	60 s.d 70	30 s.d 40
		17. Persentase Peningkatan Pemustaka (%)	30 %-40%	50%-60%
		18. Usia Harapan Hidup	72	78
		19. Laju pertumbuhan penduduk	1.9	1.85
		20. Indeks Pembangunan Gender (Indeks)	96.2	98,02

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045
		21. Uiterasi membaca SD	62,46	70
		22. Uiterasi membaca SMP	69,57	80
		23. Uiterasi numerasi SD	48,94	65
		24. Uiterasi numerasi SMP	63,97	
2. Terwujudnya Kabupaten Kepahiang yang memiliki Ekonomi Inklusif dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas	1. Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Meningkat 2. Perekonomian Daerah Maju dan Berkualitas	1. Pertumbuhan PDRB	4,1 - 4,5%	7 - 8%
		2. PDRB per kapita (Rp. Juta)	37 - 40	80 - 100
		3. Tingkat Kemiskinan (%)	12,5 - 12	6 - 5
		4. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,00 - 2,35%	1,5 - 1,7%
		5. Indeks Gini (indeks)	0,31 - 0,32	0,285 - 0,295
		6. Indeks Ketahanan Pangan (indeks)	67,75	75,69
		7. Proporsi sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	3,33%	4,17%
		8. Proporsi sub sektor perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor terhadap PDRB (%)	6,90%	13,80%
		9. Proporsi sektor manufaktur terhadap PDRB (%)	7,3 - 7,5	8,5 - 9,0
		10. Proporsi sektor pariwisata terhadap retribusi daerah dalam PAD (%)	2,80 - 2,92%	3,0 - 3,5%
		11. Jumlah investasi (Rp)	550 Miliar	2 Triliun
		12. Persentase koperasi berkualitas (%)	50%	100%
		13. Persentase pertumbuhan UMKM bersertifikat (%)	20%	80%
		14. Pertumbuhan wirausaha (%)	2,9 %	7%
3. Terwujudnya Kabupaten Kepahiang yang memiliki Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berkualitas serta Pelayanan Publik Prima	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berkualitas serta Pelayanan Publik Prima	1. Indeks Profesionalitas ASN (indeks)	60	84
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks)	88,19	100
		3. Persentase akurasi dan kecepatan dalam penerbitan dokumen kependudukan (%)	91%	99%
		4. Nilai Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi	B	A
		5. Indeks Penilaian Komponen pelaporan kinerja pada SAKIP Pemerintah Daerah (indeks)	B	A
		6. Indeks Kualitas Kebijakan (indeks)	65 (Baik)	85 (Sangat Baik)

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045
		7. Indeks SPBE (indeks)	2,6	4,5
		8. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%)	16%	100%
		9. Persentase data statistik (%)	47%	90%
		10. Indeks Kategori Keterbukaan Informasi Publik (indeks)	85	100
		11. Persentase tindak lanjut temuan (%)	77,97%	85%
		12. Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 4
		13. Persentase layanan angkutan darat (%)	52%	80%
		1. Persentase penanganan konflik (%)	81%	100%
		2. Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilih (%)	83,50%	90%
		3. Persentase penurunan pelanggaran Perda dan Perkada (%)	10 %-20%	5 %-10%
		4. Persentase desa berstatus mandiri (%)	9,52%	100%
		5. Persentase pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat (%)	81,50%	100%
		6. Persentase ormas yang aktif (%)	31%	90%
4. Terwujudnya Kabupaten Kepahiang yang memiliki Masyarakat Madani yang Tertib, Aman, Damai, Harmonis dan Menyatu Dalam Kemajemukan	Kualitas Masyarakat Madani Meningkat	1. Indeks Kualitas Lingkungan (indeks)	67,32	71,55
		2. Indeks Ketahanan Pangan	67,75	75,69
		3. Indeks Kapasitas Daerah (indeks)	117,49	100
		4. Indeks Risiko Bencana	101,31	80
5. Terwujudnya Kabupaten Kepahiang yang memiliki Lingkungan Hidup yang Lestari, Seimbang dan Berkelanjutan	1. Kualitas lingkungan meningkat 2. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Meningkat	1. Persentase Panjang jalan dan jembatan	84,73%	99,80%
		2. Persentase Panjang irigasi	96,00%	99,98%
6. Terwujudnya Kabupaten Kepahiang yang memiliki Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis yang Memadai dan Berkualitas	11. Penyediaan Infrastruktur Dasar Memadai dan Berkualitas 12. Penyediaan Infrastruktur Sosial Memadai dan Berkualitas 5. Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Memadai dan Berkualitas	3. Persentase Jumlah kelengkapan jalan	22,25%	99,75%
		4. Persentase Jumlah bangunan gedung kantor	96,24%	99,78%
		5. Persentase Panjang drainase	20,00%	99,75%
		6. Persentase Jumlah rumah tangga yang berakses air minum	86,00%	99,78%
		7. Persentase Jumlah rumah tinggal bersanitasi	88,21%	99,78%
		8. Persentase Jumlah rumah layak huni	74,00%	99,78%

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045
		9. Persentase Jumlah wilayah yang ditangani sistem persampahan	50,00%	100,00%
		10. Persentase Jumlah SD dan SMP	96,00%	99,78%
		11. Persentase Jumlah sarana perpustakaan	56,00%	99,78%
		12. Persentase Jumlah rumah sakit	25,00%	99,99%
		13. Persentase Jumlah puskesmas	87,50%	99,99%
		14. Persentase Jumlah embung	16,66%	99,98%
		15. Persentase Panjang jalan usaha tani	50,00%	100,00%
		16. Persentase Panjang parit	99,67%	100,00%
		17. Persentase Jumlah pintu air	1,53%	99,98%
		18. Persentase Jumlah lumbung pangan	41,93%	99,98%
		19. Persentase Jumlah pasar	60,00%	99,98%



PENUTUP 6

BAB VI PENUTUP

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Visi Kabupaten Kepahiang yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan pada tahun 2045 akan terwujud melalui peran serta aktif seluruh pelaku pembangunan. Oleh karena itu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2045 harus dijadikan acuan oleh seluruh pelaku pembangunan termasuk pihak swasta dan organisasi masyarakat madani dalam melaksanakan strategi transformasi pembangunan di Kabupaten Kepahiang selama dua puluh tahun kedepan sesuai peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan.

Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, dan mekanisme perubahan. Cakupan substansi tersebut menjadi instrumen pengaman (*safeguarding*) untuk memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2045 sesuai dengan cita-cita masyarakat di Kabupaten Kepahiang.

6.2 Kaidah Pelaksanaan

Konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal.

Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pelaku nonpemerintah.

Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan sampai dengan tingkat keluaran, serta memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses terutama dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

Keterkaitan RPJPD Kabupaten Kepahiang dengan Perencanaan Pembangunan Daerah

Secara substansial, RPJPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2045 akan menjadi pedoman serta harus diterjemahkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kepahiang baik untuk jangka menengah maupun tahunan yang tercermin dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah dan APBD.

Dalam jangka menengah, RPJPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2045 akan memberikan pedoman serta harus diterjemahkan dalam penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah selama 4 (empat) periode. Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah perlu menjaga konsistensi pencapaian target pembangunan

jangka panjang dalam kerangka penerjemahan Agenda Pembangunan, Arah Pembangunan dan Arah Kebijakan dan Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers) dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2045.

Oleh karena itu, dokumen RPJPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2045 harus menjadi pedoman pula bagi calon Bupati dan Wakil Bupati Kepahiang yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah serentak di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2024 terutama dalam menyusun visi, misi dan program prioritas/unggulan calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya akan diterjemahkan dan dijabarkan secara rinci kedalam dokumen perencanaan jangka menengah

Dalam konteks integrasi dan sinkronisasi perencanaan, berbagai dokumen rencana jangka panjang daerah lainnya juga harus disesuaikan dan diselaraskan dengan substansi yang terdapat dalam dokumen RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045.

Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RPJPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2045 dan dokumen perencanaan turunannya menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KKL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan. Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan Integratif.

Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan. Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah. Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan. Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Kerangka Kerja Logis menggambarkan keterkaitan antara masukan (input), proses, keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact). Sasaran utama pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2045 yang bersifat impact-outcome, harus diterjemahkan dengan baik hingga ke tingkat input. Pendetailan sasaran tersebut dilakukan melalui dokumen turunannya, meliputi rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek atau tahunan. Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, KKL dilengkapi Indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria Specific, Measurable, Achievable, Result-Oriented/Relevant, dan Time-Bound (SMART).

Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Kepahiang dalam RPJPD, RPKMD dan RKPD perlu didukung dengan sinkronisasi antara perencanaan dan pendanaan pembangunan. Selanjutnya, optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non-pemerintah perlu dilakukan secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja

dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, pemerintah Kabupaten Kepahiang juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan alternatif lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan daerah.

Kerangka Pengendalian

Untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan Kabupaten Kepahiang diperlukan pengendalian yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti (evidence based development policy).

Pengendalian RPJPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2045 dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya dilaporkan kepada Bupati dan tembusan kepada DPRD. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan terbagi menjadi dua bagian, yaitu: a) Pengendalian perencanaan; dan b) Pengendalian pelaksanaan.

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan dan menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Pengendalian jangka menengah mencakup: a) Penjabaran dokumen RPJPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2045 kedalam dokumen RPJMD dan selanjutnya dokumen RPJMD kedalam dokumen Renstra Perangkat Daerah; b) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan c) identifikasi risiko perencanaan pembangunan sekaligus mitigasinya. Pengendalian jangka pendek atau tahunan mencakup: a) Penjabaran dokumen RPJMD kedalam dokumen RKPD dan selanjutnya dokumen RKPD kedalam dokumen Renja Perangkat Daerah; b) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan c) identifikasi risiko pembangunan dan mitigasinya.

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: a) Pemantauan pelaksanaan program prioritas pembangunan Kabupaten Kepahiang; b) Pemantauan mitigasi risiko pembangunan; c) Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Kepahiang; dan d) Evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Kepahiang.

Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut mensinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk menjamin terwujudnya konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja Perangkat Daerah terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan

dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal Perangkat Daerah.

Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Kepahiang memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan non-pemerintah, seperti dunia usaha, perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat madani lainnya. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Kepahiang.

Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja Perangkat Daerah terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Kepahiang.

Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro daerah, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan non-pemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan usaha lainnya.

Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang, target RPJPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2045 dapat dimutakhirkan melalui RPJMD.

Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi publik yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: a) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; b) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta c) keterlibatan semua

kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik RPJPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2025-2045 berprinsip "tidak ada yang tertinggal" (no one left behind) dan partisipasi yang bermakna (meaningful participation). Komunikasi publik yang bersifat horisontal kepada Perangkat Daerah dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi agar Perangkat Daerah dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan. Selanjutnya, komunikasi publik yang bersifat vertikal dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah desa, kecamatan dan kabupaten untuk membangun pemahaman yang sama dan menjangkau partisipasi yang luas. Sementara, komunikasi publik secara luas kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, perguruan tinggi, organisasi masyarakat madani, pemuda dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan.

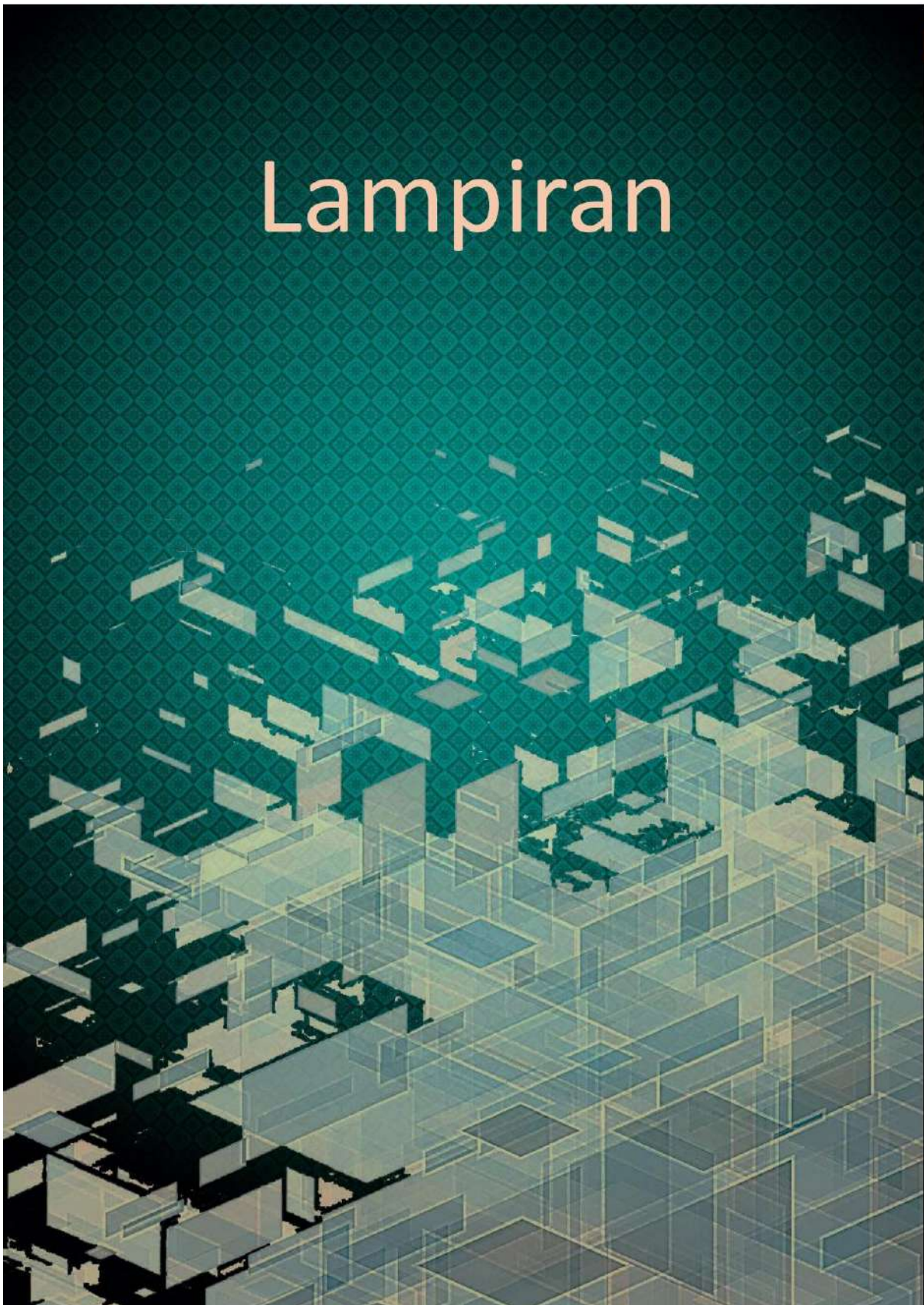
Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi publik dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

6.3 Kaidah Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Kepahiang 2045 memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru maupun kemitraan dalam pembiayaan pembangunan.

Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup: a) penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi: penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak (*impact investment*); b) perluasan kerja sama keuangan lain dan kemitraan pembiayaan pembangunan untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya; c) penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model *private financial initiative* yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial; dan d) optimalisasi pemanfaatan aset daerah melalui sekuritisasi aset (*asset securitization*), daur ulang aset (*asset recycling*), tukar guling aset (*asset offset*) hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan (*asset value capture*).

Lampiran



Lampiran 1:

Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Kepahiang dan Visi RPJPN

Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045 terhadap Visi RPJPN 2025-2045 menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) kesamaan unsur pembentuk visi, yaitu Maju dan Berkelanjutan.

Matriks Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Kepahiang dan Visi RPJPN 2025-2045

Visi RPJPN 2025-2045	Visi RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045
Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	Kabupaten Kepahiang yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan

Lampiran 2:

Penyelarasan Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Kepahiang dan RPJPN

Dari 5 (lima) sasaran visi RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045 terdapat 4 (empat) sasaran yang relatif selaras dengan sasaran visi RPJPN 2025-2045. Selanjutnya, terdapat 2 (dua) indikator visi RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045 yang selaras dengan indikator visi RPJPN 2025-2045

RPJPN 2025-2045				RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045			
Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
Pendapatan per kapita setara negara maju	GNI per kapita (US\$)	5.500	23.000-30.300	Kesejahteraan ekonomi masyarakat meningkat	PDRB per kapita (Rp. Juta)	37 - 40	80 - 100
	Kontribusi PDB Maritim (%)	7,0	15,0		Kontribusi sektor manufaktur dalam PDRB (%)	7,3 - 7,5	8,5 - 9,0
	Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0				
Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang	Rasio Gini (indeks)	0,77 - 0,382	0,290 - 0,320	Kemiskinan dan ketimpangan menurun	Tingkat Kemiskinan (%)	12,5 - 12	6 - 5
	Kontribusi PDRB KTI (%)	20,6	28,5		Rasio Gini (indeks)	0,31 - 0,32	0,285 - 0,295
Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global Power Index (peringkat)	34	15	Tingginya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dan meningkatnya kualitas kebijakan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (indeks)	88,19	100
Daya saing sumber daya manusia meningkat	Human Capital Index (indeks)	0,54	0,74	Kualitas sumber daya manusia meningkat	Indeks Pembangunan Manusia (indeks)	71,50	81,02
Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Kualitas lingkungan hidup meningkat	Indeks Kualitas lingkungan (indeks)	67,32	71,55

III

Lampiran 3:

Penyelarasan Misi RPJPD Kabupaten Kepahiang Dan Misi RPJPN

Penyelarasan Misi RPJPD Kabupaten Kepahiang (6 Misi) dan Misi RPJPN (8 Misi)

RPJPN 2025-2045		RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045	
AGENDA	MISI	MISI	
Transformasi Indonesia	1. Mewujudkan Transformasi Sosial 2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi 3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	1. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Mewujudkan Pkonomi Inklusif dan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas 3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berkualitas serta Pelayanan Publik Prima	
Landasan Transformasi	4. Mewujudkan Supremasi Ilukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia 5. Mewujudkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi	4. Mewujudkan Masyarakat Madani yang Tertib, Aman, Damai, Ilarmonis dan Menyatu dalam Kemajemukan 5. Mewujudkan Lingkungan Hidup Secara Lestari, Seimbang dan Berkelanjutan	
Kerangka Implementasi	6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan 7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan 8. Mewujudkan Kesiambungan Pembangunan	6. Menyediakan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis yang Memadai dan Berkualitas	

IV

Lampiran 4:

Penyelarasan Arah Pembangunan

Dari 14 (empat belas) Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045 terdapat sebanyak 4 (empat) Arah Pembangunan yang selaras atau sinkron dengan 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan RPJPN 2025-2045. Keempat Arah Pembangunan tersebut adalah: 1) Kesehatan Masyarakat Meningkat dan Pelayanan Kesehatan Berkualitas, 2) Derajat Pendidikan Masyarakat Meningkat, 3) Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat, 4) Ketahanan Air dan Pangan Meningkat, dan 5) Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Meningkat.

Matriks Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Kepahiang dan RPJPN 2025-2045 (1)

RPJPN 2025-2045		RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045	
Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
1. Sosial	1. Kesehatan untuk Semua 2. Pendidikan Berkualitas yang Merata 3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	Sosial	1. Pembangunan Manusia Berkualitas 2. Kesehatan Masyarakat Meningkat dan Pelayanan Kesehatan Berkualitas 3. Derajat Pendidikan Masyarakat Meningkat 4. Kesejahteraan Sosial Masyarakat Meningkat
2. Ekonomi	4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Nasional 5. Penerapan Ekonomi Hijau 6. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 7. Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Ekonomi	5. Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Meningkat 6. Perekonomian Daerah Maju dan Berkualitas
3. Tata Kelola	8. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Tata Kelola	7. Pelayanan Publik Prima dan Kebijakan Publik Berkualitas
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	9. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansial 10. Stabilitas Ekonomi Makro 11. Ketangguhan Diplomasi dan Ketangguhan Budaya Gentar Kawasan	Mewujudkan Masyarakat Madani yang Tertib, Aman, Damai, Harmonis dan Menyatu dalam Kemajemukan	8. Kualitas Masyarakat Madani Meningkat

V

Matriks Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Kepahiang dan RPJPN 2025-2045 (2)

RPJPN 2025-2045		RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045	
Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	12. Beragama Maslahat dan Berbudaya Maju 13. Resiliensi Terhadap Rencana dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Lingkungan Hidup secara Lestari, Seimbang, dan Berkelanjutan	9. Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat 10. Ketahanan Air dan Pangan Meningkat 11. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim Meningkat
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan		Menyediakan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis yang Memadai dan Berkualitas	12. Penyediaan Infrastruktur Dasar Memadai dan Berkualitas 13. Penyediaan Infrastruktur Sosial Memadai dan Berkualitas 14. Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Memadai dan Berkualitas
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan			
8. Mewujudkan Kesiambungan Pembangunan			

VI

Lampiran 5:

Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan

Secara keseluruhan, dari 45 Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPN 2025-2045 terdapat sebanyak 21 indikator utama pembangunan yang selaras atau sinkron dalam RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045.

a. Transformasi Sosial

Dalam agenda Transformasi Sosial terdapat 7 (tujuh) indikator utama pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Kepahian yang selaras dan sinkron dengan RPJPN.

Matrksi Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan Transformasi Sosial RPJPD Kabupaten Kepahiang dan RPJPN 2025-2045 (1)

RPJPN 2025-2045			RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045			
Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045
1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	71,4	80		1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	72	78
2. Kesehatan ibu dan anak: a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	115	16		2. Kesehatan ibu dan anak: a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	168.13 Per KH	Tidak ada Kematian
b) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,5	5		b) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	15%	4,7%
3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	274	76		3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	342	0
4. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98	99,5		4. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98%	100%

VII

Matrksi Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan Transformasi Sosial RPJPD Kabupaten Kepahiang dan RPJPN 2025-2045 (2)

RPJPN 2025-2045			RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045			
Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045
5. Hasil Pembelajaran: a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk : • Literasi membaca • Numerasi b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun (tahun) c) Harapan Lama Sekolah	10,00-10,00 0,00-10,00 9,5	70,00-70,00 60,00-60,00 12		5. Hasil Pembelajaran: a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk : • Literasi membaca SD • Literasi membaca SMP • Literasi numerasi SD • Literasi numerasi SMP b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun (tahun) c) Harapan Lama Sekolah	62,46 69,57 48,54 63,97 8,37 - 8,40 13,72 - 13,74	70 80 65 75 10,98 - 11,00 15,43 - 15,48
6. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)				6. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/MA/Paket C	69,16%	100%
7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi (%)	58,9	67,9				
8. Tingkat kemiskinan (%)	6,0-7,0	0,50,8		7. Tingkat Kemiskinan (%)	12,5 - 12	6 - 5
9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	44,1	99,5				
10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	30	60				

VIII

Transformasi Ekonomi

Dalam agenda Transformasi Ekonomi terdapat 6 (enam) indikator utama pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Kepahiang yang selaras dan sinkron dengan RPJPN.

Matriks Penyalarsan Indikator Utama Pembangunan Transformasi Ekonomi RPJPD Kabupaten Kepahiang dan RPJPN 2025-2045 (1)

RPJPN 2025-2045			RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045			
Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045
11. Rasio PDB industri pengolahan (%)	20,8	28		8. Proporsi sektor manufaktur terhadap PDRB (%)	7,3 - 7,5	8,5 - 9,0
12. Pengembangan Pariwisata:				9. Pengembangan Pariwisata:		
a) Rasio PDB Pariwisata (%J)	4,5	8		a) Proporsi sektor pariwisata terhadap retribusi daerah dalam PAD	2,80 - 2,92%	3,0 - 3,5%
b) Devisa pariwisata (miliar USD)	18	100				
13. Proporsi PDB ekonomi kreatif (%)	7,9	11				
14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN						
a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,3	5		b) Laju Pertumbuhan UMKM Bersertifikat	20%	80%
b) Rasio kewirausahaan (%)	2,9	8		c) Pertumbuhan Wirausaha (%)	2,9	7,0
d) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,1	10		d) Persentase Koperasi Berkualitas	50%	100%
e) Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,4	5,6				
15. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5	4		10. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,00 - 2,35%	1,5 - 1,7%
16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	55,4	65		11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	40,81%	50%

IX

Matriks Penyalarsan Indikator Utama Pembangunan Transformasi Ekonomi RPJPD Kabupaten Kepahiang dan RPJPN 2025-2045 (2)

RPJPN 2025-2045			RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045			
Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045
17. Tingkat Penguasaan IPTEK:						
a) Pengeluaran IPTEK						
b) Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	75	30				
18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau						
a) Indeks Ekonomi Hijau	70,8	90,65				
b) Porsi EBT dalam bauran energi primer [%]						
19. Indeks Daya Saing Digital di tingkat global (peringkat)	51	30				
20. Biaya logistik (% PDB)	17	9				
21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDB)	29,8	27,2				
22. Ekspor barang dan jasa (%PDB)	26	40				
23. Kota Maju, Inklusif dan Berkelanjutan						
a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,58	48,92				
b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	64	100		a) Persentase rumah layak huni	74%	99,78%

X

b. Transformasi Tata Kelola

Dalam agenda Transformasi Tata Kelola terdapat 1 (satu) indikator utama pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Kepahiang yang selaras dan sinkron dengan RPJPN

Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan Transformasi Tata Kelola RPJPD Kabupaten Kepahiang dan RPJPN 2025-2045

RPJPN 2025-2045			RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045			
Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045
24. Indeks Materi Hukum	0,25	0,49				
25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,3	5		12. Indeks Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik	2,6	4,5
26. Indeks pelayanan Publik	3,9	5				
27. Anti korupsi						
a) Indeks integritas nasional	71,94	96,98				
b) Indeks persepsi Korupsi	34	60				
28. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	65	85		13. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	72	90
29. Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten/ Kota				14. Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten/ Kota	5	15

c. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia

Dalam agenda Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia terdapat 2 (dua) indikator utama pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Kepahiang yang selaras dan sinkron dengan RPJPN.

Matriks Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia RPJPD Kabupaten Kepahiang dan RPJPN 2025-2045

RPJPN 2025-2045			RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045			
Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045
30. Indeks Pembangunan Hukum	0,6	0,84				
31. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	62,8	80				
32. Indeks demokrasi Indonesia	60-80	80				
33. Rasio pajak terhadap PDB (%)	10,0-12,0	18-22		15. PAD terhadap pendapatan Daerah (%)	1,2%	1,6%
34. Tingkat Inflasi (%)	2,5+ 1	2 + 1				
35. Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan						
a) Aset perbankan/PDB (%)						
b) Aset dana pensiun/PD (%)						
c) Aset asuransi/PDB (%)						
d) Kapitalisasi Pasar Modal/PDB(%)						
e) Total Kredit/PDB (%)						
36. Inklusi Keuangan (%)						
37. Asia power Index (Diplomatic influence)	60,40	75,80				
38. Asia power Index (Military Capability)	14,60	45,00				

d. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Dalam agenda Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi terdapat 5 (lima) indikator utama pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Kepahiang yang selaras dan sinkron dengan RPJPN

Matriks Penyalarsan Indikator Utama Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi RPJPD Kabupaten Kepahiang dan RPJPN 2025-2045 (1)

RPJPN 2025-2045			RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045			
Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045
39. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,57	68,15				
40. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75,19	84,20				
41. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,49	80,00				
42. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,36	0,15		16. Indeks Pembangunan Gender	96,2	98,02
43. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35	0,75				
44. Kualitas Lingkungan Hidup						
a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,42	76,12		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,32	71,55
b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	12,5	60		b) Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	88,21%	99,78%
c) Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	15	90		c) Persentase wilayah yang ditangani sistem persampahan	50%	100%

Matriks Penyalarsan Indikator Utama Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi RPJPD Kabupaten Kepahiang dan RPJPN 2025-2045 (2)

RPJPN 2025-2045			RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045			
Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	Bidang Urusan Pemerintahan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045
45. Ketahanan Energi, Air dan Pangan						
a) Ketahanan Energi						
- Indeks Ketahanan Energi						
b) Prevalensi ketidacukupan pangan (%)	6,2	2,1		d) Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	67,75	75,69
c) Ketahanan Air						
• Kapasitas tampungan air (M3/kapita)	66,7	200				
• Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	39	100		• Persentase jumlah rumah tangga yang berakses air minum	86%	99,78%
46. Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%)	0,14	0,11		17. Indeks Kapasitas Daerah	117,49	100
				18. Indeks Risiko Bencana	101,31	80
47. Persentase Penurunan Emisi GRK (5)						
a) Kumulatif	28,12	51,51				
b) Tahunan	32,65	80,98				

Lampiran 6:

Penyelarasan Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changer*)

Untuk mempercepat pencapaian Visi Jangka Panjang Kabupaten Kepahiang 2025-2045 terdapat 6 (enam) Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) yang digunakan untuk mempercepat transformasi pembangunan, yaitu: 1) Percepatan Wajib Belajar 14 Tahun (termasuk pendidikan vokasi), 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat., 3) Percepatan Penurunan Kemiskinan Secara Terpadu, 4) Industrialisasi Komoditas Unggulan Lokal, 5) Penyediaan Infrastruktur Dasar yang Mendukung Konektivitas Kawasan Sentra Produksi, dan 6) Reformasi Pengelolaan Sampah lihat matriks.

Dari 17 (tujuh belas) Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) dalam RPJPN 2025-2045, terdapat sebanyak 6 (enam) Upaya Transformatif Super Prioritas yang selaras dan sinkron dalam RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045 dengan rincian: 3 (tiga) dalam Transformasi Sosial, 2 (dua) dalam Transformasi Ekonomi, dan 1 (satu) dalam Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (lihat dalam Matriks 5.16, Matriks 5.17 dan Matriks 5.18).

Matriks Penyelarasan Upaya Transformatif Super Prioritas RPJPD Kabupaten Kepahiang dan RPJPN 2025-2045 dalam Agenda Transformasi Sosial

RPJPN 2025-2045		RPIPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045	
Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
Sosial	Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah)	Sosial	Percepatan Wajib Belajar 14 Tahun (termasuk pendidikan vokasi)
	Peningkatan partisipasi partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan		
	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan pendidikan dan kesehatan seperti guru dan tenaga medis		
	Investasi pelayanan kesehatan primer serta penuntasan stunting dan penyakit terabaikan (TBC dan Kusta)		Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
	Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi		Percepatan penurunan kemiskinan secara terpadu

Matriks Penyelarasan Upaya Transformatif Super Prioritas RPJPD Kabupaten Kepahiang dan RPJPN 2025-2045 dalam Agenda Transformasi Ekonomi

RPJPN 2025-2045		RPIPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045	
Transformasi	Upaya Transformatif Super Prioritas	Transformasi	Upaya Transformatif Super Prioritas
Ekonomi	Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri	Ekonomi	
	Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi serta berorientasi ekspor		Industrialisasi komoditas unggulan lokal
	Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau		
	Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital		
	Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi		Penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas kawasan sentra produksi
	Pembangunan Ibu Kota Nusantara		

Matriks Penyelarasan Upaya Transformatif Super Prioritas RPJPD Kabupaten Kepahiang dan RPJPN 2025-2045 dalam Agenda Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

RPJPN 2025-2045		RPIPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045	
Transformasi	Upaya Transformatif Super Prioritas	Transformasi	Upaya Transformatif Super Prioritas
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan karakter dan jati diri bangsa	Mewujudkan Lingkungan Hidup Secara Lestari, Seimbang dan Berkelanjutan	
	Reformasi pengelolaan sampah		Reformasi pengelolaan sampah
	Ketahanan energi, air dan kemandirian pangan		

Lampiran 7:

Penyelarasan Arah Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana

Dalam RPJPN 2025–2045, untuk provinsi Bengkulu terdapat sebanyak 82 (delapan puluh dua) Arah Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana. Dari jumlah tersebut dalam RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025–2045 terdapat sebanyak 28 (dua puluh delapan) Arah Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana yang selaras dan sinkron.

1. Transformasi Sosial

Dari 16 (enam belas) Arah Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana dalam agenda pembangunan Transformasi Sosial dalam RPJPN 2025–2045 terdapat sebanyak 12 (dua belas) Arah Kebijakan yang selaras dan sinkron dalam RPJPD Kabupaten Kepahing 2025–2045.

Matriks Penyelarasan Arah Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana Agenda Pembangunan Transformasi Sosial dalam RPJPD Kabupaten Kepahiang dan RPJPN 2025–2045 (1)

RPJPN 2025-2045		RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045	
Transformasi	Arah Kebijakan	Transformasi	Arah Kebijakan
Transformasi Sosial	1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat bagi masyarakat perkotaan dan pedesaan	Transformasi Sosial	1. Perluasan upaya promotif-prevenlif dan pembudayaan perilaku hidup sehat bagi masyarakat
	2. Percepatan penurunan stunting di seluruh kab/kota		2. Percepatan penurunan stunting di seluruh kecamatan/desa
	3. Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dan masyarakat lokal antara lain Kab. Lebong, Kab. Kaur, Kab. Kepahiang, Kab. Bengkulu Tengah, dan daerah afirmasi Pulau Enggano,		3. Pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif
	4. Peningkatan imunisasi rutin lengkap dengan pendekatan budaya bagi masyarakat perkotaan dan pedesaan		4. Peningkatan imunisasi rutin lengkap dengan pendekatan budaya

XVII

Matriks Penyelarasan Arah Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana Agenda Pembangunan Transformasi Sosial dalam RPJPD Kabupaten Kepahiang dan RPJPN 2025–2045 (2)

RPJPN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN KEPAHIANG 2025-2045	
Transformasi	Arah Kebijakan	Transformasi	Arah Kebijakan
Transformasi Sosial	5. Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi	Transformasi Sosial	5. Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat termasuk ruang terbuka hijau, sarana untuk aktivitas fisik, dan konektivitas transportasi
	6. Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya antara lain Kab Bengkulu Tengah, Seluma, Bengkulu Utara, Lebong Kepahiang, Mukomuko, Kaur, Rejang Lebong		6. Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya
	7. Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah unruk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebekerjaan tinggi terutama Kab. Bengkulu Tengah, Mukomuko, Kaur		
	8. Penguatan kurikulum dan penyediaan infrastruktur sekolah aman bencana di setiap satuan pendidikan di daerah rawan		
	9. Peningkatan literasi dan edukasi melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)		7. Peningkatan literasi dan edukasi melalui inovasi pada berbagai kurikulum pendidikan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
	10. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti pertanian dan perkebunan serta keterkaitan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)		8. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi unggulan lokal
	11. Penguatan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3		9. Penguatan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif

XVIII

Matriks Penyelarasan Arah Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana Agenda Pembangunan Transformasi Sosial dalam RPJPD Kabupaten Kepahiang dan RPJPN 2025-2045 (3)

RPJPN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN KEPAHIANG 2025-2045	
Transformasi	Arah Kebijakan	Transformasi	Arah Kebijakan
Transformasi Sosial	12. Mendukung percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi perguruan tinggi (STEM) yang sesuai dengan potensi unggulan wilayah khususnya Prodi Teknologi Hasil Perikanan, Teknologi Hasil Perkebunan Sawit, Konservasi Hasil Hutan, Manajemen Hutan, Budidaya Hasil Pertanian/Perkebunan/Perikanan/Kehutanan, Teknik Pertambangan, Teknik Perawatan dan Pengelolaan Hasil Tambang	Transformasi Sosial	
	13. Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK dan penguatan sekolah terbuka		
	14. Percepatan pembangunan optionalisasi/penguatan potensi wilayah dan pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif pada daerah afirmasi Pulau Enggano, Kota Bengkulu, serta Kabupaten Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Kaur, Seluma dan Kepahiang		10. Percepatan pembangunan Optionalisasi/penguatan potensi wilayah dan pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif
	15. Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas		11. Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui penyediaan insentif jaminan ketenagakerjaan bagi usia pekerja, perlindungan dan keamanan ekonomi untuk penduduk lansia, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas
	16. Pemanfaatan sistem Regsosek dalam upaya daerah membangun program kependudukan yang terintegrasi pada aspek sosial dan ekonomi, seperti penuntasan kemiskinan		12. Pemanfaatan sistem Regsosek dalam upaya daerah membangun program kependudukan yang terintegrasi pada aspek sosial dan ekonomi, seperti penuntasan kemiskinan

XIX

2. Transformasi Ekonomi

Dari 18 (delapan belas) Arah Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana dalam agenda pembangunan Transformasi Ekonomi dalam RPJPN 2025-2045 terdapat sebanyak 7 (tujuh) Arah Kebijakan yang selaras dan sinkron dalam RPJPD Kabupaten Kepahing 2025-2045.

Matriks Penyelarasan Arah Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana Agenda Pembangunan Transformasi Ekonomi dalam RPJPD Kabupaten Kepahiang dan RPJPN 2025-2045 (1)

RPJPN 2025-2045		RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045	
Transformasi	Arah Kebijakan	Transformasi	Arah Kebijakan
Transformasi Ekonomi	1. Pengembangan industri pengolahan terpadu ramah lingkungan berbasis SDA (Kelapa sawit, kopi, karet) yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Bengkulu - Muara Enim - Palembang (klaster industri hilirisasi batubara dan pembangkitan energi listrik pada mulut tambang serta industri pengolahan karet dan sawit).	Transformasi Ekonomi	1. Pengembangan industri manufaktur berbasis potensi komoditas unggulan lokal.
	2. Pembangunan industri di kawasan pelabuhan Pulau Baal melalui pengembangan hilirisasi komoditas perkebunan mauDun nertambanoan.		
	3. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah antara lain pengembangan perikanan berkelanjutan tangkap maupun budi daya di perairan pesisir barat Sumatra (WPP-572)		
	4. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya) terutama di Kab. Lebong, Bengkulu Selatan, Seluma, Rejang Lebong,		2. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan berbasis teknologi.

XX

Matriks Penyelarasan Arah Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana Agenda Pembangunan Transformasi Ekonomi dalam RPJPD Kabupaten Kepahiang dan RPJPN 2025-2045 (2)

RPJPN 2025-2045		RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045	
Transformasi	Arah Kebijakan	Transformasi	Arah Kebijakan
Transformasi Ekonomi	5. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis	Transformasi Ekonomi	3. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital.
	6. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.		4. Peningkatan kualitas dan modernisasi koperasi.
	7. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.		5. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
	8. Mendukung peningkatan rantai nilai global (olahan kelapa sawit, kopi, dan karet) melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT, ekonomi, logistik, dan ekspor dari Pantai Barat Sumatera ke Negara Eksportir di wilayah seperti Asia Tengah, Asia Selatan, dan Afrika.		6. Mendukung peningkatan rantai nilai global komoditas unggulan lokal.
	9. Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, perkebunan, dan industri pengolahan.		7. Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, perkebunan, dan industri pengolahan.

Matriks Penyelarasan Arah Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana Agenda Pembangunan Transformasi Ekonomi dalam RPJPD Kabupaten Kepahiang dan RPJPN 2025-2045 (3)

RPJPN 2025-2045		RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045	
Transformasi	Arah Kebijakan	Transformasi	Arah Kebijakan
Transformasi Ekonomi	10. Pengembangan multi-infrastructure feeder (Penuntasan pembangunan Jalan Tol Bengkulu Lubuklinggau-Palembang), Pengembangan jalur KA dari Lubuklinggau ke Bengkulu guna mendukung pergerakan logistik dari/ke Pelabuhan Pulau Baai, Peningkatan Jalan Daerah Manna - Batas Sumsel, Kaur - Batas Lampung, Mukomuko - Batas Sumbang, Curup - Lubuklinggau, termasuk pengembangan sistem expressway (Perluasan Jalur Logistik Laut Lokal dan Internasional Linau - Enggano - Pulau Baai - Mukomuko - Teluk Bayur - Pulau Baai - Asia Selatan) guna menurunkan biaya logistik	Transformasi Ekonomi	
	11. Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung, serta penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan terutama perkotaan Bengkulu		
	12. Pengembangan pasokan listrik yang mengintegrasikan sumber energi konvensional dan EBT dengan kawasan strategis industri melalui pemanfaatan sumber daya yang potensial, seperti mikrohidro, batubara, dan panas bumi yang berada di Tambang Sawah, Hulu Lais, Lebong Simpang, Suban Ayam, Kepahiang/Gunung Kaba.		

Matriks Penyeragaman Arah Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana Agenda Pembangunan Transformasi Ekonomi dalam RPJPD Kabupaten Kepahiang dan RPJPN 2025-2045 (4)

RPJPN 2025-2045		RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045	
Transformasi	Arah Kebijakan	Transformasi	Arah Kebijakan
Transformasi Ekonomi	13. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (termasuk memper timbangan pembangunan PLTP dan PLTMH)	Transformasi Ekonomi	
	14. Pengembangan interkoneksi jaringan transmisi listrik di Wilayah Bengkulu untuk mendukung terwujudnya Sumatra-lawa-Bali Integrated SuDer Grid		
	15. Pengembangan jaringan listrik cerdas (smart grid) khususnya pada koridor industri Palembang Muaraenim-Bengkulu untuk mendukung meningkatkan keandalan dan dekarbonisasi pasokan tenaga listrik		
	16. Penuntasan dan penguatan infrastruktur TIK melalui upaya memperluas jaringan broadband terutama di kawasan strategis industri dan kawasan perkotaan hingga menjangkau ke seluruh pelosok (minimal 4G)		
	17. Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber, serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital)		
	18. Pengembangan Universitas Bengkulu sebagai basis IPTEKIN menuju komersialisasi oleh industri		

3. Transformasi Tata Kelola

Dari 7 (tujuh) Arah Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana dalam agenda pembangunan Transformasi Tata Kelola dalam RPJPN 2025-2045 terdapat sebanyak 3 (tiga) Arah Kebijakan yang selaras dan sinkron dalam RPJPD Kabupaten Kepahing 2025-2045.

Matriks Penyeragaman Arah Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana Agenda Pembangunan Transformasi Ekonomi dalam RPJPD Kabupaten Kepahiang dan RPJPN 2025-2045

RPJPN 2025-2045		RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045	
Transformasi	Arah Kebijakan	Transformasi	Arah Kebijakan
Transformasi Tata Kelola	1. Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah	Transformasi Tata Kelola	1. Peningkatan kualitas kebijakan publik
	2. Peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat		
	3. Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat		
	4. Penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah		2. Peningkatan profesionalitas ASN
	5. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital		3. Peningkatan indeks SPBE
	6. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital		
	7. Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi		

4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

Dari 7 (tujuh) Arah Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana dalam agenda pembangunan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia dalam RPJPN 2025-2045 terdapat sebanyak 3 (tiga) Arah Kebijakan yang selaras dan sinkron dalam RPJPD Kabupaten Kepahing 2025-2045.

Matriks Penyelarasan Arah Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana Agenda Pembangunan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia dalam RPJPD Kabupaten Kepahiang dan RPJPN 2025-2045

RPJPN 2025-2045		RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045	
Transformasi	Arah Kebijakan	Transformasi	Arah Kebijakan
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	1. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal di Bengkulu	Masyarakat Madani yang Tertib, Aman, Damai, Harmonis dan Menyatu dalam Kemajemukan	1. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga persatuan bangsa
	2. Peningkatan pengawasan keamanan dengan dukungan teknologi Integrated Maritime Intelligent Platform pada wilayah perbatasan laut Samudera		
	3. Hindia untuk meminimalkan kegiatan ilegal		
	4. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan pada pulau terluar Enggano		
	5. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KP8U, CSR, dana jasa ekosistem, dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional;		
	6. Penguatan pengendalian inflasi daerah		
	7. Transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai advocat general		
	8. Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran		

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Dari 19 (sembilan belas) Arah Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana dalam agenda pembangunan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi dalam RPJPN 2025-2045 terdapat sebanyak 2 (dua) Arah Kebijakan yang selaras dan sinkron dalam RPJPD Kabupaten Kepahing 2025-2045.

Matriks Penyelarasan Arah Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana Agenda Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi dalam RPJPD Kabupaten Kepahiang dan RPJPN 2025-2045 (1)

RPJPN 2025-2045		RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045	
Transformasi	Arah Kebijakan	Transformasi	Arah Kebijakan
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	1. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama	Mewujudkan Lingkungan Hidup Secara Lestari, Seimbang dan Berkelanjutan	
	2. Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat di Wilayah Bengkulu		
	3. Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah pemanfaatan hutan dan kesatuan lanskap yang ramah kaum rentan		
	4. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung khususnya Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di wilayah Bengkulu		
	5. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi di antaranya gajah dan harimau Sumatera		
	6. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana gempa bumi dan tsunami, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah pesisir di sepanjang pantai barat Sumatra		1. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana gempa bumi dan tsunami, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim

Matriks Penyalarsan Arah Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana Agenda Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi dalam RPJPD Kabupaten Kepahiang dan RPJPN 2025-2045 (2)

RPJPN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN KEPAHIANG 2025-2045	
Transformasi	Arah Kebijakan	Transformasi	Arah Kebijakan
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	7. Rehabilitasi dan pemanfaatan lahan pasca tambang batubara dan emas	Mewujudkan Lingkungan Hidup Secara Lestari, Seimbang dan Berkelanjutan	
	8. Penanggulangan masalah abrasi dengan menjaga bentang alam dan kelestarian lingkungan di wilayah pantai sepanjang pesisir barat Sumatra		
	9. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami dan gempa bumi, maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi		2. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami dan gempa bumi, maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi
	10. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal		
	11. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang		
	12. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan		

Matriks Penyalarsan Arah Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana Agenda Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi dalam RPJPD Kabupaten Kepahiang dan RPJPN 2025-2045 (3)

RPJPN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN KEPAHIANG 2025-2045	
Transformasi	Arah Kebijakan	Transformasi	Arah Kebijakan
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	13. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan Wilayah Bengkulu	Mewujudkan Lingkungan Hidup Secara Lestari, Seimbang dan Berkelanjutan	
	14. Pengembangan natural based solution untuk pengendalian banjir terutama di Kota Bengkulu		
	15. Pembangunan infrastruktur tangguh bencana tsunami dan gempa bumi sebagai upaya mitigasi risiko bencana		
	16. Pengembangan Flood Forecasting Early Warning System (FFEWS) terutama di Kota Bengkulu		
	17. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir terutama di kawasan perkotaan		
	18. Penguatan karakter dan jati diri bangsa melalui pemuda		
	19. Pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin		

6. Implementasi Transformasi

Dari 15 (lima belas) Arah Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana dalam agenda pembangunan Implementasi Transformasi dalam RPJPN 2025-2045 terdapat sebanyak 1 (satu) Arah Kebijakan yang selaras dan sinkron dalam RPJPD Kabupaten Kepahiang 2025-2045 (lihat Matriks 5.24).

Matriks Penyeragaman Arah Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana Agenda Implementasi Transformasi dalam RPJPD Kabupaten Kepahiang dan RPJPN 2025-2045 (1)

RPJPN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN KEPAHIANG 2025-2045	
Transformasi	Arah Kebijakan	Transformasi	Arah Kebijakan
Implementasi Transformasi	1. Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Bengkulu	Menyediakan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis yang Memadai dan Berkualitas	
	2. Penuntasan RDTR kabupaten/kota serta kewenangan tata ruang laut RZWP3K (rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil)		
	3. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria di wilayah Bengkulu		
	4. Pemanfaatan ALKI 1 secara optimal dan infrastruktur logistik untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global melalui Pelabuhan Pulau Baai		
	5. Pengembangan bandara Fatmawati Soekarno, Mukomuko, dan Enggano dengan pengembangan wilayah yang terintegrasi untuk mendukung konektivitas udara		
	6. Penyelesaian pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra ruas Bengkulu - Lubuklinggau untuk mendukung integrasi rantai pasok logistik (menghubungkan kawasan ekonomi dan pelabuhan/bandara) serta menghubungkan koridor barat dan koridor timur Sumatra untuk mendukung pemerataan pembangunan		

XXIX

Matriks Penyeragaman Arah Kebijakan Kewilayahan dan Sarana Prasarana Agenda Implementasi Transformasi dalam RPJPD Kabupaten Kepahiang dan RPJPN 2025-2045 (2)

RPJPN 2025-2045		RPJPD KABUPATEN KEPAHIANG 2025-2045	
Transformasi	Arah Kebijakan	Transformasi	Arah Kebijakan
Implementasi Transformasi	7. Pengembangan transportasi perkotaan sedang yang andal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang	Menyediakan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Strategis yang Memadai dan Berkualitas	Penyediaan infrastruktur sosial yang berkualitas
	8. Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak termasuk hunian perkotaan, air minum aman, serta sanitasi yang aman dan berkelanjutan sesuai karakteristik daerah		
	9. Eliminasi praktik buang air besar sembarangan (BARS) di seluruh rumah tangga melalui perubahan perilaku masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana sanitasi yang aman		
	10. Penyediaan layanan pengelolaan sampah yang terpadu dengan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan 100 persen sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi ekonomi sirkuler dengan bekerja sama dengan industri-industri di daerah sebagai penerima hasil olahan sampah		
	11. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah (RPJPD, RPJMD) dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)		
	12. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional		
	13. Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko		
	14. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan		
	15. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance		

XXX

BUPATI KEPAHIANG,

HIDAYATTULLAH SJAHD